

Dr. Drs. Rifa'i, M. Pd.
Desi Firmasari, S.Pd., M.Pd.I.



SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sebuah Pengantar



SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sebuah Pengantar

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sebuah Pengantar

Dr. Drs. Rifai, M.Pd.

Desi Firmasari, S.Pd., M.Pd.I.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN Sebuah Pengantar

Penulis : Dr. Drs. Rifa'i, M.Pd., & Desi Firmasari, S.Pd., M.Pd.I
Desain Cover : Ali Hasan Zein
Sumber : PeopleImages.com – Yuri A (www.shutterstock.com)
Tata Letak : Hifzillah Fahmi
Proofreader : A. Timor Eldian

Ukuran:
vi, 252 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:
978-623-02-9544-7

Cetakan Pertama:
November 2024

Hak Cipta 2024 pada Penulis
Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks : (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***SOSIOLOGI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar***.

Buku ini membahas mengenai sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang menerapkan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir, dan penyatuan informasi dalam penyelidikan pendidikan. Hal ini berfokus pada pemahaman proses pendidikan sebagai interaksi sosial, menelaah sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Manfaat sosiologi pendidikan bagi pendidik sangat besar. Salah satunya adalah membantu dalam memetakan hubungan antara individu dalam lingkungan sekolah dan struktur masyarakat di mana sekolah berada. Sosiologi Pendidikan mencakup berbagai topik; masyarakat dan seluruh komponen lain di dalamnya (budaya, golongan, ras, gender, dan lain-lain), berlangsungnya proses sosialisasi, akulturasi budaya, organisasi sosial, serta faktor-faktor lain seperti status, peran, nilai, moral, semuanya termasuk dalam peninjauan bidang ini. Menyelaraskan desain pendidikan menurut kebutuhan geografis, etnis, dan bahasa, serta kebutuhan subkelompok populasi lainnya juga termasuk dalam Sosiologi Pendidikan.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Dr. Drs. Rifa'i, M.Pd., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN	1
BAB 1 SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN	3
BAB 2 SEJARAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN	13
BAB 3 HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN SOSIOLOGI	28
BAB 4 PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	38
BAB 5 PENDIDIKAN, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN (<i>SCHOOL SOCIETY AND CULTURE</i>)	89
BAB 6 POLITIK DAN PENDIDIKAN	104
BAB 7 EKONOMI DAN PENDIDIKAN	127
BAB 8 PENDIDIKAN STRATIFIKASI SOSIAL DAN MOBILITAS SOSIAL	150
BAB 9 GENDER, KELUARGA DAN PENDIDIKAN	166
BAB 10 SEKOLAH DAN MASYARAKAT	181
BAB 11 GURU, MURID DAN KELAS	191
DAFTAR PUSTAKA	231

PENGANTAR SOSIOLOGI

PENDIDIKAN

Sosiologi pendidikan adalah salah satu subbidang utama dalam sosiologi dan juga dalam pengembangan dan produksi penelitian dan pengajaran pendidikan. Karena luasnya dan cakupan yang sangat besar dari apa yang disebut 'pendidikan' dalam masyarakat modern, studi sosiologis tentang pendidikan mencakup bidang yang luas dan mungkin merupakan salah satu subbidang terbesar dalam sosiologi. Seperti yang ditunjukkan Ballentine dan Hammack (2012), pendidikan dimulai dengan kelahiran dan tidak berakhir sampai kematian. Dalam satu atau lain bentuk, baik formal maupun informal, itu terjadi sepanjang hidup seseorang. Namun, sosiolog cenderung mengarahkan perhatian mereka pada jenis pendidikan yang berlangsung di lembaga formal yang ditunjuk oleh masyarakat untuk belajar secara terorganisir, sistematis. Dengan demikian studi sosiologi pendidikan, dan apa yang disebut 'sosiologi pendidikan', umumnya terbatas pada pendidikan dalam arti formal, yaitu sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Melalui lembaga-lembaga ini, masyarakat memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai standar ditransmisikan ke generasi mendatang.

Emile Durkheim, salah satu sosiolog pertama yang mempelajari pendidikan formal secara sistematis, berpendapat bahwa pendidikan formal adalah cara masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. (Saha, 2013) (Saha, 2015) Ini tidak berarti bahwa proses pendidikan berlangsung mulus, dan bahwa tubuh pengetahuan dan nilai-nilai yang diinginkan tidak berubah, atau bahwa hal itu diteruskan tanpa kontestasi. Durkheim sendiri memahami bahwa hanya sedikit masyarakat yang setuju tentang pengetahuan apa yang harus diteruskan melalui pendidikan formal. Perpecahan dalam masyarakat, seperti kelas sosial, agama, jenis kelamin, dan kelompok ras/etnis, biasanya memiliki beberapa preferensi unik tentang pengetahuan apa yang harus diturunkan kepada kaum muda. Akibatnya, kebijakan pendidikan, khususnya dalam masyarakat multietnis modern, biasanya menjadi sumber banyak ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan ini tidak hanya berarti bahwa banyak kompromi sering

terjadi dalam pendirian sistem pendidikan formal, tetapi sering kali dua atau lebih jenis sekolah yang berbeda menjadi mapan, masing-masing menyampaikan setidaknya beberapa pengetahuan dan nilai unik kepada siswa yang mengahdirinya.. Ini menjelaskan mengapa banyak masyarakat modern terdiri dari sistem sekolah pemerintah dan satu atau lebih sistem sekolah swasta. Ini adalah beberapa jenis fenomena yang sosiolog coba pahami melalui penelitian mereka.

SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

1) Pengertian sosiologi

Sosiologi sebagai bidang disiplin bersifat generik dan payung karena berkaitan dengan totalitas interaksi dan pemeriksaan manusia. Ini adalah studi sistematis tentang perilaku sosial dan kelompok manusia. Ini menyelidiki terutama pengaruh hubungan sosial pada sikap dan perilaku masyarakat dan tentang bagaimana masyarakat dibentuk dan diubah. Bagi orang awam, sosiologi adalah studi tentang interaksi manusia di dalam masyarakat tetapi lebih dari itu karena berkaitan dengan organisasi dan kontrol perilaku dan sikap manusia dalam masyarakat. Sebagai suatu bidang studi, sosiologi memiliki cakupan yang sangat luas karena masyarakat terdiri dari beberapa subsistem dengan fragmentasi yang melekat pada bagian-bagian komponen di masing-masing untuk pertimbangan sosiologis, pengertian itu sejalan dengan pengertian yang disampaikan Jeanne H. Ballantine (2017) Sosiologi adalah studi ilmiah tentang kehidupan sosial, perubahan sosial, dan sebab serta akibat sosial dari perilaku manusia. Sosiolog mempelajari bagaimana masyarakat terbentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok kecil, organisasi, komunitas nasional, dan jaringan sosial global. Bagi kita, ini berarti mempelajari bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain—dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi kehidupan Anda.

Lebih lanjut Jeanne H. Ballantine (2017) menyatakan bahwa disiplin sosiologi berbeda dengan disiplin ilmu psikologi yang berfokus pada atribut, motivasi, dan perilaku individu, sosiologi berfokus pada pola kelompok. Psikolog mungkin mencoba menjelaskan perilaku dengan memeriksa ciri-ciri kepribadian individu, sedangkan sosiolog akan memeriksa posisi atau tugas orang-orang yang berbeda dalam kelompok dan bagaimana posisi ini mempengaruhi pemikiran dan tindakan individu. Sosiolog berupaya menganalisis dan menjelaskan mengapa orang

berinteraksi dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok, bagaimana kelompok seperti keluarga atau Anda dan teman Anda bekerja sama, mengapa kelompok tertentu memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan kelompok lain, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana kelompok menghadapi konflik dan berubah. Sosiolog juga mempelajari penyebab masalah sosial, seperti pelecehan anak, kejahatan, kemiskinan, dan perang, serta cara mengatasinya.

Sosiologi berkaitan dengan fakta-fakta sosial dalam ekonomi, pendidikan, hukum, keamanan, politik, medis, agama, keluarga, teknologi, olahraga dan sebagainya. Penelitian ilmiah atas fakta-fakta sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai jalan untuk mengekang ketidaknyamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi berfungsi membantu anggota masyarakat untuk memecahkan masalah sikap, karakter, perilaku dan sosial untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sosiolog adalah orang-orang yang melayani masyarakat dalam berbagai kapasitas sebagai guru, dosen, peneliti, jurnalis, pekerja di industri, petugas personalia, pekerja sosial, administrator, perencana pertanian, pendeta, kriminolog, petugas masa percobaan dan sebagainya. Atas dasar inilah pengetahuan dasar sosiologi adalah wajib bagi para mahasiswa atau calon sarjana di semua bidang ilmu atau program studi agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat atau tentang lingkungannya di mana mereka akan bertempat tinggal.

Sehubungan dengan pengertian di atas dapat juga dikatakan bahwa pada hakikatnya Sosiologi bukan hanya sekadar ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak guna meningkatkan ilmu pengetahuan itu sendiri tetapi sosiologi juga merupakan ilmu terapan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis atau masalah-masalah social yang memerlukan solusi.

Pemahaman lain tentang sosiologi juga dapat dikatakan bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota Masyarakat, dan fokus bahasannya adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih, dalam perasaan, sikap, dan Tindakan. Bagong Suyanto (2007)

2) Fungsi Sosiologi

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan murni (pure sciences) dan juga sebagai ilmu terapan (applied science). Sebagai ilmu pengetahuan murni sosiologi menjalankan perannya untuk mengembangkan ilmu dan sebagai ilmu terapan sosiologi membantu Masyarakat untuk memberikan dan atau memecahkan masalah-masalah social yang sedang terjadi. Untuk itu Sosiologi menjalankan beberapa peran dalam masyarakat sebagai dorongan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesinambungan dan stabilitasnya. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. Sosiologi membantu dalam analisis dan klarifikasi berbagai jenis hubungan dalam masyarakat yang menghasilkan hubungan sosial tersebut. Kata Pendidikan berasal dari bahasa Latin educere yang berarti “memimpin”. Webster mengartikan pendidikan sebagai proses mendidik atau mengajar. Mendidik selanjutnya diartikan sebagai “mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau karakter...” Dengan demikian, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau karakter peserta didik. “Tujuan dari pendidikan seharusnya adalah untuk mengajarkan kita lebih banyak bagaimana cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan daripada untuk memperbaiki pikiran kita, sehingga memungkinkan kita untuk berpikir untuk diri kita sendiri, dibandingkan membebani ingatan kita dengan pemikiran orang lain.” Bill Beatty. Lembaga dan asosiasi tempat perilaku individu diatur dan dikendalikan. Hal ini menjadi perhatian sosiologi untuk mengidentifikasi mengapa perilaku tertentu yang tidak diinginkan muncul pada manusia dan bagaimana perilaku tersebut dapat diperiksa dan direformasi. Misalnya, dalam masyarakat terdapat pelaku penyimpangan sosial yang mungkin terpicu atau terjebak dalam perilaku yang tidak dapat diterima tersebut karena ketidaktahuan dan berbagai alasan lain di luar penjelasan korban. Sosiologi berkepentingan untuk menyelidiki penyebab mendasar dari perilaku yang tidak dapat diterima melalui analisis kritis terhadap masalah untuk mengendalikan dan memperbaiki pelanggaran tersebut. Misalnya, ada kasus permusuhan yang tidak beralasan dan hal-hal terkait lainnya dalam diri seseorang yang ia

wujudkan ketika berhadapan dengan orang lain, maka perlu dilakukan analisis terhadap perilaku tersebut untuk rekonstruksi dan reformasi. Misalnya, ada kasus seorang “mahasiswa kedokteran” yang secara konsisten unggul dalam semua mata pelajaran namun ia meminum alkohol dan tidur di bawah kandang sapi di asramanya. Otoritas Universitas ketika menemukan masalahnya merekomendasikan beberapa mata kuliah sosiologi untuk mengendalikan perilakunya yang secara logis mereformasi perilaku mahasiswa. Saat ini dia adalah seorang praktisi medis yang berperilaku baik dan terkenal.

- b. Sosiologi memaparkan anggota masyarakat tentang bagaimana otoritas dan kekuasaan diturunkan dalam masyarakat dan mengapa nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik tertentu dijunjung tinggi. Semua manusia pada dasarnya sama dalam hal perasaan berkuasa atau menduduki posisi istimewa. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk berpegang teguh pada kekuasaan dan otoritas karena keuntungan yang didapat darinya. Ada pepatah yang mengatakan "tidak ada seorang pun yang mencicipi madu lalu memuntahkannya". Kekuasaan dan kekuasaan sama manisnya dengan madu. Itu menjelaskan mengapa manusia mengejanya dengan berani untuk menikmati nilai-nilai yang melekat pada dirinya.
- c. Sosiologi juga berupaya menjalin hubungan antara berbagai subsistem dalam masyarakat. Ia mempelajari hubungan sistem politik dengan sistem ekonomi atau hubungan sistem pendidikan dengan sistem politik atau hubungan sistem hukum dengan sistem keagamaan dan sebagainya. Diktum mengatakan demikian, ketika satu jari menyentuh minyak maka berdampak pada jari lainnya, terdapat keterhubungan antara semua sistem dalam masyarakat dan oleh karena itu harus ada fungsi dan hubungan yang sehat untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Disfungsi apa pun pada sistem apa pun akan selalu memengaruhi sistem lainnya.
- d. Sosiologi mendekatkan individu-individu dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan akibat-akibat dari perubahan-perubahan tersebut pada eksistensi manusia. Melalui sosiologi terungkap bahwa masyarakat bersifat dinamis dan fana. Dalam

- sosiologi, individu menjadi sadar bahwa masyarakat tidak statis yang membutuhkan dinamisme dalam pikiran dan tindakan di antara orang-orang untuk terintegrasi sepenuhnya dari waktu ke waktu. Misalnya, ada revolusi komputer secara global saat ini. Setiap individu dalam masyarakat global diharapkan melek komputer agar dapat berfungsi secara efektif dan terintegrasi penuh ke dalam sub sistem dalam masyarakat.
- e. Sosiologi mengkaji latar belakang manusia dan berbagai bentuk orientasi dalam masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ada diversifikasi latar belakang budaya dan pendidikan. Lingkungan di mana seorang individu dilahirkan dan roti memiliki pengaruh yang signifikan dalam nilai-nilai, kepercayaan, sifat dan ide-ide yang diinternalisasikan, dikonseptualisasikan, diperlihatkan, dimanifestasikan, dan diperlihatkan oleh orang tersebut. Dengan pemahaman sosiologi seorang individu diberkati dengan pandangan penolakan tentang latar belakang orang lain. Ini akan membantu dalam menoleransi dan mengakomodasi orang lain dengan perbedaan latar belakang budaya dan orientasi.
 - f. Sosiologi juga beroperasi dalam ranah kebutuhan manusia. Di dalam masyarakat terdapat kebutuhan-kebutuhan sosial dasar yang dicita-citakan oleh individu-individu untuk mencapai eksistensi yang berarti dan kelangsungan hidup yang bertujuan. Sosiologi menetapkan dirinya untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan manusia dalam masyarakat dan menjelaskan bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi dan dipuaskan. Sosiologi mengajarkan orang untuk hanya bercita-cita untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan hidup yang akan membantu dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermakna. Ini menjelaskan bahaya dalam pendekatan yang berani, agresif dan tidak baik untuk memuaskan kebutuhan seseorang. Misalnya, seseorang yang terlibat dalam perampokan bersenjata, penipuan, pencurian, dan tindakan ilegal lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dianggap sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak etis dan tidak bermoral.

Dari beberapa fungsi sosiologi di atas, Sosiologi memberikan kerangka sistematis untuk memahami struktur, dinamika, dan kompleksitas masyarakat manusia. Ini membantu menganalisis hubungan sosial, institusi, dan perilaku, berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-proses sosial utama

3) Pengertian Pendidikan

Pendidikan dapat didefinisikan secara bervariasi tergantung pada tujuan yang dimaksudkan untuk melayani dan disiplin dalam perspektif. Dalam sosiologi, pendidikan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang berlangsung dalam suatu masyarakat di mana tujuan dan metodenya bergantung pada sifat masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Hal ini untuk membuat seorang individu memahami masyarakat baru yang tumbuh di sekitarnya di mana ia adalah anggota penting. Pendidikan dalam istilah khusus adalah sarana untuk membuat individu memahami masyarakat mereka dan strukturnya. Ini akan membantu individu tersebut untuk membuka bagi mereka cara menciptakan makna dari lingkungan dan hubungan mereka dengan orang lain. Ada individu-individu dalam ranah pemerolehan bahasa dan pemikiran untuk mengklasifikasikan dan memberi makna pada hal-hal, ide-ide dan peristiwa-peristiwa.

Dalam perspektif luas, pendidikan mengacu pada segala upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan membentuk nilai-nilai; oleh karena itu, pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan sosialisasi (encyclopedia.com 2023). Namun, ketika sosiolog berbicara tentang pendidikan, mereka umumnya menggunakan arti yang lebih spesifik: proses yang disengaja, di luar keluarga, yang melaluinya masyarakat meneruskan pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi peran orang dewasa (dan, pada tingkat yang lebih rendah, mempersiapkan generasi muda untuk berperan sebagai orang dewasa). Orang dewasa untuk peran baru). Proses ini memperoleh status kelembagaan ketika kegiatan-kegiatan ini menjadikan pengajaran sebagai tujuan utama yang menentukan, dibedakan dari bidang sosial lainnya, dan melibatkan peran guru dan pelajar yang ditentukan (Clark 1968). Sekolah merupakan contoh pelembagaan semacam ini.

Pendidikan dalam masyarakat mana pun adalah untuk membantu menularkan kepada kaum muda budaya masyarakat itu. Dalam melaksanakan fungsi mulia ini, orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya berkontribusi. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki fungsi hukum untuk mentransmisikan pengetahuan untuk kelangsungan hidup individu. Rumah menyelenggarakan pendidikan informal, sekolah menyelenggarakan pendidikan formal, sedangkan masyarakat terbuka menyalurkan pendidikan nonformal. Tidak dapat dihindarkan untuk hidup dalam masyarakat mana pun tanpa satu bentuk pendidikan atau yang lain. Oleh karena itu, pendidikan adalah alat yang benar-benar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Dari penjelasan di atas fungsi Pendidikan juga dapat ditinjau dari 3 (tiga) perspektif 1) perspektif fungsional, pendidikan membantu mensosialisasikan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk memasuki masyarakat yang lebih luas ketika mereka dewasa, 2) Perspektif konflik menekankan bahwa pendidikan memperkuat kesenjangan dalam masyarakat yang lebih luas, 3) Perspektif interaksionis simbolik berfokus pada interaksi sosial di dalam kelas, di taman bermain sekolah, dan di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan sekolah. Interaksi sosial berkontribusi terhadap sosialisasi peran gender, dan harapan guru dapat mempengaruhi kinerja siswanya. Ballantine, J. H., & Hammack, F. M. (2009).

4) Pengertian sosiologi Pendidikan

Sosiologi Pendidikan dapat didefinisikan sebagai analisis ilmiah dari proses sosial dan pola sosial yang terlibat dalam sistem pendidikan. Brookover dan Gottlieb menganggap bahwa "ini mengasumsikan pendidikan adalah kombinasi tindakan sosial dan sosiologi adalah analisis interaksi manusia." Proses pendidikan berlangsung dalam situasi formal maupun informal. Analisis sosiologis dari interaksi manusia dalam pendidikan dapat mencakup kedua situasi dan mungkin mengarah pada pengembangan generalisasi ilmiah dari hubungan manusia dalam sistem pendidikan.

Sosiologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Hal ini paling berkaitan dengan sistem sekolah umum masyarakat industri

modern, termasuk perluasan pendidikan yang lebih tinggi, lebih lanjut, dewasa, dan berkelanjutan. Ini adalah filosofis serta konsep sosiologis, yang menunjukkan ideologi, kurikulum, dan teknik pedagogis dari penanaman dan pengelolaan pengetahuan dan reproduksi sosial kepribadian dan budaya.

Singkatnya, sosiologi pendidikan diartikan sebagai studi tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ini adalah penyelidikan proses sosiologis yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Bagi Ottaway (1962), ini adalah studi sosial dan sejauh metodenya bersifat ilmiah, maka ini adalah salah satu cabang ilmu sosial. Hal ini berkaitan dengan tujuan, metode, lembaga, administrasi dan kurikulum pendidikan dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya masyarakat di mana mereka berfungsi. Sejauh menyangkut pendidikan individu, sosiologi pendidikan menyoroti pengaruh kehidupan sosial dan hubungan sosial terhadap perkembangan kepribadian. Dengan demikian, sosiologi pendidikan menekankan pada aspek sosiologis dari fenomena dan institusi pendidikan. Permasalahan yang dihadapi pada dasarnya dianggap sebagai permasalahan sosiologi dan bukan permasalahan praktik pendidikan. (Subrata S Satapathy; 2020)

Oleh karena itu, Sosiologi Pendidikan dapat dijelaskan sebagai analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola sosial yang terlibat dalam sistem pendidikan. Brookover dan Gottlieb menganggap bahwa —ini mengasumsikan pendidikan adalah kombinasi tindakan sosial dan sosiologi adalah analisis interaksi manusia.” Proses pendidikan berlangsung dalam situasi formal dan informal. Studi sosiologis tentang interaksi manusia dalam pendidikan dapat mencakup kedua situasi tersebut dan mungkin memandu pengembangan generalisasi ilmiah tentang hubungan manusia dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Hal ini paling relevan dengan sistem pendidikan umum dalam masyarakat industri modern, termasuk pertumbuhan pendidikan tinggi, menengah, dewasa, dan berkelanjutan. Ini adalah konsep filosofis dan sosiologis, yang menunjukkan ideologi, kurikulum, dan teknik pedagogi dalam penanaman dan pengelolaan pengetahuan serta reproduksi sosial kepribadian dan budaya. Ini berkaitan

dengan hubungan, aktivitas dan reaksi guru dan siswa di kelas dan menyoroti masalah sosiologis di bidang pendidikan.

5) Ruang lingkup sosiologi pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang menerapkan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir, dan pengumpulan data dalam penyelidikan pendidikan. Ini memfokuskan pada pemahaman proses pendidikan sebagai interaksi sosial, mengkaji sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga social. Manfaat sosiologi pendidikan bagi pendidik sangat besar. Ini membantu dalam menganalisis hubungan antara individu dalam lingkungan sekolah dan struktur masyarakat di mana sekolah berada. Dengan pendekatan sosiologi pendidikan, kita dapat mempelajari pola-pola interaksi dalam sistem pendidikan, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan dan bahan kurikulum. (<http://repository.ut.ac.id/4624/1/SOSI4406-M1.pdf> Bambang Prasetyo)

Sosiologi pendidikan melibatkan analisis ilmiah terhadap proses sosial dan pola sosial dalam sistem pendidikan. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem pendidikan melibatkan serangkaian tindakan sosial. Beberapa kajian dalam sosiologi pendidikan mencakup melihat pola hubungan antara sistem pendidikan dan proses sosial, analisis terhadap struktur sosial dalam sistem pendidikan, serta kajian mengenai bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat berhubungan dengan sistem pendidikan dan pola stratifikasi yang berlaku. Masih banyak penelitian yang dapat dikembangkan dalam bidang sosiologi Pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, hal ini bisa dipahami karena keduanya merupakan atau memiliki hubungan yang sangat kompleks. Ruang lingkup tersebut adalah: a) berkaitan dengan konsep umum seperti masyarakat itu sendiri, budaya, komunitas, kelas, lingkungan, sosialisasi, internalisasi, akomodasi, asimilasi, keterbelakangan budaya, subkultur, status, peran dan sebagainya. b) berkaitan dengan kasus-kasus pendidikan dan kelas sosial, negara, kekuatan sosial, perubahan budaya, berbagai masalah struktur peran, analisis peran dalam kaitannya dengan total sistem sosial dan masyarakat mikro sekolah seperti otoritas, seleksi dan organisasi pembelajaran, *streaming*, kurikulum dan lainnya dll. c) berkaitan dengan analisis situasi

pendidikan dalam berbagai konteks geografis dan etnologis. Misalnya, situasi pendidikan di daerah pedesaan, perkotaan dan suku, di berbagai belahan negara/dunia, dengan latar belakang ras, budaya dan lainnya yang berbeda, d) membantu kita memahami efektivitas metode pendidikan yang berbeda dalam mengajar siswa dengan jenis kecerdasan yang berbeda, e) Penelitian ini mengkaji pengaruh ilmu ekonomi terhadap jenis pendidikan yang diberikan kepada siswa, misalnya, pendidikan disediakan di TK, SD, SMA, SMA hingga ke Perguruan Tinggi, f) membantu memahami pengaruh berbagai institusi sosial seperti keluarga, sekolah terhadap siswa, g) mempelajari hubungan antara kelas sosial, budaya, bahasa, pendidikan orang tua, pekerjaan dan prestasi siswa, h) mempelajari peran dan struktur sekolah, kelompok teman sebaya terhadap kepribadian siswa, i) memberikan wawasan tentang isu-isu seperti rasisme, komunalisme, diskriminasi gender, dll. Semua ini adalah perhatian pendidikan dan sosiologi sebagai disiplin yang tidak terpisahkan yang berfokus pada masalah-masalah masyarakat. (Subrata S Satapathy; 2020)

Sosiologi Pendidikan mencakup berbagai topik. Masyarakat dan seluruh komponen lain di dalamnya, seperti budaya, golongan, ras, gender, dan lain-lain, berlangsungnya proses sosialisasi, akulturasi budaya, organisasi sosial, dan lain-lain, serta faktor-faktor lain seperti status, peran, nilai, moral, dan lain-lain., semuanya termasuk dalam pemeriksaan bidang studi ini (Satapathy, n.d.). Menyelaraskan desain pendidikan menurut kebutuhan geografis, etnis, dan bahasa, serta kebutuhan subkelompok populasi lainnya juga termasuk dalam Sosiologi Pendidikan. Bagaimana latar belakang dan situasi ekonomi, struktur dan hubungan keluarga, teman, kelompok teman sebaya dan guru, serta isu-isu sosial lainnya yang lebih menyeluruh mempengaruhi kepribadian, kualitas pendidikan, dan aksesibilitas peluang bagi siswa merupakan poin integral dari pertimbangan Sosiologi Pendidikan.

SEJARAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Jauh sebelum adanya kemunculan sosiologi telah ada para intelektual tentang masalah dan isu yang berhubungan dengan masyarakat dan tingkah laku manusianya. Pada abad 18 para ahli filsafat pencerahan tentang menekankan peranan akal budi dalam memahami perilaku manusia dan memberikan landasan hukum dan organisasi negara. Mereka lebih menekankan pemikiran yang bergaya skolastis dan dogmatis, yang mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat tersebut sudah dijelaskan dalam hubungan dengan kepercayaan agama.

Latar belakang yang mempengaruhi proses kelahiran sosiologi ialah perubahan dan krisis yang terjadi di Eropa Barat. Hal ini ditandai dengan kemunculan Kapitalisme, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan dengan reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke 18, serta terjadinya revolusi perancis.

Sosiologi modern lahir dari Revolusi Industri dan meningkatnya kesadaran akan pergeseran radikal dalam struktur sosial masyarakat, khususnya di Eropa dan Inggris. Tetapi pada masa inilah pendidikan yang kita kenal juga berkembang, sehingga dalam satu hal, industrialisasi dan perluasan pendidikan berjalan beriringan. Pendidikan memang masuk ke dalam tulisan-tulisan para sosiolog klasik awal, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang dipikirkan dengan matang.

Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat buku "Rules of Sociological Method" yang di karang oleh Emile Durkheim yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku tersebut dia menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Dan untuk saat ini banyak yang telah mengakuinya sebagai "bapak metodologi sosiologi". Pendiri sosiologi yang lainnya adalah Max Weber memiliki pandangan yang berbeda dengan Durkheim. Menurut Weber,

sebagai ilmu yang mencoba memahami yang mencoba untuk memahami masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, sosiologi tidak semestinya berkutat pada soal-soal pengukuran kuantitatif, tetapi yang lebih penting sosiologi bergerak pada upaya memahami di tingkat makna tentang perilaku sosial. Karena itu, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal.

Perkembangan sosiologi makin variatif, memasuki abad 20. Tokoh yang paling memelopori ilmu sosial kontemporer adalah Anthony Giddens, kefokusannya minat sosiologi dewasa ini bergeser dari *structures* ke *agency*, dari masyarakat yang dipahami terutama sebagai seperangkat batasan eksternal yang membatasi bidang pilihan yang bersedia untuk anggota-anggota masyarakat tersebut, dan dalam beberapa hal menentukan perilaku mereka, menuju ke era baru; memahami latar belakang sosial sebagai kumpulan sumber daya yang diambil oleh faktor-faktor untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Sedangkan kehadiran sosiologi semakin mantap dan kehadirannya banyak diakui dan banyak memberikan sumbangan yang sangat penting bagi usaha pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada tahun 2000-an.

Sosiologi pendidikan muncul karena dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial di Eropa. Revolusi industri dan revolusi kesadaran masyarakat Eropa pada saat itu menyebabkan pelemahan nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Kondisi ini membawa konsekuensi terbentuknya patologi sosial karena masyarakat saat itu kehilangan pedoman yang kuat untuk memperkuat integrasi sosial. Dampaknya, harmoni sosial retak di tengah-tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi dengan cepat melahirkan kajian ilmu baru dalam sosiologi, khususnya sosiologi pendidikan (Suardi, Moh: 2016)

Perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak awal abad ke 20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamaan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi dan kemudian persoalan-persoalan pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sebelum berakhirnya PD II sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peredaran dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan di Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Amerika Serikat. Setelah PD II, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan, dalam menyikapi perlunya dimensi pendidikan menjadi instrumen terpenting dalam memajukan masyarakat. Karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu penting di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari para tokoh-tokoh pendirinya, diantaranya adalah:

1. Lester Frank Ward (1841-1913),

Lester Frank Ward (1841-1913), salah seorang pelopor sosiologi di Amerika dianggap sebagai pencetus gagasan lahirnya sosiologi pendidikan di Amerika. Gagasan tersebut muncul dalam bukunya yang berjudul: *Applied Sociology* (Sosiologi Terapan), yang mengkaji perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Gagasan Ward tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Dewey (1859-1952). Sebagai bapak pendidikan dan sekaligus sebagai pelopor sosiologi pendidikan, dalam karyanya: *School and Society* (Sekolah dan Masyarakat), Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Pemikiran Dewey itu kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya: *Democracy and Education* (Demokrasi dan Pendidikan) pada 1916 yang mendorong berkembang sosiologi pendidikan.

Keyakinan Ward pada nilai pendidikan menggerakkannya untuk menulis sebuah buku yang membahas secara sistematis pentingnya pendidikan dalam masyarakat manusia. Buku ini awalnya berjudul "The Great Panacea," dan antara tahun 1869 dan 1874 sebagian besar waktu luangnya dicurahkan untuk merencanakan dan menulisnya. Namun, ia menyadari bahwa cakupan keprihatinannya begitu luas sehingga diperlukan bacaan dan studi ilmiah yang ekstensif jika ia ingin menyelesaikan tugasnya. Alhasil, ia menghabiskan satu tahun membaca filsafat dan sains, khususnya karya Ernst Heinrich Haeckel, Auguste Comte, dan Herbert Spencer. Pada tahun 1876 Ward melaporkan hasil

kerja kerasnya berikut ini dalam buku catatannya: “Saya mulai menyadari bahwa apa yang saya tulis adalah *sosiologi*, dan saya harus mencoba melakukan sesuatu yang orisinal dalam ilmu tersebut” (*Glimpses of the Cosmos*, vol. 3, hal.172). Dia membuat garis besar yang benar-benar baru, dan, setelah beberapa kali revisi, dia menyelesaikan naskahnya pada tahun 1880 dan memberinya judul *Sosiologi Dinamis* (1883).

Karya Ward dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai di bidang biologi, psikologi, dan antropologi serta oleh perubahan sosial revolusioner yang terjadi di Amerika pada paruh terakhir abad kesembilan belas—industrialisasi, urbanisasi, dan bangkitnya monopoli, kapitalisme keuangan. Akar intelektual pemikirannya terutama ditemukan pada Comte dan Spencer. Memang benar, karya Ward dapat dianggap sebagai positivisme Comte versi Amerika, dikombinasikan dengan penerapan teori evolusi kosmis Spencer. Meskipun sosiologi Ward tidak membuahkan hasil dalam pengembangan ilmu sosial, setidaknya ia memberikan dasar pemikiran, yang dituangkan dalam terminologi ilmiah, untuk semangat reformasi yang merupakan ciri khas ilmu sosial Amerika awal.

Menurut filosofi kosmik Ward, alam semesta pada akhirnya terdiri dari serangkaian hubungan antar partikel materi. Evolusi struktur dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks merupakan hasil pergulatan antara kekuatan-kekuatan yang unik pada setiap tahapannya. Ada tiga tahap: (1) asal mula materi; (2) asal usul bentuk-bentuk organik, pikiran, dan akhirnya manusia; dan (3) asal usul masyarakat. Skema evolusioner ini, dengan segala konsekuensinya, menjadi perhatian utama Ward. Dalam menguraikan rangkaiannya, Ward memperkenalkan konsep “sinergi”—kombinasi gagasan energi dan mutualitas. Sinergi adalah sebuah proses yang berjalan di antara kekuatan alam yang berlawanan dan mengarah pada pengembangan struktur yang semakin kompleks. Tingkat kompleksitas yang berurutan terdiri dari *lebih* dari sekadar penjumlahan elemen-elemen sebelumnya, dan munculnya tingkat-tingkat baru ini disebutnya sintesis kreatif (meminjam istilah dari Wundt). Proses sintesis kreatif merupakan dasar Ward tidak hanya dalam menyusun ilmu-ilmu dengan cara yang mirip dengan Comte dan Spencer, tetapi juga dalam konsepsinya tentang sosiologi sebagai puncak dari semua ilmu pengetahuan. Seperti kebanyakan orang sezamannya, Ward mengembangkan sistem sosiologinya sebagai pelayan perempuan untuk

mencapai tujuannya yang lebih besar, yaitu kemajuan umat manusia. Dengan cara yang benar-benar positivis, ia mencari hukum yang mengatur cara kerja kekuatan-kekuatan sosial sehingga struktur sosial yang dihasilkan dari kekuatan-kekuatan ini dapat dimanipulasi untuk menghasilkan “kebahagiaan” yang ia anggap sebagai tujuan dari semua usaha manusia. Sosiologi dapat mencapai tujuan ini karena merupakan “ilmu sejati, yang menjawab definisi sains, yaitu bidang fenomena yang dihasilkan oleh kekuatan alam sejati dan sesuai dengan hukum yang seragam” (1903, hal. 99).

Ward membedakan antara “sosiologi murni” dan “sosiologi terapan”, dan menganggap masing-masingnya mempunyai peran yang berbeda dalam proses reformasi dan penciptaan kebahagiaan. Sosiologi murni bersifat diagnostik, berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia—dengan “pencapaian manusia”—dan berorientasi pada studi fungsi sosial. Sebaliknya, sosiologi terapan memiliki fungsi terapeutik, berkaitan dengan “perbaikan manusia”—berfokus pada masa depan daripada masa lalu dan masa kini—dan berorientasi untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip yang ditemukan oleh sosiologi murni dapat diterapkan untuk mewujudkan kemajuan manusia.. Ward menegaskan bahwa sosiologi terapan adalah ilmu dan bukan seni; ia hanya dapat memberikan panduan paling umum mengenai aksi sosial, dan sosiolog itu sendiri bukanlah seorang reformis atau politisi yang aktif.

Dalam penjelasannya tentang sifat masyarakat manusia dan proses evolusi sosial, Ward memperkenalkan dua konsep yang terus berperan dalam pemikiran sosiologi setelah kematiannya. Konsep pertama adalah bahwa kekuatan sosial pada dasarnya bersifat psikologis; gagasan ini tidak hanya menjadi salah satu tema psikologi sosial Amerika tetapi juga menjadi prinsip pengorganisasian bagi banyak buku teks sosiologi awal, misalnya teks karya Small dan Vincent pada tahun 1894, karya EA Ross pada tahun 1920, dan karya Park dan Burgess pada tahun 1921. Konsep kedua adalah telesi: Berbeda dengan Spencer dan Sumner, Ward berpendapat bahwa masyarakat manusia bukan hanya produk dari kejadian alamiah namun, sesuai dengan prinsip sintesis kreatif, mewujudkan sebuah proses baru, telesi. Jika semua struktur agregatif sebelumnya telah maju melalui proses adaptasi buta melalui seleksi alam, masyarakat manusia mengizinkan proses adaptasi melalui seleksi buatan, sebuah proses yang

menghasilkan pencapaian yang bertujuan. Baik tindakan manusia maupun hewan dimotivasi oleh keinginan alami, namun tindakan manusia, jika dipandu oleh kecerdasan, “secara tidak langsung” mengarah pada pencapaian dan laju kemajuan yang dipercepat. Ward membayangkan tahap pembangunan yang ideal di mana pemerintah (sebagai instrumen telesi sosial), dengan berbekal prinsip-prinsip sosiologi, akan menghasilkan “perundang-undangan yang menarik” untuk menjamin kebahagiaan maksimum bagi semua orang. Dalam istilah yang lebih praktis, resep Ward untuk kebahagiaan manusia adalah dukungan publik terhadap wajib belajar, yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

Penekanan teoretisnya pada evolusi sosial dan minat pragmatismenya pada reformasi sosial berskala besar digabungkan untuk menempatkan kontribusi sosiologi khusus Ward lebih pada bidang proses sosial daripada struktur sosial. Namun ia membahas struktur sosial dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat manusia. Menurutnya, pada tahap awal perkembangan, konflik antar ras dan penaklukan suatu ras oleh ras lain menyebabkan munculnya *kasta*. Ketimpangan sosial yang melekat dalam sistem kasta kemudian diatasi dengan munculnya hukum dan penggantian hak hukum dengan kekuatan militer. Dengan demikian berkembanglah suatu bentuk masyarakat yang disebutnya *negara*, yang dicirikan oleh struktur kelas di mana semua strata mempunyai hak dan kewajiban hukum. Kontak, konflik, dan percampuran yang terus menerus kemudian berujung pada terciptanya *masyarakat yang homogen*, dan sebagai tahap akhir, dengan bangkitnya sentimen patriotik, terjadilah terbentuknya suatu *bangsa*.

Ward tertarik menganalisis struktur kelas hanya dalam hubungannya dengan penyakit masyarakat manusia dan prospek untuk memperbaiki penyakit ini. Ia menghargai signifikansi fungsional properti serta potensi eksploitasi dalam sistem kelas masyarakat Barat yang bersejarah (termasuk masyarakatnya sendiri). Ia yakin, perpecahan paling penting dalam masyarakat adalah antara produsen dan non-produsen; dan dia mendokumentasikan perbedaan tajam antara dunia dan fungsi penguasa dan yang dikuasai. Namun, ia menganggap perkembangan struktural ini hanya sekadar artefak manusia: Perbedaan kelas hanya disebabkan oleh perbedaan kesempatan, terutama kesempatan pendidikan, yang mengarah pada monopoli dan ketidakadilan sosial dan budaya yang dibuat-buat. Oleh

karena itu, jalan menuju perbaikan sosial adalah dengan mewajibkan pendidikan publik dan dengan demikian menyebarkan pengetahuan dan menyamakan kesempatan. Reformasi mendasar ini harus dilakukan oleh pemerintah, yang dianggap Ward sebagai basis kebebasan dan mediator antagonisme kelas. (Meskipun Ward menyetujui gerakan serikat pekerja dan partai-partai sayap kiri yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan, ia menganggap sosialisme negara sebagai pengganti yang buruk bagi sosiokrasi ilmiahnya.)

Pandangan Ward bersifat demokratis: Ia berasumsi bahwa semua orang pada dasarnya memiliki kapasitas yang sama; dia menekankan perlunya kesempatan pendidikan yang setara; dan dia memiliki keyakinan rasionalis pada kemampuan pemerintah yang tercerahkan dalam mewujudkan telesi sosial. Ada juga unsur radikal dalam pemikirannya: Ia menyerang tradisi *laissez-faire* yang dominan, dan ia mengembangkan teori ginekocentris tentang keunggulan perempuan, yang memberikan dukungan pada gerakan emansipasi perempuan.

Meskipun Ward melakukan sebagian besar pekerjaannya di luar universitas, tulisannya membawanya ke dalam kontak dekat dengan para sarjana baik di bidang ilmu alam dan sosial. Dia adalah anggota Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan anggota National Academy of Sciences, dan dia sangat terlibat dalam urusan masyarakat profesional filsuf, ekonom, dan ahli geologi lokal dan nasional. Statusnya sebagai salah satu sosiolog Amerika terkemuka pada zamannya ditunjukkan dengan terpilihnya dia pada tahun 1906 sebagai presiden pertama dari American Sociological Society yang baru didirikan.

Sebagai tokoh terakhir pembangun sistem, Ward berdiri di ujung garis perkembangan sosiologi—konsepsi sosiologi sebagai “ratu ilmu-ilmu sosial”. Ward pada dasarnya memiliki konsepsi penelitian ilmiah abad kedelapan belas. Baginya, sains terutama terdiri dari penalaran logis dari fakta-fakta yang kurang lebih jelas, observasi sederhana, klasifikasi, dan generalisasi. (Pelatihannya sebagai ahli botani dan geologi mungkin telah memperkuat posisi ini.) Dia tidak tertarik pada kuantifikasi, yang membantu menjelaskan mengapa sosiolog Amerika berikutnya menolak pendekatan teoretis dan metodologisnya dan memilih penelitian yang lebih terbatas berdasarkan metode kuantitatif. Ward memang terbukti sebagai nabi yang lebih baik daripada pemimpin intelektual: Munculnya negara

kesejahteraan modern dan keterlibatan sosiolog profesional dalam masalah-masalah praktis politik, kemiskinan, dan ras merupakan semacam pembenaran atas karyanya. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/ward-lester-f>

2. Jhon dewey (1859-1952)

John dewey mengembangkan gagasan dari Lester Frank Ward. Dalam bukunya yang berjudul *School and Society* yang terbit tahun 1899, ia menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Gagasan Ward tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Dewey (1859-1952). Sebagai bapak pendidikan dan sekaligus sebagai pelopor sosiologi pendidikan, dalam karyanya: *School and Society* (Sekolah dan Masyarakat), Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Pemikiran Dewey itu kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya: *Democracy and Education* (Demokrasi dan Pendidikan) pada 1916 yang mendorong berkembang sosiologi pendidikan. Untuk merealisasikan konsepnya, dia menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran yaitu: *Problem Solving Method* dan *Learning by Doing*.

John Dewey memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan yang masih relevan hingga saat ini. Beberapa kontribusinya antara lain:

- a. Pengalaman sebagai kunci dalam pembelajaran: Dewey menganggap bahwa pengalaman adalah kunci dalam pembelajaran. Menurutnya, siswa harus terlibat dalam pengalaman langsung dan aktif dalam pembelajaran, bukan hanya menerima informasi dari guru. Konsep ini masih relevan dalam pendidikan modern, di mana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengalaman masih digunakan.
- b. Pembelajaran melalui tindakan: Dewey juga mengajarkan bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui tindakan. Siswa harus terlibat dalam tindakan nyata dan memecahkan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Konsep ini masih relevan dalam pendidikan modern, di mana pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah masih digunakan.
- c. Demokrasi dalam pendidikan: Dewey menganggap bahwa pendidikan harus menciptakan warga negara yang demokratis dan

- aktif. Konsep ini masih relevan dalam pendidikan modern, di mana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada partisipasi siswa dan pengembangan keterampilan sosial masih digunakan.
- d. Pendidikan sebagai pengalaman sosial: Dewey menganggap bahwa pendidikan harus menciptakan pengalaman sosial yang positif bagi siswa. Konsep ini masih relevan dalam pendidikan modern, di mana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada kolaborasi dan kerja tim masih digunakan.
 - e. Pembelajaran sepanjang hayat: Dewey mengajarkan bahwa pembelajaran harus terus berlanjut sepanjang hayat. Konsep ini masih relevan dalam pendidikan modern, di mana pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan profesionalisme masih digunakan. (Hasbullah, 2020)

John Dewey memiliki hubungan yang erat dengan sosiologi pendidikan. Kontribusinya terhadap pendidikan mencakup pemikiran tentang pengalaman sosial, demokrasi dalam pendidikan, dan pembelajaran berbasis tindakan, yang semuanya memiliki relevansi langsung dengan sosiologi pendidikan. Dewey menekankan pentingnya pengalaman sosial dalam pembelajaran, yang sejalan dengan fokus sosiologi pendidikan pada interaksi sosial dan pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran dan perkembangan individu. Konsep demokrasi dalam pendidikan yang diperjuangkan Dewey juga mencerminkan hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, serta peran individu dalam masyarakat. Selain itu, pandangannya tentang pembelajaran melalui tindakan dan pengalaman langsung juga mencerminkan pemahaman tentang bagaimana individu terlibat dalam proses sosial dan bagaimana pengalaman sosial membentuk pemahaman mereka tentang dunia. Dengan demikian, Dewey memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sosiologi pendidikan melalui pemikirannya tentang pengalaman sosial, demokrasi, dan pembelajaran berbasis tindakan.

Pemikiran Dewey tentang sosiologi pendidikan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, Dewey menekankan pentingnya pengalaman sosial dalam pembelajaran. Menurutnya, pengalaman sosial merupakan bagian integral dari proses pendidikan, dan siswa harus terlibat dalam pengalaman sosial yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Kedua, Dewey juga

memperjuangkan konsep demokrasi dalam pendidikan, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam proses pembelajaran yang demokratis dan partisipatif. Hal ini mencerminkan hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, serta peran individu dalam masyarakat. Ketiga, Dewey juga menyoroti pentingnya pembelajaran melalui tindakan dan pengalaman langsung, yang mencerminkan pemahaman tentang bagaimana individu terlibat dalam proses sosial dan bagaimana pengalaman sosial membentuk pemahaman mereka tentang dunia.

Dengan demikian, pemikiran Dewey tentang sosiologi pendidikan menekankan pentingnya pengalaman sosial, demokrasi dalam pendidikan, dan pembelajaran berbasis tindakan sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Salah satu pemikiran terpenting John Dewey dalam sosiologi pendidikan adalah penekanannya pada pentingnya pengalaman sosial dalam pembelajaran. Dewey memandang pengalaman sosial sebagai bagian integral dari proses pendidikan, di mana siswa harus terlibat dalam pengalaman sosial yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Pandangan ini mencerminkan hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, serta peran individu dalam masyarakat. Selain itu, konsep demokrasi dalam pendidikan yang diperjuangkan Dewey juga merupakan pemikiran penting dalam sosiologi pendidikan. Dewey memperjuangkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran secara demokratis, mencerminkan hubungan antara pendidikan dan struktur sosial yang demokratis. Dengan demikian, pemikiran terpenting Dewey dalam sosiologi pendidikan adalah penekanannya pada pengalaman sosial dan demokrasi dalam pendidikan sebagai bagian integral dari proses pendidikan.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis yang menjadi terkenal pada akhir abad ke-19^{dan} awal abad ke-20. Bersama Karl Marx dan Max Weber, ia dianggap sebagai salah satu pendiri utama sosiologi modern. Salah satu klaimnya yang paling utama adalah bahwa masyarakat adalah realitas *sui generis*, atau realitas yang unik bagi dirinya sendiri dan tidak dapat direduksi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Hal ini tercipta ketika hati nurani individu berinteraksi dan menyatu untuk menciptakan realitas sintetik yang benar-benar baru dan lebih besar daripada gabungan

bagian-bagiannya. Realitas ini hanya dapat dipahami secara sosiologis, dan tidak dapat direduksi menjadi penjelasan biologis atau psikologis. Fakta bahwa kehidupan sosial memiliki kualitas ini akan menjadi landasan pernyataan Durkheim lainnya, yaitu bahwa masyarakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah. Untuk tujuan ini ia mengembangkan metodologi baru, yang berfokus pada apa yang disebut Durkheim sebagai “fakta sosial”, atau elemen kehidupan kolektif yang ada secara independen dan mampu memberikan pengaruh pada individu. Dengan menggunakan metode ini, ia menerbitkan karya-karya berpengaruh tentang sejumlah topik. Ia paling dikenal sebagai penulis *Tentang Pembagian Kerja Sosial*, *Aturan Metode Sosiologis*, *Bunuh Diri*, dan *Bentuk Dasar Kehidupan Beragama*. Namun, Durkheim juga menerbitkan sejumlah besar artikel dan ulasan, dan beberapa kuliahnya diterbitkan secara anumerta.

Ketika Durkheim mulai menulis, sosiologi tidak diakui sebagai bidang studi yang berdiri sendiri. Sebagai bagian dari kampanye untuk mengubah hal ini, ia berusaha keras untuk memisahkan sosiologi dari semua disiplin ilmu lainnya, terutama filsafat. Akibatnya, meskipun pengaruh Durkheim dalam ilmu-ilmu sosial sangat luas, hubungannya dengan filsafat masih bersifat ambigu. Meskipun demikian, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi dan filsafat dalam banyak hal saling melengkapi, bahkan mengatakan bahwa sosiologi memiliki keunggulan dibandingkan filsafat, karena metode sosiologinya menyediakan sarana untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan filosofis secara empiris, bukan secara metafisik atau teoretis. Akibatnya, Durkheim sering menggunakan sosiologi untuk mendekati topik-topik yang secara tradisional dikhususkan untuk penyelidikan filosofis.

Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang sosiologi, termasuk karyanya dalam sosiologi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Durkheim menekankan peran pendidikan dalam mendorong integrasi sosial dan memelihara ketertiban sosial.

Pandangan Emile Durkheim tentang sosiologi pendidikan menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk dan memelihara kesatuan sosial. Menurut Durkheim, pendidikan memiliki peran krusial dalam mengajarkan norma-norma sosial dan nilai-nilai moral kepada

individu. Ia percaya bahwa lembaga pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk identitas sosial, mengajarkan norma-norma sosial, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Durkheim menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mempersiapkan individu untuk pasar kerja, tetapi juga tentang mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesatuan sosial dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. (Harahap, *et al.*, 2024)

Gagasan utama Emile Durkheim tentang sosiologi pendidikan adalah bahwa pendidikan memainkan peran krusial dalam membentuk dan memelihara kesatuan sosial. Menurut Durkheim, lembaga pendidikan tidak hanya menyebarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk identitas sosial, mengajarkan norma-norma sosial, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Durkheim menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang persiapan individu untuk pasar kerja, tetapi juga tentang mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesatuan sosial dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat.

Kontribusi Durkheim tentang sosiologi pendidikan meliputi:

- a. **Solidaritas Sosial:** Ia berpendapat bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan solidaritas sosial dengan meneruskan nilai-nilai dan norma-norma bersama kepada generasi baru. Hal ini membantu menciptakan rasa persatuan dan koherensi dalam masyarakat.
- b. **Pendidikan Moral:** Durkheim percaya bahwa sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga berperan dalam pendidikan moral. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai moral dan rasa kesadaran kolektif.
- c. **Fungsi Sosial:** Durkheim mengidentifikasi dua fungsi sosial utama pendidikan – integrasi individu ke dalam masyarakat dan transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- d. **Anomie:** Durkheim juga memperkenalkan konsep anomie, mengacu pada keadaan tanpa norma atau rusaknya norma-norma sosial. Ia berpendapat bahwa kurangnya pendidikan moral dan integrasi sosial di sekolah dapat menyebabkan anomie di masyarakat.

Disamping berkontribusi terhadap Sosiologi Pendidikan, Durkheim juga menyumbangkan pemikiran pendidikan, diantaranya:

- a. Pendidikan sebagai Fakta Sosial: Durkheim menganggap pendidikan sebagai fakta sosial, yang berarti pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat.
- b. Pendidikan sebagai Transmisi Budaya: Durkheim menekankan bahwa pendidikan berperan dalam mentransmisikan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- c. Pendidikan Moral: Durkheim menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk moralitas dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
- d. Pedagogi dan Sosiologi: Durkheim membedakan antara pendidikan dan pedagogi, di mana pendidikan merupakan proses aktif dalam mendidik generasi muda, sementara pedagogi merupakan refleksi terhadap pendidikan.

Teori-teori ini masih relevan karena mereka memberikan wawasan tentang peran pendidikan dalam masyarakat, transmisi nilai-nilai budaya, dan pembentukan moralitas, yang tetap menjadi perhatian dalam konteks pendidikan modern.

4. Karl Mannheim (1893–1947)

Karl Mannheim, sosiolog Jerman, lahir di Budapest. Ia bersekolah di kota itu dan kemudian belajar di universitas Berlin, Budapest, Paris, dan Freiburg sebelum melanjutkan ke Universitas Heidelberg, di mana ia dihabilitasi sebagai Privatdozent *pada* tahun 1926. Saat itu Heidelberg masih menjadi pusat intelektual utama di kota tersebut. Dunia akademis Jerman. Alfred Weber, Heinrich Rickert, Marianne Weber, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz, dan Errrl Lederer termasuk di antara tokoh utamanya. Semangat Max Weber, yang meninggal pada tahun 1920, mendominasi atmosfer, dan kecemerlangan masa muda György Lukács di

masa pra-Marxisnya tidak terlupakan. Mannheim tinggal dan bekerja di Heidelberg sampai dia dipanggil menjadi profesor sosiologi di Universitas Frankfurt pada tahun 1930. Dia tetap di jabatan itu sampai musim semi tahun 1933, ketika, setelah berkuasanya kaum Sosialis Nasional, dia berlindung di Inggris Raya. Di sana ia menjadi dosen sosiologi di Universitas London (London School of Economics) dari tahun 1933 hingga 1945; dan dari tahun 1945 hingga kematiannya, ia menjadi profesor sosiologi dan filsafat pendidikan di Institut Pendidikan di universitas yang sama.

Pekerjaan Mannheim terbagi dalam dua fase utama, yang kira-kira sesuai dengan kariernya di Jerman dan Inggris. Pada fase pertama, sosiologi pengetahuan—legitimasi metodologisnya, implikasi epistemologisnya, dan penerapan substantifnya—menjadi bidang kerja utamanya. Pada fase kedua studi tentang struktur masyarakat modern mengemuka. Dalam studinya yang terakhir, ia menggabungkan perhatian makrososiologis dan mikrososiologis dengan minat yang jelas terhadap kebijakan sosial.

Tulisan-tulisan awal Mannheim banyak berkaitan dengan peran kepemimpinan elite intelektual dalam mempertahankan kebebasan. Perhatiannya ini merefleksikan studinya atas Max Weber, Max Scheler, dan Karl Marx. Buku awal Mannheim yang paling penting *'Ideology and Utopia'* (1929 dalam bahasa Jerman, 1936 dalam bahasa Inggris) memperkenalkan *sosiologi pengetahuan* sebagai bidang baru studi dalam ilmu sosial. Antipati-nya terhadap gerakan Nazi di Jerman memperdalam minatnya dalam kajian dinamika demokrasi. Tulisan-tulisannya semakin berfokus pada masalah politik, sosial, dan moral yang terlibat dalam kelangsungan hidup demokrasi dan kebebasan. Dia melihat *saling ketergantungan* (interdependensi) sebagai fitur karakteristik era modern; memandang Pendidikan dan Perencanaan sebagai hakikat penting untuk meningkatkan masyarakat. Perhatiannya ini diungkapkan dalam *Man and Society in an Age of Reconstruction* (Manusia dan Masyarakat dalam Era Rekonstruksi) (1940), di mana ia menimbang kekuatan dan kelemahan politik elite-intelektual. *Diagnosis of Our Time*-nya (1943) mengeksplorasi cara untuk membangun kembali tujuan rasional organisasi sosial. Di *Freedom, Power, and Democratic Planning* (1950), yang

diterbitkan setelah kematiannya, ia melanjutkan perhatiannya terhadap Intelektual sebagai pemimpin dalam masyarakat-yang-direncanakan.

Pada tahun-tahun terakhirnya Mannheim menjadikan masalah Perencanaan dan Pendidikan sebagai perhatian utama kajiannya. Sebagai editor di *International Library of Sociology and Social Reconstruction*, ia merangsang pemikiran dan publikasi dalam bidang sosiologi, pendidikan, dan perencanaan. Dia mencari cara-cara demokratis untuk mencapai konsensus dalam masyarakat-massa (*mass-society*), percaya bahwa penelitian dalam sosiologi pendidikan bisa membantu mencapai konsensus ini.

Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Menurut Mannheim penggunaan pendekatan sosiologis terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan, tidak saja dapat membawa nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada pengembangan konten dan metodologi. Dalam konteks sosiologi pengetahuan ini, pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan masyarakat. Menurut Mannheim, pendidikan tidak semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan, atau sebagai alat transformasi keahlian teknis, tetapi lebih dari itu, pendidikan merupakan bagian dari proses mempengaruhi manusia. Pendidikan hanya dapat dipahami dalam konteks untuk membentuk masyarakat seperti apa yang kita inginkan. Pemikiran pendidikan Mannheim terangkum dalam publikasi dengan judul *An Introduction to the Sociology of Education*. Dalam artikel ini, ia menyebut tiga hal penting kurikulum yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan guru, yakni:

- a. Sosiologi untuk guru, yang meliputi; (a) sifat manusia dan tata sosial; (b) dampak kelompok sosial terhadap individu; (c) struktur sosial.
- b. Sosiologi pendidikan, meliputi pembahasan; (a) sekolah dan masyarakat; (b) sosiologi pendidikan dan aspek-aspek sejarahnya; (c) sekolah dan tata sosial.
- c. Sosiologi mengajar, mencakup: (1) interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah; (b) hubungan guru dan murid; (c) masalah-masalah organisasi sekolah. (Ahmad Baihaki 2020)

HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN SOSIOLOGI

Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan diri pada analisis dan pemahaman interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan, mulai dari tahap anak-anak di dalam keluarga hingga masa dewasa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dan negara. Kaitan erat sosiologi pendidikan dengan sistem pendidikan, termasuk pengembangan pendidikan berkelanjutan, menjadikannya sangat relevan dalam konteks pendidikan. Sosiolog berpendapat bahwa struktur kekuasaan dan kebutuhan individu dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pendidikan. Melalui alat-alat dan teknik ilmiah yang dimiliki oleh sosiologi, kita dapat memahami lebih dalam masalah-masalah pendidikan dan memberikan kontribusi berharga untuk meningkatkan sistem pendidikan dalam masyarakat. (Abdullah Idi, 2011)

Pendidikan dan sosiologi adalah isu-isu yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan membangun keterkaitan antara pendidikan dan masyarakat. Istilah sosiologi pendidikan dan sosiologi pendidikan digunakan dalam disiplin sebagai pendekatan terhadap dua ekstrem. Penggunaan kedua istilah tersebut bergantung pada preferensi ahli. Namun, di dunia kontemporer, sosiologi pendidikan umum digunakan. Hal ini karena sosiologi pendidikan akan berimplikasi pada penekanan pada masalah-masalah sosiologis dalam ranah pendidikan yang menjadi perhatian para sosiolog.

Dalam memadukan kedua konsep tersebut menjadi sosiologi pendidikan atau sosiologi pendidikan, perhatian dan fokusnya tetap pada masyarakat. Sosiologi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip umum dan temuan sosiologi untuk administrasi dan proses pendidikan. Pendekatan berarti penerapan sosiologi pada lembaga pendidikan sebagai unit masyarakat yang terpisah. Dalam nada yang sama sosiologi pendidikan menggambarkan analisis proses sosiologis yang terlibat dalam

lembaga pendidikan. Ini menekankan studi dalam institusi pendidikan. Terjadi fertilisasi silang ide, konsep, istilah dan teori di antara para pendidik dalam menutup kesenjangan antara kedua bidang tersebut.

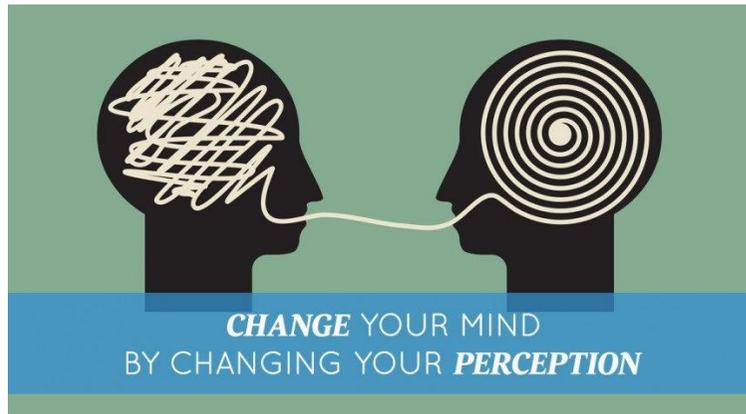
Bahkan, para ahli sosiologi pendidikan dianggap sebagai sosiolog karena kontribusinya terhadap pengetahuan yang ada dalam sosiologi. Para ahli sosiologi murni juga telah memberikan kontribusi yang tak terhitung dalam bidang pendidikan yang semakin mempererat hubungan antara kedua bidang tersebut. Dalam studi tentang berbagai hubungan antara pendidikan dan masyarakat, sosiologi pendidikan berkaitan dengan konsep-konsep umum seperti masyarakat itu sendiri, budaya, komunitas, kelas, lingkungan, sosialisasi, internalisasi, akomodasi, asimilasi, ketertinggalan budaya, sub-budaya, status., peran dan lain sebagainya. Ini lebih lanjut melibatkan dalam kasus-kasus pendidikan dan kelas sosial, negara, kekuatan sosial, perubahan budaya, berbagai masalah struktur peran, analisis peran dalam kaitannya dengan sistem sosial total dan masyarakat mikro sekolah seperti otoritas, seleksi, dan organisasi, pembelajaran streaming, kurikulum dan lain sebagainya. Emile Durkheim adalah orang pertama yang menunjukkan perlunya pendekatan sosiologis terhadap pendidikan. Dia menganggap pendidikan "pada dasarnya bersifat sosial dalam karakter dan fungsinya dan sebagai akibatnya teori pendidikan berhubungan lebih jelas dengan sosiologi daripada ilmu lainnya." Ia menekankan bahwa pendidikan bukanlah fenomena yang statis, melainkan proses yang dinamis dan selalu berubah.

Sosiologi pendidikan menurut definisi adalah disiplin ilmu yang mempelajari pendidikan secara sosiologis, dengan premis bahwa ia mengakui pendidikan sebagai fakta sosial, proses dan institusi, memiliki fungsi sosial dan ditentukan secara sosial. Sosiologi pendidikan hanya bisa muncul ketika menerima sifat sosial pendidikan.

a. Teori-teori sosiologi dan sosiologi pendidikan

Dalam uraian ini akan menjelaskan beberapa teori tentang sosiologi pendidikan. Karena teks ini mengeksplorasi pendidikan dari perspektif sosiologis, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana teori berkontribusi pada pemahaman kita tentang pendidikan sebagai bagian dari masyarakat. Teori sosiologi membantu kita untuk mengambil berbagai potongan teka-teki dan menyatukannya, menggunakan kerangka kerja

khusus untuk membantu kita memahami semuanya dan memberi kita alat yang kita butuhkan untuk berbicara tentang "gambaran yang lebih besar." Setiap perspektif teoretis mewakili cara tertentu untuk memahami dunia sosial. Ini seperti melihat dunia melalui kaca mata tertentu (lihat Gambar di bawah ini). Cara kita melihat dunia jelas mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan proses sosial yang terjadi di dalamnya.



(Gambar 1)

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669>

Banyak teori diberikan pertimbangan dalam uraian ini. Setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Semua teori berfokus pada berbagai aspek masyarakat manusia; beberapa fokus pada kelas, yang lain pada ras, yang lain pada gender. Ada banyak tumpang tindih, dan sementara banyak ahli teori berbicara tentang kelas, misalnya, Anda akan menemukan bahwa mereka memikirkannya dengan cara yang sangat berbeda. Dan keunggulan perspektif teoretis tertentu mengikuti tren yang pasti. Beberapa dari teori ini sangat populer dalam disiplin pada satu titik (misalnya, fungsionalisme struktural) tetapi hampir tidak dipertimbangkan sekarang. Namun, penting untuk memahami asal usul semua teori sosiologi pendidikan yang digunakan saat ini. Memahami era sebuah teori—yaitu, keadaan historis di mana teori itu muncul—sering juga membantu untuk memahami penekanan yang diberikan pada berbagai aspek kehidupan sosial.

1) Teori-teori sosiologi

Sosiolog mengembangkan teori untuk menjelaskan fenomena sosial. Teori adalah usulan hubungan antara dua konsep atau lebih. Dengan kata lain, teori adalah penjelasan mengapa atau bagaimana suatu fenomena terjadi.

Sosiolog mengembangkan teori untuk menjelaskan fenomena sosial, yang merupakan penjelasan mengapa atau bagaimana suatu fenomena terjadi melalui hubungan antara dua konsep atau lebih. Teori sosiologi dikembangkan pada berbagai tingkatan, mulai dari teori besar hingga teori rentang mikro yang sangat kontekstual dan spesifik. Ada banyak teori rentang menengah dan mikro dalam sosiologi. Karena teori-teori tersebut bergantung pada konteks dan spesifik pada situasi tertentu, maka pembahasan mengenai masing-masing teori tersebut berada di luar cakupan teks ini. Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan beberapa teori besar dan menengah yang paling terkenal dan paling umum digunakan dalam sosiologi.

Dalam kerangka konsep fakta sosial dalam ilmu sosiologi, diakui bahwa fokus utama penelitian sosiologi adalah pada fakta sosial. Fakta sosial merujuk pada entitas di luar individu yang memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku individu. Contohnya mencakup aspek-aspek dalam masyarakat seperti hukum, adat, kebiasaan, organisasi, hierarki kekuasaan, sistem peradilan, nilai-nilai, dan institusi sosial lainnya. Secara umum, fakta sosial dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Dalam kerangka ini, terdapat dua teori besar yang berkaitan dengan konsep fakta sosial, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik.

Teori sangat penting dalam menjelaskan sebuah fenomena atau untuk menjelaskan hubungan antar konsep, kita tidak akan mampu membuat hipotesis hubungan sebab dan akibat dalam kehidupan sosial atau menguraikan proses terjadinya peristiwa dan pola sosial. Mengusulkan hubungan sebab dan akibat atau menguraikan proses dalam pengalaman sosial adalah komponen utama teori sosiologi.

Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan menciptakan proposisi yang dapat diuji, yang disebut hipotesis, tentang masyarakat. Sosiolog mengembangkan teori untuk menjelaskan fenomena sosial, yang merupakan usulan hubungan antara dua konsep atau lebih. Teori sosial mengacu pada gagasan,

argumen, hipotesis, eksperimen pemikiran, dan spekulasi penjelasan tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia terbentuk, berubah, dan berkembang seiring berjalannya waktu atau menghilang. Teori sosiologi adalah landasan utama disiplin Sosiologi, dan memungkinkan penjelasan umum dan pemahaman khusus tentang hubungan sosial dan proses sosial.

Fungsionalisme adalah teori makro yang menjelaskan: Stabilitas sosial diperlukan untuk memiliki masyarakat yang kuat, dan sosialisasi serta integrasi sosial yang memadai diperlukan untuk mencapai stabilitas sosial. Institusi sosial masyarakat menjalankan fungsi penting untuk membantu menjamin stabilitas sosial. Perubahan sosial yang lambat memang diinginkan, namun perubahan sosial yang cepat mengancam tatanan social.

Teori Konflik merupakan teori makro yang berpandangan bahwa: Masyarakat dicirikan oleh kesenjangan yang meluas berdasarkan kelas sosial, gender, dan faktor lainnya. Perubahan sosial yang luas diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat egaliter.

Teori Interaksionisme simbolik adalah teori mikro menyatakan bahwa setiap orang membangun peran mereka saat berinteraksi; mereka tidak hanya mempelajari peran yang ditetapkan masyarakat bagi mereka. Ketika interaksi ini terjadi, individu menegosiasikan definisi mereka tentang situasi di mana mereka berada dan secara sosial membangun realitas situasi tersebut. Dalam melakukan hal ini, mereka sangat bergantung pada simbol-simbol seperti kata-kata dan gerak tubuh untuk mencapai pemahaman bersama tentang interaksi mereka.

Utilitarianisme adalah teori mikro yang beranggapan bahwa: orang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam situasi tertentu dan mengurangi kerugian mereka. Jika mereka memutuskan bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, mereka akan memulai atau melanjutkan interaksi jika interaksi sudah berlangsung. Jika mereka memutuskan bahwa kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, mereka akan menolak untuk mulai berinteraksi atau menghentikan interaksi jika sudah dimulai. Ketertiban sosial bisa terwujud karena masyarakat menyadari bahwa bekerja sama dan berkompromi bila diperlukan merupakan hal yang terbaik bagi mereka.

2) Teori-teori sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan bidang studi yang mengkaji peran pendidikan dalam masyarakat. Empat pendekatan teoretis utama yang digunakan dalam sosiologi pendidikan: fungsionalisme, teori konflik, interaksionisme, dan postmodernisme. Fungsionalisme memandang pendidikan sebagai cara mempersiapkan orang untuk peran sosialnya. Teori konflik melihat pendidikan sebagai alat untuk mereproduksi kesenjangan sosial. Interaksionisme berfokus pada interaksi dan makna yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Postmodernisme menantang klaim dan asumsi universal teori-teori lain.

Mengkaji pengetahuan tentang sistem pendidikan Sosiolog pendidikan memulai dengan perspektif atau teori yang dapat memberikan kerangka kerja. Teori adalah upaya untuk menjelaskan dan memprediksi pola dan praktik antar individu dan dalam sistem social (sistem Pendidikan). Teori adalah penjelasan atau argumen yang terstruktur dengan hati-hati yang diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Karena teori bukanlah deskripsi tentang apa yang terjadi di sekolah tetapi hanya penjelasan yang dipikirkan dengan cermat tentang mengapa sesuatu terjadi, kita dapat menerapkan lebih dari satu teori untuk menjelaskan fenomena pendidikan. Pemahaman tentang beberapa pendekatan teoretis memberi kita cara berpikir yang berbeda tentang sistem pendidikan. Teori memandu penelitian dan pembentukan kebijakan dalam sosiologi pendidikan dan memberikan penjelasan logis mengapa hal-hal terjadi seperti yang mereka lakukan, membantu menjelaskan, memprediksi, dan menggeneralisasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan sekolah. Dari teori dan penelitian yang dihasilkan bahwa sosiolog pendidikan memahami sistem pendidikan.

Émile Durkheim, seorang sosiolog Perancis klasik, merupakan salah satu sosiolog pertama yang mempertimbangkan peran sosial dari pendidikan. Dia meyakini bahwa pendidikan moral sangat penting untuk mempertahankan eksistensi masyarakat karena memberikan landasan bagi solidaritas sosial yang mengikat masyarakat bersama. Pendekatan ini menciptakan perspektif fungsionalis mengenai pendidikan, yang menekankan pentingnya sosialisasi di dalam lembaga pendidikan. Ini mencakup pengajaran nilai-nilai budaya, etika, politik, keyakinan agama, kebiasaan, dan norma masyarakat. Lebih lanjut, dari pandangan Durkheim,

pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kontrol sosial dan mengurangi perilaku devian.

Sementara itu, dalam memahami pendidikan, pendekatan interaksi simbolik menekankan pentingnya interaksi dalam proses pendidikan dan nilai-nilai yang terkait dengannya. Sebagai contoh, ada harapan yang tercipta antara siswa dan guru berdasarkan hubungan mereka dan juga faktor-faktor sosial seperti ras, kelas sosial, dan gender. Guru berharap siswa akan memperlihatkan perilaku tertentu, dan melalui interaksi tersebut, harapan tersebut dapat mempengaruhi perilaku siswa, yang dikenal sebagai "efek harapan guru." Misalnya, jika seorang guru memiliki stereotip bahwa siswa A akan tampil lebih buruk dalam ujian Bahasa Indonesia dibandingkan dengan siswa B, harapan tersebut dapat berdampak negatif terhadap prestasi siswa A. Dalam kedua pendekatan ini, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat dan individu melalui fungsinya sebagai suatu sistem yang berperan dan melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Berasal dari teori Marx tentang hubungan antara pekerja dan kapitalisme, pendekatan teori konflik terhadap pendidikan mengkaji cara lembaga pendidikan dan hierarki tingkat gelar berkontribusi pada reproduksi hierarki dan kesenjangan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa pendidikan mencerminkan stratifikasi kelas, ras, dan gender, dan cenderung mereproduksinya. Misalnya, para sosiolog telah mendokumentasikan dalam berbagai situasi bagaimana "pelacakan" siswa berdasarkan kelas, ras, dan gender secara efektif memilah siswa ke dalam kelas buruh dan manajer/wirausahawan, yang mereproduksi struktur kelas yang sudah ada daripada menghasilkan mobilitas sosial.

Mengikuti model sistem terbuka yang dibahas dalam Pendahuluan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan sistem sekolah dan hubungannya dengan organisasi lain dalam konteks sosialnya, atau lingkungannya. Dengan memvisualisasikan dinamika di dalam sekolah, kita dapat menggunakan teori untuk menjelaskan berbagai situasi di dalam sekolah, seperti peran yang dimainkan individu di sekolah dan interaksi antara administrator, guru, siswa, dan staf lainnya; kesempatan yang sama dalam organisasi sekolah individu; dinamika kelas sosial seperti yang dimainkan antara teman sebaya di sekolah; dinamika formal dan informal di sekolah; dan organisasi sistem sekolah.

Teori sosiologi saat ini memiliki sejarah panjang dalam pemikiran sosiologi, mengalir dari karya-karya awal Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Studi Durkheim tentang dampak sistem sosial dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat dianggap sebagai dasar teori fungsional. Bacaan ketiga memberikan kutipan klasik dari Emile Durkheim, umumnya dianggap sebagai sosiolog pertama yang menulis secara ekstensif tentang pendidikan. Sebagai profesor pedagogi Prancis di Sorbonne di Paris, Prancis, ia menggunakan sosiologi untuk mempelajari pendidikan, bidang di mana ia menulis dan mengajar untuk sebagian besar kariernya, sampai kematiannya pada tahun 1917. Durkheim mendefinisikan bidang sosiologi pendidikan dan Pendidikan berkontribusi pada konten awalnya. Dia sangat memperhatikan fungsi atau tujuan pendidikan bagi masyarakat, hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, peran pendidikan dalam mempersiapkan kaum muda untuk mematuhi norma-norma masyarakat, dan sistem sosial yang berkembang di kelas dan sekolah. Dalam bacaan dalam bab ini, Durkheim membahas peran yang dimainkan sekolah dalam mensosialisasikan kaum muda. Pendidikan Moral, fokus kutipan Durkheim di sini, dan karya-karyanya yang lain dalam sosiologi pendidikan membantu meletakkan dasar bagi para ahli teori fungsional yang lebih baru. Fungsi adalah akar dari diskusi pendidikan; Sosiolog yang menggunakan perspektif fungsional melihat kelangsungan hidup masyarakat yang dipertaruhkan—jika masyarakat gagal melatih anggotanya dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melestarikan masyarakat, ketertiban dan kontrol sosial akan dikompromikan. Durkheim dan fungsionalis lainnya prihatin dengan bagaimana sistem pendidikan bekerja dalam hubungannya dengan bagian lain dari masyarakat untuk menciptakan sistem sosial yang berjalan lancar.

Secara historis, perspektif teoretis utama kedua yang dikembangkan adalah teori konflik. Teori ini menjadi yang dominan dalam menanggapi fokus teori fungsional pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat, kadang-kadang dengan mengorbankan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Teori konflik bertanya bagaimana sekolah berkontribusi pada hasil pendidikan yang tidak setara dan distribusi orang dalam sistem stratifikasi (seperti kelas sosial). Isu utama bagi sosiolog pendidikan dalam tradisi konflik adalah peran pendidikan dalam mempertahankan prestise, kekuasaan, dan posisi ekonomi dan sosial dari

kelompok dominan dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa anggota masyarakat yang lebih kuat mempertahankan posisi paling kuat dalam masyarakat, dan kelompok yang kurang kuat (seringkali perempuan, kelompok ras dan etnis yang kurang beruntung, dan kelas sosial yang lebih rendah) "dialokasikan" ke peringkat yang lebih rendah.

Karl Marx dan Max Weber menyiapkan panggung untuk teori konflik kontemporer, dan pembacaan dalam bab ini oleh Randall Collins (1971) memberikan contoh perspektif ini diterapkan pada pendidikan. Para ahli teori konflik klasik berpendapat bahwa mereka yang mendominasi sistem ekonomi kapitalis juga mengontrol institusi lain dalam masyarakat, seperti pendidikan. Kapitalis menggunakan institusi ini untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan keuntungan mereka sendiri, meskipun bukan tanpa perlawanan dari beberapa mahasiswa dan kelompok masyarakat. Collins juga memberikan gambaran tentang pendekatan lain terhadap teori konflik, membahas penggunaan konsep Weber tentang "kelompok status". Weber menunjukkan hubungan yang kuat antara asal kelas sosial siswa, persiapan mereka di sekolah, dan pekerjaan yang mereka jalani setelah sekolah. Weber berpendapat bahwa sekolah mengajarkan dan memelihara "budaya status" tertentu—yaitu, kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan minat dan posisi yang sama dalam status hirarki. Terletak di lingkungan, sekolah sering agak homogen dalam tubuh siswa mereka dan mengajar ke konstituen lokal, sehingga mengabadikan budaya status di lingkungan dan masyarakat.

David Swartz menjelaskan cabang teori konflik yang cukup baru: "reproduksi sosial." Hal ini didasarkan pada pertanyaan apakah sekolah membantu mereproduksi kelas sosial siswa dengan memperlakukan siswa secara berbeda berdasarkan latar belakang kelas mereka atau faktor pembeda lainnya. Ahli teori reproduksi mengeksplorasi pertanyaan seperti apakah siswa "kelas pekerja" ditakdirkan untuk menjadi orang dewasa kelas pekerja, dan peran yang dimainkan sekolah dalam proses tersebut. Konsep "modal budaya" (dan modal sosial dan ekonomi) berfokus, sebagian, pada isu-isu tingkat mikro seperti pola bahasa individu siswa dan latar belakang pengalaman budaya. Swartz memberikan gambaran tentang cabang teori konflik ini.

Para ahli teori fungsional dan konflik telah memperdebatkan bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di sekolah-sekolah sejak zaman

Marx, Weber, dan Durkheim. Setiap fungsi pendidikan (dibahas dalam bacaan kedua) telah menimbulkan kontroversi. Misalnya, fungsionalis berpendapat bahwa sekolah mempersiapkan anggota masyarakat muda untuk peran dewasa mereka, sehingga memungkinkan kelancaran fungsi masyarakat, sedangkan teori konflik melawan bahwa anggota masyarakat yang kuat mengontrol akses ke pendidikan terbaik, sehingga hanya mempersiapkan anak-anak mereka untuk posisi tertinggi dalam masyarakat dan mempertahankan posisi kekuasaan mereka.

Perspektif teoretis utama ketiga dalam sosiologi pendidikan adalah teori interaksi, teori tingkat mikro yang berfokus pada pengalaman individu dan kelompok kecil dalam sistem pendidikan: proses dan interaksi yang terjadi di sekolah. Dalam teori interaksi atau interpretatif, individu adalah pemain aktif dalam membentuk pengalaman dan budaya mereka dan tidak hanya dibentuk oleh kekuatan sosial. Dengan mempelajari cara peserta dalam proses persekolahan mengkonstruksi realitas mereka, peneliti dapat lebih memahami makna pendidikan bagi peserta. Pembacaan terakhir oleh Ray Rist (1977) berasal dari tradisi teori interaksi, dan berfokus pada teori pelabelan (*labeling theory*).

Salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar adalah apa yang diharapkan guru dari siswanya. Konsep *self-fulfilling prophecy* yang diterapkan pada ruang kelas dipopulerkan oleh buku Rosenthal dan Jacobson (1968) *Pygmalion in the Classroom*. Mereka mempelajari bagaimana guru membentuk penilaian tentang siswa mereka dan melabeli mereka berdasarkan faktor objektif tetapi juga subjektif, seperti kelas sosial, penampilan, dan pola bahasa. Pembacaan oleh Rist berpendapat bahwa memanfaatkan teori pelabelan, dan hasil pelabelan yang disebut *self-fulfilling prophecy*, membantu kita memahami proses sekolah dari sudut pandang guru dan siswa.

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Pendidikan telah lama dianggap sebagai pilar utama dalam mengarahkan perubahan sosial. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk membentuk dan memperbaharui norma-norma sosial yang mendukung perkembangan masyarakat. Pendidikan berperan dalam memfasilitasi perubahan sosial dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah (Bourn, 2023).

Transformasi sosial, yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, pola budaya, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, seringkali terjadi seiring dengan perkembangan dalam sistem pendidikan. Menurut pandangan kritis yang diutarakan oleh peneliti pendidikan, pendidikan tidak hanya mencerminkan kondisi sosial yang ada tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat perubahan sosial (Zajda, 2023). Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan, mengarahkan masyarakat menuju inovasi dan pembaruan sosial, sekaligus mempertahankan stabilitas melalui pelestarian nilai-nilai budaya (Giroux, 2023).

Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dengan membuka akses ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran kritis di kalangan individu, yang pada gilirannya dapat memicu gerakan sosial yang berpotensi mengubah struktur sosial yang ada (Bourn, 2023; Zajda, 2023). Tantangan-tantangan baru seperti ketimpangan akses dan perkembangan teknologi mengharuskan sistem pendidikan untuk terus beradaptasi agar relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang semakin kompleks.

Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendidikan dapat menjadi alat perubahan sosial yang signifikan, dengan mengkaji teori-teori dan studi kasus terkini dari berbagai perspektif. Melalui pembahasan ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan keduanya.

Selain itu, peran pendidikan dalam perubahan sosial juga dapat dilihat melalui bagaimana pendidikan membentuk identitas sosial dan politik individu. Pendidikan sering kali menjadi tempat di mana identitas kolektif dikembangkan dan dipertahankan, baik melalui kurikulum formal maupun aktivitas ekstrakurikuler. Dalam konteks globalisasi, pendidikan telah menjadi arena bagi pertemuan budaya dan nilai yang beragam, yang memungkinkan terbentuknya identitas yang lebih inklusif dan pluralis. Menurut penelitian terbaru, pendidikan memiliki peran signifikan dalam mendorong kesadaran global dan solidaritas sosial, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi perubahan sosial yang lebih luas (Giroux, 2023; Zajda, 2023).

Namun, perubahan sosial yang dihasilkan oleh pendidikan tidak selalu bergerak menuju ke arah yang positif. Dalam beberapa kasus, pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan menghambat perubahan sosial yang diinginkan. Misalnya, sistem pendidikan yang tidak inklusif atau yang secara sengaja mempertahankan ketimpangan sosial dapat memperkuat diskriminasi dan eksklusi sosial (Bourn, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendidikan sebagai agen perubahan sosial harus diiringi dengan upaya untuk memastikan keadilan dan inklusivitas dalam akses dan kualitas pendidikan itu sendiri.

A. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses yang esensial dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu dan masyarakat. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada aspek pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat, selain dari transfer ilmu dan keahlian. Melalui proses ini, suatu bangsa atau negara dapat meneruskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Hal ini mempersiapkan

mereka dengan baik untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara.

Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan kebiasaan. Pendidikan bertujuan untuk membekali individu dengan alat dan pemahaman yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam masyarakat, mengejar karier, dan berkontribusi pada pengembangan pribadi dan masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi, menumbuhkan pemikiran kritis, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami, beradaptasi, dan menavigasi dunia.

Pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen perubahan dan kontrol sosial yang paling kuat. Pendidikan dapat menghilangkan kegelapan kebodohan dan kesempatan pikiran manusia serta menanamkan ide-ide baru, cahaya baru dan arah baru bagi perubahan dan pembangunan. Hal ini dapat menghilangkan kegelapan ketidaktahuan, ketidakpedulian dan ketidakaktifan pikiran manusia serta mengembangkan harapan dan aspirasi baru.

Dari sudut pandang sosiologi pendidikan memiliki tiga fungsi untuk perubahan dan perkembangan tersebut. Pertama, membantu pelestarian karya sekaligus pengetahuan, budaya dan warisan masa lalu. Kedua, hal ini membantu dalam transmisi unsur-unsur budaya yang diinginkan pada generasi baru. Ketiga, juga membantu penyebaran pengetahuan dan pengalaman baru untuk penemuan dan penciptaan masyarakat baru. Oleh karena itu, ketiga kegiatan pendidikan ini membawa perubahan yang diperlukan dalam masyarakat dan mengendalikan unsur-unsur yang tidak diinginkan. Tiga fungsi pendidikan untuk perubahan sosial dijelaskan di bawah ini:

1. Pelestarian warisan sosial: Dalam kaitannya dengan pelestarian pengetahuan berharga dan warisan masyarakat, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Remaja laki-laki dan perempuan bersekolah untuk membaca dan menulis dan melalui tindakan ini mereka mengenal unsur-unsur yang diinginkan dari budaya sosial mereka. Kurikulum yang diperuntukkan bagi anak dirancang sedemikian rupa sehingga mencakup pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Tugas guru adalah menyajikan kepada murid-muridnya seni, ilmu pengetahuan dan sastra, sejarah dan

budaya yang telah diwariskan masyarakat sepanjang zaman. Perkembangan atau kemajuan baru apa pun hanya mungkin terjadi bila generasi baru meniru pemikiran, perasaan, dan aktivitas masyarakat masa lalu.

Jadi dari sudut pandang ini pendidikan tidak lain hanyalah sebuah proses peniruan yang besar. Melalui peniruan seperti itulah pelestarian dan perlindungan unsur-unsur yang diinginkan dari kebudayaan manusia yang luas menjadi mungkin.

2. Transmisi budaya yang diinginkan: Pendidikan bertanggung jawab atas transmisi elemen-elemen budaya yang diinginkan dalam pikiran generasi baru. Perlu dicatat bahwa seluruh warisan sosial dan budaya masyarakat masa lalu tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat baru. Generasi baru tidak menginginkan segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka hanya menginginkan unsur-unsur budaya yang bermanfaat dan diinginkan di masa lalu dan menghindari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Di sini pendidikan harus melakukan kontrol sadar terhadap warisan sosial. Pemerintah harus mengkaji secara hati-hati elemen atau item mana dari pengalaman masa lalu yang mampu mengembangkan generasi baru menuju kemajuan sosial. Patut dicatat bahwa seiring dengan perubahan masyarakat, harapan dan aspirasi baru serta kebutuhan-kebutuhan mereka muncul dalam pikiran yang sama. Mengingat fakta ini, pendidikan harus secara sadar mengendalikan, merancang dan memilih benda-benda warisan sosial dan mewariskannya kepada generasi baru.
3. Penyebaran pengetahuan baru: Pendidikan bertanggung jawab atas penyebaran pengetahuan baru dan pengalaman dalam benak masyarakat. Setiap masyarakat baru membawa serta kejeniusannya yang dapat berkontribusi pada penciptaan baru dan penemuan baru untuk kemajuan sosial. Pendidikan harus memberikan cahaya baru dan arah baru dalam pikiran orang-orang jenius yang melaluinya pemikiran, gagasan dan aktivitas baru serta kreasi baru dapat muncul. Berkat kreativitas seperti itulah keyakinan, kepercayaan, dan cara hidup lama diubah dan aktivitas serta pemikiran baru akan berkembang. Sejarah umat manusia mempunyai banyak contoh mengenai fakta ini. Orang luar biasa dengan kejeniusan kreatif

dalam masyarakat baru menyumbangkan pemikiran dan idenya sendiri untuk diikuti oleh orang lain. Gandhiji dan Karl Marx serta para reformis sosio-politik dan agama lainnya dari waktu ke waktu telah mampu mewujudkan perubahan dan pembangunan sosial tersebut. Jadi terbukti bahwa pendidikan dapat menyebarkan pengetahuan dan ide-ide baru untuk perubahan dan pembangunan sosial.

Dari analisis di atas jelas bahwa pendidikan adalah instrumen perubahan dan pembangunan sosial yang ampuh. Tanpa adanya hal tersebut, masyarakat akan tetap stagnan dan perubahan serta kemajuannya akan terhenti.

a. Fungsi Pendidikan

Teori fungsional menekankan fungsi pendidikan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Fungsi pendidikan yang paling penting adalah *sosialisasi*. Jika anak-anak perlu mempelajari norma-norma, nilai-nilai, dan keterampilan yang mereka perlukan agar dapat berfungsi dalam masyarakat, maka pendidikan adalah sarana utama untuk pembelajaran tersebut. Pertanyaan apakah fungsi pertama pendidikan adalah fungsi sosialisasi adalah pertanyaan yang kompleks, karena pendidikan melayani berbagai peran dalam masyarakat. Namun, sejumlah besar penelitian mendukung gagasan bahwa sosialisasi memang fungsi utama pendidikan. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, keyakinan, norma, dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Proses ini sangat penting untuk mengubah individu menjadi anggota kompeten dari komunitas mereka. Pendidikan, khususnya pendidikan formal, memainkan peran penting dalam proses ini. Menurut Li Yixian dan Liu Huizhen, fungsi utama pendidikan adalah untuk mensosialisasikan individu, menunjukkan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah tentang mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial dengan menanamkan norma dan nilai-nilai masyarakat (Yixian & Huizhen, 1987). Peran pendidikan dalam sosialisasi lebih ditekankan oleh Ismailsaheb Mulla, yang mencatat bahwa pendidikan diakui secara luas sebagai agen perubahan dan pembangunan sosial. Sementara pendidikan dapat memulai perubahan sosial dengan mengubah

pandangan dan sikap, fungsi utamanya sering dilihat sebagai sosialisasi kaum muda dan pemeliharaan tatanan sosial (A, 2022). Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan berfungsi untuk melanggengkan struktur sosial yang ada dengan menanamkan norma-norma budaya dan sosial yang diperlukan pada siswa. Selain itu, Robert D. Hess menyoroti pentingnya pendidikan dini sebagai bentuk sosialisasi dasar. Keterlibatan sekolah dan pemerintah dalam program pendidikan dini menggarisbawahi pengakuan peran pendidikan dalam mensosialisasikan anak-anak sejak usia muda, mempersiapkan mereka untuk peran sosial masa depan^[4]. Sosialisasi awal ini sangat penting untuk pengembangan kognitif dan kepribadian, karena meletakkan dasar untuk pembelajaran di kemudian hari dan integrasi sosial. Dimensi sejarah dan budaya fungsi sosialisasi pendidikan juga signifikan. Artem Stryzhakov membahas bagaimana pendidikan dan sosialisasi terjalin dalam membentuk perkembangan kepribadian dalam konteks sosio-historis tertentu. Pola perkembangan manusia dipengaruhi oleh citra kehidupan sosio-historis, yang dibantu oleh pendidikan untuk mengabadikan dengan melibatkan individu dalam rutinitas dan kegiatan tertentu (Stryzhakov, 2022). Selanjutnya, peran pendidikan dalam sosialisasi melampaui masa kanak-kanak. JS Western dan DS Anderson menjelaskan bagaimana pendidikan terus mensosialisasikan individu ke dalam peran dan status orang dewasa, seperti pekerjaan dan kewarganegaraan, melalui institusi seperti sekolah dan universitas^[10]. Proses sosialisasi seumur hidup ini sangat penting untuk berfungsinya masyarakat birokrasi modern, di mana peran profesional didefinisikan dengan jelas dan memerlukan pelatihan ekstensif. Singkatnya, sementara pendidikan melayani banyak fungsi, fungsi sosialisasi adalah dasar. Melalui pendidikan itulah individu belajar untuk menavigasi dan berkontribusi pada masyarakat mereka, menjadikan sosialisasi sebagai fungsi utama dan abadi dari sistem pendidikan. Fungsi ini terbukti di berbagai tahap kehidupan dan sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dan kontinuitas. Penelitian ini secara konsisten mendukung pandangan bahwa sosialisasi adalah fungsi sentral, jika bukan yang pertama, dari pendidikan, karena mempersiapkan individu untuk memenuhi peran mereka dalam tatanan sosial.

Fungsi pendidikan yang kedua adalah *integrasi sosial*. Agar suatu masyarakat dapat berfungsi, kata para fungsionalis, masyarakat harus

menganut seperangkat keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Seperti yang telah kita lihat, berkembangnya pandangan umum tersebut merupakan tujuan dari sistem pendidikan wajib gratis yang berkembang pada abad ke-19. Ribuan anak-anak imigran di Amerika Serikat saat ini belajar bahasa Inggris, sejarah Amerika, dan mata pelajaran lain yang membantu mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja dan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan Amerika. Integrasi seperti ini merupakan tujuan utama dari gerakan hanya berbahasa Inggris, yang para pendukungnya mengatakan bahwa hanya bahasa Inggris yang boleh digunakan untuk mengajar anak-anak yang bahasa ibunya adalah Spanyol, Vietnam, atau bahasa lain apa pun yang digunakan orang tua mereka di rumah. Kritik terhadap gerakan ini mengatakan bahwa hal ini memperlambat pendidikan anak-anak dan melemahkan identitas etnis mereka (Schildkraut, 2005).

Fungsi Integrasi sosial, menekankan peran pendidikan dalam mendorong kohesi sosial dan integrasi di antara kelompok yang beragam. Pendidikan inklusif adalah aspek penting dari integrasi sosial, karena bertujuan untuk mensosialisasikan individu penyandang cacat dan mengembangkan strategi pedagogis yang mempromosikan kehidupan mandiri dan keterlibatan masyarakat. Penelitian oleh Derzhavina dkk. mengidentifikasi fungsi integratif sekolah inklusif, yang, terlepas dari tantangan, berusaha untuk menciptakan lingkungan yang dapat diakses bagi siswa penyandang cacat, sehingga memfasilitasi integrasi sosial mereka ke dalam komunitas yang lebih luas (Derzhavina, *et al.*, 2021). Pendidikan sipil untuk demokrasi adalah pendekatan pendidikan lain yang menggarisbawahi integrasi sosial. Penelitian Hwang menekankan pentingnya pendidikan sipil dalam mempersiapkan penyatuan Korea, dengan fokus pada mengatasi perbedaan dan menumbuhkan rasa komunitas dan solidaritas. Bentuk pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman multikultural dan kesadaran global, yang sangat penting untuk mengintegrasikan beragam kelompok budaya dalam masyarakat (Inpyo Hwang, 2015). Pendidikan jasmani juga berperan dalam integrasi sosial dengan mempromosikan kohesi kelompok dan keterampilan sosial melalui olahraga dan aktivitas fisik. Studi Mihailescu dan Catrina menunjukkan bahwa pendidikan jasmani dapat meningkatkan integrasi sosial dengan meningkatkan keterampilan sosial-motorik dan

mendorong kohesi kelompok, yang penting untuk interaksi sosial dan integrasi. Pendidikan tinggi adalah domain lain di mana integrasi sosial ditekankan. Penelitian Wu tentang sistem pendidikan Tiongkok menyoroti pentingnya mengembangkan pembelajaran seumur hidup dan kemampuan komprehensif pada lulusan untuk mengintegrasikan mereka dengan lebih baik ke dalam masyarakat yang berubah. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk beradaptasi dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga mempromosikan integrasi sosial (Wu, 2023). Peran pendidikan dalam integrasi sosial lebih lanjut didukung oleh studi Beck tentang pendidikan di rumah, yang menunjukkan bahwa sementara kehadiran sekolah tradisional sangat penting untuk integrasi sosial, siswa berpendidikan di rumah juga dapat mencapai integrasi sosial melalui peningkatan komunikasi dan keterbukaan dengan masyarakat (Beck, 2015). Selain itu, O'Leary dan Finnäs mengeksplorasi hubungan antara pendidikan dan perkawinan campuran, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam kelompok minoritas dengan mempertahankan ikatan budaya dan mempromosikan integrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas (O'Leary & Finnäs, 2002). Secara keseluruhan, abstrak penelitian secara kolektif menegaskan bahwa integrasi sosial adalah fungsi mendasar pendidikan. Baik melalui pendidikan inklusif, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, atau pendidikan tinggi, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan keterampilan sosial, dan mempromosikan pemahaman budaya di antara kelompok yang beragam. Fungsi integratif ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang kohesif dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam komunitas mereka. Studi ini menyoroti sifat multifaset peran pendidikan dalam integrasi sosial, mengatasi berbagai tantangan dan peluang di berbagai konteks pendidikan.

Fungsi ketiga dari pendidikan adalah *penempatan sosial*. Mulai dari sekolah dasar, para siswa diidentifikasi oleh guru dan pejabat sekolah lainnya sebagai siswa yang cerdas dan termotivasi atau kurang cerdas dan bahkan memiliki tantangan pendidikan. Bergantung pada bagaimana mereka diidentifikasi, anak-anak diajar pada tingkat yang dianggap paling cocok untuk mereka. Dengan cara ini mereka dipersiapkan dengan cara yang paling tepat untuk kehidupan mereka di kemudian hari.

Penempatan sosial mengacu pada peran pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk peran tertentu dalam masyarakat, sering dikaitkan dengan kesiapan karier dan mobilitas sosial. Pertama, abstrak menyoroti pentingnya penempatan lapangan dalam pendidikan profesional, seperti pekerjaan sosial dan fisioterapi, yang merupakan bagian integral untuk mempersiapkan siswa untuk peran masa depan mereka dalam masyarakat. Penempatan ini memberikan pengalaman praktis dan membantu siswa menerapkan pengetahuan teoretis dalam pengaturan dunia nyata, sehingga memfasilitasi transisi mereka ke peran profesional. Misalnya, penelitian oleh Byrne menekankan perlunya penempatan praktik terstruktur dalam pendidikan perawatan sosial untuk mempersiapkan siswa secara efektif untuk karier mereka ^ [Context_1. (Byrne, 2000). Demikian pula, Caspersen dan Smeby membahas pentingnya penempatan lapangan dalam pendidikan pekerjaan sosial, menggarisbawahi peran mereka dalam menjembatani kesenjangan antara pembelajaran akademik dan praktik profesional (Caspersen & Smeby, 2021). Selain itu, konsep penempatan sosial secara implisit didukung oleh penekanan pada pendidikan interprofesional, seperti yang disorot oleh Prendergast. Pendekatan ini mendorong kolaborasi di antara siswa dari latar belakang profesional yang berbeda, meningkatkan kesiapan mereka untuk peran pekerjaan yang beragam dan mempromosikan integrasi sosial dalam tenaga kerja (Prendergast, 2014). Integrasi pendidikan interprofesional ke dalam kurikulum dapat dilihat sebagai mekanisme penempatan sosial, karena mempersiapkan siswa untuk bekerja secara efektif dalam tim multidisiplin, persyaratan umum di banyak pengaturan profesional. Gagasan penempatan sosial semakin diperkuat oleh penekanan pada misi ketiga universitas, yang mencakup keterlibatan sosial dan layanan publik. Analisis Kesten terhadap institusi pendidikan tinggi di Turki menyoroti semakin pentingnya peran universitas di luar pendidikan dan penelitian tradisional, dengan fokus pada integrasi dan keterlibatan masyarakat (Kesten, 2019). Ini sejalan dengan pemahaman yang lebih luas tentang penempatan sosial, di mana pendidikan berfungsi sebagai saluran bagi individu untuk terlibat dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, abstrak oleh Anderson membahas penempatan lanjutan dalam pendidikan pekerjaan sosial, yang bertujuan untuk merampingkan jalur pendidikan dan mengurangi redundansi, sehingga memfasilitasi masuk yang lebih efisien ke peran

profesional (Anderson, 1978). Pendekatan ini dapat dilihat sebagai bentuk penempatan sosial, karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan persyaratan pekerjaan, memastikan bahwa siswa dipersiapkan dengan baik untuk karier masa depan mereka. Singkatnya, sementara istilah spesifik “penempatan sosial” tidak secara eksplisit disebutkan dalam abstrak, prinsip-prinsip yang mendasarinya terbukti dalam penekanan pada penempatan praktis, pendidikan interprofesional, dan misi ketiga universitas. Elemen-elemen ini secara kolektif berkontribusi pada fungsi penempatan sosial pendidikan dengan mempersiapkan siswa untuk peran sosial tertentu, meningkatkan kesiapan karier mereka, dan mempromosikan mobilitas sosial. Integrasi strategi pendidikan ini memastikan bahwa siswa dilengkapi dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil beralih ke kehidupan profesional mereka dan berkontribusi secara bermakna kepada masyarakat.

Inovasi sosial dan budaya merupakan fungsi pendidikan yang keempat. Para ilmuwan kita tidak dapat membuat penemuan ilmiah yang penting dan para seniman serta pemikir kita tidak dapat menghasilkan karya seni, puisi, dan prosa yang hebat kecuali mereka telah terlebih dahulu dididik dalam berbagai bidang yang perlu mereka ketahui untuk jalur yang mereka pilih.

Fungsi pendidikan keempat dari inovasi sosial dan budaya dapat dipahami sebagai fasilitasi lingkungan belajar partisipatif dan kolaboratif yang menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan masyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam mengadaptasi sistem pendidikan dengan lanskap sosial budaya yang berkembang dan mengatasi tantangan kontemporer. Pertama, inovasi sosial dan budaya dalam pendidikan menekankan pentingnya kreativitas dan budaya partisipatif. Menurut Decortis dan Lentini, kreativitas bukan hanya proses kognitif individu tetapi fenomena sosial budaya yang muncul dari interaksi dalam suatu komunitas. Perspektif ini mendorong desain lingkungan pendidikan yang mendukung pembelajaran formal dan informal melalui kegiatan kreatif dan artefak, mempromosikan pergeseran dari pembelajaran pasif ke keterlibatan aktif dan kolaboratif. Selain itu, inovasi sosial dalam pendidikan terkait erat dengan demokrasi budaya dan pemberdayaan kelompok terpinggirkan. Studi Conrad tentang Proyek Pemuda Tanpa Sensor menyoroti bagaimana sistem pengetahuan berbasis seni dan

Pribumi dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan untuk mendorong inovasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman pendidikan tetapi juga mengatasi keharusan etika dengan mempromosikan inklusivitas dan keragaman budaya (Conrad, 2015). Dalam konteks pendidikan tinggi, inovasi sosial memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan revolusi industri keempat. Osorio Atehortúa dkk. menekankan perlunya lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan inovasi sosial ke dalam kurikulum mereka, sehingga menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan keterampilan kewirausahaan yang berkontribusi pada pengembangan masyarakat (Ruth & Arrubla, n.d.). Ini sejalan dengan pandangan Xiao-hong bahwa inovasi dan pendidikan kewirausahaan harus menumbuhkan nilai-nilai moral dan keterampilan kolaboratif, meningkatkan kualitas pelatihan bakat secara keseluruhan. Selain itu, integrasi inovasi sosial ke dalam praktik pendidikan dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam kualitas belajar mengajar. Penelitian García Gómez menggarisbawahi kompleksitas inovasi pendidikan, yang membutuhkan pendekatan sistemik untuk meningkatkan praktik pendidikan dan hasil pembelajaran. Ini melibatkan navigasi interaksi antara subsistem sosial dan lembaga pendidikan untuk mencapai inovasi etis dan efektif. Selain itu, inovasi sosial dalam pendidikan dapat mengatasi tantangan sosial seperti migrasi dan integrasi budaya. Spulber dan Nesterova berpendapat bahwa pendidikan antarbudaya, dikombinasikan dengan inovasi sosial, dapat menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan berkelanjutan dengan menumbuhkan pemahaman dan kolaborasi di antara kelompok budaya yang beragam (Spulber & Nesterova, 2023). Singkatnya, fungsi pendidikan keempat dari inovasi sosial dan budaya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan kolaboratif yang tidak hanya meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritis tetapi juga mengatasi tantangan masyarakat yang lebih luas. Fungsi ini dicapai melalui integrasi perspektif budaya yang beragam, promosi tanggung jawab sosial, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk dunia modern. Dengan menumbuhkan budaya partisipatif dan menyelaraskan praktik pendidikan dengan kebutuhan sosial, lembaga pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan inovasi.

Ada 3 poin penting Dalam hubungannya dengan fungsi Pendidikan:

1. Menurut perspektif fungsional, pendidikan membantu mensosialisasikan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk memasuki masyarakat yang lebih luas ketika mereka dewasa. Dari perspektif fungsional, pendidikan memainkan peran penting dalam mensosialisasikan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas saat mereka tumbuh dewasa. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai sistem bagian-bagian yang saling terkait yang bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Pendidikan, dalam kerangka ini, dipandang sebagai mekanisme kunci untuk mempromosikan integrasi sosial, stabilitas, dan konsensus tentang nilai-nilai sosial inti (Wasilah, 2023). Pandangan fungsionalis menyatakan bahwa pendidikan melayani beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah sosialisasi, yang melibatkan mengajar anak-anak norma-norma, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam komunitas dan masyarakat mereka pada umumnya. Proses ini membantu individu memahami dan melakukan peran sosial mereka, sehingga berkontribusi pada kohesi dan stabilitas sosial (Wasilah, 2023, Brisko, 2012). Selain itu, pendidikan dianggap sebagai faktor penting dalam mempersiapkan individu untuk peran masa depan mereka dalam tenaga kerja. Ini membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengamankan pekerjaan, yang sangat penting untuk kemandirian ekonomi dan status sosial mereka. Persiapan ini tidak hanya tentang memperoleh keterampilan teknis tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan independen dan beradaptasi dengan berbagai struktur sosial (Brisko, 2012). Perspektif fungsional juga menyoroti peran pendidikan dalam mempromosikan pengembangan pribadi dan pemahaman tentang peristiwa global, yang penting bagi individu untuk menavigasi kompleksitas masyarakat modern. Pendidikan menumbuhkan rasa memiliki dan rasa hormat di antara teman sebaya, yang selanjutnya meningkatkan integrasi sosial dan kemampuan individu untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat (Brisko, 2012). Namun, efektivitas

pendidikan dalam memenuhi fungsi-fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi pemerintah dan tingkat korupsi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan menjadi benar-benar fungsional ketika ada investasi pemerintah yang besar dan tingkat korupsi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktural seputar pendidikan secara signifikan berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi peran sosialisasinya secara efektif Abayomi, Ayotunde, Ayoade., Srinivasarao, Thota. (2023. Singkatnya, dari perspektif fungsional, pendidikan adalah lembaga vital yang mensosialisasikan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk peran masa depan mereka dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menanamkan norma dan nilai-nilai masyarakat, melengkapi individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk tenaga kerja, dan mendorong pengembangan pribadi dan integrasi sosial. Keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan ini, bagaimanapun, tergantung pada faktor-faktor struktural yang lebih luas, termasuk investasi dan tata kelola yang memadai. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya memandang pendidikan tidak hanya sebagai sarana kemajuan individu tetapi sebagai komponen fundamental dari stabilitas dan kohesi masyarakat.

2. Perspektif konflik menekankan bahwa pendidikan memperkuat kesenjangan dalam masyarakat yang lebih luas. Perspektif konflik tentang pendidikan menekankan bahwa sistem pendidikan sering memperkuat kesenjangan sosial yang ada, mencerminkan dan melanggengkan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat yang lebih luas. Pandangan ini didukung oleh berbagai temuan penelitian yang menyoroti bagaimana pendidikan dapat mencerminkan dan memperburuk konflik dan perpecahan masyarakat. Pertama, pendidikan di masyarakat yang terkena dampak konflik sering mencerminkan ketegangan dan perpecahan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, di Bosnia dan Herzegovina, sistem pendidikan telah dikritik karena perannya dalam mempertahankan perpecahan etnis pasca-konflik. Integrasi pendidikan agama ke dalam sistem publik telah dilihat sebagai alat untuk memperkuat identitas etnis, yang

dapat mengarah pada segregasi lebih lanjut daripada persatuan (Jozelić, 2017). Ini menunjukkan bahwa pendidikan, alih-alih berfungsi sebagai kekuatan netral atau murni menguntungkan, dapat dimanipulasi untuk melayani tujuan politik, sehingga memperkuat perpecahan masyarakat. Selain itu, perspektif struktural tentang pendidikan menyoroti bagaimana disparitas dipertahankan melalui sistem pendidikan. Di Lebanon, misalnya, perang saudara memperburuk kesenjangan pendidikan di antara sekte agama yang berbeda, dengan Muslim umumnya tertinggal dari orang Kristen dalam pencapaian pendidikan. Meskipun ada beberapa pergeseran dalam dinamika kekuasaan pasca-konflik, perbedaan ini sebagian besar bertahan, menunjukkan bahwa pendidikan dapat melanggengkan ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya daripada memperbaikinya (Tfaily, *et al.*, 2013). Peran pendidikan dalam memperkuat disparitas masyarakat juga terbukti dalam cara berinteraksi dengan kohesi sosial. Meskipun pendidikan memiliki potensi untuk mempromosikan kohesi sosial, pendidikan juga dapat mencerminkan dan memperkuat perpecahan masyarakat jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam pendidikan yang sensitif terhadap konflik, fokusnya adalah pada bagaimana praktik pendidikan dapat berkontribusi atau mengurangi konflik, tergantung pada bagaimana praktik tersebut diterapkan (Komatsu, 2024). Potensi ganda pendidikan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi pendidikan yang peka konteks yang bertujuan untuk menjembatani, bukan memperluas, kesenjangan sosial. Lebih jauh lagi, perspektif fungsional struktural menunjukkan bahwa sementara pendidikan dapat berkontribusi pada integrasi dan stabilitas sosial, itu juga dapat mencerminkan disfungsi dan perbedaan sosial. Perspektif ini mengakui bahwa sistem pendidikan adalah bagian dari struktur masyarakat yang lebih besar yang dapat beradaptasi untuk menyelesaikan disparitas atau melanggengkan mereka melalui inersia kelembagaan (Wasilah, 2023). Dalam situasi pasca-konflik, pendidikan sering dilihat sebagai alat untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Namun, efektivitas pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan ini bergantung pada penanganan ketegangan sosial dan etnis yang mendasari yang dapat diabadikan oleh sistem

pendidikan secara tidak sengaja. Misalnya, inisiatif pendidikan perdamaian di berbagai masyarakat konflik dan pasca-konflik bertujuan untuk mempromosikan koeksistensi dan rekonsiliasi, namun keberhasilan mereka sering dibatasi oleh prasangka sosial yang terus-menerus dan segregasi. Sebagai kesimpulan, perspektif konflik tentang pendidikan menyoroti peran kompleks yang dimainkan sistem pendidikan baik dalam memperkuat atau menantang kesenjangan masyarakat. Meskipun pendidikan memiliki potensi untuk mempromosikan kohesi sosial dan rekonsiliasi, pendidikan juga dapat melanggengkan ketidaksetaraan yang ada jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ini menggarisbawahi perlunya reformasi pendidikan yang peka terhadap konteks sosial-politik di mana mereka dilaksanakan, yang bertujuan untuk mengubah daripada mereproduksi perpecahan masyarakat.

3. Perspektif interaksionis simbolik berfokus pada interaksi sosial di dalam kelas, di taman bermain sekolah, dan di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan sekolah. Perspektif interaksionis simbolis adalah kerangka sosiologis yang menekankan peran interaksi sosial dalam pengembangan identitas individu dan struktur masyarakat. Perspektif ini sangat relevan dalam pengaturan pendidikan, seperti ruang kelas dan taman bermain sekolah, di mana interaksi sosial sering dan bervariasi. Interaksionisme simbolik, seperti yang diuraikan oleh Fletcher, muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan teori sosial tradisional yang sangat berfokus pada determinisme struktural. Sebaliknya, ini berpusat pada tindakan sehari-hari dan interpretasi individu, menyoroti pentingnya simbolisme dalam membentuk realitas sosial (Fletcher, 2023). Pendekatan ini sangat berguna dalam konteks pendidikan, di mana siswa dan guru terlibat dalam interaksi berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan makna dan identitas sosial. Di kelas, interaksionisme simbolik dapat diterapkan untuk memahami bagaimana siswa dan guru menciptakan dan menegosiasikan makna melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Efendi dkk. menekankan bahwa interaksionisme simbolik melibatkan pemahaman pikiran, diri, dan masyarakat melalui makna bersama yang muncul dari

interaksi (Efendi, *et al.*, 2024). Ini sangat penting dalam pengaturan pendidikan, di mana makna yang dikaitkan dengan konten pendidikan, hubungan teman sebaya, dan tokoh otoritas terus-menerus dibangun dan direkonstruksi melalui interaksi. Selain itu, perspektif interaksionis simbolis dapat diperluas ke taman bermain sekolah, di mana anak-anak terlibat dalam permainan sosial dan interaksi yang penting untuk perkembangan sosial mereka. Interaksi ini memungkinkan anak-anak untuk bereksperimen dengan peran dan identitas yang berbeda, berkontribusi pada pemahaman mereka tentang norma dan harapan sosial. Karya Azarian tentang konstruksi sosial tempat sebagai objek yang bermakna menggarisbawahi pentingnya pengalaman dan narasi bersama dalam membentuk identitas kolektif (Azarian, 2023). Dalam konteks taman bermain sekolah, pengalaman bermain dan interaksi bersama berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif di antara siswa. Pendekatan interaksionis simbolis juga menyoroti fluiditas interaksi sosial dan sifat dinamis dari pembuatan makna. Brito mencatat bahwa metode kualitatif yang diinformasikan oleh interaksionisme simbolik memprioritaskan pemahaman makna yang dikaitkan aktor dengan objek dan hubungan, menekankan konstruksi tindakan yang lancar dalam pengaturan sosial¹ (Steeves, 2023). Perspektif ini sangat relevan dalam lingkungan pendidikan, di mana interaksi tidak statis tetapi berkembang dengan perubahan dinamika sosial dan perkembangan individu. Namun, interaksionisme simbolik telah dikritik karena fokusnya yang terbatas pada struktur sosial, karena terutama menekankan agensi dan interaksi individu (Fletcher, 2023). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sementara interaksionisme simbolik memberikan wawasan berharga tentang interaksi tingkat mikro dalam pengaturan pendidikan, mungkin perlu dilengkapi dengan perspektif teoretis lainnya untuk sepenuhnya memahami pengaruh struktural yang lebih luas pada pendidikan. Kesimpulannya, perspektif interaksionis simbolis menawarkan lensa yang berharga untuk memeriksa interaksi sosial dalam pengaturan pendidikan, seperti ruang kelas dan taman bermain. Ini menekankan peran interaksi dalam konstruksi makna dan identitas, memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman pendidikan dibentuk oleh

dinamika sosial. Namun, fokusnya pada interaksi individu mungkin memerlukan integrasi dengan perspektif lain untuk mengatasi pengaruh struktur sosial yang lebih besar pada pendidikan.

B. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan signifikan struktur sosial dan pola budaya seiring berjalannya waktu. *Struktur sosial* mengacu pada jaringan hubungan sosial yang terus-menerus di mana interaksi antar orang atau kelompok menjadi rutin dan berulang. *Budaya* mengacu pada cara hidup dan berpikir bersama yang mencakup simbol dan bahasa (verbal dan nonverbal); pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai (apa yang “baik” dan “buruk”); norma (bagaimana orang diharapkan berperilaku); dan teknik, mulai dari resep rakyat biasa hingga teknologi canggih dan objek material. Sosiologi dimulai pada akhir abad ke-19 sebagai upaya untuk memahami kemunculan dunia modern. Para pemikir sosiologi paling awal—August Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber—semuanya mencoba memahami implikasi kemanusiaan dari dua transformasi besar yang menghasilkan dunia modern: urbanisasi dan industrialisasi. Mereka memiliki visi yang sama bahwa studi tentang masyarakat manusia dan perubahan dapat dipahami secara umum, bukan sebagai akumulasi dari peristiwa-peristiwa sejarah. Seperti fokus studi sosiologi lainnya, studi tentang perubahan sosial memiliki komponen makro dan mikro, dan popularitasnya meningkat dan menurun selama abad ke-20. Pekerjaan sebelum Perang Dunia II hampir secara eksklusif berfokus pada komponen makro dan penyebab perubahan sosial, namun pekerjaan setelah Perang Dunia II, pada tahun 1950-an dan 1960-an, berfokus pada sumber-sumber perubahan sosial yang bersifat mikro/sosial-psikologis. Baru-baru ini, terdapat banyak gerakan menuju rekonsiliasi lembaga dan struktur dalam menjelaskan perubahan sosial

1. Macam-macam Perubahan Sosial

Perubahan sosial mencakup berbagai jenis dan bentuk, masing-masing dicirikan oleh mekanisme dan hasil yang berbeda. Pada intinya, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan signifikan dari struktur sosial, yang mencakup pergeseran norma, nilai, dan produk budaya (Hernes, 2001). Memahami perubahan ini membutuhkan

pemeriksaan interaksi antara tindakan individu dan transformasi struktural yang lebih luas. Salah satu model utama perubahan sosial adalah model efek agregat, yang berfokus pada dampak keseluruhan dari perubahan sosial daripada tindakan individu (Hernes, 2001). Model ini menyoroti bagaimana hasil kolektif dapat muncul dari berbagai gerakan sosial, yang berfungsi sebagai indikator arah dan dorongan perubahan sosial. Misalnya, gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an di Amerika Serikat mencontohkan bagaimana perilaku kolektif dapat mendorong transformasi politik dan sosial yang signifikan, mengatasi penindasan rasial, politik, pendidikan, dan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Selain efek agregat, efek struktural berkaitan dengan perubahan dalam struktur sosial itu sendiri, mempengaruhi posisi atau keadaan yang dapat ditempati individu dalam masyarakat⁶¹. Perspektif struktural ini sangat penting untuk memahami bagaimana pergeseran dinamika kekuasaan dapat menyebabkan perubahan sosial yang lebih luas, seperti yang terlihat dalam revolusi Nasionalis dan Pan-Afrika yang mencari kemerdekaan dari pemerintahan kolonial di Afrika. Efek aktor fokus pada perubahan yang muncul dari tindakan atau keinginan individu, menekankan bagaimana motivasi pribadi dapat mengkatalisasi perubahan sosial (Hernes, 2001). Perspektif ini sejalan dengan model efek dialektis, yang meneliti bagaimana individu merespons dan mengubah kondisi yang telah mereka ciptakan, yang mengarah pada transformasi baik dalam diri mereka sendiri maupun lingkungan sosial mereka (Hernes, 2001). Bersama-sama, model-model ini menggambarkan interaksi kompleks antara agensi individu dan kendala struktural dalam proses perubahan sosial. Selain itu, gerakan keadilan sosial mewakili bentuk perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan peluang dan kesetaraan bagi komunitas yang terpinggirkan, menekankan keadilan dan inklusi (Newman & Brunswick, 2009). Keterlibatan sipil juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan sosial, karena individu secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan meningkatkan komunitas mereka (Johansen & Givskov, 2014). Singkatnya, jenis dan bentuk perubahan sosial beragam, mencakup efek agregat dan struktural, serta perubahan yang digerakkan oleh aktor dan dialektis. Dinamika ini terbukti dalam gerakan sejarah dan upaya kontemporer menuju keadilan sosial dan

keterlibatan sipil, menyoroti evolusi berkelanjutan dari struktur masyarakat dan peran individu di dalamnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh perubahan sosial budaya yang telah terjadi seiring waktu. Berikut adalah beberapa contoh perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia:

a. Urbanisasi

Perubahan sosial budaya terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. Urbanisasi adalah pendorong signifikan perubahan sosial, mempengaruhi berbagai aspek struktur masyarakat, norma budaya, dan perilaku individu. Proses urbanisasi melibatkan pergerakan populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang mengarah pada transformasi demografis dan sosial-ekonomi yang mendalam. Salah satu perubahan sosial utama akibat urbanisasi adalah perubahan peran dan institusi sosial. Ketika daerah perkotaan berkembang, struktur sosial tradisional, seperti organisasi masyarakat suku atau pedesaan, menghadapi tantangan. Lingkungan perkotaan sering mempromosikan individualisme daripada kolektivisme, yang lebih umum dalam pengaturan suku. Pergeseran ini dapat menyebabkan konflik dan masalah adaptasi bagi individu yang beralih dari gaya hidup pedesaan ke perkotaan, karena mereka menavigasi hubungan sosial yang kurang intim dan lebih dangkal yang khas dari pengaturan perkotaan (TAN & FIRAT, 2022). Selain itu, urbanisasi dapat menyebabkan redefinisi dari apa yang merupakan “pedesaan” dan “perkotaan,” menantang kebijaksanaan konvensional dan mengaburkan batas antara kategori-kategori ini (Smakotina, 2022). Urbanisasi juga berdampak pada dinamika sosial budaya, karena kota menjadi pusat modernisasi dan perubahan budaya. Sifat perubahan sosial yang berkelanjutan dan dinamis di daerah perkotaan mencerminkan peradaban yang berkembang dan perkembangan zaman (Asnita, 2022). Transformasi ini tidak seragam; itu bervariasi dalam kecepatan dan besarnya, mempengaruhi komunitas yang berbeda dalam berbagai cara. Misalnya, di Area Perencanaan Asansol-Durgapur India, urbanisasi

telah menyebabkan pergeseran demografis yang signifikan dan perubahan dalam penggunaan lahan, mengubah daerah pedesaan menjadi ruang perkotaan dan mengubah struktur sosial (Demographic, 2001). Secara ekonomi, urbanisasi sering mengarah pada peningkatan peluang kerja dan kegiatan ekonomi, seperti yang terlihat dalam pengembangan kawasan industri. Pergeseran ekonomi ini dapat mengakibatkan perubahan mata pencaharian, seperti transisi dari pekerjaan pertanian ke non-pertanian di daerah pinggiran kota, yang pada gilirannya mempengaruhi interaksi sosial dan solidaritas masyarakat^[10]. Pusat-pusat kota, sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya, juga mengalami pergeseran dalam pemerintahan dan tatanan sosial, dengan elite perkotaan sering memainkan peran penting dalam membentuk perubahan ini^[7]. Namun, urbanisasi bukan tanpa tantangan. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan polusi, dan masalah kesehatan, karena daerah perkotaan berjuang dengan masalah seperti polusi udara dan kebisingan, sanitasi yang tidak memadai, dan efek pulau panas perkotaan (Thankappan & Ambat, 2015). Tantangan lingkungan ini memiliki implikasi langsung bagi kesehatan masyarakat, berkontribusi pada insiden penyakit yang lebih tinggi seperti kondisi pernapasan dan kardiovaskular (Grasso, *et al.*, 2023). Singkatnya, urbanisasi mendorong perubahan sosial yang signifikan dengan membentuk kembali struktur sosial, norma budaya, dan kegiatan ekonomi. Meskipun menawarkan peluang untuk modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, ia juga menghadirkan tantangan terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kompleksitas dampak urbanisasi memerlukan perencanaan dan pembuatan kebijakan yang cermat untuk memanfaatkan manfaatnya sambil mengurangi efek buruknya. Sintesis penelitian ini menyoroti sifat urbanisasi yang beragam dan pengaruhnya yang mendalam pada masyarakat kontemporer.

b. Perubahan dalam peran gender

Terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Perempuan semakin aktif terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik, dan hal ini membawa perubahan

dalam pola hubungan keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga.

Lanskap peran gender telah mengalami transformasi yang signifikan, yang mengarah pada perubahan sosial mendalam yang mencerminkan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya batas keuangan yang diberikan kepada perempuan, yang telah mengurangi otoritas pria tradisional dalam struktur keluarga. Perubahan ini menunjukkan tren masyarakat yang lebih luas di mana laki-laki diberikan lebih sedikit otoritas, sementara perempuan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas keputusan keuangan dan partisipasi ekonomi (Caron & Markusen, 2016). Meningkatnya partisipasi perempuan yang sudah menikah dalam angkatan kerja berbayar telah menjadi faktor penting dalam transformasi ini. Ketika perempuan terlibat lebih banyak dalam kegiatan ekonomi, dinamika kontrol ekonomi istri-suami dan pengambilan keputusan telah bergeser, mempromosikan pendekatan yang lebih egaliter terhadap peran keluarga. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan sikap terhadap peran gender tetapi juga menyoroti perlunya mendefinisikan kembali hubungan gender dalam masyarakat kontemporer (Pande & Delhi, n.d.). Selain itu, ketegasan perempuan dalam mengekspresikan kebutuhan mereka dan menantang norma-norma moral lama menjadi lebih jelas. Keyakinan yang baru ditemukan ini sering dikaitkan dengan kemandirian ekonomi, yang memberdayakan perempuan untuk menavigasi dan mendefinisikan kembali batas-batas kaku peran gender tradisional (Pande & Delhi, n.d.). Di perkotaan India, misalnya, perempuan semakin vokal tentang hak dan aspirasi mereka, didukung oleh laki-laki perkotaan berpendidikan yang mengadvokasi kesetaraan gender. Dukungan ini menandakan perubahan penting dalam sikap laki-laki, menunjukkan gerakan kolektif menuju dinamika gender yang lebih seimbang. Namun, terlepas dari kemajuan ini, penting untuk menyadari bahwa peran gender tradisional masih bertahan di bawah permukaan. Sementara wanita perkotaan mungkin menganjurkan perubahan, norma-norma sosial yang mengakar sering menolak transformasi total,

menunjukkan bahwa perjalanan menuju kesetaraan gender sedang berlangsung dan kompleks. Singkatnya, perubahan sosial yang dihasilkan dari pergeseran peran gender beragam, meliputi peningkatan kemandirian finansial perempuan, perubahan dinamika keluarga, dan sikap masyarakat yang berkembang. Perubahan ini tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga menantang gagasan tradisional tentang maskulinitas dan otoritas, membina masyarakat yang lebih adil. Ketika dinamika ini terus berkembang, mereka kemungkinan akan membentuk diskusi masa depan seputar hubungan gender dan struktur sosial, menyoroti pentingnya penelitian dan dialog yang sedang berlangsung di bidang ini.

Evolusi peran gender telah menjadi pendorong perubahan sosial yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian di berbagai konteks budaya dan geografis. Perubahan ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, migrasi, dan perkembangan sosial-ekonomi. Salah satu katalis utama untuk mengubah peran gender adalah globalisasi, yang telah memfasilitasi transisi dari norma sosial tradisional ke modern. Di Pakistan, misalnya, globalisasi telah menyebabkan pergeseran nyata dalam peran gender lintas generasi, dengan generasi muda, khususnya Generasi Z, menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap peran non-tradisional dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Pergeseran ini sebagian dikaitkan dengan pengaruh teknologi, yang telah memberikan peluang dan platform baru bagi perempuan untuk terlibat dalam peran yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Migrasi juga memainkan peran penting dalam mengubah dinamika gender. Penelitian tentang imigran Eropa Timur di Jerman menyoroti bagaimana migrasi dapat menyebabkan restrukturisasi peran keluarga, dengan perempuan sering mengambil peran pengambilan keputusan dan pencari nafkah karena kemahiran bahasa dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Pergeseran ini menantang norma-norma gender tradisional pasca-Soviet dan menyarankan langkah menuju peran gender yang lebih liberalisasi dalam keluarga imigran (Havlin, 2015). Dalam konteks Uni Emirat Arab, perubahan sosial ekonomi yang cepat telah mendorong pergeseran antargenerasi dalam nilai-nilai gender. Wanita Emirat

semakin menavigasi ketegangan antara harapan tradisional dan peran modern, didorong oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Hal ini telah menyebabkan gerakan bertahap menuju kesetaraan gender, meskipun nilai-nilai tradisional masih memberikan pengaruh yang kuat (Alteneji, 2023). Interseksionalitas gender dengan faktor sosial lainnya seperti ras, kelas, dan agama semakin memperumit dinamika perubahan sosial. Gender tetap menjadi faktor dominan dalam membentuk pengalaman dan peluang sosial, seringkali membatasi akses bagi perempuan dan minoritas. Namun, ada upaya berkelanjutan untuk memerangi ketidaksetaraan ini dan mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif (Putra, 2009). Di pedesaan Punjab, Pakistan, pendidikan telah menjadi faktor penting dalam mengubah peran gender, terutama sejak 1980-an. Peningkatan peluang pendidikan bagi perempuan telah menyebabkan otonomi yang lebih besar dan pergeseran sikap tradisional terhadap anak perempuan, meskipun beberapa peran tradisional tetap ada (Farooq & Kayani, 2014). Komunitas Samin di Indonesia menggambarkan bagaimana faktor internal dan eksternal, seperti perbaikan ekonomi dan kemajuan teknologi, dapat menyebabkan pergeseran peran gender. Perempuan di komunitas ini telah beralih dari terbatas pada tugas rumah tangga menjadi berpartisipasi dalam kegiatan produktif dan sosial (Arsal, 2014). Secara keseluruhan, transformasi peran gender adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh segudang faktor. Meskipun ada kecenderungan umum menuju peran yang lebih egaliter, norma dan nilai-nilai tradisional terus memberikan pengaruh yang signifikan di banyak masyarakat. Interaksi globalisasi, migrasi, pendidikan, dan teknologi membentuk kembali peran gender, mengarah pada perubahan sosial yang signifikan yang mencerminkan langkah yang lebih luas menuju kesetaraan gender dan inklusivitas (Mi, n.d.)

c. Globalisasi dan teknologi informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengaruh globalisasi, telah membawa perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia. Akses mudah terhadap internet, media

sosial, dan konten digital telah mempengaruhi cara komunikasi, gaya hidup, dan budaya populer di negara ini.

Globalisasi dan teknologi informasi telah menjadi kekuatan penting yang mendorong perubahan sosial di seluruh dunia. Interaksi antara elemen-elemen ini telah membentuk kembali lanskap budaya, ekonomi, dan sosial, yang mengarah pada peluang dan tantangan. Globalisasi, seperti yang dijelaskan oleh McGrath, telah secara signifikan menghubungkan masyarakat dunia, mengurangi relevansi perbatasan nasional dan menumbuhkan ekonomi global yang mempengaruhi politik, budaya, dan organisasi sosial. Keterkaitan ini semakin dipercepat oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang telah mengubah hambatan komunikasi dan menciptakan komunitas virtual global dengan bahasa dan budayanya sendiri (Petrova & Pervukhina, 2022). Pengaruh TIK yang meluas terbukti dalam peran mereka sebagai prinsip aktif perubahan sosial, mempengaruhi semua bidang kehidupan dan mengubah norma dan hubungan sosial yang mapan (Bylieva, *et al.*, 2019). Transformasi digital masyarakat, seperti yang disorot oleh Hilbert, menandai metaparadigm modernisasi masyarakat saat ini, dengan fokus pada transformasi informasi. Pergeseran ini telah menyebabkan otomatisasi data menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti, secara signifikan berdampak pada struktur sosial ekonomi^[8]. Integrasi TIK ke dalam kehidupan sehari-hari telah memfasilitasi munculnya bentuk-bentuk baru interaksi sosial dan ekspresi budaya, terutama di kalangan pemuda, yang sangat dipengaruhi oleh platform media sosial (Petrova & Pervukhina, 2022). Gerakan sosial juga telah dibentuk kembali oleh globalisasi dan TIK. Casas mencatat bahwa TIK telah mengubah cara gerakan sosial menggunakan komunikasi publik, mempromosikan kesepakatan di antara kelompok sosial sementara berpotensi memicu konflik dengan lembaga atau pemerintah^[5]. Vinayaraj lebih lanjut menjelaskan bahwa gerakan sosial melawan globalisasi neoliberal adalah hal baru karena partisipasi warga negara dari negara maju, berfungsi sebagai tanggapan kritis terhadap infrastruktur ekonomi dan politik modal global. Namun, dampak globalisasi dan TIK tidak seragam positif. Majumdar dkk.

membahas ketegangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial, menyoroti kesenjangan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda dan tantangan pertumbuhan inklusif. Tingginya biaya inovasi teknologi dan masalah akses dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada, terutama di negara-negara berkembang. Terlepas dari tantangan ini, TIK juga memungkinkan solusi inovatif untuk perubahan sosial. Pengusaha sosial di negara berkembang telah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem inklusif, seperti keuangan mikro, untuk mengatasi masalah sosial. Ini menunjukkan potensi TIK untuk mendorong perubahan sosial yang positif ketika disesuaikan dengan konteks lokal dan norma budaya. Kesimpulannya, globalisasi dan teknologi informasi adalah kekuatan yang sangat terkait yang telah mengkatalisasi perubahan sosial yang signifikan. Sementara mereka menawarkan peluang untuk peningkatan konektivitas dan inovasi, mereka juga menimbulkan tantangan terkait dengan ketidaksetaraan dan gangguan budaya. Masa depan perubahan sosial kemungkinan akan tergantung pada bagaimana masyarakat menavigasi kompleksitas ini, menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai sosial dan inklusivitas.

d. Perubahan nilai dan norma

Nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, perubahan dalam persepsi terhadap pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam pandangan tentang identitas budaya dan agama.

Hubungan antara perubahan nilai dan norma dan perubahan sosial adalah interaksi kompleks yang mempengaruhi perilaku individu dan kolektif. Norma sosial, yang merupakan aturan tidak tertulis yang mendikte perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, dapat berubah dengan cepat sebagai respons terhadap dinamika sosial, sementara norma-norma pribadi, yang lebih mendarah daging, cenderung berkembang lebih lambat. Dinamika ini sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru. Di bawah ini, kami

mengeksplorasi mekanisme perubahan norma, peran nilai, dan implikasinya terhadap perubahan sosial.

1) **Mekanisme Perubahan Norma**

- a) **Perubahan Norma Cepat vs Lambat:** Norma sosial dapat berubah dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, seperti yang ditunjukkan dalam pengaturan eksperimental seperti permainan dilema tahanan berulang, di mana peserta menyesuaikan norma sosial mereka berdasarkan kerja sama rekan-rekan mereka. Sebaliknya, norma pribadi, yang dipengaruhi oleh kepribadian individu dan faktor situasional, berubah lebih bertahap (Batzke & Ernst, 2024).
- b) **Peran Informasi:** Peningkatan informasi dapat mengurangi inersia dalam perubahan norma, terutama dalam pengaturan di mana nilai-nilai umum dibagikan. Ini menunjukkan bahwa memberikan lebih banyak informasi dapat memfasilitasi adaptasi norma-norma sosial yang lebih cepat untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai masyarakat yang berkembang (Shadmehr, 2023).
- c) **Munculnya dari Konvensi:** Norma sering muncul dari konvensi, mendapatkan kekuatan normatif dari waktu ke waktu. Proses ini dapat membuat mereka tahan terhadap perubahan, terutama ketika mereka mempromosikan hasil egaliter, bahkan dalam menghadapi perubahan insentif ekonomi (Przepiorka, *et al.*, 2022).

2) **Nilai sebagai Faktor Penstabil**

- a) **Nilai dan Stabilitas Norma:** Nilai memainkan peran penting dalam menstabilkan norma sosial. Mereka bertindak sebagai kekuatan penuntun yang memungkinkan norma bertahan melalui perubahan lingkungan. Namun, jika nilai-nilai yang mendasarinya bergeser, norma dapat berkembang atau menghilang sama sekali (Utrecht, 2022).

- b) **Konsonan dengan Nilai Sosial:** Penyelarasan antara nilai-nilai individu dan sistem nilai sosial yang lebih luas sangat penting untuk kesesuaian sukarela dengan norma. Perbedaan antara ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kriminal dan ketegangan sosial, menyoroiti pentingnya penyelarasan nilai dalam menjaga ketertiban sosial (Fîrţală & Cristea, 2023).
- 3) **Implikasi untuk Perubahan Sosional**
- a) **Penggerak Perubahan Norma:** Norma sosial bersifat statis dan dinamis, memberikan standar yang stabil sambil terus berkembang. Aktivis dan gerakan sosial sering terlibat dengan norma-norma untuk mendorong perubahan sosial, mengatasi masalah seperti hak gender dan pernikahan dini (Green, 2024).
 - b) **Norma dalam Pembangunan:** Dalam konteks gender dan pembangunan, norma sosial adalah pengungkit utama untuk perubahan. Gerakan feminis dan hak-hak perempuan telah berperan penting dalam mengubah norma, menunjukkan kekuatan tindakan kolektif dalam mendorong perubahan sosial (Cookson, *et al.*, 2023).
 - c) **Pertimbangan Etis:** Intervensi pergeseran norma harus mempertimbangkan implikasi etis, seperti nilai-nilai siapa yang diprioritaskan dan bagaimana resistensi dikelola. Intervensi ini secara tidak sengaja dapat memperkuat ketidakadilan jika tidak dirancang dan diterapkan dengan cermat (Igras, *et al.*, 2021).

Sementara perubahan norma sosial adalah pendorong kuat perubahan sosial, penting untuk mengenali potensi perlawanan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Norma-norma sangat tertanam dalam konteks budaya dan sosial, dan perubahannya dapat dipenuhi dengan oposisi, terutama ketika mereka menantang struktur kekuasaan yang mapan atau keyakinan yang dipegang secara mendalam. Memahami interaksi antara norma, nilai, dan perubahan

sosial sangat penting untuk merancang intervensi efektif yang mempromosikan transformasi sosial yang positif.

Perubahan nilai dan norma adalah aspek fundamental dari perubahan sosial, yang mencerminkan sifat dinamis masyarakat saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan signifikan dari struktur sosial, termasuk pergeseran norma, nilai, dan produk budaya, yang penting untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi dengan realitas baru. Salah satu contoh menonjol dari hal ini adalah gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an di Amerika Serikat, yang mencontohkan tuntutan kolektif untuk kesetaraan dan keadilan rasial. Gerakan-gerakan ini tidak hanya menantang norma-norma sosial yang ada tetapi juga mendefinisikan kembali nilai-nilai masyarakat mengenai ras dan keadilan, menggambarkan bagaimana gerakan sosial dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan sosial yang lebih luas. Gerakan keadilan sosial lebih lanjut menggambarkan evolusi nilai-nilai masyarakat yang sedang berlangsung, karena mereka mengadvokasi hak dan kesetaraan kelompok yang terpinggirkan. Gerakan-gerakan ini sering berusaha mengubah norma dan praktik sosial yang berbahaya, sehingga membentuk kembali lanskap sosial menjadi lebih inklusif dan adil. Gerakan feminis juga memainkan peran penting dalam konteks ini, karena mereka menantang norma-norma gender yang membatasi dan berjuang untuk kesetaraan gender, bertindak sebagai agen kunci perubahan sosial. Pergeseran budaya, didorong oleh gerakan-gerakan ini, mencerminkan perubahan signifikan dalam nilai-nilai dan norma masyarakat dari waktu ke waktu. Pergeseran ini seringkali merupakan hasil dari tindakan kolektif dan menyoroti keterkaitan berbagai gerakan sosial dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik. Perubahan norma, yang mengacu pada proses di mana norma-norma sosial yang ditetapkan diubah, adalah hasil langsung dari pergeseran budaya ini dan sering didorong oleh perubahan nilai atau perilaku masyarakat. Selain itu, norma sosial, yang merupakan keyakinan bersama secara kolektif tentang perilaku yang diharapkan dalam suatu kelompok, memainkan peran penting dalam membentuk tindakan individu dan standar masyarakat. Evolusi norma-norma ini

biasanya merupakan proses dari bawah ke atas, dipengaruhi oleh tindakan dan persepsi individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembusukan norma terjadi ketika individu atau kelompok menantang dan mengganggu norma yang ditetapkan, yang mengarah pada perubahan sosial yang signifikan^[10]. Singkatnya, interaksi antara perubahan sosial dan evolusi nilai dan norma adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, didorong oleh berbagai gerakan dan tindakan kolektif yang membentuk kembali harapan dan perilaku masyarakat.

2. Munculnya budaya konsumsi

Perubahan sosial budaya di Indonesia juga mencakup munculnya budaya konsumsi yang lebih kuat. Perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat telah mengubah pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya, termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan gaya hidup modern. Munculnya budaya konsumsi adalah fenomena multifaset yang telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, sangat mempengaruhi identitas individu dan kolektif, struktur masyarakat, dan sistem ekonomi. Budaya ini ditandai dengan memprioritaskan konsumsi sebagai aspek sentral kehidupan, membentuk nilai-nilai, perilaku, dan status sosial. Transisi dari konsumsi material ke konsumsi simbolis, peran pergerakan konsumen, dan implikasi sosial ekonomi dari konsumsi adalah aspek kunci dari transformasi ini. Di bawah ini, kami mengeksplorasi dimensi ini secara rinci.

1) Evolusi Masyarakat Konsumen

- a) **Perkembangan Sejarah:** Konsumsi secara historis menjadi penentu status sosial, berkembang dari praktik material menjadi fenomena sosial budaya. Pergeseran ini ditandai dengan transisi dari konsumsi nyata ke konsumsi simbolis dan munculnya hedonisme konsumen, di mana konsumsi bukan hanya tentang memperoleh barang tetapi juga tentang pengalaman dan makna yang melekat padanya (Olena & Sciences, 2022).
- b) **Pergantian Budaya:** Pergantian budaya dalam studi konsumsi menekankan aspek simbolis, material, dan praktis konsumsi, menyoroti perannya dalam hierarki dan dominasi

sosial. Pergeseran ini telah mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang konsumsi di luar transaksi ekonomi belaka, dengan fokus pada ketertanamannya dalam konteks sosial dan budaya (Warde, 2022).

2) **Gerakan Sosial dan Budaya Konsumen**

- a) **Dampak Gerakan Sosial Baru:** Gerakan sosial baru telah secara signifikan mempengaruhi budaya konsumen dengan membentuk kembali budaya pasar, ideologi konsumen, dan institusi makro. Gerakan-gerakan ini menantang pola konsumsi tradisional dan menganjurkan perubahan sosial, mendorong evaluasi ulang teori budaya konsumen melalui lensa politik dan kolektif.
- b) **Aktivisme Konsumen:** Gerakan konsumen dan aktivisme telah memainkan peran penting dalam mengubah gaya hidup dan konsumsi kelompok, menyoroti interaksi antara budaya konsumen dan perubahan sosial (Patsiaouras, 2022) ^[3].

3) **Implikasi Sosio-Ekonomi dan Budaya**

- a) **Komodifikasi dan Ketidaksetara:** Komodifikasi barang dan jasa telah dikaitkan dengan meningkatnya ketidaksetaraan material, dengan praktik konsumsi yang mencerminkan dan memperkuat hierarki sosial. Konsep 'mode penyediaan' menawarkan kerangka kerja untuk memahami dinamika ini dan dampaknya terhadap perubahan makro-sosial (Warde, 2022).
- b) **Proses Budaya dan Ekonomi:** Budaya konsumsi terkait dengan proses ekonomi, terutama dalam konteks perubahan pasar di wilayah seperti Uni Eropa. Hubungan ini menggarisbawahi pengaruh ganda faktor budaya dan ekonomi terhadap praktik konsumsi (Pieszak, 2020).

- 4) **Gender dan Identitas dalam Konsumsi:** Budaya konsumen historis dan kontemporer telah dibentuk oleh dinamika gender, dengan praktik konsumsi sering mencerminkan dan memperkuat identitas gender. Desain budaya material, seperti cita-cita ibu rumah

tangga rasional tahun 1950-an, menggambarkan bagaimana konsumsi telah digunakan untuk mengartikulasikan identitas gender (D'Enbeau, 2009).

Sementara budaya konsumsi telah menjadi kekuatan dominan dalam masyarakat modern, itu bukan tanpa kritik dan tantangannya. Munculnya gerakan konsumsi yang berkelanjutan dan etis mencerminkan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial dari konsumsi berlebihan. Gerakan-gerakan ini menganjurkan pendekatan konsumsi yang lebih rasional dan sadar, menekankan perlunya menyeimbangkan keinginan material dengan nilai-nilai spiritual dan etika^[1]. Perspektif ini menyoroti potensi konsumsi menjadi tempat perlawanan dan transformasi, bukan hanya cerminan dari struktur sosial yang ada.

3. Diversifikasi agama dan budaya

Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang kaya. Perubahan sosial budaya tercermin dalam interaksi antara berbagai kelompok agama dan budaya, yang mempengaruhi cara hidup, adat istiadat, seni dan budaya, serta toleransi dan dialog antarumat beragama.

Interaksi antara perubahan sosial, diversifikasi agama, dan diversifikasi budaya adalah proses yang kompleks dan dinamis yang membentuk masyarakat dengan cara yang mendalam. Unsur-unsur ini saling mempengaruhi melalui berbagai mekanisme, termasuk pergeseran norma-norma sosial, evolusi praktik keagamaan, dan adaptasi identitas budaya. Interaksi ini dapat menyebabkan harmoni dan konflik dalam masyarakat, tergantung pada bagaimana perubahan ini dikelola dan dirasakan oleh kelompok yang berbeda.

1) **Perubahan Sosial dan Diversifikasi Agama**

- a) Perubahan sosial sering mengarah pada transformasi dalam praktik dan interpretasi agama. Misalnya, di India, proses globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi praktik keagamaan, yang mengarah pada perubahan bertahap dalam cara Hindu, Jainisme, dan Buddhisme dipraktikkan, terlepas dari tradisi mereka yang mengakar (Zepa, 2022).

- b) Diversifikasi sosial telah menyebabkan pergeseran dari kepatuhan agama yang ketat, dengan sekularisasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan ekspresi budaya, menantang stabilitas politik yang bergantung pada keseragaman agama (Asgarkhani, 2018).
- c) Pengaruh struktur sosial pada interpretasi agama adalah signifikan, seperti yang terlihat dalam konteks praktik kunjungan kubur, di mana perubahan masyarakat telah menyebabkan interpretasi dan praktik baru dalam kerangka agama (Dergisi, 2022).

2) **Diversifikasi Budaya dan Dinamika Sosial**

- a) Keragaman budaya memperkaya kehidupan sosial dengan memperkenalkan berbagai elemen budaya berwujud dan tidak berwujud, seperti arsitektur, makanan, dan festival, yang dibentuk oleh interaksi latar belakang sosial yang berbeda dan ceruk ekologis (Qureshi, 2023).
- b) Dalam masyarakat multikultural seperti desa Sibolangit, keragaman budaya dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, memerlukan moderasi agama dan pemahaman multikultural untuk menjaga keharmonisan sosial (Telaumbanua, *et al.*, 2023).
- c) Proses migrasi dan adaptasi lebih lanjut berkontribusi pada diversifikasi budaya, karena individu membawa latar belakang budaya mereka ke lingkungan baru, mempengaruhi budaya lokal dan menciptakan lanskap budaya yang dinamis (Riya Bhorkar, 2024).

3) **Interaksi Diversifikasi Agama dan Budaya**

- a) Diversifikasi praktik keagamaan sering sejajar dengan diversifikasi budaya, seperti yang terlihat dalam pengembangan ekspresi budaya baru dan pemecahan tabu agama di Iran, yang mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas (Dergisi, 2022).
- b) Konsep superdiversitas menyoroti bagaimana perubahan sosial dan budaya yang cepat, didorong oleh globalisasi dan

kemajuan teknologi, dapat mengarah pada pencampuran budaya dan mundur ke identitas tradisional, mempengaruhi kesinambungan agama dan budaya (Eriksen, 2022).

- c) Dalam konteks masyarakat modern, keragaman budaya semakin dipandang sebagai aspek fundamental dalam memahami fenomena agama, karena memberikan kerangka kerja untuk menganalisis transformasi dan adaptasi praktik keagamaan dalam pengaturan budaya yang beragama (Moniz, 2019).

Sementara interaksi antara perubahan sosial, diversifikasi agama, dan diversifikasi budaya dapat mengarah pada hasil positif seperti ekspresi budaya yang diperkaya dan kohesi sosial yang lebih besar, itu juga dapat menimbulkan tantangan. Ini termasuk potensi konflik yang timbul dari perbedaan budaya dan agama, serta destabilisasi identitas tradisional. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pemahaman yang bernuansa tentang dinamika yang mendasarinya dan komitmen untuk menumbuhkan inklusivitas dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragama.

C. Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial

Istilah perubahan sosial digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam interaksi dan interelasi manusia. Masyarakat adalah jaringan hubungan sosial dan karenanya perubahan sosial berarti perubahan dalam sistem hubungan sosial. Hal ini dipahami dalam kaitannya dengan proses sosial dan interaksi sosial serta organisasi sosial. August Comte, bapak Sosiologi, mengajukan dua masalah – pertanyaan tentang statika sosial dan pertanyaan tentang dinamika sosial, apa itu dan bagaimana perubahannya. Para sosiolog tidak hanya menguraikan struktur masyarakat tetapi juga berupaya mengetahui penyebabnya. Menurut Morris Ginsberg perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial. (Ginsberg, 1958)

International Encyclopedia of the Social Science memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, atau pola tindakan dan interaksi dalam masyarakat. Perubahan dapat terjadi pada norma, nilai, produk budaya, dan simbol dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi pada norma, nilai, produk budaya, dan simbol dalam masyarakat.

Definisi lain mengenai perubahan juga menunjukkan bahwa perubahan terutama berarti perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Institusi, pola interaksi, pekerjaan, aktivitas waktu luang, peran, norma, dan aspek masyarakat lainnya dapat berubah seiring berjalannya waktu sebagai akibat dari proses perubahan sosial. Ketika mendefinisikan perubahan sosial, kita dapat mengatakan bahwa perubahan sosial pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan tanpa mengacu pada kualitas perubahan. Perubahan dalam masyarakat berkaitan/terkait dengan perubahan budaya, sehingga terkadang ada gunanya membicarakan ‘perubahan sosial budaya’.

Perubahan sosial dapat bervariasi dalam cakupan dan kecepatannya. Kita bisa membicarakan perubahan skala kecil atau besar. Perubahan dapat terjadi dalam pola siklus, misalnya ketika terjadi kembali sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi administratif. Hal ini juga bisa menjadi revolusioner. Perubahan revolusioner terlihat ketika terjadi penggulingan pemerintahan di suatu negara. Perubahan juga dapat mencakup perubahan jangka pendek (misalnya tingkat migrasi) serta perubahan jangka panjang (dalam struktur ekonomi). Kita dapat memasukkan perubahan sosial, baik pertumbuhan maupun penurunan keanggotaan dan ukuran lembaga-lembaga sosial. Perubahan dapat mencakup proses berkelanjutan seperti spesialisasi, birokratisasi, dan juga mencakup proses terputus-putus seperti penemuan teknis atau sosial tertentu yang muncul pada suatu waktu.

Perubahan juga memiliki cakupan yang bervariasi, karena perubahan tersebut dapat mempengaruhi banyak aspek masyarakat dan mengganggu keseluruhan sistem sosial seperti proses industrialisasi yang telah mempengaruhi banyak aspek masyarakat. Ada perubahan yang terjadi dengan cepat, namun ada juga yang membutuhkan waktu lama. Banyak negara-negara barat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadi negara industri, namun negara-negara berkembang berusaha melakukannya dengan lebih cepat. Mereka melakukan hal ini dengan meminjam atau mengadaptasi dari negara-negara yang telah mencapai hal tersebut.

Saat ini, sebagian besar sosiolog berasumsi bahwa perubahan adalah hal yang wajar, tak terelakkan, dan selalu ada dalam kehidupan setiap masyarakat. Ketika kita melihat perubahan sosial, kita tidak fokus pada perubahan pengalaman individu, namun pada variasi dalam struktur sosial,

institusi dan hubungan sosial. Untuk memahami perubahan sosial secara jelas, berikut beberapa pengertian perubahan sosial.

M. E. Jones, “Perubahan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi, atau modifikasi, segala aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial, atau organisasi sosial.”

Manjumdar, “Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu mode atau modus baru, baik yang memodifikasi atau menggantikan yang lama, dalam kehidupan bermasyarakat, atau dalam berjalannya masyarakat.”

MacIver dan Page, “Perubahan sosial mengacu pada suatu proses yang responsif terhadap berbagai jenis perubahan, terhadap perubahan kondisi kehidupan yang disebabkan oleh manusia, terhadap perubahan sikap dan kepercayaan manusia, dan terhadap perubahan yang melampaui kendali manusia terhadap perubahan biologis dan sifat fisik segala sesuatu.”

Dengan demikian, setiap perubahan, perbedaan atau modifikasi yang terjadi pada suatu situasi atau suatu objek dari waktu ke waktu dapat disebut perubahan. Istilah perubahan sosial digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam interaksi dan interelasi manusia. Masyarakat adalah jaringan hubungan sosial dan oleh karena itu perubahan sosial jelas berarti perubahan dalam sistem hubungan sosial. Hubungan sosial dipahami dalam kaitannya dengan proses sosial dan interaksi sosial serta organisasi sosial. Dengan demikian, istilah perubahan sosial digunakan untuk menggambarkan variasi dalam interaksi sosial, proses sosial, dan organisasi sosial. Ini mencakup perubahan struktur dan fungsi masyarakat.

Pendidikan dan perubahan sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial melalui pengajaran nilai-nilai yang mendorong perubahan sosial positif. Sebaliknya, perubahan sosial dapat mempengaruhi pendidikan dengan mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Nasith UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pendidikan dijelaskan sebagai proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, teori-teori dalam sosiologi sangat menarik dijadikan pisau analisis dalam penelitian pendidikan

terutama interaksi sosial antar peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, antar guru dan peserta didik dan seluruh stake holders yang terlibat dalam proses pendidikan. Namun, penelitian dalam bidang ini masih terasa kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang intensif dan penelitian yang mendalam tentang hal tersebut.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial, terutama melalui kerangka kerja yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesadaran kritis. Konsep pendidikan untuk perubahan sosial menyoroti perlunya mengembangkan praktik pendidikan yang memprioritaskan transformasi sosial daripada kepentingan kapitalis, yang sering mendorong pasar dan eksploitasi dalam sistem pendidikan (Liu, *et al.*, 2022). Perspektif kritis ini sangat penting untuk memahami bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil. Pendidikan keadilan sosial adalah pendekatan vital yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan ke dalam praktik pengajaran, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran mereka dan membina lingkungan pendidikan yang demokratis (Hyttén & Bettez, 2011). Ini sejalan dengan pendidikan transformatif, yang berusaha menciptakan perubahan signifikan dengan menumbuhkan kesadaran kritis dan memotivasi individu untuk mengambil tindakan sosial. Prinsip-prinsip pedagogis Freirian lebih lanjut mendukung hal ini dengan menekankan pentingnya memberdayakan peserta didik untuk mengenali dan menantang ketidakadilan sosial, sehingga meningkatkan kapasitas mereka untuk memfasilitasi perubahan dalam komunitas mereka. Aspek kunci dari pembelajaran transformatif adalah transformasi perspektif, seperti yang diartikulasikan oleh Jack Mezirow. Proses ini melibatkan individu yang mengevaluasi kembali keyakinan dan asumsi mereka, yang sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah sosial dan peran mereka sendiri di dalamnya (Regmi, 2007). Advokasi dalam pendidikan juga memainkan peran penting, karena melibatkan mempromosikan kebijakan dan praktik yang memajukan keadilan sosial dan kesetaraan, memastikan bahwa pengaturan pendidikan inklusif dan mendukung semua siswa. Selain itu, konsep interseksionalitas sangat penting dalam memahami bagaimana berbagai identitas sosial—seperti ras, gender, dan kelas—bersinggungan untuk membentuk pengalaman individu tentang penindasan

dan hak istimewa dalam konteks pendidikan (Bhopal & Preston, 2012). Kerangka kerja ini memungkinkan pendidik untuk mengatasi sifat multifaset ketidaksetaraan dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa mereka. Kesetaraan dalam pendidikan pada dasarnya adalah tentang keadilan, memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk sukses (Marvin W. Berkowitz, *et al.*, 2014). Prinsip ini sangat penting dalam memerangi ketidaksetaraan sistemik, yang mengacu pada disparitas mengakar yang mempengaruhi kelompok terpinggirkan. Dengan mengatasi kesenjangan ini melalui praktik pendidikan yang memprioritaskan perubahan sosial, pendidik dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan adil. Singkatnya, pendidikan yang dilihat melalui lensa perubahan sosial mencakup berbagai pendekatan yang secara kolektif bertujuan untuk memberdayakan individu, mempromosikan kesetaraan, dan menantang ketidakadilan sistemik, yang pada akhirnya menumbuhkan lanskap pendidikan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab secara sosial.

D. Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya

Perubahan social dan perubahan kebudayaan pada hakikatnya sulit untuk dibedakan karena keduanya merupakan kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain, namun beberapa sosiolog membedakan perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan dalam struktur sosial, (termasuk perubahan ukuran masyarakat) atau dalam institusi sosial tertentu, atau dalam hubungan antar institusi. Mereka merasa bahwa perubahan sosial terutama mengacu pada perilaku manusia yang sebenarnya. Perubahan budaya di sisi lain mengacu pada variasi dalam fenomena budaya seperti pengetahuan dan gagasan, seni, agama, doktrin moral, nilai-nilai, kepercayaan, sistem simbol dan sebagainya. Pembedaannya bersifat abstrak, karena dalam banyak situasi sulit, atau hampir tidak mungkin menentukan jenis perubahan apa yang sedang terjadi. Misalnya, pertumbuhan teknologi modern sebagai bagian dari kebudayaan sangat erat kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi, salah satu bagian penting dari masyarakat. Sementara itu Nanang (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara perubahan social dan perubahan budaya. Perubahan social adalah bagian

dari perubahan budaya. Namun demikian perubahan social dan perubahan budaya yang terjadi dalam Masyarakat saling berkaitan, tidak ada Masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa ada Masyarakat.

Pendidikan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberdayakan individu. Melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, siswa dapat melihat peran mereka sendiri dalam transformasi. Perubahan masyarakat berasal dari transformasi kolektif individu-individu dalam masyarakat itu. Hari ini telah menjadi sekuler. Ini adalah lembaga independen sekarang. Pendidikan telah terutama berperan dalam mempersiapkan jalan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan telah membawa perubahan fenomenal dalam setiap aspek kehidupan manusia. Francis J. Brown mengatakan bahwa Pendidikan adalah proses yang membawa perubahan perilaku masyarakat. Ini adalah proses yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. (Raj Lakshmi, 2018)

Interaksi antara perubahan sosial dan perubahan budaya dalam pendidikan adalah masalah multifaset yang membutuhkan pemahaman bernuansa dari berbagai perspektif pendidikan. Perspektif sosiokultural menekankan peran penting yang dimainkan konteks sosial dan budaya dalam membentuk pendidikan sains, menganjurkan metodologi seperti dialog kogenaratif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa tetapi juga menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan kurikulum sains, sehingga memperluas identitas dan peran siswa di dalam kelas. Secara paralel, perspektif ekokultural menyoroti pentingnya faktor ekologi dan budaya dalam membentuk identitas dan pembelajaran matematika. Perspektif ini menggarisbawahi bagaimana rasa memiliki dan identitas individu dipengaruhi oleh konteks budaya mereka, yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman matematika yang kuat. Kedua perspektif menganjurkan praktik pendidikan yang responsif terhadap beragam latar belakang siswa, sehingga memfasilitasi perubahan budaya melalui pendidikan. Selain itu, konsep tanggung jawab moral dalam pendidikan menyatakan bahwa pendidik memiliki kewajiban etis untuk membentuk nilai-nilai publik dan mendorong pertumbuhan siswa.

Tanggung jawab ini sangat relevan dalam konteks perubahan sosial, karena menyerukan para pendidik untuk terlibat secara aktif dalam transformasi praktik pendidikan untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Transformasi pendidikan itu sendiri diperlukan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang beragam, memastikan bahwa sistem pendidikan beradaptasi dengan lanskap masyarakat yang berubah. Relevansi kurikuler adalah aspek penting lain yang menghubungkan perubahan sosial dan budaya. Menyelaraskan konten pendidikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan sangat penting untuk mendorong keterlibatan dan kesuksesan di antara siswa. Penyelarasan ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan, mengakui perubahan yang tak terhindarkan dan perlunya kemampuan beradaptasi. Pedagogi yang responsif secara budaya, pengajaran yang relevan secara budaya, dan pedagogi yang menopang budaya adalah semua pendekatan yang berusaha memasukkan referensi budaya siswa ke dalam proses pembelajaran. Strategi pedagogis ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan efektif, terutama di ruang kelas yang semakin beragam. Dengan memusatkan pengalaman hidup siswa, pendidik dapat meningkatkan keterlibatan dan mempromosikan kesuksesan akademis. Singkatnya, integrasi perspektif sosiokultural dan ekokultural, bersama dengan komitmen terhadap tanggung jawab moral dan relevansi kurikuler, sangat penting untuk mendorong perubahan sosial dan budaya dalam pendidikan. Dengan mengadopsi praktik yang responsif secara budaya, pendidik dapat menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung beragam identitas siswa mereka, yang pada akhirnya mengarah ke lanskap pendidikan yang lebih adil.

Perubahan sosial dan budaya dalam pendidikan adalah proses multifaset yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai perspektif pendidikan. Perspektif sosiokultural menekankan peran konteks sosial dan budaya dalam membentuk pengalaman pendidikan, khususnya dalam pendidikan sains. Pendekatan ini menyoroti bagaimana dialog kogeneratif dapat meningkatkan kualitas pengajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memperluas identitas terkait sains, sehingga menantang pandangan tradisional tentang sains dan pendidikan. Secara paralel, perspektif ekokultural menggarisbawahi pentingnya ekologi dan

budaya dalam membentuk identitas dan pembelajaran matematika. Ini menggambarkan bagaimana rasa memiliki dan identitas seseorang terkait dengan praktik budaya mereka, yang secara signifikan dapat mempengaruhi pengalaman pendidikan mereka. Perspektif ini sangat penting untuk menumbuhkan identitas budaya dan matematika yang sehat, terutama dalam lingkungan pendidikan yang beragam. Perubahan pendidikan secara inheren terkait dengan pengakuan praktik masa lalu sambil beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Ini membutuhkan penghormatan terhadap konteks historis, kemampuan beradaptasi, dan pengakuan akan perubahan yang tak terhindarkan. Transformasi ini sangat penting untuk mengatasi beragam kebutuhan siswa dan menyelaraskan praktik pendidikan dengan nilai-nilai masyarakat yang berkembang, sehingga berkontribusi pada perubahan budaya yang lebih luas. Pedagogi yang responsif secara budaya memainkan peran penting dalam konteks ini dengan mengintegrasikan referensi budaya siswa ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan tetapi juga memastikan bahwa praktik mengajar relevan dengan latar belakang siswa, sehingga mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya, pendidikan keadilan sosial berusaha untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial melalui kurikulum dan pedagogi, memberdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka dan menumbuhkan pemikiran kritis tentang isu-isu sosial¹⁶. Pendidikan multikultural melengkapi perspektif ini dengan mempromosikan keragaman dan inklusi dalam kurikulum. Ini bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki peluang yang sama untuk keberhasilan akademis. Kerangka kerja ini mendorong integrasi berbagai perspektif budaya, yang penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Akhirnya, literasi ekuitas sangat penting untuk mengenali dan mengatasi ketidakadilan dalam pengaturan pendidikan. Ini memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas, yang merupakan dasar untuk mencapai perubahan sosial dan budaya. Dengan mensintesis perspektif ini, pendidik dapat menciptakan lanskap pendidikan yang lebih adil dan responsif yang tidak hanya mengakui tetapi secara aktif terlibat dengan kompleksitas perubahan sosial dan budaya.

a. Pendidikan di Era Sekarang

Pendidikan di era digital menandai perubahan besar dalam cara pendidikan dirancang, disampaikan, dan diakses. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan telah melampaui batas-batas fisik dan geografis, memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap pengetahuan. Teknologi digital telah mengubah ruang kelas tradisional menjadi lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif, di mana siswa dapat belajar melalui berbagai platform digital dan media yang inovatif (Selwyn, 2023; Bates, 2022).

Era digital juga memperkenalkan konsep baru dalam pendidikan, seperti pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) dan pendidikan berbasis kompetensi. Pembelajaran seumur hidup menjadi semakin relevan karena teknologi terus berkembang dan mengubah dunia kerja dengan cepat. Dalam konteks ini, individu perlu terus mengembangkan keterampilan baru untuk tetap kompetitif di pasar kerja global. Pendidikan berbasis kompetensi, yang menekankan penguasaan keterampilan praktis dibandingkan hanya menguasai teori, semakin diminati karena dianggap lebih relevan dengan kebutuhan industri di era digital (Jenkins, 2023; OECD, 2023).

Selain itu, digitalisasi telah memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih baik. Dengan bantuan analisis data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI), pendidik dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Misalnya, platform *e-learning* seperti Khan Academy menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan materi yang tepat bagi siswa berdasarkan kemajuan belajar mereka (Selwyn, 2023). Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan memberdayakan bagi siswa.

Namun, transisi ke era digital juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet berkualitas tinggi, yang dapat memperburuk ketimpangan dalam akses pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan institusi pendidikan perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang

memadai tersedia bagi semua siswa, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang (Bates, 2022; OECD, 2023).

Di sisi lain, era digital juga mempengaruhi bagaimana pendidik dan siswa berinteraksi. Pendidikan tidak lagi sekadar kegiatan satu arah dari guru ke siswa, tetapi lebih interaktif dan kolaboratif. Teknologi seperti forum diskusi *online*, aplikasi pembelajaran kolaboratif, dan media sosial memungkinkan siswa untuk berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama dalam proyek-proyek secara lebih mudah dan luas. Hal ini memperkaya pengalaman belajar dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat penting di dunia kerja yang semakin terhubung secara global (Jenkins, 2023).

Pendidikan saat ini difokuskan untuk mempromosikan nilai-nilai yang kompetitif dan memiliki makna konsumen pasar massal. Dalam lima dekade terakhir, Pendidikan kita telah menghasilkan sejumlah besar profesional, akademisi, dan teknokrat yang bersemangat tentang bidang mereka dan telah meningkatkan status negara baik secara nasional maupun internasional melalui penggunaan sistem pendidikan yang ada. Ilmuwan top, dokter, insinyur, murid, guru, dll. Mereka sebenarnya bukan saja mendapatkan Pendidikan luar negeri tetapi juga di dalam negeri sendiri. Ini bukan pertanyaan tentang sejauh mana pendidikan menyediakan atau gagal menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang tetapi ini adalah pertanyaan tentang pendidikan yang menyediakan teknologi modern untuk kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan. Ini adalah pertanyaan tentang kualitas pendidikan.

Alih-alih hanya melihat populasi yang tumbuh sebagai beban, kita harus mengubah populasi menjadi aset dan kekuatan serta berusaha mengendalikan pertumbuhannya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pembangunan manusia.

Tiga kekurangan utama dalam sistem pendidikan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan saat ini tidak menghasilkan atau membentengi jenis pengetahuan yang relevan dengan perubahan masyarakat kita.
- (2) Teknologi yang diasosiasikan dengan kumpulan pengetahuan tertentu tidak sesuai dengan tahap perkembangan kita dalam hal potensi lapangan kerja atau permintaan investasinya.

- (3) Pendidikan telah gagal memberikan kerangka nilai yang dapat mempersiapkan politisi, birokrat, teknokrat, dan profesional yang berkomitmen yang dapat diandalkan oleh bangsa kita untuk sistem layanan dukungan yang canggih untuk berguna dalam membawa negara ke tingkat tertinggi.

Meskipun pendidikan tidak menjamin status yang tinggi dan posisi yang lebih tinggi untuk semua orang, namun tanpa pendidikan, seseorang tidak mungkin mencapai mobilitas sosial. Gore menegaskan bahwa pendidikan berperan dalam pemerataan kesempatan dalam tiga cara.

- (1) Dengan memungkinkan bagi semua orang yang berkeinginan untuk mengenyam pendidikan dan mampu memanfaatkan fasilitas itu;
- (2) Dengan mengembangkan isi pendidikan yang akan mendorong perkembangan pandangan ilmiah dan objektif.
- (3) Dengan menciptakan lingkungan sosial yang saling bertoleransi berdasarkan agama, bahasa, kasta, kelas, dll. untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mobilitas sosial kepada semua individu dalam masyarakat, dan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik sangatlah penting.

Bagaimana pendidikan terkait dengan kesetaraan kesempatan dapat dilihat berdasarkan temuan sebuah studi empiris yang dilakukan di delapan negara bagian pada tahun 1967 tentang latar belakang sosial siswa (umur, jenis kelamin, kasta, pekerjaan ayah, pendidikan ayah, dll) belajar di berbagai tingkatan sekolah menengah, perguruan tinggi dan perguruan tinggi profesional. Studi ini menyajikan dua proposisi *posse-group*:

- (1) Pendidikan diprioritaskan pada kelompok kerah putih, dan anak pada kelompok ini lebih banyak menggunakan fasilitas pendidikan dibandingkan dengan kelompok lain, dan anak pada kelompok ini lebih banyak menggunakan fasilitas pendidikan dibandingkan dengan kelompok lain;
- (2) Pendidikan tersedia secara berbeda bagi mereka yang bukan termasuk kelompok kerah putih (lihat Gore, 1994:33). Jika proposisi pertama benar, hal itu mungkin menggarisbawahi tidak relevannya

pendidikan dengan kelompok non-kerah putih dalam masyarakat kita.

Pendidikan di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang berdampak pada kualitas dan efektivitasnya. Masalah-masalah ini berkisar dari masalah sistemik seperti kompleksitas kurikulum dan kualitas guru hingga kekurangan infrastruktur dan hambatan sosial budaya. Meskipun reformasi dan inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk meningkatkan lanskap pendidikan, hambatan signifikan tetap ada. Di bawah ini, kami mengeksplorasi isu-isu utama dan solusi potensial dalam sistem pendidikan Indonesia.

b. Kurikulum dan Kualitas Pendidikan

- Sistem pendidikan Indonesia dikritik karena kurikulumnya yang kompleks dan sering berubah, yang tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam penyampaian pendidikan (Ni Nyoman Perni, *et al.*, 2024).
- Kualitas pendidikan semakin terhambat oleh metode pengajaran yang monoton dan fasilitas yang tidak memadai, mengakibatkan hasil belajar siswa yang tidak memuaskan.
- Hasil PISA 2022 menyoroti penurunan kinerja akademik, menggarisbawahi perlunya reformasi kurikuler dan peningkatan kualitas pengajaran (Bilad, *et al.*, 2024) (Nandang Mustafa, 2023).

c. Kualitas Guru dan Pengembangan Profesional

- Kualitas guru merupakan perhatian yang signifikan, dengan banyak pendidik tidak memiliki keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk memberikan kurikulum secara efektif (Naibaho, 2023).
- Inisiatif “Merdeka Belajar” bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan otonomi yang lebih besar dan kesempatan belajar profesional kepada guru, mempromosikan metode pengajaran yang inovatif dan penilaian holistik.

- d. **Infrastruktur dan Alokasi Sumber Daya**
- Infrastruktur dan sumber daya yang tidak memadai lazim, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, berkontribusi pada ketidaksetaraan pendidikan (Manajemen & Islam, n.d.).
 - Investasi dalam memodernisasi fasilitas sekolah dan menyediakan materi pembelajaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan hasil pendidikan.
- e. **Tantangan Sosial-Budaya dan Geografis**
- Geografi dan tatanan sosial Indonesia yang beragam menimbulkan tantangan unik, dengan perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan ^[7].
 - Tabu budaya dan norma sosial juga menghambat penyampaian program pendidikan tertentu secara efektif, seperti pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ^[6].
- f. **Pendidikan Multikultural dan Kesetaraan Sosif**
- Integrasi pendidikan multikultural sangat penting dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Ini bertujuan untuk mempromosikan keragaman budaya, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial di antara siswa.
 - Upaya untuk memasukkan perspektif multikultural ke dalam kurikulum dapat membantu menumbuhkan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan kohesif ^[9].
- g. **Reformasi Kebijakan dan Arah Masa Depan**
- Pemerintah Indonesia telah memulai beberapa reformasi, seperti inisiatif “Merdeka Belajar”, untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan membuat pendidikan lebih berpusat pada siswa.
 - Ada seruan untuk perubahan kebijakan yang komprehensif, termasuk adopsi praktik terbaik internasional yang disesuaikan dengan konteks lokal, untuk mengatasi masalah sistemik dalam sistem pendidikan.

Meskipun tantangan ini signifikan, mereka juga menghadirkan peluang untuk perubahan transformatif. Dengan mengatasi masalah ini melalui reformasi dan investasi yang ditargetkan, Indonesia dapat meningkatkan sistem pendidikannya dan mempersiapkan siswa dengan lebih baik untuk tuntutan ekonomi global. Namun, mencapai tujuan ini membutuhkan upaya bersama dari pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa reformasi pendidikan dilaksanakan dan berkelanjutan secara efektif.

1) Pendidikan, Perubahan Sosial dan Modernisasi

Pendidikan telah diterima sebagai salah satu agen utama sosialisasi, dan guru serta lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi. Dalam menggambarkan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial, ada tiga hal penting: agen perubahan, isi perubahan, dan latar belakang sosial dari mereka yang ingin diubah, yaitu peserta didik. Institusi pendidikan di bawah kendali kelompok budaya yang berbeda mencerminkan nilai-nilai kelompok yang mendukung dan mengendalikan pendidikan. Dalam situasi ini, guru menanamkan nilai-nilai tertentu, aspirasi dan kepada anak-anak.

Reformis sosial, yang dididik menekankan nilai-nilai seperti penghapusan batasan kasta, kesetaraan perempuan, menghilangkan kebiasaan dan praktik sosial yang jahat, suara dalam pemerintahan negara, mendirikan lembaga demokrasi dan sebagainya. Karena itu, mereka ingin mengajarkan filsafat liberal melalui pendidikan untuk mengubah masyarakat. Dengan kata lain mereka menganggap pendidikan sebagai nyala api atau cahaya pengetahuan yang menghalau kegelapan kebodohan.

Penggunaan pendidikan untuk menyebarkan nilai-nilai modernisasi mulai ditekankan sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Ekonomi yang sangat produktif, keadilan distributif, partisipasi masyarakat dalam badan pembuat keputusan, adopsi teknologi ilmiah di industri, pertanian dan pekerjaan serta profesi lainnya diterima sebagai tujuan modernisasi masyarakat India. Dan tujuan ini harus dicapai melalui pendidikan liberal. Dengan demikian, modernisasi tidak diterima sebagai suatu filosofi atau gerakan yang didasarkan pada sistem nilai rasional, tetapi sebagai suatu proses yang dibatasi hanya pada bidang ekonomi tetapi juga dicapai dalam bidang sosial, politik, budaya dan agama. Pendidikan diupayakan untuk dimanfaatkan sebagai saluran penyebaran modernitas

Menurut perspektif sosiologis, pendidikan tidak muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan individu dari individu tersebut, tetapi muncul dari kebutuhan masyarakat di mana individu tersebut menjadi anggotanya¹. Sistem pendidikan masyarakat mana pun terkait dengan keseluruhan sistem sosialnya. Ini adalah sub sistem yang melakukan fungsi tertentu untuk sistem sosial yang sedang berlangsung. Tujuan dan kebutuhan dari keseluruhan sistem sosial tercermin dalam fungsi-fungsi yang ditetapkan untuk sistem pendidikan dan bentuk strukturnya untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut.

Dalam masyarakat yang statis, fungsi utama sistem pendidikan adalah mewariskan warisan budaya kepada generasi baru. Tetapi dalam masyarakat yang terus berubah, hal ini terus berubah dari generasi ke generasi dan sistem pendidikan dalam masyarakat seperti itu tidak hanya harus meneruskan warisan budaya, tetapi juga membantu mempersiapkan kaum muda untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang mungkin telah terjadi atau sedang terjadi, kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dalam masyarakat kontemporer, “Proporsi perubahan baik yang direncanakan maupun yang dihasilkan dari konsekuensi sekunder dari inovasi yang disengaja jauh lebih tinggi daripada di masa lalu.” Terlebih lagi pada masyarakat yang baru merdeka dan sedang dalam tahap berkembang. Akibatnya, dalam masyarakat kompleks modern seperti itu, pendidikan dipanggil untuk melakukan fungsi tambahan menjadi transformator perubahan social

Dengan demikian, hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat bersifat timbal balik; terkadang masyarakat mempengaruhi perubahan sistem pendidikan dan di lain waktu sistem pendidikan mempengaruhi perubahan masyarakat.

Pendidikan dan modernisasi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Pendidikan menjadi sarana untuk mencapai modernisasi. Dengan pendidikan, proses modernisasi tersebut akan terbentuk dengan baik dan akan berdampak lagi ke Pendidikan itu sendiri. Modernisasi juga akan mempengaruhi pendidikan. Karena dengan modernisasi, inovasi dan pembaharuan di bidang pendidikan akan di dapatkan. Terutama pada zaman sekarang, di mana modernisasi ini sangat berperan penting dalam pendidikan. Kedua hal tersebut menjadi sebuah siklus yang berkaitan dan berjalan terus menerus. Ketika pendidikan dan modernisasi ini berjalan,

tentunya di antara kedua hal tersebut ada pendidikan karakter yang harus ditanamkan ke manusia. Karena modernisasi tanpa karakter itu tidak akan bisa sempurna. Dalam pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan pendidikan sejarah. Karena pendidikan sejarah disini akan membentuk karakter manusia melalui pembelajarannya dan membentuk manusia yang berbakti kepada Negara pada umumnya.

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi sosial budaya. Ini adalah proses perubahan menyeluruh yang melibatkan nilai, norma, institusi, dan struktur. Dimensi politik modernisasi melibatkan penciptaan negara bangsa modern dan pengembangan institusi-institusi penting – partai politik, struktur birokrasi, badan legislatif dan sistem pemilu berdasarkan hak universal dan pemungutan suara rahasia. Modernisasi budaya melibatkan kepatuhan terhadap ideologi nasionalis, keyakinan pada kesetaraan, kebebasan dan humanisme, pandangan rasional dan ilmiah. Modernisasi ekonomi melibatkan industrialisasi yang disertai dengan monetisasi ekonomi, peningkatan pembagian kerja, penggunaan teknik manajemen dan peningkatan teknologi serta perluasan sektor jasa. Modernisasi sosial melibatkan nilai-nilai universalistis, motivasi berprestasi, peningkatan mobilitas baik sosial maupun geografis, peningkatan melek huruf dan urbanisasi serta kemunduran otoritas tradisional. Pendidikan sekuler dan ilmiah berperan sebagai sarana modernisasi yang penting. Ini membantu dalam penyebaran nilai-nilai modern tentang kesetaraan, kebebasan dan humanisme. Sistem sekolah modern dapat menanamkan motivasi berprestasi. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar hubungan baru dalam masyarakat dan tumbuhnya rasionalitas yang memungkinkan berkembangnya sistem administrasi. Difusi nilai-nilai kesetaraan, kebebasan dan humanisme dapat meletakkan dasar bagi sistem politik yang demokratis. Penyebaran pendidikan modern pada paruh kedua abad ke-19 menyebabkan munculnya elite politik modern di India yang memberikan kepemimpinan dalam perjuangan kemerdekaan. Penyebaran pengetahuan ilmiah dan teknis oleh lembaga pendidikan modern dapat membantu penciptaan tenaga kerja terampil untuk memainkan peran pekerjaan yang dituntut oleh perekonomian industri. Nilai-nilai lain seperti individualisme dan etika universalistik dll juga dapat ditanamkan melalui pendidikan. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi sarana modernisasi yang penting. Pentingnya pendidikan

dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua masyarakat modern cenderung menekankan pada universalisasi pendidikan dan masyarakat modern telah mencapainya.

Modernisasi, perubahan sosial, dan pendidikan merupakan tema-tema yang saling berhubungan dan mempunyai implikasi signifikan bagi individu dan masyarakat. Pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep ini dan keterkaitannya. 1. Modernisasi: Modernisasi mengacu pada proses perkembangan dan transformasi masyarakat yang mencakup perubahan ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Hal ini melibatkan peralihan dari masyarakat tradisional dan agraris ke masyarakat industri yang lebih maju. Modernisasi biasanya mengarah pada peningkatan urbanisasi, peningkatan standar hidup, dan akses yang lebih besar terhadap informasi dan teknologi. 2. Perubahan Sosial: Perubahan sosial adalah konsep yang lebih luas yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, institusi, norma, nilai, dan praktik budaya. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain modernisasi, kemajuan teknologi, gerakan politik, dan perubahan sikap masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap dan tiba-tiba, yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. 3. Pendidikan: Pendidikan memainkan peran penting dalam proses modernisasi dan perubahan sosial. Ini berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga membekali individu untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamika masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan komunitasnya. Selain itu, hal ini dapat menjadi katalisator perubahan sosial dengan menantang norma-norma tradisional dan menumbuhkan pemikiran kritis.

Interaksi antara Modernisasi, Perubahan Sosial, dan Pendidikan: Modernisasi sering kali mengarah pada perubahan sosial karena sistem tradisional digantikan dengan sistem yang lebih kontemporer. Pergeseran ini terlihat pada berbagai aspek masyarakat, seperti perubahan struktur keluarga, peran gender, dan sistem ekonomi. Pendidikan merespons dan mempengaruhi perubahan-perubahan ini dengan mengadaptasi kurikulum, mempromosikan nilai-nilai baru, dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam dunia yang berkembang pesat.

Singkatnya, hubungan antara modernisasi, perubahan sosial, dan pendidikan sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi. Seiring dengan modernisasi masyarakat, mereka mengalami perubahan sosial yang dapat diadaptasi atau dibentuk oleh pendidikan. Memahami keterkaitan ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terkait dengan proses-proses ini.

2) Perubahan Dalam Lingkungan Sosial

Perubahan itu mungkin dalam lingkungan sosial total di sekitar masyarakat. Ini mungkin karena beberapa kekuatan internal atau kekuatan eksternal yang muncul di masyarakat lain. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang bertetangga atau jauh berdampak sangat luas saat ini. Bahasa Inggris, misalnya, kini menjadi bahasa dunia untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan akibatnya India merasa perlu menekankan perlunya mempertahankan dan memperkuat ilmu bahasa Inggris agar terus diuntungkan oleh ilmu-ilmu baru yang berkembang di seluruh dunia.

3) Perubahan Tujuan, Sasaran, dan Nilai Sosial:

Perubahan sosial tersebut dapat berupa tujuan, sasaran, dan nilai sosial. Perubahan tersebut dapat berupa nilai-nilai sosial yang secara langsung mempengaruhi isi peran sosial dan interaksi sosial. Misalnya, pengadopsian kesetaraan sebagai suatu nilai pada akhirnya dapat mengarah pada pendidikan dasar wajib dan gratis, perluasan fasilitas pendidikan dasar untuk semua anak hingga usia empat belas tahun dan penyediaan bantuan keuangan dan bantuan lainnya untuk kelas terbelakang agar mereka dapat memanfaatkannya dari perluasan fasilitas pendidikan.

4) Perubahan Sosial Kelembagaan

Perubahan sosial dapat bersifat 'institusional' yang mencakup perubahan dalam struktur yang lebih pasti seperti bentuk organisasi, peran dan isi peran. Adopsi demokrasi dan waralaba orang dewasa di India telah membuat pelatihan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan responsif mutlak diperlukan bagi para pemilih. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi isi dan metode pengajaran di lembaga pendidikan serta hubungan guru-mengajar.

5) Perubahan Pengetahuan dan Teknologi

Perubahan mungkin dalam pengetahuan dan teknologi yang ada. Eksplorasi ruang angkasa, industrialisasi, teknologi pertanian dan rumah tangga, pengembangan transportasi, dan media komunikasi massa, pemahaman baru tentang organisme manusia, perilaku individu dan sosial adalah beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di mana pengetahuan telah berkembang pesat dan akan terus berlanjut, terus berkembang. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa perubahan dalam silabus, metode pengajaran dan evaluasi serta peran guru.

BAB 5

PENDIDIKAN, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN (*SCHOOL SOCIETY AND CULTURE*)

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan kebudayaan yang lebih luas. Pendidikan mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sekaligus memengaruhi dan membentuk kebudayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Durkheim, pendidikan merupakan sarana untuk mempertahankan integrasi sosial dan menciptakan solidaritas di dalam masyarakat (Durkheim, 2001).

Masyarakat merupakan entitas dinamis yang senantiasa berkembang, dan dalam perkembangannya tersebut, kebudayaan memainkan peran yang signifikan. Kebudayaan, sebagai kumpulan nilai, norma, dan praktik yang diterima bersama oleh anggota masyarakat, berfungsi sebagai landasan bagi proses pendidikan. Dalam perspektif ini, pendidikan dapat dilihat sebagai proses sosialisasi formal yang berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai kebudayaan dalam diri individu. Freire (2000) menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan kesadaran kritis, yang memungkinkan individu untuk mempertanyakan dan menantang struktur sosial yang ada.

Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dan kebudayaan di mana ia berada. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar membaca dan menulis, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai sosial dan kebudayaan diajarkan dan diperkuat. Menurut Bourdieu (1990), sekolah berfungsi sebagai alat reproduksi sosial, di mana nilai-nilai dominan dalam masyarakat dipertahankan dan diperkuat melalui kurikulum yang diajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan

memiliki peran ganda: sebagai agen perubahan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan status quo.

Namun, hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan tidak selalu harmonis dan linier. Terdapat ketegangan yang sering muncul ketika nilai-nilai yang diajarkan di sekolah bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contoh nyata dari ketegangan ini dapat dilihat dalam konteks masyarakat multikultural, di mana perbedaan nilai dan norma budaya dapat mempengaruhi proses pendidikan. Giroux (1983) menyatakan bahwa pendidikan harus bersifat reflektif dan responsif terhadap keragaman budaya yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut, pendidikan juga memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan sosial individu. Melalui pendidikan, individu belajar tentang sejarah, bahasa, dan praktik budaya mereka, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan identitas mereka. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk melestarikan dan mentransmisikan warisan budaya kepada generasi berikutnya. Menurut Banks (2006), pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang penting untuk memahami dan menghargai keragaman budaya di dalam masyarakat.

Di era globalisasi saat ini, pendidikan menghadapi tantangan baru dalam mengakomodasi perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses ke beragam informasi dan budaya, yang memengaruhi proses pendidikan dan pembentukan nilai-nilai sosial. Bauman (2000) berargumen bahwa pendidikan di era modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak menentu dalam masyarakat global yang terus berubah.

Sebagai kesimpulan, hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan adalah hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Pendidikan bukan hanya sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga alat yang penting untuk membentuk dan mengarahkan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini, kita dapat mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.

A. Pendidikan dan Masyarakat

Hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah interaksi multifaset dan dinamis yang telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Hubungan ini sangat berakar pada filosofi pendidikan para pemikir berpengaruh seperti John Dewey, yang menekankan peran pendidikan dalam membina cita-cita demokrasi dan kemajuan sosial. Interaksi antara lembaga pendidikan dan kekuatan masyarakat sangat penting dalam membentuk lanskap pendidikan dan struktur sosial yang lebih luas. Jawaban ini mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari hubungan ini, menarik wawasan dari berbagai karya ilmiah.

a) Filsafat Pendidikan dan Sosial Progresif

Karya penting John Dewey, “Sekolah dan Masyarakat,” menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk kemajuan sosial dan demokrasi. Eksperimen Sekolah Laboratorium Dewey menyoroti perlunya sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi. Dia menganjurkan pendekatan pembelajaran pengalaman yang berpusat pada anak yang mengintegrasikan pengalaman dunia nyata ke dalam kurikulum, sehingga mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis (Day Frank, 2023).

Filosofi Dewey juga menekankan rekonstruksi pendidikan untuk mengatasi perubahan sosial, mengintegrasikan wawasan psikologis kontemporer ke dalam praktik pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi isolasi pendidikan tradisional dengan menghubungkannya dengan kehidupan siswa di luar sekolah, sehingga membuat pembelajaran lebih relevan dan berdampak.

b) Teori dan Reformasi Pendidikan

Walter Feinberg dan Jonas F. Soltis mengeksplorasi hubungan antara sekolah dan masyarakat melalui tiga kerangka teoretis: fungsionalisme, teori konflik, dan pendekatan interpretis. Kerangka kerja ini memberikan lensa yang berbeda untuk memahami bagaimana sekolah berfungsi dalam masyarakat. Fungsionalisme memandang sekolah sebagai institusi yang mensosialisasikan siswa agar sesuai dengan norma-norma sosial, sementara teori konflik

melihat mereka sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Pendekatan interpretis berfokus pada makna dan tujuan sosial yang dimiliki oleh individu dalam pengaturan pendidikan.

Kerangka kerja ini sangat penting bagi pendidik dan administrator untuk menilai secara kritis pengaruh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik pada praktik pendidikan dan untuk mendorong reformasi yang berarti.

c) Konteks Sejarah dan Politik

Tracy Lynn Steffes menyoroti peran sekolah umum dalam perkembangan politik selama awal abad kedua puluh. Sekolah bukan hanya proyek reformasi tetapi pusat untuk mengatasi tantangan industrialisasi dan urbanisasi. Perluasan mandat dan otoritas sekolah atas kesejahteraan anak-anak menandai perubahan signifikan dalam peran negara bagian dalam pendidikan dan tata kelola.

Evolusi historis pendidikan, seperti yang diperiksa oleh Steven Tozer, Paul C. Violas, dan Guy B. Senese, mengungkapkan bagaimana praktik pendidikan telah dibentuk oleh kondisi sosial dan ideologi yang berlaku. Perspektif sejarah ini memberikan wawasan tentang interaksi yang sedang berlangsung antara lembaga pendidikan dan perubahan masyarakat.

d) Tantangan dan Perspektif Kontemporer

Terlepas dari pengaruh ide-ide Dewey yang bertahan lama, implementasi praktisnya menghadapi tantangan. Philip W. Jackson membahas kesulitan dalam mewujudkan teori pendidikan Dewey dalam praktik, khususnya dalam konteks Sekolah Lab Universitas Chicago. Ini menyoroti kesenjangan antara teori pendidikan dan praktik, sebuah tantangan yang tetap ada dalam sistem pendidikan kontemporer.

Karya Ellen Nørgaard mencerminkan perdebatan masyarakat yang lebih luas seputar pendidikan, seperti inisiatif legislatif dan liputan media, yang terus membentuk wacana tentang peran sekolah dalam masyarakat.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat beragam, ditandai dengan peran ganda sosialisasi dan alokasi. Sekolah berfungsi sebagai institusi penting di mana siswa menginternalisasi nilai-nilai masyarakat, mempersiapkan mereka untuk memainkan peran konstruktif dalam komunitas mereka. Proses sosialisasi ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara siswa, memungkinkan mereka untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Selain sosialisasi, sekolah ditugaskan dengan alokasi atau penyortiran siswa berdasarkan kemampuan mereka, yang mempersiapkan mereka untuk berbagai posisi pekerjaan. Mekanisme penyortiran ini sangat penting untuk menjaga struktur masyarakat, karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Efektivitas proses alokasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, yang dapat berdampak pada pencapaian dan peluang pendidikan [1]. Undang-Undang No Child Left Behind (NCLB) mencontohkan pendekatan federal terhadap standar pendidikan, menekankan tujuan kognitif untuk semua siswa terlepas dari latar belakang mereka. Namun, model satu ukuran yang cocok untuk semua ini telah dikritik karena tidak cukup memenuhi beragam kebutuhan siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Sebaliknya, pendekatan nilai tambah dalam pengujian menawarkan penilaian kemajuan siswa yang lebih individual dengan membandingkan nilai tes saat ini dengan yang sebelumnya, sehingga berfokus pada pertumbuhan pribadi daripada kepatuhan ketat terhadap standar yang telah ditentukan. Kerangka teoretis fungsionalisme struktural dan teori konflik memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika antara sekolah dan masyarakat. Fungsionalisme struktural berpendapat bahwa sekolah harus melakukan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dalam sistem sosial, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi [9]. Sebaliknya, teori konflik menyoroti sifat kompetitif sistem sosial, menunjukkan bahwa perbedaan dalam hasil pendidikan dapat melanggengkan ketidaksetaraan sosial. Pada akhirnya, memahami interaksi antara sekolah dan masyarakat membutuhkan pandangan komprehensif yang mempertimbangkan sosialisasi siswa dan mekanisme alokasi. Dengan mengakui pentingnya fungsi-fungsi ini, pendidik dan pembuat kebijakan dapat bekerja untuk menciptakan lanskap pendidikan yang lebih adil yang tidak hanya

mempersiapkan siswa untuk peran masa depan dalam tenaga kerja tetapi juga menumbuhkan rasa komunitas dan nilai-nilai bersama¹⁸¹. Pendekatan holistik ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berhasil dalam hidup.

Kesimpulannya, hubungan antara sekolah dan masyarakat kompleks dan terus berkembang. Sementara filosofi pendidikan seperti John Dewey telah meletakkan dasar untuk memahami hubungan ini, tantangan praktis dan perubahan sosial memerlukan refleksi dan adaptasi yang berkelanjutan. Interaksi antara lembaga pendidikan dan kekuatan masyarakat tetap menjadi bidang studi dan reformasi yang kritis, karena secara langsung berdampak pada perkembangan individu dan tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam menguraikan kajian tentang hubungan antara Pendidikan dengan Masyarakat dan atau hubungan antara sekolah dengan Masyarakat, penulis tidak mencoba memisahkan keduanya dengan pembahasan yang terpisah karena hubungan antara keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Hubungan antara sekolah dan masyarakat kompleks dan saling berhubungan, yang masing-masing saling mempengaruhi dengan cara yang berbeda. Hubungan antara sekolah dan masyarakat kompleks dan dinamis. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat yang dilayani. Sebaliknya, sekolah membantu membentuk masyarakat dengan membentuk persepsi anak-anak dan menanamkan nilai-nilai, keyakinan, dan norma masyarakat dalam diri mereka. Hubungan antara sekolah dan komunitas adalah jalan dua arah, di mana masing-masing mempengaruhi yang lain. Sekolah memainkan peran inti dalam masyarakat dengan mengubah kehidupan siswa dan keluarga mereka. Pada saat yang sama, sekolah terus berubah karena politik, pasar, dan perubahan ilmiah, teknologi, dan budaya.

Dalam karya ilmiahnya “School Public Relation,” Kindred Leslie berpendapat bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya merupakan proses komunikatif yang bertujuan menumbuhkan di dalam masyarakat kesadaran akan kebutuhan yang melekat dalam upaya pendidikan, sementara secara bersamaan mendorong keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas dalam mengejar kemajuan lembaga

pendidikan. Hubungan ini melibatkan kerja sama yang dimodali dengan itikad baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah, hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan/peraturan yang diberlakukan di sekolah. Berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak menanganinya. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggungjawab dalam melaksanakannya. Partisipasi/peranserta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan/usul/saran tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknis edukatif/akademis. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif, apabila mereka sebagai masyarakat diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. Supaya sukses dalam “saling berperan serta”, haruslah dipahami betul nilai, cara kerja dan pola hidup yang ada dalam masyarakat. Kerja sama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. Efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan/penemuan, saran, kritik sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah.

Terdapat hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat dalam bidang sosiologi pendidikan. Sekolah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas, serta memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul "Education and Sociology" (1898), Emile Durkheim menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk solidaritas sosial dan mempersiapkan individu untuk berfungsi dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa sekolah berperan dalam menyosialisasikan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya kepada siswa. Sementara Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam bukunya yang berjudul "Reproduction in Education, Society and Culture" (1977) menyoroti bagaimana sekolah dapat memperkuat reproduksi ketimpangan sosial. Mereka mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan gender dapat mempengaruhi hasil pendidikan, akses

terhadap pendidikan berkualitas, dan peluang di masa depan. Demikian juga Bowles dan Gintis dalam bukunya yang berjudul "Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life" (1976) mengungkapkan bagaimana sekolah mencerminkan dan membentuk struktur sosial, nilai-nilai, dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Mereka menyoroti kontradiksi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem pendidikan. Sedangkan John Anyon dalam artikelnya yang berjudul "Social Class and the Hidden Curriculum of Work" (1980) meneliti bagaimana sekolah, melalui kurikulum tersembunyi, dapat mempengaruhi reproduksi ketimpangan sosial. Ia menunjukkan bahwa sekolah sering kali memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kelas sosial tertentu, menghasilkan kesenjangan dalam persiapan siswa untuk dunia kerja. Dan tokoh berikutnya yang membahas hubungan tentang sekolah dan Masyarakat adalah Paul Willis dalam bukunya yang berjudul "Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs" (1977) mengungkapkan bagaimana sekolah dan proses pendidikan dapat membentuk identitas dan aspirasi siswa dari latar belakang kelas pekerja. Ia menyoroti bagaimana sekolah terkadang menghasilkan reproduksi ketimpangan sosial melalui pemisahan dan pengelompokan siswa berdasarkan kelas sosial mereka.

Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mengembangkan antusiasme/semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Ketiga tujuan tersebut menggambarkan adanya "*two way traffic*" atau dua arus komunikasi yang saling timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila terjadi kesepakatan antara sekolah dengan masyarakat tentang "policy" (kebijakan), perencanaan program, dan strategi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Sekolah berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu, membentuk mereka menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan mempengaruhi norma dan nilai social, dan harapan Masyarakat

mempengaruhi kurikulum dan tujuan pendidikan. Sekolah memainkan peran penting dalam sosialisasi individu, membantu mereka memperoleh keterampilan dan nilai-nilai social yang penting agar dapat berfungsi dalam Masyarakat. Sekolah menyediakan pendidikan, yang penting untuk pengembangan pribadi dan Masyarakat. Sekolah yang baik adalah sekolah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Mereka menyesuaikan kurikulum mereka untuk mengatasi perubahan kebutuhan Masyarakat. Misalnya, seiring kemampuan teknologi, sekolah memasukkan literasi digital ke dalam program mereka untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan modern, oleh karena itu sekolah juga berperan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan siswa guna mengatasi masalah-masalah social dan membutuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan Masyarakat.

Lembaga pendidikan dan kerangka kerja sosial adalah dua dimensi yang saling terkait di mana lembaga pendidikan harus mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan yang lazim dalam masyarakat; secara bersamaan, lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dan membentuk nilai-nilai komunal, mempromosikan transformasi sosial, dan mengurangi ketidakadilan masyarakat. (Riani & Ain, 2022)

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat dicirikan oleh ketergantungan timbal balik, dengan pendidikan berfungsi sebagai katalis dinamis yang mencerminkan dan mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan struktur konteks sosial yang lebih luas. Ini mengambil peran penting dalam kemajuan individu dan komunitas, berdampak pada mobilitas sosial, mendorong partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi transmisi warisan budaya. (Shri Kant Dwivedi, 2020, dan Emmanuel Jean-Francois, 2015)

Hubungan antara sekolah dan masyarakat rumit dan saling berhubungan. Sekolah merupakan cerminan masyarakat luas di mana mereka berada, dan sekolah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sosialisasi individu.

Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan antara sekolah dan masyarakat:

1. **Sosialisasi dan Transmisi Budaya:** Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, tempat individu belajar dan menginternalisasikan norma, nilai, dan harapan masyarakat. Mereka

- memainkan peran penting dalam mewariskan warisan budaya, pengetahuan, dan tradisi lintas generasi. Sekolah berkontribusi dalam membentuk identitas, keyakinan, dan perilaku sosial siswa, mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
2. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Sekolah sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia, yang penting bagi kemajuan dan kemajuan masyarakat. Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Individu yang berpendidikan tinggi berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi, inovasi, dan pembangunan sosial.
 3. Mobilitas dan Kesetaraan Sosial: Sekolah memberikan kesempatan terjadinya mobilitas sosial, memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosial ekonominya dan melepaskan diri dari hambatan sosial. Pendidikan dapat menjembatani kesenjangan dengan menawarkan akses yang sama terhadap pengetahuan dan peluang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Sekolah memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.
 4. Integrasi dan Kohesi Sosial: Sekolah mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang dan pengalaman, mendorong integrasi dan kohesi sosial. Mereka memberikan ruang interaksi, kolaborasi, dan pengembangan hubungan sosial antar individu dengan latar belakang budaya, etnis, dan sosial ekonomi yang berbeda. Sekolah berkontribusi dalam membangun rasa kebersamaan dan nilai-nilai bersama.
 5. Persiapan Kewarganegaraan: Sekolah mempersiapkan individu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka memberikan pendidikan kewarganegaraan, mengajar siswa tentang hak, tanggung jawab, dan fungsi lembaga demokrasi. Sekolah mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pemikiran kritis, dan kesadaran sosial, mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan berkontribusi pada perbaikan masyarakat.
 6. Sosialisasi Norma dan Nilai: Sekolah memainkan peran penting dalam mensosialisasikan siswa ke dalam norma, nilai, dan standar

etika masyarakat. Mereka mengajar siswa tentang perilaku yang dapat diterima, prinsip-prinsip moral, dan tanggung jawab sosial. Sekolah mempromosikan perilaku etis, empati, menghormati keberagaman, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, sehingga membentuk tatanan moral masyarakat.

7. Pengaruh terhadap Perubahan Sosial: Sekolah dapat menjadi agen perubahan sosial dengan menantang norma, bias, dan kesenjangan yang ada. Mereka dapat meningkatkan kesadaran, pemikiran kritis, dan aktivisme di kalangan siswa, mendorong mereka untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dan berupaya menuju transformasi positif. Sekolah dapat menumbuhkan rasa keagenan dan memberdayakan individu untuk berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Penting untuk menyadari bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang. Sekolah mencerminkan dan membentuk nilai-nilai, aspirasi, dan tantangan masyarakat yang mereka layani. Kualitas pendidikan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Harsita Jain, 2023).

B. Masyarakat dan Kebudayaan

Budaya terdiri dari keyakinan, perilaku, objek, dan karakteristik lain yang umum dimiliki anggota kelompok atau masyarakat tertentu. Melalui budaya, orang-orang dan kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai bersama masyarakat, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, budaya mencakup banyak aspek kemasyarakatan: bahasa, adat istiadat, nilai, norma, adat istiadat, aturan, alat, teknologi, produk, organisasi, dan institusi. Istilah institusi yang terakhir ini mengacu pada kumpulan aturan dan makna budaya yang terkait dengan aktivitas sosial tertentu. Institusi umum adalah keluarga, pendidikan, agama, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Secara umum, berbudaya berarti berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas dalam bidang seni, bergaya, dan berperilaku

baik. Budaya tinggi — umumnya dianut oleh kelas atas — mengacu pada musik klasik, teater, seni rupa, dan aktivitas canggih lainnya. Anggota kelas atas dapat mengejar seni yang tinggi karena mereka memiliki modal budaya, yang berarti kualifikasi profesional, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan verbal dan sosial yang diperlukan untuk memperoleh “properti, kekuasaan, dan prestise” agar dapat “maju” secara sosial. Budaya rendah, atau budaya populer — umumnya dilakukan oleh kelas pekerja dan menengah — mengacu pada olahraga, film, komedi situasi dan sinetron televisi, dan musik rock. Ingatlah bahwa sosiolog mendefinisikan *budaya* secara berbeda dibandingkan dengan *budaya*, *budaya tinggi*, *budaya rendah*, dan *budaya populer*.

Para sosiolog mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang berinteraksi sedemikian rupa untuk berbagi budaya yang sama. Ikatan budaya mungkin bersifat etnis atau ras, berdasarkan gender, atau karena kepercayaan, nilai, dan aktivitas bersama. Istilah *masyarakat* juga dapat memiliki arti *geografis* dan merujuk pada orang-orang yang memiliki budaya yang sama di lokasi tertentu. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah beriklim Arktik mengembangkan budaya yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah gurun. Belakangan, beragam budaya manusia muncul di seluruh dunia.

Budaya dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Kebudayaan terdiri dari “objek-objek” suatu masyarakat, sedangkan masyarakat terdiri dari orang-orang yang mempunyai budaya yang sama. Ketika istilah *budaya* dan *masyarakat* pertama kali memperoleh maknanya saat ini, sebagian besar orang di dunia bekerja dan tinggal dalam kelompok kecil di lokasi yang sama. Di dunia yang berpenduduk 7,888 miliar orang saat ini (2021), istilah-istilah ini telah kehilangan sebagian kegunaannya karena semakin banyak orang yang berinteraksi dan berbagi sumber daya secara global. Namun, masyarakat cenderung menggunakan *budaya* dan *masyarakat* dalam pengertian yang lebih tradisional: misalnya, menjadi bagian dari “budaya” dalam “masyarakat” yang lebih luas.

a) Perbedaan Antara Budaya dan Masyarakat

Masyarakat tidak lain hanyalah sekelompok orang terorganisir yang hidup bersama dan terhubung satu sama lain. Berbeda dengan kebudayaan, yang dapat dipahami sebagai cara hidup masyarakat yang hidup di suatu tempat atau wilayah tertentu. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya masing-masing, namun keduanya tidaklah sama. Meski begitu, mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain.

Kebudayaan mempunyai nilai-nilai, adat istiadat, keyakinan dan perilaku sosial tertentu, sedangkan masyarakat mencakup orang-orang yang memiliki keyakinan, nilai-nilai dan cara hidup yang sama. Artikel ini mencoba menjelaskan perbedaan antara masyarakat dan budaya secara rinci.

Basic for comparison	Culture	Society
Meaning	Budaya mengacu pada seperangkat keyakinan, praktik, perilaku yang dipelajari, dan nilai-nilai moral yang diwariskan, dari satu generasi ke generasi lainnya.	Masyarakat berarti sekelompok orang yang saling bergantung dan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan berhubungan satu sama lain.
What is it?	Ini adalah sesuatu yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.	Ini adalah komunitas orang-orang, yang tinggal di wilayah tertentu, berbagi budaya yang sama dari waktu ke waktu.
What does it do?	Ini menyatukan kerangka sosial melalui pengaruh.	Ini membentuk kerangka sosial melalui tekanan.
Represents	Aturan yang memandu cara hidup orang.	Struktur yang menyediakan cara orang mengatur diri mereka sendiri.
Includes	Keyakinan, nilai-nilai dan praktik suatu kelompok.	Orang-orang yang memiliki keyakinan dan praktik yang sama.
Examples	<i>Fashion</i> , gaya hidup, selera & preferensi, musik, seni, dll.	Ekonomi, desa, kota dll.

b) Definisi Kebudayaan

Istilah budaya mengacu pada sistem kepercayaan, adat istiadat, pengetahuan, perilaku, agama, praktik, dll., yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang. Hal ini digambarkan sebagai cara hidup masyarakat seperti perilaku yang dipelajari, nilai-nilai, moral, seni, hukum, simbol-simbol, gaya hidup yang mereka terima sepenuhnya tanpa berpikir panjang. Secara umum, kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi melalui komunikasi, pengajaran, dan peniruan. Hal ini dianggap sebagai warisan sosial dari kelompok yang terorganisir.

Kebudayaan merupakan suatu pola tanggapan (berpikir, merasa, berperilaku) yang dikembangkan oleh Masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat interaksi anggota kelompok dengan lingkungannya.

c) Definisi Masyarakat

Kami mendefinisikan istilah 'masyarakat' sebagai sekelompok orang yang memiliki gaya hidup, wilayah, pola perilaku, dan organisasi yang sama. Ini mengacu pada komunitas yang teratur, terlibat dalam interaksi sosial yang berkelanjutan dengan para anggotanya. Secara sederhana, masyarakat menyiratkan sekelompok orang yang mengatur diri mereka sendiri dan hidup bersama di wilayah geografis tertentu dan melakukan kontak satu sama lain. Anggota masyarakat memiliki atribut yang sama seperti nilai, tradisi, dan adat istiadat. Mereka juga berbagi budaya dan agama yang sama. Setiap anggota penting bagi masyarakat, karena keberadaannya bergantung pada anggotanya saja.

d) Perbedaan Kunci Antara Budaya dan Masyarakat

Perbedaan antara kebudayaan dan masyarakat dapat digambarkan dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

- Budaya mengacu pada seperangkat keyakinan, praktik, perilaku yang dipelajari, dan nilai-nilai moral yang diwariskan, dari satu generasi ke generasi lainnya. Masyarakat berarti sekelompok orang yang saling bergantung dan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan berhubungan satu sama lain.
- Kebudayaan adalah sesuatu yang membantu kita membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di sisi lain, masyarakat

adalah komunitas orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan berbagi budaya yang sama dari waktu ke waktu.

- Kebudayaan menyatukan struktur sosial, sedangkan masyarakat membangunnya.
- Kebudayaan memberikan pedoman kepada masyarakat tentang cara hidup. Sebaliknya, masyarakat adalah suatu struktur yang menyediakan cara orang mengatur dirinya sendiri.
- Budaya terdiri dari keyakinan, nilai-nilai dan praktik suatu kelompok. Sebaliknya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kesamaan keyakinan, praktik, adat istiadat, dan lain-lain.
- Budaya tercermin dalam *fashion*, gaya hidup, selera & preferensi, musik, seni, dll. Berbeda dengan masyarakat yang tercermin dalam perekonomian.

POLITIK DAN PENDIDIKAN

Politik dan pendidikan saling terkait erat dan seringkali mempunyai dampak signifikan satu sama lain. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin politik dan pembuat kebijakan dapat menentukan arah sistem pendidikan dan mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Salah satu aspek kunci dari hubungan antara politik dan pendidikan adalah alokasi sumber daya. Pemerintah menentukan berapa banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan, yang dapat berdampak langsung pada kualitas sekolah, gaji guru, dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Keputusan politik juga dapat menentukan distribusi dana pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antar wilayah atau kelompok sosial ekonomi.

Ideologi dan agenda politik juga dapat membentuk kurikulum dan kebijakan pendidikan. Misalnya, politisi mungkin mendorong agar mata pelajaran tertentu dimasukkan atau dikeluarkan dari kurikulum, atau menganjurkan metode atau pendekatan pengajaran tertentu. Keputusan-keputusan ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa, serta nilai-nilai dan perspektif yang mereka hadapi.

Politik juga berperan dalam membentuk akses dan kesetaraan pendidikan. Kebijakan terkait zonasi sekolah, penerimaan siswa, atau pendanaan dapat berdampak pada peluang yang tersedia bagi berbagai kelompok siswa. Keputusan politik mengenai isu-isu seperti tindakan afirmatif, pilihan sekolah, atau desegregasi dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kesetaraan pendidikan dan mobilitas sosial.

Selain itu, politik dapat mempengaruhi tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan. Para pemimpin politik menunjuk pejabat pendidikan, menetapkan kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan guru, dan mungkin memiliki kendali atas kurikulum dan sistem penilaian. Keputusan-keputusan ini dapat mempunyai dampak yang luas terhadap fungsi sekolah dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, politik dan pendidikan saling terkait erat, dan keputusan dan kebijakan politik secara signifikan menentukan arah,

kualitas, dan aksesibilitas pendidikan. Penting bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan perdebatan mengenai isu-isu ini untuk memastikan bahwa sistem pendidikan adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik.

Hubungan antara politik dan pendidikan memiliki banyak aspek dan kompleks. Hal ini dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, ideologi, pendanaan, dan nilai-nilai masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan antara politik dan pendidikan:

- a. Kebijakan dan Perundang-undangan: Politik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan perundang-undangan pendidikan. Pemerintah di berbagai tingkat (lokal, negara bagian/provinsi, dan nasional) membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem pendidikan. Kebijakan ini dapat mencakup standar kurikulum, alokasi dana, persyaratan sertifikasi guru, dan banyak lagi.
- b. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya: Pendidikan sering kali merupakan bagian penting dari anggaran pemerintah, dan cara pengalokasian dana dapat menjadi isu yang kontroversial secara politik. Keputusan politik menentukan tingkat pendanaan untuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, yang dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
- c. Kurikulum dan Standar: Politisi dapat mempengaruhi kurikulum yang diajarkan di sekolah dan standar yang dipegang siswa. Perdebatan mengenai apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, seperti pengajaran topik kontroversial atau dimasukkannya nilai-nilai tertentu, sering kali bersifat politis.
- d. Pilihan Sekolah dan Privatisasi: Ideologi politik dapat mendorong diskusi tentang pilihan sekolah, program voucher, sekolah piagam, dan privatisasi pendidikan. Perdebatan ini berkisar pada peran pemerintah dalam pendidikan dan keseimbangan antara keterlibatan sektor publik dan swasta.
- e. Serikat Pekerja Guru: Guru dan serikat pekerja mereka adalah kelompok yang aktif secara politik yang mengadvokasi kebijakan terkait pendanaan pendidikan, gaji guru, kondisi kerja, dan reformasi

- pendidikan. Serikat pekerja ini dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan kebijakan pendidikan.
- f. Masalah Sosial dan Budaya: Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk sosialisasi, dan politik dapat mempengaruhi nilai-nilai, kepercayaan, dan perspektif budaya yang dipromosikan dalam sistem pendidikan. Perdebatan mengenai topik seperti pendidikan seks, kurikulum sejarah, dan penyertaan berbagai perspektif sering kali mempunyai dimensi politik.
 - g. Akses dan Kesetaraan: Politik juga berperan dalam mengatasi masalah akses dan kesetaraan dalam pendidikan. Para pembuat kebijakan dapat menetapkan kebijakan tindakan afirmatif, mengatasi segregasi sekolah, atau menerapkan program untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di antara kelompok sosio-ekonomi yang berbeda.
 - h. Hubungan Internasional: Dalam konteks hubungan internasional, politik dapat mempengaruhi pertukaran pendidikan, kolaborasi, dan penyebaran informasi. Negara-negara seringkali menggunakan pendidikan sebagai alat diplomasi dan soft power.
 - i. Pendidikan untuk Kewarganegaraan: Pendidikan dipandang oleh sebagian orang sebagai sarana mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Pendidikan kewarganegaraan, termasuk pengajaran kewarganegaraan, pemerintahan, dan keterampilan berpikir kritis, dipengaruhi oleh pertimbangan politik.
 - j. Penelitian dan Inovasi: Pendanaan untuk penelitian dan inovasi pendidikan sering kali ditentukan oleh prioritas politik. Penelitian dapat memberikan informasi terhadap kebijakan pendidikan, namun arah dan fokus penelitian juga dapat dipengaruhi oleh agenda politik.

Hubungan Antara Politik dan Pendidikan

Hubungan antara politik dan pendidikan telah menjadi subjek penelitian yang luas. Sejumlah studi telah dilakukan untuk memahami bagaimana politik mempengaruhi sistem pendidikan dan sebaliknya. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian oleh Carnoy dan Levin (1985) yang meneliti hubungan antara politik dan pendidikan di beberapa negara.

Mereka menemukan bahwa kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ideologi di masyarakat. Misalnya, dalam negara-negara dengan sistem politik otoriter, kebijakan pendidikan dapat digunakan untuk mengendalikan dan memanipulasi opini publik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Busemeyer (2009) menyoroti bagaimana keputusan politik tentang alokasi sumber daya dapat mempengaruhi pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem politik yang lebih demokratis cenderung mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Selain itu, penelitian oleh Hatcher (2010) menyoroti bagaimana politik dapat mempengaruhi kurikulum dan kebijakan pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa politisi sering kali memiliki kepentingan dan agenda tertentu dalam menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa, serta nilai dan perspektif yang mereka terima.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait, dan keputusan politik membentuk struktur, isi, dan pendanaan sistem pendidikan. Hubungan tersebut dapat menimbulkan perdebatan, karena ideologi politik dan kelompok kepentingan yang berbeda bersaing untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan praktik pendidikan.

Hubungan antara politik dan pendidikan beragam, melibatkan pengaruh pendidikan pada partisipasi politik, dampak sistem politik pada kebijakan pendidikan, dan peran pendidikan dalam membentuk pengetahuan politik dan keterlibatan demokrasi. Interaksi yang kompleks ini terbukti di berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti demokrasi, kelas sosial, dan elite politik. Di bawah ini, kami mengeksplorasi dimensi ini secara rinci.

1. Pengantar Politik dalam Pendidikan

Politik memainkan peran penting dalam setiap aspek sistem pendidikan, dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan teknis dan pedagogis, tetapi juga oleh kekuatan politik yang membentuk struktur dan arah kebijakan pendidikan. Sub bab ini akan membahas bagaimana politik

mempengaruhi pendidikan, mengeksplorasi berbagai teori dan perspektif yang menjelaskan hubungan ini, serta mengidentifikasi dampak konkret dari keputusan politik terhadap sistem pendidikan.

a. Pengertian dan Teori Dasar

Politik dalam pendidikan merujuk pada cara di mana kebijakan pendidikan dibuat, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui proses politik. Hal ini melibatkan aktor-aktor politik seperti pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan, serta keputusan yang mereka buat mengenai pendanaan, kurikulum, dan regulasi sekolah. Menurut Michael W. Apple dalam bukunya *Ideology and Curriculum* (2004), pendidikan adalah medan perjuangan ideologi di mana berbagai kelompok mencoba untuk mempengaruhi apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana hal tersebut disampaikan kepada siswa. Apple berargumen bahwa kurikulum sering kali mencerminkan kepentingan politik tertentu dan dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan dominan dalam masyarakat.

b. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Pendidikan

Keputusan politik mempengaruhi banyak aspek sistem pendidikan. Pembiayaan pendidikan, misalnya, sering kali menjadi isu yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah. Ball (2013) dalam *Education, Justice and the Human Capacity for Flourishing* menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan pendanaan dapat memiliki dampak besar pada kualitas pendidikan yang tersedia, serta kesetaraan akses bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Ketika pemerintah memprioritaskan pembiayaan untuk sekolah-sekolah tertentu atau untuk jenis pendidikan tertentu, dampaknya bisa sangat besar bagi kesempatan pendidikan yang tersedia untuk semua siswa.

c. Kontroversi dan Konflik dalam Kurikulum

Kurikulum pendidikan sering kali menjadi pusat kontroversi politik. Seperti yang dijelaskan oleh Schmidt dan Prawat (2006) dalam *Curriculum Research: What We Have Learned, What We Need to Know*, keputusan tentang materi pelajaran yang diajarkan di sekolah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pedagogis, tetapi juga pada tekanan politik dari berbagai kelompok kepentingan.

Misalnya, perdebatan tentang pengajaran sejarah, sains, atau pendidikan seks sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai politik dan budaya yang dominan.

Secara keseluruhan, hubungan antara politik dan pendidikan adalah kompleks dan saling terkait. Keputusan politik memiliki dampak langsung pada bagaimana pendidikan disampaikan dan diterima, sementara pendidikan juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Menyadari bagaimana politik mempengaruhi pendidikan membantu kita memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pendidikan.

2. Pendidikan dan Partisipasi Politik

- Pendidikan merupakan penentu yang signifikan dari partisipasi politik. Studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan minat dan partisipasi politik. Misalnya, di Jerman, peningkatan wajib sekolah ditemukan memiliki efek kausal pada partisipasi politik, menunjukkan bahwa pendidikan meningkatkan keterlibatan individu dalam proses politik (Bömmel & Heineck, 2023).
- Dalam mengembangkan demokrasi seperti Senegal, pendidikan meningkatkan kesadaran politik dan dukungan untuk lembaga-lembaga demokrasi, terutama ketika demokrasi berada di bawah ancaman. Namun, peningkatan partisipasi politik secara keseluruhan bergantung pada kekuatan lembaga-lembaga demokrasi (Larreguy & Liu, 2023).

3. Pengaruh Sistem Politik terhadap Pendidikan

- Sistem dan ideologi politik secara signifikan membentuk kebijakan pendidikan. Di Amerika Latin, misalnya, demokrasi cenderung meningkatkan pengeluaran pendidikan, meskipun tidak selalu mengarah pada reformasi yang berkualitas. Aktor politik, seperti serikat pekerja dan politisi klienalis, sering menggunakan sumber daya pendidikan untuk tujuan politik,

sementara teknokrat dan LSM menganjurkan reformasi pendidikan (Schneider, 2024).

- Dalam konteks pasca-kolonial, pendidikan telah menjadi alat untuk pengaruh dan kontrol politik. Warisan kolonial dalam sistem pendidikan sering menyebabkan konflik atas konten pendidikan dan tata kelola, seperti yang terlihat dalam kasus bekas koloni Afrika Portugal (Hofstetter & Schneuwly, 2024).

4. Pendidikan sebagai Alat Pengetahuan Politik dan Keterlibatan Demokratis

- Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan politik dan mendorong keterlibatan demokrasi. Ini memberikan individu dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik. Hal ini terbukti dalam hubungan positif antara pendidikan dan pengetahuan politik, seperti yang ditunjukkan dalam studi yang melibatkan kembar Denmark (*Online Appendix*, n.d.).
- Di Amerika Serikat, pendidikan dipandang sebagai kendaraan untuk pengembangan politik, membekali siswa dengan kemampuan untuk terlibat secara kritis dengan isu-isu sosial dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini melibatkan pemahaman dinamika kekuasaan dan advokasi hak, yang merupakan komponen penting dari pendidikan demokrasi (Dinorah Sanchez LozaORCID Icon, 2021).

5. Peran Elite Politik dan Pendidikan

- Di negara-negara seperti Indonesia, hubungan antara pendidikan dan politik sangat dipengaruhi oleh elite politik. Para elite ini sering mengendalikan kebijakan pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, pendidikan juga memberdayakan individu untuk melawan manipulasi politik dan mempromosikan nilai-nilai nasionalistik (Kristanto, 2022).

- Sementara pendidikan adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengetahuan, dampaknya tidak seragam di berbagai konteks politik dan sosial. Efektivitas pendidikan dalam mempromosikan keterlibatan politik seringkali tergantung pada lingkungan politik yang lebih luas dan keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang mendukung. Selain itu, sistem politik dapat memungkinkan dan membatasi reformasi pendidikan, menyoroti perlunya pemahaman yang bernuansa tentang interaksi antara politik dan pendidikan.

6. Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Peran pemerintah dalam pendidikan merupakan aspek kunci yang menentukan bagaimana sistem pendidikan berfungsi dan berkembang. Pemerintah mempengaruhi pendidikan melalui berbagai kebijakan dan keputusan, termasuk pendanaan, regulasi, penetapan kurikulum, dan pengawasan kualitas. Sub bab ini akan mengeksplorasi berbagai cara pemerintah mempengaruhi pendidikan dan dampak dari keputusan tersebut terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

a. Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah salah satu area utama di mana pemerintah memiliki pengaruh signifikan. Pemerintah sering kali menjadi sumber utama dana untuk sekolah-sekolah publik, baik melalui anggaran nasional maupun lokal. Menurut Ball (2013) dalam *Education, Justice and the Human Capacity for Flourishing*, keputusan pemerintah mengenai alokasi dana dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesetaraan akses di seluruh sistem pendidikan. Pembiayaan yang tidak merata antara daerah kaya dan miskin sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, dengan dampak jangka panjang terhadap peluang pendidikan mereka.

b. Penetapan Kurikulum dan Standar Pendidikan

Pemerintah juga memainkan peran penting dalam penetapan kurikulum dan standar pendidikan. Melalui departemen pendidikan atau lembaga terkait, pemerintah menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah dan menetapkan standar untuk

penilaian. Apple (2004) dalam *Ideology and Curriculum* menunjukkan bahwa kurikulum sering kali mencerminkan nilai-nilai politik dan ideologi yang dominan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memutuskan untuk memasukkan atau mengecualikan materi tertentu dari kurikulum berdasarkan pertimbangan politik atau sosial. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana siswa memahami sejarah, sains, dan nilai-nilai budaya.

c. Regulasi dan Pengawasan Kualitas Pendidikan

Regulasi dan pengawasan juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur cara sekolah beroperasi, termasuk aturan tentang keselamatan, hak-hak siswa, dan standar profesional bagi guru. Menurut Kozol (2005) dalam *The Shame of the Nation: The Restoration of Apartheid Schooling in America*, regulasi yang tidak memadai atau penerapan yang tidak konsisten dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.

d. Kebijakan Inovasi dan Reformasi Pendidikan

Selain mengelola sistem pendidikan yang ada, pemerintah juga terlibat dalam pengembangan kebijakan inovasi dan reformasi pendidikan. Ini termasuk inisiatif untuk memperkenalkan metode pengajaran baru, teknologi pendidikan, dan program-program khusus yang dirancang untuk meningkatkan hasil pendidikan. Campbell dan Rozsnyai (2002) dalam *Quality Assurance and the Development of Course Programmes* mengulas bagaimana kebijakan reformasi dapat mempengaruhi struktur dan penyampaian pendidikan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan baru.

e. Dampak Sosial dan Politik dari Kebijakan Pendidikan

Keputusan pemerintah tentang pendidikan tidak hanya mempengaruhi sekolah dan siswa, tetapi juga dapat memiliki dampak sosial dan politik yang lebih luas. Pendidikan adalah alat penting untuk mobilitas sosial dan pengembangan kapasitas manusia, dan keputusan politik tentang pendidikan dapat mempengaruhi kesetaraan sosial dan peluang bagi kelompok-kelompok marginal. Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan pentingnya pendidikan dalam memajukan hak asasi

manusia dan memperkuat kapasitas individu untuk meraih kebebasan dan kesejahteraan.

7. Politik Pendidikan di Berbagai Negara

Perbandingan politik pendidikan di berbagai negara memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pendidikan dibentuk oleh konteks politik yang berbeda. Setiap negara memiliki struktur politik dan kebijakan pendidikan yang unik, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kebutuhan sosial-ekonominya. Sub bab ini akan membahas bagaimana faktor-faktor politik mempengaruhi sistem pendidikan di beberapa negara yang berbeda, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap hasil pendidikan dan kesetaraan.

a. Politik Pendidikan di Negara Berkembang

Di banyak negara berkembang, politik pendidikan sering kali dipengaruhi oleh prioritas pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Menurut Baghdadi (2014) dalam *Education and Political Transformation in the Developing World*, kebijakan pendidikan di negara-negara seperti India dan Nigeria sering kali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan mengatasi kesenjangan pendidikan yang besar antara berbagai kelompok sosial-ekonomi. Kebijakan ini bisa sangat dipengaruhi oleh tekanan internasional dan bantuan luar negeri, yang sering kali menentukan prioritas pendidikan di negara-negara ini.

b. Pendidikan di Negara-Negara Skandinavia

Sebaliknya, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Finlandia memiliki sistem pendidikan yang didanai sepenuhnya oleh negara dan cenderung memiliki struktur politik yang sangat mendukung pendidikan inklusif. Menurut Sahlberg (2011) dalam *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*, sistem pendidikan di Finlandia dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Politik di negara-negara ini sering kali mendukung kebijakan pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan kesetaraan.

c. Pendidikan di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, sistem pendidikan sangat bervariasi antara negara bagian, dengan perbedaan signifikan dalam pendanaan dan kurikulum. Menurut Ravitch (2010) dalam *The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education*, kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh ideologi politik dan kepentingan lokal, seperti reformasi berbasis standar dan pilihan sekolah. Politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi semua aspek sistem pendidikan, dari standar kurikulum hingga pendanaan sekolah.

d. Pendidikan di Negara-Negara Asia Timur

Di negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, politik pendidikan sering kali berfokus pada persaingan internasional dan pencapaian akademis. Menurut Stevenson dan Lee (1996) dalam *The Korean Education System: Education Reform and Development*, tekanan untuk mencapai hasil pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan, termasuk pengenalan kurikulum yang sangat terstruktur dan ujian yang kompetitif. Pemerintah di negara-negara ini sering kali mendorong pendidikan sebagai alat untuk kemajuan ekonomi dan sosial.

e. Dampak Globalisasi terhadap Pendidikan

Globalisasi juga mempengaruhi politik pendidikan di seluruh dunia, dengan standar internasional dan pengaruh lembaga-lembaga global seperti UNESCO dan OECD. Menurut Sellar dan Lingard (2013) dalam *Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*, tes internasional seperti PISA telah mempengaruhi kebijakan pendidikan di berbagai negara dengan mendorong adopsi standar global dan perbandingan internasional. Ini menciptakan tekanan untuk melakukan reformasi pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan global sambil tetap mempertahankan kebutuhan lokal.

Deskripsi ini memberikan gambaran tentang bagaimana politik mempengaruhi sistem pendidikan di berbagai negara dan dampaknya terhadap hasil pendidikan serta kesetaraan. Referensi yang disediakan mendukung analisis ini dengan memberikan konteks dan wawasan dari berbagai perspektif internasional.

8. Politik Pendidikan di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Kontemporer

Politik pendidikan di Indonesia merupakan cerminan dari interaksi antara kebijakan pemerintah, dinamika sosial, serta perkembangan politik yang terjadi di negara ini. Sejak kemerdekaan, pendidikan telah dipandang sebagai alat strategis untuk membangun identitas nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Namun, dalam perjalanannya, politik pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang. Pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana politik pendidikan di Indonesia berkembang dari masa ke masa dan bagaimana tantangan-tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan politik dan ekonomi kontemporer.

a. Sejarah Politik Pendidikan di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, pendidikan telah menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berupaya membangun sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi keanekaragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kesadaran nasional dan memperkuat persatuan dalam negara yang baru merdeka (Tilaar, 2004).

Namun, tantangan utama pada masa ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang masih sangat minim. Pemerintah harus menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil (Bjork, 2005).

Pada era Orde Baru, politik pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi dengan pendidikan sebagai salah satu pilar utama. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mendukung program industrialisasi dan modernisasi negara. Namun, pendekatan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru juga dikritik karena mengabaikan keberagaman lokal dan memusatkan kekuasaan pendidikan di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan

ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah pusat dan daerah pinggiran (Jalal & Supriadi, 2001).

Setelah reformasi 1998, terjadi desentralisasi kekuasaan yang signifikan di Indonesia. Ini termasuk dalam bidang pendidikan, di mana wewenang untuk mengelola pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Namun, desentralisasi juga menimbulkan masalah baru, seperti ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar daerah, yang sering kali bergantung pada kemampuan ekonomi daerah tersebut (Parker & Raihani, 2011).

b. Politik Pendidikan di Era Kontemporer

Dalam beberapa tahun terakhir, politik pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan, seiring dengan perkembangan politik nasional dan tantangan global. Pemerintah saat ini, di bawah Presiden Joko Widodo, telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, dengan fokus pada penguatan pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di era industri 4.0 (Suryadarma & Jones, 2013).

Salah satu kebijakan utama yang diperkenalkan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Program ini memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin untuk mencegah mereka putus sekolah (World Bank, 2012). Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan pendidikan vokasional untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompleks (Hill & Wie, 2012).

Namun, tantangan dalam politik pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global. Indonesia harus menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia kini harus mampu mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan persaingan global. Di sisi lain,

masalah internal seperti kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan yang harus diatasi (UNESCO, 2023).

Politisasi pendidikan juga masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, terutama menjelang pemilihan umum. Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten dapat mengganggu proses pendidikan dan menciptakan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa (Suryadi, 2021).

c. Isu Pendidikan dan Pembangunan Nasional

Pendidikan di Indonesia juga menjadi alat penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah melihat pendidikan sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inovatif dan mampu bersaing di tingkat global. Salah satu inisiatif terbaru adalah Merdeka Belajar, yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Program ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta menekankan pada pengembangan karakter dan kreativitas (Makarim, 2020).

Namun, pelaksanaan program ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di berbagai daerah. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pelatihan guru yang memadai, yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara efektif (Suryadi, 2021).

d. Tantangan dan Prospek Masa Depan

Masa depan politik pendidikan di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengatasi berbagai tantangan yang ada. Penguatan kapasitas guru, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman adalah beberapa langkah yang perlu terus diperkuat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika politik jangka pendek (UNESCO, 2023).

Dalam konteks global, Indonesia perlu terus memperkuat sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di tingkat internasional. Pendidikan yang inklusif, adil, dan merata tetap menjadi agenda utama, di mana semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas (Suryadarma & Jones, 2013).

Politik pendidikan di Indonesia merupakan cerminan dari kompleksitas dan dinamika yang ada dalam masyarakat. Sejak masa kemerdekaan hingga era kontemporer, pendidikan telah digunakan sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan nasional, termasuk stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan ketimpangan kualitas pendidikan, politisasi kebijakan pendidikan, dan tantangan globalisasi. Ke depan, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, yang dapat membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur.

9. Politik dan Kurikulum: Konflik dan Kontroversi

Kurikulum pendidikan sering kali menjadi medan pertempuran politik yang intens, karena ia mencerminkan nilai-nilai dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Ketika kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh politik, keputusan tentang apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana materi tersebut disampaikan bisa menjadi sangat kontroversial. Sub bab ini mengeksplorasi bagaimana politik mempengaruhi kurikulum, termasuk konflik yang timbul dari keputusan tentang materi ajar dan bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan kesetaraan.

a. Pengaruh Ideologi Politik terhadap Kurikulum

Ideologi politik memainkan peran besar dalam menentukan kurikulum pendidikan. Menurut Apple (2004) dalam *Ideology and Curriculum*, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi politik dan sosial tertentu. Kurikulum sering kali dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, yang dapat menciptakan konflik jika nilai-nilai tersebut tidak

mencerminkan keberagaman budaya atau pandangan yang berbeda. Misalnya, keputusan tentang materi sejarah, pengajaran agama, dan teori sains seperti evolusi dapat dipengaruhi oleh pandangan politik dan sosial yang beragam.

b. Kontroversi dalam Pengajaran Sejarah dan Literatur

Salah satu area yang sering menimbulkan kontroversi adalah pengajaran sejarah dan literatur. Di banyak negara, keputusan tentang bagaimana sejarah diajarkan atau buku apa yang boleh dibaca di sekolah sering kali dipengaruhi oleh ideologi politik. Menurut Ravitch (2010) dalam *The Death and Life of the Great American School System*, di Amerika Serikat, perdebatan tentang pengajaran sejarah dan literatur sering kali mencerminkan konflik politik yang lebih luas, termasuk bagaimana sejarah yang sensitif atau kontroversial seperti perbudakan atau hak-hak sipil dipresentasikan di ruang kelas.

c. Pengaruh Kelompok Kepentingan pada Kurikulum

Kelompok kepentingan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kurikulum. Menurut Schmidt dan Prawat (2006) dalam *Curriculum Research: What We Have Learned, What We Need to Know*, berbagai kelompok seperti organisasi agama, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga pendidikan sering kali berusaha mempengaruhi kurikulum untuk mencerminkan pandangan mereka. Ini dapat menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk memenuhi standar nasional dan permintaan dari kelompok-kelompok yang memiliki agenda tertentu.

d. Perubahan Kurikulum dan Reformasi Pendidikan

Reformasi pendidikan sering kali mencakup perubahan pada kurikulum, dan perubahan ini sering kali dipengaruhi oleh agenda politik. Menurut Campbell dan Rozsnyai (2002) dalam *Quality Assurance and the Development of Course Programmes*, reformasi kurikulum dapat terjadi sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang kualitas pendidikan, ketidaksetaraan, atau tuntutan pasar tenaga kerja. Namun, perubahan ini sering kali dihadapkan pada tantangan politik, terutama jika mereka melibatkan perubahan signifikan dalam materi ajar atau metode pengajaran.

e. Dampak Sosial dari Kontroversi Kurikulum

Kontroversi seputar kurikulum dapat memiliki dampak sosial yang luas, termasuk bagaimana siswa memahami diri mereka sendiri dan masyarakat mereka. Menurut Apple (2004), kurikulum yang kontroversial dapat memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada, mempengaruhi bagaimana siswa melihat identitas dan peran mereka dalam masyarakat. Misalnya, penekanan pada pandangan tertentu dalam kurikulum dapat memperkuat stereotip atau memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Deskripsi ini memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana politik mempengaruhi kurikulum pendidikan, serta konflik dan kontroversi yang timbul dari keputusan politik terkait materi ajar dan pengajaran. Referensi yang disediakan mendukung analisis ini dengan memberikan konteks dan wawasan dari berbagai perspektif.

10. Pendanaan Pendidikan dan Ketidaksetaraan Sosial

Pendanaan pendidikan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas sistem pendidikan. Ketidaksetaraan dalam pendanaan pendidikan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mempengaruhi kesempatan pendidikan yang tersedia bagi siswa dari latar belakang yang berbeda. Sub bab ini akan membahas bagaimana alokasi dana pendidikan mempengaruhi ketidaksetaraan sosial, dengan fokus pada bagaimana keputusan politik dan struktur pendanaan berdampak pada hasil pendidikan dan kesempatan bagi semua siswa.

a. Struktur Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan sering kali merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Struktur pendanaan ini dapat mencakup alokasi anggaran dari pajak, hibah pemerintah, dan sumber daya lokal. Menurut Ladd dan Fiske (2003) dalam *The Uneven Playing Field of School Finance*, di banyak negara, alokasi dana pendidikan dapat sangat bervariasi berdasarkan lokasi geografis dan tingkat pendapatan lokal. Hal ini sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah yang lebih kaya dibandingkan dengan daerah yang kurang beruntung.

b. Dampak Ketidaksetaraan Pendanaan pada Kualitas Pendidikan

Ketidaksetaraan dalam pendanaan pendidikan dapat mempengaruhi berbagai aspek kualitas pendidikan, termasuk ukuran kelas, ketersediaan bahan ajar, dan kualitas fasilitas sekolah. Menurut Kozol (2005) dalam *The Shame of the Nation: The Restoration of Apartheid Schooling in America*, ketidaksetaraan pendanaan di Amerika Serikat telah menciptakan perbedaan yang mencolok dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di lingkungan kaya dan miskin. Sekolah-sekolah di daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas sering kali menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi, yang berdampak langsung pada kesempatan akademis dan masa depan siswa.

c. Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Pendidikan

Pendanaan pendidikan juga memiliki dampak besar pada mobilitas sosial. Menurut Sen (1999) dalam *Development as Freedom*, pendidikan adalah kunci untuk mobilitas sosial dan pembangunan pribadi. Namun, ketidaksetaraan dalam pendanaan dapat membatasi kesempatan pendidikan bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah, menghambat kemampuan mereka untuk naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai kesuksesan di pasar kerja. Ketika siswa dari latar belakang yang kurang beruntung tidak mendapatkan akses yang setara ke pendidikan berkualitas, mereka sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

d. Kebijakan Pemerintah dan Pendanaan Pendidikan

Kebijakan pemerintah mengenai pendanaan pendidikan dapat mempengaruhi seberapa adil alokasi dana dilakukan. Reformasi kebijakan, seperti pengenalan program pendanaan berbasis kebutuhan atau dana tambahan untuk sekolah-sekolah di daerah yang kurang beruntung, dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan. Menurut Ladd dan Fiske (2003), reformasi yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam pendanaan sering kali menghadapi tantangan politik dan administrasi yang signifikan. Implementasi kebijakan yang adil dan efektif memerlukan komitmen politik dan strategi yang berkelanjutan.

e. **Studi Kasus dan Analisis Internasional**

Studi kasus dari berbagai negara memberikan wawasan tentang bagaimana ketidaksetaraan pendanaan dapat diatasi. Misalnya, di beberapa negara Eropa, kebijakan pendanaan pendidikan yang berfokus pada redistribusi sumber daya telah berhasil mengurangi ketidaksetaraan pendidikan. Menurut UNESCO (2015) dalam *Education for All Global Monitoring Report*, negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan telah menunjukkan peningkatan dalam hasil pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Deskripsi ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana pendanaan pendidikan mempengaruhi ketidaksetaraan sosial dan aksesibilitas pendidikan. Referensi yang disediakan memberikan konteks dan data yang relevan untuk memahami dampak dari ketidaksetaraan pendanaan dan kebijakan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut.

11. Politik Pendidikan dan Kualitas Pengajaran

Kualitas pengajaran adalah elemen kunci dalam sistem pendidikan yang menentukan hasil belajar siswa. Politik pendidikan sering mempengaruhi kualitas pengajaran melalui berbagai kebijakan dan reformasi yang berdampak pada kondisi kerja guru, kurikulum, dan standar pendidikan. Sub bab ini akan membahas hubungan antara politik pendidikan dan kualitas pengajaran, termasuk bagaimana kebijakan politik dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran dan pengalaman belajar siswa.

a. **Kebijakan Penggajian dan Kondisi Kerja Guru**

Kebijakan penggajian dan kondisi kerja guru merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pengajaran. Menurut Darling-Hammond (2000) dalam *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*, kebijakan politik yang mempengaruhi gaji guru, pelatihan profesional, dan kondisi kerja dapat berdampak langsung pada motivasi dan efektivitas guru. Guru yang menerima kompensasi yang adil dan memiliki akses ke pelatihan yang berkualitas tinggi cenderung lebih efektif dalam mengajar dan berkomitmen untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Pengaruh Kurikulum dan Standar Pendidikan

Politik pendidikan juga mempengaruhi kurikulum dan standar pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Menurut Apple (2004) dalam *Ideology and Curriculum*, keputusan politik tentang kurikulum dan standar sering kali mencerminkan nilai-nilai ideologis dan sosial yang dominan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi metode pengajaran dan materi ajar yang digunakan oleh guru. Ketika kurikulum terlalu terpusat pada standar tertentu atau terlalu terfokus pada pengujian, hal ini dapat membatasi fleksibilitas guru dalam mengadaptasi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individual siswa.

c. Dampak Reformasi Pendidikan pada Kualitas Pengajaran

Reformasi pendidikan sering kali melibatkan perubahan dalam kebijakan pengajaran dan evaluasi. Menurut Ravitch (2010) dalam *The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education*, reformasi seperti pengenalan standar tinggi dan ujian berbasis standar sering kali mempengaruhi cara guru mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Meskipun reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mereka juga dapat menciptakan tekanan tambahan pada guru dan mengurangi waktu yang tersedia untuk pengajaran kreatif dan interaktif.

d. Peran Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Profesional Guru

Kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan profesional guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Menurut Hargreaves (2003) dalam *Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity*, kebijakan yang menyediakan pelatihan berkelanjutan dan kesempatan pengembangan profesional dapat membantu guru untuk tetap terkini dengan praktik terbaik dan inovasi pendidikan. Kebijakan yang mendukung kolaborasi antar guru dan pengembangan komunitas belajar juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran.

e. Evaluasi dan Akuntabilitas Pengajaran

Politik pendidikan sering mempengaruhi sistem evaluasi dan akuntabilitas pengajaran. Menurut Hanushek dan Rivkin (2010) dalam *Generalizations about Using Value-Added Measures of*

Teacher Quality, sistem evaluasi berbasis data, seperti penilaian nilai tambah (value-added measures), digunakan untuk mengukur efektivitas guru. Namun, penggunaan sistem ini dapat menimbulkan kontroversi karena dapat mempengaruhi cara guru mengajar dan berfokus pada hasil ujian. Sistem evaluasi yang efektif harus mempertimbangkan konteks pengajaran dan mendukung pengembangan profesional guru.

Deskripsi ini menguraikan bagaimana politik pendidikan mempengaruhi kualitas pengajaran melalui kebijakan penggajian, kurikulum, reformasi pendidikan, pengembangan profesional, dan sistem evaluasi. Referensi yang disediakan memberikan dasar untuk memahami hubungan kompleks antara politik dan kualitas pengajaran, serta implikasinya bagi hasil pendidikan dan pengalaman siswa.

12. Politik Pendidikan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan isu penting yang sering dipengaruhi oleh kebijakan politik. Politika pendidikan dapat memiliki dampak signifikan pada akses dan kualitas pendidikan untuk siswa berdasarkan gender, mempengaruhi peluang dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Sub bab ini akan mengeksplorasi bagaimana politik pendidikan mempengaruhi kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan gender di berbagai konteks.

a. Kebijakan Pendidikan dan Kesetaraan Gender

Kebijakan pendidikan yang dirancang untuk mempromosikan kesetaraan gender mencakup berbagai pendekatan, dari penerapan undang-undang anti-diskriminasi hingga pengembangan program khusus untuk mendukung siswa perempuan atau laki-laki. Menurut UNESCO (2015) dalam *Global Education Monitoring Report: Education for All 2015*, kebijakan pendidikan yang sukses dalam mempromosikan kesetaraan gender sering kali melibatkan penetapan tujuan yang jelas, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan program-program yang mendukung partisipasi setara di semua tingkat pendidikan.

- b. Pengaruh Politik terhadap Akses Pendidikan untuk Perempuan
- Di banyak negara, akses pendidikan untuk perempuan telah menjadi fokus utama dari kebijakan pendidikan. Menurut Miske (2003) dalam *The Gender and Education for All: The Leap to Equality*, kebijakan yang mendukung pendidikan perempuan dan program-program khusus, seperti beasiswa dan sekolah khusus perempuan, dapat membantu mengatasi kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Namun, pengaruh politik, baik dalam bentuk undang-undang maupun norma sosial, dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan secara efektif.
- c. Kesetaraan Gender dalam Kurikulum dan Metode Pengajaran
- Kesetaraan gender dalam kurikulum dan metode pengajaran juga merupakan area yang sering dipengaruhi oleh politik. Menurut Lingard dan Sellar (2013) dalam *Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*, kurikulum dan metode pengajaran yang mendukung kesetaraan gender berusaha untuk menghilangkan bias gender dan memastikan bahwa materi ajar mencerminkan perspektif yang inklusif. Politik dapat mempengaruhi keputusan tentang apa yang diajarkan dan bagaimana materi tersebut disampaikan, yang berdampak pada pembentukan sikap dan pemahaman siswa tentang kesetaraan gender.
- d. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender
- Implementasi kebijakan kesetaraan gender sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk norma sosial dan budaya yang mengakar. Menurut Kabeer (2005) dalam *Gender and Social Protection Strategies: The Social Protection of Women and Girls*, meskipun kebijakan pendidikan mungkin dirancang untuk mempromosikan kesetaraan gender, tantangan budaya dan sosial dapat menghambat pencapaiannya. Misalnya, di beberapa masyarakat, tekanan sosial atau norma tradisional dapat membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan atau mempengaruhi cara mereka diperlakukan di lingkungan pendidikan.
- e. Studi Kasus dan Inisiatif Global
- Studi kasus dari berbagai negara memberikan contoh tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat mendukung kesetaraan gender dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Misalnya,

inisiatif global seperti "Girls' Education Initiative" oleh UNICEF telah berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan untuk anak perempuan di negara-negara berkembang. Menurut UNICEF (2018) dalam *The State of the World's Children 2018: Children in a Digital World*, program-program ini menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan mengurangi kesenjangan gender di berbagai negara.

Deskripsi ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana politik pendidikan mempengaruhi kesetaraan gender dalam pendidikan. Referensi yang disediakan memberikan data dan analisis tentang kebijakan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai konteks pendidikan.

EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Ada banyak alasan mengapa pendidikan itu penting, laporan ini berfokus pada kontribusinya terhadap pertumbuhan dan hasil ekonomi. Pendidikan 'dapat didefinisikan sebagai persediaan keterampilan, kompetensi, dan karakteristik lain yang meningkatkan produktivitas' (WEF 2016). Secara umum, pendidikan-sebagai komponen penting dari modal manusia suatu negara-meningkatkan efisiensi setiap pekerja dan membantu perekonomian untuk bergerak ke atas rantai nilai di luar tugas-tugas manual atau proses produksi yang sederhana (WEF 2016). Modal manusia telah lama dianggap sebagai ciri khas sistem ekonomi dan penelitian lebih lanjut telah membuktikan dampak pendidikan terhadap pertumbuhan produktivitas secara empiris.

World Economic Forum 2016 menyarankan tiga jalur yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu negara. Pertama, pendidikan meningkatkan kemampuan kolektif tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada dengan lebih cepat. Kedua, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara khusus memfasilitasi transfer pengetahuan tentang informasi, produk, dan teknologi baru yang diciptakan oleh orang lain (Barro dan Lee 2010). Terakhir, dengan meningkatkan kreativitas, hal ini akan meningkatkan kapasitas suatu negara untuk menciptakan pengetahuan, produk, dan teknologi baru.

Ada banyak literatur tentang topik ini, yang menunjukkan harapan yang telah lama dipegang bahwa pembentukan modal manusia (status pendidikan dan kesehatan penduduk) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang lebih baik tidak hanya menghasilkan pendapatan individu yang lebih tinggi, tetapi juga merupakan prasyarat yang diperlukan (meskipun tidak selalu cukup) untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang (IIASA 2008). Woessmann 2015 mensurvei bukti empiris terbaru yang menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan peran penting pendidikan bagi kemakmuran individu dan masyarakat.

Pendidikan adalah penentu utama pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan. Mengabaikan dimensi ekonomi dari pendidikan akan membahayakan kemakmuran generasi mendatang, dengan dampak yang meluas pada kemiskinan, pengucilan sosial, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial (Woessman 2015). Untuk setiap US\$1 yang dibelanjakan untuk pendidikan, sebanyak US\$10 hingga US\$15 dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi (UNESCO 2012). Jika 75% lebih banyak anak berusia 15 tahun di 46 negara termiskin di dunia dapat mencapai nilai terendah OECD untuk matematika, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 2,1% dari angka dasar dan 104 juta orang dapat dihindari dari kemiskinan ekstrem (UNESCO 2012).

Salah satu aspek penting dari hubungan antara ekonomi dan pendidikan adalah dampak pendidikan terhadap hasil perekonomian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan ekonomi individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan upah yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan keamanan kerja yang lebih baik. Selain itu, pendidikan seringkali dipandang sebagai pendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi di tingkat nasional.

Investasi di bidang pendidikan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah selama satu tahun dapat menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 10%. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Sbm 2014 memberikan kesimpulan bahwa Pendidikan di proxy dengan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diproxy dengan PDB

Di sisi lain, faktor ekonomi juga membentuk sistem pendidikan dan hasilnya. Pendanaan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Sumber daya yang memadai diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, termasuk guru yang terlatih, fasilitas terkini, dan materi pengajaran. Ketimpangan ekonomi

dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan dan hasil pendidikan, sehingga melanggengkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Hubungan antara ekonomi dan pendidikan juga dipengaruhi oleh dinamika pasar tenaga kerja. Permintaan akan keterampilan dan jenis pekerjaan yang tersedia dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur industri. Sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini untuk memastikan bahwa siswa dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja.

Kebijakan dan reformasi di bidang pendidikan seringkali didorong oleh pertimbangan ekonomi. Pemerintah dan pembuat kebijakan mengambil keputusan mengenai pendanaan pendidikan, desain kurikulum, dan pelatihan guru berdasarkan analisis dan proyeksi ekonomi. Misalnya, fokus pada pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di banyak negara didorong oleh manfaat ekonomi yang dirasakan dari tenaga kerja yang sangat terampil di bidang-bidang tersebut.

Hubungan antara ekonomi dan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stabil juga dapat memberikan dukungan yang kuat bagi sistem pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Pendidikan yang berkualitas juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena individu yang terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam suatu negara. Individu yang terdidik memiliki pengetahuan yang lebih luas dan kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan teknologi dan menciptakan ide-ide baru yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil juga memberikan dukungan penting bagi pendidikan. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat cenderung memiliki anggaran yang lebih besar untuk pendidikan.

Dana yang cukup dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil juga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, sehingga individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

a. Hubungan Antara Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan dan ekonomi adalah dua aspek yang saling terkait erat dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas seringkali dianggap sebagai fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, ekonomi yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi warganya.

Hubungan antara pendidikan dan ekonomi beragam, dengan pendidikan berfungsi sebagai penentu penting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan meningkatkan modal manusia, yang penting untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu negara dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Grace Giving International, 2021). Investasi dalam pendidikan tidak hanya menumbuhkan kemampuan individu tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap output ekonomi suatu negara, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian yang menghubungkan pencapaian pendidikan dengan tingkat pertumbuhan PDB (Macheret, 2016). Perubahan teknologi memainkan peran penting dalam hubungan ini, karena terkait erat dengan kemajuan pendidikan. Integrasi pengetahuan dan inovasi teknologi ke dalam kerangka pendidikan meningkatkan produktivitas dan kegiatan ekonomi^[3]. Selain itu, dimasukkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan telah terbukti meningkatkan output pendidikan, sehingga berdampak positif pada ekonomi^[4]. Integrasi teknologi ini sangat penting dalam ekonomi global, di mana kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah yang terpenting. Selanjutnya, rasio pendaftaran bruto di pendidikan dasar, menengah, dan tersier berfungsi sebagai indikator komitmen suatu negara terhadap pendidikan dan potensi pertumbuhan ekonominya. Rasio pendaftaran yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan kinerja ekonomi yang lebih baik, karena mencerminkan investasi

masyarakat dalam pembentukan modal manusia. Investasi ini bukan sekedar komitmen keuangan; itu juga mencakup pengembangan modal sosial, yang saling terkait dengan sumber daya manusia dan penting untuk mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah faktor penting lain yang mempengaruhi hubungan ini. Peningkatan investasi pemerintah dalam pendidikan telah dikaitkan dengan peningkatan pembangunan ekonomi dan PDB yang lebih tinggi ^[10]. Namun, membangun hubungan yang tepat antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi kompleks, karena berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi dinamika ini ^[9]. Singkatnya, interaksi antara pendidikan dan ekonomi dicirikan oleh hubungan timbal balik di mana pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan modal manusia, inovasi teknologi, dan peningkatan modal sosial. Bukti menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan dalam pendidikan sangat penting untuk mencapai kemakmuran ekonomi jangka panjang, karena meletakkan dasar bagi tenaga kerja terampil yang mampu menavigasi tantangan ekonomi global yang berubah dengan cepat.

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pendidikan terletak pada kenyataan bahwa pendidikan merupakan fasilitator bagi pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia, yang diharapkan dapat memberikan hasil yang akan berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Efek ini dapat dilihat di daerah-daerah dengan persentase orang yang berpendidikan tinggi. Orang-orang tersebut dapat menyalurkan pengetahuan mereka ke dalam tindakan nyata yang mengarah pada pengembangan ekonomi dibandingkan dengan daerah-daerah yang hanya memiliki sedikit orang yang berpendidikan tinggi.

Contoh hubungan antara pembangunan ekonomi dan pendidikan adalah nilai yang diperoleh dari peningkatan pengetahuan. Pendidikan melibatkan proses formal atau informal untuk menginstruksikan orang dan menyimpan modal pengetahuan di dalam diri mereka. Misalnya, ketika seseorang pergi ke sekolah untuk berlatih sebagai insinyur, prosesnya akan melibatkan serangkaian pelatihan, tes, dan bentuk-bentuk pengajaran praktis dan teoretis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tersebut. Setelah seseorang menjalani pelatihan formal ini, dia akan membantu mengembangkan ekonomi melalui penerapan

pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ke berbagai proyek yang pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan ekonomi. Contoh lain dari hubungan antara pembangunan ekonomi dan pendidikan adalah kemampuan anggota masyarakat yang berpendidikan untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk menemukan peluang baru untuk menciptakan kekayaan. Sebagai contoh, kebanyakan orang di negara-negara dunia ketiga mungkin tidak dapat mengembangkan model yang akan membantu mereka secara efektif memanfaatkan sumber daya mereka karena rendahnya rasio orang yang berpendidikan dibandingkan dengan persentase orang yang berpendidikan di negara-negara maju. Contoh dari skenario ini dapat dilihat dalam situasi di mana terdapat kekurangan infrastruktur yang tepat untuk mempertahankan distribusi energi yang efisien, yang menyebabkan pemadaman listrik secara terus-menerus dan kurangnya daya di bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Situasi seperti ini memengaruhi kemampuan suatu negara untuk berproduksi dengan baik dan sering kali menghasilkan Produk Domestik Bruto yang rendah untuk wilayah tersebut.

Ketentuan pendidikan di suatu negara merupakan salah satu faktor penentu utama dari komposisi dan pertumbuhan output dan ekspor negara tersebut dan merupakan unsur penting dalam kapasitas sistem untuk meminjam teknologi asing secara efektif. Sebagai contoh, kesehatan dan gizi, serta pendidikan dasar dan menengah meningkatkan produktivitas pekerja, baik di pedesaan maupun di perkotaan; pendidikan menengah, termasuk kejuruan, memfasilitasi perolehan keterampilan dan kapasitas manajerial; pendidikan tinggi mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dasar, pemilihan impor teknologi yang tepat, serta adaptasi dan pengembangan teknologi di dalam negeri; pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga merupakan elemen penting dalam pengembangan lembaga-lembaga utama, seperti pemerintah, hukum, dan sistem keuangan, yang semuanya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris di tingkat mikro dan makro semakin memperjelas hubungan-hubungan ini.

Pembangunan ekonomi dan pendidikan terkait dengan bagaimana pendidikan mengarah pada kemampuan individu untuk menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, seorang individu yang berpendidikan mungkin dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan untuk mengembangkan barang-barang

seperti produk bertenaga surya serta peralatan dan mesin lainnya. Produk-produk ini dapat meningkatkan permintaan akan barang-barang yang diproduksi secara lokal dan juga meningkatkan PDB negara-negara tersebut. Telah diterima secara luas bahwa untuk beradaptasi dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat, dan dunia yang menekankan peran informasi, pengetahuan, dan keterampilan, negara-negara maju perlu terus meningkatkan kualitas tenaga kerja mereka secara keseluruhan (Ozturk, 2001).

b. Pendidikan sebagai Investasi Ekonomi

Pendidikan sering dianggap sebagai investasi ekonomi yang paling menguntungkan bagi individu dan masyarakat. Menurut teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Gary Becker, pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan output ekonomi dan pendapatan individu.

Studi oleh Psacharopoulos dan Patrinos (2004) menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu rata-rata sebesar 10% di seluruh dunia. Selain itu, investasi dalam pendidikan juga meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, yang penting dalam ekonomi yang semakin didorong oleh pengetahuan dan inovasi.

c. Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan

Pendidikan adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sebuah laporan oleh UNESCO (2014) menunjukkan bahwa jika semua orang dewasa di negara-negara berkembang menyelesaikan pendidikan menengah, tingkat kemiskinan global dapat berkurang hingga 50%. Pendidikan memberikan keterampilan yang memungkinkan individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Lebih jauh lagi, pendidikan juga membantu dalam memperluas pilihan hidup seseorang, termasuk dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini terbukti dari studi yang menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan lebih cenderung memiliki anak yang sehat dan lebih sedikit mengalami kematian bayi.

d. Pendidikan dan Inovasi Ekonomi

Inovasi adalah kunci dalam perekonomian modern, dan pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan tenaga kerja yang inovatif. Sistem pendidikan yang mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) berkontribusi langsung terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara dengan sistem pendidikan yang unggul seperti Amerika Serikat dan Jerman telah menjadi pusat inovasi global, berkat investasi besar dalam pendidikan tinggi dan R&D.

Sebagai contoh, laporan dari OECD (2010) menyoroti bahwa negara-negara dengan investasi tinggi dalam pendidikan tinggi dan R&D menunjukkan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan, akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya hubungan langsung antara kemampuan inovasi suatu negara dengan kualitas pendidikannya.

e. Tantangan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Meskipun manfaat pendidikan terhadap ekonomi sangat jelas, tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas masih banyak dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara berkembang. Menurut laporan UNESCO (2020), ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan merupakan salah satu hambatan terbesar. Kesenjangan ekonomi membuat banyak anak dari keluarga miskin atau dari daerah pedesaan sulit mendapatkan pendidikan yang memadai

Selain itu, kualitas pendidikan yang tidak merata dan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi masalah serius. Banyak lulusan yang menemukan bahwa keterampilan yang mereka pelajari di sekolah tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja modern. Menurut World Bank (2018), hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan baru di banyak negara berkembang.

f. Peran Pemerintah dalam Mengintegrasikan Pendidikan dan Ekonomi

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan pendidikan dengan pembangunan ekonomi. Kebijakan yang mendukung investasi dalam pendidikan, baik dari sektor publik maupun swasta, dapat memperkuat hubungan antara pendidikan dan

ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia seperti Finlandia dan Swedia telah menunjukkan bagaimana investasi pemerintah dalam pendidikan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah dengan cepat, terutama di era digital ini. Program pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, dan kemitraan dengan sektor swasta adalah beberapa cara di mana pemerintah dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi.

Wanda Oktaviani Putri (2022) dalam sebuah tulisan yang berjudul bagaimana hubungan antara Pendidikan dan ekonomi mengatakan bahwa: Pendidikan merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun perdesaan. Pendidikan juga merupakan salah satu poin pending di dalam meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusianya, sehingga diharapkan dengan melalui pendidikan, keterampilan dan juga kemampuan berfikir seseorang tersebut akan bisa meningkat dan akhirnya bisa meningkatkan suatu produktivitasnya.

Di dalam pendidikan tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah ekonomi, baik itu mau secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun peran ekonomi di dalam dunia pendidikan tersebut ialah, yang pertama pendidikan sebagai bentuk investasi dan yang kedua yaitu investasi di dalam dunia pendidikan, di mana pada poin ini investasi di dalam dunia pendidikan ialah penanaman suatu modal dengan menggunakan cara mengalokasikan suatu biaya agar dapat menyelenggarakan pendidikan dan juga dapat mengambil keuntungan pada sumber daya manusianya yang didapatkan melalui pendidikan tersebut. Ketiga, adanya peran dan juga fungsi dalam pendidikan, di mana perannya hanya menentukan tetapi bukanlah sebagai bentuk pemegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang lebih dapat menentukan berjalan atau tidaknya, maju atau mundurnya suatu lembaga pendidikan ini di banding pada bentuk sector ekonomi, yaitu disebut dengan dedikasi.

Adapun fungsi ekonomi di dalam dunia pendidikan ialah dapat menunjang kelancaran di dalam proses berjalannya pendidikan bukanlah merupakan suatu modal yang bisa dikembangkan dan juga bisa mendapatkan suatu keuntungan yang berlimpah.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dalam daerah perdesaan ialah, sumber daya manusianya dan juga pendidikan yang di anggap dapat memainkan peran pokok agar bisa membentuk suatu kemampuan di dalam daerah agar bisa menyerap teknologi yang modern dan juga bisa mengembangkan kapasitas produksi supaya terciptanya pertumbuhan dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu pendidikan dapat dimasukkan ke dalam investasi pembangunan yang kemudian hasilnya bisa di nikmati. Investasi yang dilakukan di dalam dunia pendidikan tidaklah hanya bermanfaat bagi perorangan saja, tetapi juga suatu komunitas bisnis dan juga masyarakat umum. Dalam Pengembangan Sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dapat mendorong secara langsung pada pertumbuhan ekonomi tersebut, dan juga karena pengeluaran pada pendidikan haruslah bisa di pandang sebagai suatu investasi yang produktif dan tidak semena mena dapat dilihat sebagai sesuatu bentuk yang konsumtif tanpa adanya manfaat sebaliknya yang jelas. Pendidikan ialah proses jalan menuju kemajuan dan juga bentuk pencapaian kesejahteraan sosial serta ekonomi, begitupun sebaliknya kegagalan di dalam membangun pendidikan akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu seperti kriminalitas, pengangguran, adanya penyalahgunaan narkoba, hal ini yang menjadikan beban pada bidang sosial politik bagi pemerintahnya.

Hubungan antara ekonomi dan juga pendidikan tidak terlepas dari masalah pembangunan. Di dalam konsep pembangunan bidang sosial ekonomi itu sendiri sangatlah beragam hal ini tergantung pada konteks penggunaannya. Oleh karena itu sangatlah penting suatu arti pendidikan di dalam bidang ekonomi di indonesia itu sendiri agar dapat meningkatkan produktivitas belajar agar generasi penerus bangsa yang masih mengenyam pendidikan bisa lebih memahami dan juga mengetahui ilmu ekonomi dan juga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia yang masih terpuruk ini. Dengan adanya pendidikan inilah bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mungkin bisa lebih profesional baik itu pada sector bidang industri maupun sector lainnya. Nah dari sinilah dapat kita

lihat dampaknya ataupun berpengaruh pada bidang ekonomi bangsa Indonesia. <https://www.kompasiana.com/wanda87579/629727fdce96e5641445a213/bagaimanakah-hubungan-antara-pendidikan-dan-ekonomi>

Kesimpulannya, hubungan antara ekonomi dan pendidikan bersifat simbiosis. Pendidikan merupakan pendorong sekaligus hasil pembangunan ekonomi. Investasi di bidang pendidikan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu, sementara faktor ekonomi membentuk sistem pendidikan dan hasil-hasilnya. Memahami dan mengatasi keterkaitan antara ekonomi dan pendidikan sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Hubungan antara ekonomi dan pendidikan sangatlah kompleks dan mempunyai banyak segi. Pendidikan dan perekonomian saling berkaitan erat, dan perubahan pada salah satu aspek dapat berdampak besar pada aspek lainnya. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan antara faktor ekonomi dan pendidikan:

- a. Sumber Daya Manusia: Pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Modal manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh individu melalui pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi seringkali lebih produktif dan mudah beradaptasi, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang lebih tinggi.
- b. Pembangunan Ekonomi: Pendidikan dianggap sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Populasi yang berpendidikan tinggi dapat menarik investasi, mendorong inovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri seperti teknologi, layanan kesehatan, dan penelitian. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi individu serta kesejahteraan suatu negara secara keseluruhan.
- c. Ketimpangan Pendapatan: Pendidikan dapat memperburuk atau meringankan ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Akses terhadap pendidikan berkualitas dapat memberdayakan individu dari latar belakang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan prospek ekonomi dan mobilitas sosial mereka. Namun, kesenjangan dalam kesempatan pendidikan dapat

memperkuat ketimpangan pendapatan jika kelompok tertentu mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas.

- d. **Pasar Tenaga Kerja:** Tingkat pendidikan seseorang sering kali menentukan kelayakan kerja dan potensi penghasilannya. Individu yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki akses terhadap peluang kerja yang lebih luas dan cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Permintaan akan keterampilan dan kualifikasi tertentu juga dapat berdampak pada struktur pasar tenaga kerja secara keseluruhan.
- e. **Pendanaan Pendidikan:** Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pendanaan pendidikan di berbagai tingkatan, termasuk sekolah negeri, perguruan tinggi, dan universitas. Selama krisis ekonomi, keterbatasan anggaran dapat menyebabkan berkurangnya investasi di bidang pendidikan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber daya pendidikan.
- f. **Pembelajaran Seumur Hidup:** Dalam perekonomian global yang berubah dengan cepat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi hal yang penting. Seiring berkembangnya industri dan munculnya teknologi baru, individu perlu memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru sepanjang karier mereka agar tetap kompetitif dan mudah beradaptasi di pasar tenaga kerja.
- g. **Pendidikan sebagai sebuah Industri:** Pendidikan itu sendiri adalah sebuah industri yang memiliki implikasi ekonomi. Hal ini melibatkan pengeluaran untuk infrastruktur, material, gaji guru, dan biaya administrasi. Sektor pendidikan dapat berkontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja suatu negara, sehingga menjadikannya sebagai penggerak perekonomian yang penting.
- h. **Penelitian dan Inovasi:** Institusi pendidikan tinggi sering kali memainkan peran penting dalam penelitian dan inovasi. Mereka berkontribusi terhadap pengembangan teknologi, produk, dan layanan baru, yang dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian, termasuk penciptaan industri baru.
- i. **Kebijakan Pendidikan dan Ekonomi:** Pemerintah dan pembuat kebijakan sering kali menerapkan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan ini dapat mencakup inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses

terhadap pendidikan, dan menyelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Permasalahan pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Makalah ini mengemukakan pendapat bahwa pendidikan didasarkan pada hasil ekonomi. Berdasarkan bukti empiris terkini, hal ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan di perekonomian modern yang berbasis pengetahuan. Mengabaikan dimensi ekonomi pendidikan akan membahayakan kesejahteraan generasi mendatang, yang berdampak luas pada kemiskinan, pengucilan sosial, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Para pembuat kebijakan yang tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan harus fokus pada hasil pendidikan, bukan pada masukan atau pencapaian. (Woessmann, 2016)

a. Pendidikan sebagai Investasi

Pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mengalami stagnansi dan ambivalensi karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog Pendidikan diantaranya Gary Besker (1964, 1975, 1993) mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio-budaya.

Kritik Becker ini justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis semata, tetapi lebih dari itu pendidikan harus dilihat dalam perspektif dan dimensi sosial serta budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan. Perspektif dan dimensi ini merupakan hal yang lebih penting dari sekadar investasi ekonomi. Karena pendidikan terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity).

Beberapa penelitian neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung dan seluruh sektor pembangunan

makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia Kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya di berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya. Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan Masyarakat itu sendiri.

Pendidikan dapat dianggap sebagai investasi sumber daya manusia karena pendidikan memberikan kontribusi dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai investasi, pendidikan memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan individu yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup individu tersebut. Pendidikan juga memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa.

Terdapat tiga tataran pendidikan yang dapat dilihat dari perspektif investasi, yaitu:

1. Tataran makro pendidikan: Pendidikan dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai masukan komponen dari sistem yang lebih luas.
2. Tataran mikro pendidikan: Pendidikan dilihat dari perspektif individu, di mana individu memandang pendidikan sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan individu.
3. Proses belajar mengajar di kelas: Pendidikan dilihat dari perspektif proses belajar mengajar di kelas, di mana pendidikan dianggap sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan jangka

panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan individu yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup individu tersebut.

Konsep pendekatan pendidikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa adalah bahwa pendidikan dianggap sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan individu yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup individu tersebut. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai masukan komponen dari sistem yang lebih luas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Pendidikan juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia terdidik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi di dalam masyarakat yang menuju ke arah modernisasi dan industri.

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan individu yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup individu tersebut. Pendidikan juga memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Terdapat tiga tataran pendidikan yang dapat dilihat dari perspektif investasi, yaitu tataran makro pendidikan, tataran mikro pendidikan, dan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi di dalam masyarakat yang menuju ke arah modernisasi dan industri.

Konsep pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai suatu proses pembelajaran, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan dalam bentuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu. Selain itu, makalah ini juga

mengaitkan konsep pendidikan sebagai investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. [object Object], (Siregar, *et al.*, 2022)

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, investasi dalam pendidikan dianggap sebagai stimulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik dalam jangka panjang. Kedua, sektor pendidikan dianggap sebagai penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, karena pendidikan memberikan *high rate of return* di masa mendatang. Ketiga, investasi dalam pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keempat, pengeluaran pemerintah yang proporsional dan tepat sasaran terhadap program pendidikan (seperti rintisan wajib belajar 12 tahun atau pendidikan menengah universal) memberikan dampak percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Subroto, 2014).

Inti dari perspektif teorinya adalah bahwa pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, yang mana dalam jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Dalam proses pembangunan, teori human capital tersebut setidaknya harus memiliki dua syarat keharusan. Pertama, adanya pemanfaatan teknologi secara efisien serta adanya sumber daya manusia yang mengelola dan/atau menggunakan teknologi tersebut. Sumber daya manusia dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan teori human capital percaya bahwa investasi dalam pendidikan merupakan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. (Subroto, 2014)

Sedangkan Dahal (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nepal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan

menengah dan tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB per kapita di Nepal. Meskipun pendidikan dasar juga memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya kurang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik, melakukan upaya serius untuk Universalisasi Pendidikan Dasar, dan mengurangi angka putus sekolah di semua tingkatan pendidikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Dahal, 2016).

b. Investasi dalam Pendidikan

Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang atau jasa. Kenneth J. Arrow (1962) mengemukakan bahwa istilah investasi atau *investment* merupakan alokasi *current resources* yang mempunyai alternatif produktif yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menambah keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang. Biaya atau cost suatu investasi merupakan keuntungan yang diperoleh dibagi dengan penggunaan sumber daya dalam berbagai kegiatan lain. Dengan demikian jelas bahwa investasi merupakan penanaman modal atau uang yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan keuntungan melalui produk yang dihasilkan.

Sementara itu pendidikan merupakan usaha manusia untuk membangun manusia itu sendiri dengan segala masalah dan spektrumnya yang terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Hal ini berarti bahwa inti pendidikan itu adalah pembelajaran seumur hidup (*life long learning*), sementara bentuk pendidikan formal, pendidikan non formal (luar sekolah) dan sebagainya hanya merupakan modus operandi dari proses pendidikan. Pendidikan disini dimaksud untuk meningkatkan martabat manusia agar mempunyai keterampilan dan kemampuan sehingga produktivitasnya meningkat. Oleh sebab itu maka hasil pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang sangat berguna dalam pembangunan suatu negara. (Widiansyah, 2017)

c. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi

Dalam artikel "Relationship between School Education and Economic Growth: SAARC Countries" yang diterbitkan dalam

International Journal of Economics and Financial Issues, peneliti mengkaji hubungan antara pendidikan sekolah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara SAARC. Mereka menggunakan data panel dinamis untuk menganalisis dampak pendaftaran pendidikan tinggi, menengah, dan dasar terhadap pertumbuhan PDB, serta mempertimbangkan variabel kontrol seperti tingkat inflasi dan modal fisik. Mereka menemukan bahwa pendidikan tinggi memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara pendidikan menengah dan dasar juga berkontribusi, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan ekonomi di negara-negara SAARC, menyoroti pentingnya modal manusia dalam fungsi produksi dan menekankan perlunya investasi dalam pendidikan tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel ini menggunakan data dari World Development Indicators (WDI) sebagai sumber data sekunder yang dianggap autentik dan dapat diandalkan. Mereka juga menyoroti pentingnya penggunaan model data panel dinamis dalam menganalisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hubungan antara pendidikan sekolah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara SAARC, serta menyoroti implikasi kebijakan yang relevan untuk pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Artikel ini memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori hubungan antara pendidikan sekolah dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara-negara SAARC. Dengan menggunakan data panel dinamis, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang dampak positif pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara juga mempertimbangkan kontribusi pendidikan menengah dan dasar.

Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya modal manusia dalam fungsi produksi, yang menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tinggi dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara SAARC. Dengan demikian, artikel ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk mendukung teori-teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran penting pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, penggunaan model data panel dinamis juga memberikan kontribusi metodologis yang penting

dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis yang relevan dalam pengembangan teori ekonomi.

Pendidikan berkontribusi untuk meningkatkan distribusi pendapatan dalam masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, pendidikan membantu meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan fleksibilitas intelektual angkatan kerja, yang pada gilirannya menghasilkan upah yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Kedua, pendidikan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja dan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ketiga, pendidikan membantu mengurangi kemiskinan dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri dan menjadi wirausaha. Terakhir, pendidikan membantu meningkatkan mobilitas sosial dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan jenjang sosial dan mencapai tingkat pendapatan dan status yang lebih tinggi.

Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan dalam beberapa cara. Pertama, pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan membantu mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah, yang penting untuk kewirausahaan dan inovasi. Ketiga, pendidikan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis baru, yang dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pendidikan membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen, yang penting untuk menjalankan bisnis dan organisasi yang sukses.

Pendidikan berdampak pada kemiskinan dan kemajuan teknologi dalam perekonomian suatu negara melalui beberapa cara. Pertama, pendidikan membantu mengurangi kemiskinan dengan membekali

individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka. Kedua, pendidikan membantu mendorong kemajuan teknologi dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru. Ketiga, pendidikan membantu mendorong inovasi dan kreativitas, yang penting bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, pendidikan membantu mendorong penelitian dan pengembangan, yang penting bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pendidikan membantu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam perekonomian dan masyarakat. (OZTURK, 2001)

Dampak Pendidikan terhadap Ekonomi

Perekonomian suatu negara menjadi lebih produktif seiring dengan meningkatnya proporsi pekerja berpendidikan karena pekerja berpendidikan dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan baca tulis dan berpikir kritis dengan lebih efisien. Namun, mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga membutuhkan biaya. Sebuah negara tidak harus menyediakan jaringan perguruan tinggi atau universitas yang luas untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan; negara dapat menyediakan program literasi dasar dan tetap melihat peningkatan ekonomi.

Negara-negara yang memiliki porsi lebih besar dari penduduknya yang bersekolah dan lulus sekolah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan negara-negara yang memiliki tenaga kerja yang kurang berpendidikan. Akibatnya, banyak negara menyediakan dana untuk pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Dalam hal ini, pendidikan merupakan investasi dalam sumber daya manusia, sama halnya dengan investasi dalam peralatan yang lebih baik. Menurut UNESCO dan Program Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), rasio jumlah anak usia sekolah menengah resmi yang terdaftar di sekolah terhadap jumlah anak usia sekolah menengah resmi dalam populasi (disebut sebagai rasio partisipasi), lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang (Bhattarai, *et al.*, 2015).

Rasio partisipasi berbeda dengan metrik untuk menghitung pengeluaran pendidikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB), yang tidak selalu berkorelasi kuat dengan tingkat pendidikan penduduk suatu negara. PDB mewakili output barang dan jasa suatu negara. Oleh karena itu, membelanjakan proporsi PDB yang tinggi untuk pendidikan tidak memastikan bahwa populasi suatu negara lebih terdidik. Untuk bisnis, kemampuan intelektual karyawan dapat diperlakukan sebagai aset. Aset ini dapat digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang dapat dijual. Semakin banyak pekerja terlatih yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, semakin banyak yang dapat diproduksi oleh perusahaan tersebut. Perekonomian yang memperlakukan pendidikan sebagai aset sering disebut sebagai ekonomi berbasis pengetahuan (Grant, 2017). Seperti halnya keputusan lainnya, berinvestasi dalam pendidikan melibatkan biaya peluang bagi pekerja. Waktu yang dihabiskan di ruang kelas berarti lebih sedikit waktu untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Namun, pemberi kerja akan membayar upah yang lebih tinggi ketika pekerja tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Akibatnya, meskipun pendapatan karyawan mungkin lebih rendah dalam jangka pendek untuk menjadi terdidik, upah kemungkinan akan lebih tinggi di masa depan, setelah pelatihan selesai.

Keterampilan yang tersedia dalam angkatan kerja dan harga keterampilan tersebut menentukan bagaimana negara akan bersaing di pasar global. Ketika sistem jasa dan produksi menjadi lebih kompleks, mereka membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil, masyarakat perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara mendorong kesetaraan secara keseluruhan dan menawarkan insentif ekonomi yang kuat. Meningkatnya tingkat pencapaian dalam populasi, prospek pekerjaan yang lebih baik, dan peningkatan pendapatan yang datang dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, semuanya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan kemakmuran di negara-negara OECD. Dalam konteks ini, pertumbuhan pendapatan tenaga kerja dalam PDB menurut kategori pendidikan memberikan ukuran sederhana untuk menggambarkan pergerakan menuju keterampilan yang lebih tinggi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (OECD, 2012)

Peran pendidikan tinggi dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan meningkat dari tahun ke tahun, dan hal ini akan terus berlanjut dalam beberapa dekade mendatang. Pendidikan tinggi dapat dilihat sebagai titik fokus pengetahuan dan penerapannya, sebuah institusi yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui pengembangan inovasi dan peningkatan keterampilan yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan sosial dan global yang besar. Pendidikan tinggi secara luas didefinisikan sebagai salah satu pendorong utama kinerja pertumbuhan, kemakmuran, dan daya saing. UNESCO mengatakan bahwa peran sosialnya menyediakan hubungan antara peran intelektual dan pendidikan universitas di satu sisi dan pengembangan masyarakat di sisi lain. Meningkatkan keterampilan merupakan kunci untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan. Berinvestasi dalam penciptaan pengetahuan dan memungkinkan penyebarannya adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja berupah tinggi dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas (Bhattarai, *et al.*, 2015).

Sama seperti perusahaan dengan pekerja yang berpendidikan lebih baik dapat berkinerja lebih baik dalam dimensi-dimensi ini, demikian pula perekonomian dengan tenaga kerja yang berpendidikan lebih baik. Keterampilan melahirkan lebih banyak keterampilan dan cara-cara baru dalam berbisnis, para pekerja belajar dari satu sama lain, dan perusahaan menyesuaikan teknologi dan penggunaan modal mereka dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. Manfaat memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik akan dirasakan oleh semua orang, tidak hanya oleh organisasi tempat mereka bekerja. Lebih jauh lagi, efek tidak langsung (atau limpahan) semacam ini bagi perusahaan atau ekonomi secara keseluruhan mungkin sangat penting dalam pasar global yang semakin kompetitif. Bayangkan ekonomi yang kekurangan orang yang mampu membaca petunjuk arah, menggunakan mesin fotokopi atau komputer yang canggih, atau memahami norma-norma perilaku yang berlaku. Bahkan jika satu organisasi dalam perekonomian tersebut mampu menemukan atau mengimpor keterampilan tersebut, organisasi lain tidak akan dapat berinvestasi pada jenis peralatan tertentu atau jenis bisnis tertentu dengan jaminan bahwa hal tersebut dapat membuat investasi tersebut

menguntungkan (Dumciuviene, 2014). Selain itu, tenaga kerja yang lebih terdidik dapat menghasilkan lingkungan yang lebih bebas dari kejahatan dan lingkungan yang lebih sehat dengan lembaga-lembaga sipil yang berfungsi lebih baik dan semua manfaat yang mengalir ke sektor bisnis dari lingkungan tersebut. Pertumbuhan dan kesejahteraan sosial di masa depan akan bergantung pada industri dan jasa yang padat pengetahuan. Dalam hal ini, lebih banyak pekerjaan akan membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Penting untuk menentukan hubungan antara kebijakan pendidikan, kebijakan lain-seperti penelitian dan pengembangan teknologi, sosial dan pembangunan ekonomi negara. Artikel ini menganalisis modal manusia sebagai faktor produksi, yang diakumulasikan oleh individu melalui pendidikan dan dampaknya terhadap produksi yang lebih tinggi. Isu penting lainnya adalah dampak pendidikan yang tinggi terhadap penelitian, pengembangan teknologi, dan pertumbuhan produktivitas faktor total. Perkembangan masyarakat pengetahuan membutuhkan sikap baru terhadap kebijakan pendidikan.

PENDIDIKAN STRATIFIKASI SOSIAL DAN MOBILITAS SOSIAL

Pendidikan telah lama diakui sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan masyarakat. Lebih dari sekadar penyediaan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas individu dan kelompok, serta dalam mempengaruhi struktur sosial suatu masyarakat. Namun, dalam tatanan sosial yang kompleks, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari realitas stratifikasi sosial yang ada. Stratifikasi sosial, yang merujuk pada pembagian hierarkis dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status, secara langsung mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu dari berbagai lapisan sosial.

Dalam masyarakat yang semakin kompetitif dan terhubung secara global, pendidikan sering kali dipandang sebagai jalur utama untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini terutama terlihat dalam konsep meritokrasi, di mana keberhasilan individu diukur berdasarkan pencapaian akademik dan profesional mereka, bukan berdasarkan latar belakang sosial mereka. Akan tetapi, konsep ini kerap dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas. Kondisi sosial-ekonomi, lokasi geografis, serta kebijakan pendidikan yang tidak merata sering kali menjadi penghalang yang membuat pendidikan justru memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada.

Lebih lanjut, pendidikan juga memiliki peran ganda dalam konteks mobilitas sosial. Di satu sisi, pendidikan berpotensi menjadi alat yang efektif untuk mobilitas sosial vertikal, yaitu proses di mana individu atau kelompok dapat bergerak naik atau turun dalam hierarki sosial. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka pintu menuju peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, status sosial yang lebih baik. Di sisi lain, sistem pendidikan yang tidak adil dan tidak merata

dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada, di mana individu dari latar belakang yang kurang beruntung terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan kesempatan.

Dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu memahami bagaimana faktor-faktor seperti kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan memengaruhi distribusi kesempatan pendidikan di antara berbagai kelompok sosial. Sebagai contoh, sekolah-sekolah di daerah perkotaan dengan sumber daya yang melimpah cenderung memberikan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau di wilayah-wilayah yang terpinggirkan. Akibatnya, anak-anak dari keluarga dengan status sosial-ekonomi yang lebih rendah sering kali menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk meraih prestasi akademik yang tinggi, yang kemudian berimplikasi pada peluang mereka untuk mobilitas sosial ke atas.

Selain itu, hubungan antara pendidikan dan stratifikasi sosial juga dipengaruhi oleh dinamika budaya dan kebijakan nasional. Di beberapa negara, akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas mungkin lebih terbatas, yang kemudian menciptakan elitisasi dalam pendidikan. Sementara di negara-negara lain, mungkin ada upaya lebih besar untuk mendemokratisasikan pendidikan melalui kebijakan afirmatif atau pemberian beasiswa untuk kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Oleh karena itu, dalam membahas pendidikan, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial, kita tidak hanya melihat pendidikan sebagai proses individual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan struktural.

Melalui pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dapat menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial, baik sebagai sarana untuk memperbaiki ketidaksetaraan maupun sebagai instrumen yang memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada. Kita juga akan mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan reformasi pendidikan dapat dirancang untuk mendorong mobilitas sosial yang lebih inklusif, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara pendidikan, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial akan memberi kita wawasan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

1. Pendidikan dan stratifikasi

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada stratifikasi sosial dan mobilitas dalam suatu komunitas. Pendidikan telah dipraktikkan sejak awal kehidupan manusia. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam membentuk lingkungan sosial seseorang. Artinya, pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Tingkat pendidikan seseorang menentukan seberapa besar rasa hormat yang dia terima di masyarakat. Fenomena ini menghasilkan lapisan masyarakat yang membedakan posisi vertikal seseorang. Proses membedakan status seseorang dalam masyarakat dikenal sebagai stratifikasi sosial. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang berkontribusi pada start-up sosial di masyarakat.

Stratifikasi adalah klasifikasi hierarkis individu. Menurut Soekanto, sistem pelapisan masyarakat memiliki komponen tertutup dan terbuka. Sistem tertutup membatasi mobilitas seseorang dari satu tingkat ke tingkat lainnya, baik naik maupun turun. Sedangkan sistem terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk maju ke lapisan sosial. Maka kemungkinan mobilitas sosial sangat tinggi. Pendidikan sangat penting dalam masyarakat dengan sistem terbuka karena memungkinkan orang untuk naik melalui hierarki sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan maju dalam posisi sosial (Budiati & Rochmat, 2020).

Perbedaan dan ketidaksetaraan pendidikan ditemukan di semua masyarakat di mana persaingan, pasar, dan keluarga adalah lembaga sentral. Perlu dicatat bahwa hierarki profesional dan model mobilitas sosial secara mengejutkan serupa di semua masyarakat industri (Erikson dan Goldthorpe, 1992). Seiring berkembangnya pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat, efek latar belakang sosial sedikit melemah (Dronkers, 1993), tetapi pelemahan ini dapat berbeda untuk siswa di berbagai bidang studi di pendidikan tinggi (Ayalon dan Yogev, 2005). Persistensi perbedaan dan ketidaksetaraan mengambil bentuk yang berbeda, termasuk nilai-nilai sosial dan ekonomi sekolah dan juga isi dan format setiap jenis pendidikan (Bills, 2004; Shavit dan Blossfeld, 1993; Shavit dan Müller, 1998).

Terlepas dari globalisasi, perbedaan lintas negara terlihat jelas dalam ketimpangan pendidikan. Mereka terkait dengan perbedaan sosial yang lebih umum, sehingga di negara-negara Nordik – atau lebih umum di negara-negara dengan rezim sosialis atau sosial demokratis –

perbedaannya lebih kecil daripada di negara-negara dengan ekonomi pasar liberal. Faktor-faktor kuat yang menjelaskan perbedaan termasuk individualisasi dan pembentukan jalur sekolah yang berbeda dalam pendidikan (Beller dan Hout, 2006; Tanda, 2005). Menurut hasil Marks (2005: 494–5), 'Semakin besar jumlah jalur sekolah, semakin kuat efek latar belakang kelas. Demikian pula, semakin besar perbedaan antara sekolah dalam kinerja siswa (korelasi intra-kelas), semakin kuat efek latar belakang kelas. Namun demikian, hubungan antara pendidikan dan hubungan ekonomi kurang dari persatuan. Misalnya, seperti yang ditunjukkan Marrero (2012), Uruguay memiliki salah satu indeks Gini (distribusi pendapatan) yang lebih baik di Amerika Latin dan sistem pendidikan paling tidak setara di benua itu. Dubet, *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan nilai lebih pada diploma – seharusnya lebih terbuka dan demokratis – memiliki sistem pendidikan yang sangat terbatas.

Perjuangan sosial atas pendidikan adalah bagian dari karakteristik kelembagaan sistem sekolah: kelas menengah, yang berada dalam posisi kunci, mampu mempengaruhi perkembangan pendidikan ke arah tujuan eksklusifnya (Ferreira, 2000; Power, *et al.*, 2003). Bias akademik dapat mendistorsi upaya dan investasi pada sekolah, mendepresiasi formasi teknis dan sertifikat (Barbosa, 2012; Brunello dkk., 2007; Schwartzman, 2011). Perjuangan sosial dapat mengakibatkan hambatan seperti aksesibilitas pendidikan. Hambatan sosial adalah kombinasi dari faktor-faktor yang mencegah seseorang tanpa sumber daya sosial untuk mendapatkan pendidikan. Hambatan sosial budaya mewakili kecenderungan yang kuat antara tingkat kualitas pendidikan dan karakteristik seperti pendidikan orang tua, pekerjaan dan posisi kerja mereka. Hambatan teritorial ditentukan oleh berbagai faktor: jenis daerah berpenduduk, jarak dari daerah pemukiman ke sekolah, akses ke transportasi, jumlah sekolah dalam jarak yang dapat dijangkau dan tingkat urbanisasi di daerah tersebut. Setiap faktor ini bisa menjadi hambatan, atau sumber daya. Dalam menganalisis hambatan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya faktor terbuka aksesibilitas seperti pendapatan keluarga, tetapi juga faktor laten seperti biaya layanan sekolah (kadang-kadang sebagai praksis tidak resmi). Hambatan kelembagaan bersifat spesifik. Jika hambatan teritorial, sosial budaya dan ekonomi

dapat direproduksi oleh sistem pendidikan, hambatan kelembagaan ini *diciptakan* olehnya. Penelitian yang cukup besar dalam sosiologi pendidikan dengan demikian didedikasikan untuk pemeriksaan hambatan dan mekanisme yang menciptakan dan melanggengkannya (Konstantinovskiy. 2003, 2012). Selain kelas sosial, sistem pendidikan ditandai dengan perbedaan gender dan 'ras' (etnis). Kelas sosial, jenis kelamin, dan 'ras' sebagai identitas kolektif tidak dapat direduksi satu sama lain, tetapi mereka juga tidak terpisah: melainkan, mereka interseksional (Crenshaw, 1991; Mirza, 2009; Santos, 2009). Akibatnya, ketidaksetaraan dapat didasarkan pada berbagai alasan, sistem klasifikasi dapat saling bersilangan, dan identitas dapat berlipat ganda dan berlipat ganda terpinggirkan.

Hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para akademisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dapat memperkuat dan memperpanjang ketidaksetaraan sosial, sementara yang lain menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut. Pierre Bourdieu (1977), seorang sosiolog Prancis, mengamati bahwa sistem pendidikan cenderung mempertahankan ketidaksetaraan sosial dengan memihak kelompok sosial yang lebih dominan. Menurutnya, pendidikan dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial karena kurikulum dan metode pengajaran yang diadopsi oleh lembaga pendidikan cenderung menguntungkan kelompok sosial yang sudah mapan. Sementara Robert Collins (1979), seorang sosiolog Amerika, berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan status sosial dan peluang individu. Dalam bukunya yang berjudul "The Credential Society", ia menyatakan bahwa pendidikan telah menjadi kunci untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan status sosial yang lebih tinggi. Namun, ia juga menunjukkan bahwa kesenjangan sosial masih ada dalam akses dan kualitas pendidikan.

Bowles dan Gintis 1976, dua sosiolog Amerika, meneliti peran pendidikan dalam mempertahankan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat kapitalis. Mereka berpendapat bahwa sistem pendidikan mencerminkan dan memperkuat struktur hierarkis dalam ekonomi, yang menghasilkan ketidaksetaraan sosial. Penelitian oleh Erikson dan Jonsson (1996) menunjukkan bahwa stratifikasi sosial mempengaruhi peluang dan

hasil pendidikan. Mereka menemukan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Sementara Breen dan Goldthorpe (1997) mengusulkan teori tindakan rasional untuk menjelaskan perbedaan pendidikan berdasarkan stratifikasi sosial. Menurut mereka, individu membuat keputusan yang rasional tentang pendidikan berdasarkan latar belakang sosial mereka dan pengembalian investasi yang diharapkan.

Salah satu referensi terbaru yang membahas hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan adalah penelitian oleh Reardon dan Portilla. Dalam penelitian mereka yang diterbitkan pada tahun 2020, mereka menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial yang berbeda masih ada di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa anak-anak dari keluarga yang lebih kaya memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penelitian lain yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Beller dan Hout menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi faktor yang penting dalam menentukan status sosial dan penghasilan individu. Namun, mereka juga menemukan bahwa faktor lain seperti asal usul keluarga dan jenis pekerjaan orang tua juga mempengaruhi status sosial dan penghasilan individu.

Penelitian oleh Kim dan Lee (2021) menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, etnisitas, dan gender. Mereka menyarankan bahwa pendidikan harus lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu dari kelompok-kelompok sosial yang kurang terwakili.

Dalam penelitian terbaru lainnya, Kao dan Tienda (2021) menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial jika dijalankan dengan tepat. Mereka menemukan bahwa program-program pendidikan yang dirancang khusus untuk kelompok-kelompok sosial yang kurang terwakili dapat meningkatkan kesempatan pendidikan dan hasil pendidikan.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan masih menjadi topik yang penting dan kompleks. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan

bahwa pendidikan dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan juga dapat menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial jika dijalankan dengan tepat dan responsif terhadap kebutuhan individu dari kelompok-kelompok sosial yang kurang terwakili.

Hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan bersifat kompleks dan beragam. Stratifikasi sosial mengacu pada susunan hierarki individu atau kelompok dalam suatu masyarakat berdasarkan berbagai faktor seperti pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Pendidikan adalah salah satu komponen kunci dari proses stratifikasi ini dan dapat memperkuat sekaligus menantang hierarki sosial yang ada. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan:

- a. Akses terhadap Pendidikan: Di banyak masyarakat, akses terhadap pendidikan berkualitas tidak seragam. Status sosial ekonomi seringkali menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap kesempatan pendidikan terbaik. Individu dan keluarga yang lebih kaya mampu membeli sekolah swasta, tutor, dan sumber daya lain yang dapat meningkatkan hasil pendidikan, sementara mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas.
- b. Kualitas Pendidikan: Sekalipun pendidikan dapat diakses, kesenjangan kualitas pendidikan dapat semakin memperburuk stratifikasi sosial. Sekolah-sekolah di daerah makmur cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, guru yang berpengalaman, dan fasilitas yang lebih baik, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi siswa. Sebaliknya, sekolah-sekolah di komunitas yang kurang beruntung mungkin kesulitan untuk memberikan tingkat kualitas pendidikan yang sama.
- c. Pencapaian Pendidikan: Pencapaian pendidikan, seperti menyelesaikan sekolah menengah atas atau memperoleh gelar sarjana, memainkan peran penting dalam stratifikasi sosial. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki prospek pekerjaan yang lebih baik dan potensi penghasilan yang lebih tinggi, sehingga dapat berkontribusi terhadap mobilitas ke atas. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah

- mungkin menghadapi hambatan dalam kemajuan ekonomi dan sosial.
- d. **Reproduksi Ketimpangan Sosial:** Pendidikan dapat mereproduksi kesenjangan sosial dengan melanggengkan hierarki sosial yang ada. Hal ini terjadi ketika anak-anak dari latar belakang yang memiliki hak istimewa menerima kesempatan pendidikan yang lebih baik, sehingga menghasilkan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan prospek karier yang lebih baik, sementara anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung menghadapi hambatan untuk maju.
 - e. **Meritokrasi dan Ideologi:** Banyak masyarakat yang mempromosikan gagasan meritokrasi, di mana individu diyakini berhasil atau gagal berdasarkan bakat dan usaha masing-masing. Pendidikan sering kali dipandang sebagai sarana untuk mencapai cita-cita meritokratis, namun kenyataannya tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara ideologi meritokrasi dengan realitas stratifikasi sosial.
 - f. **Mobilitas Sosial:** Pendidikan dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, yang memungkinkan individu untuk naik atau turun hierarki sosial. Namun, sejauh mana pendidikan mendorong mobilitas ke atas bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, ras, dan gender. Dalam beberapa kasus, pendidikan mungkin tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan struktural yang mengakar.
 - g. **Modal Budaya:** Konsep modal budaya, yang diperkenalkan oleh sosiolog Pierre Bourdieu, menunjukkan bahwa individu dari latar belakang yang memiliki hak istimewa sering kali memiliki pengetahuan dan keterampilan budaya yang dihargai dalam lingkungan pendidikan. Modal budaya ini dapat memberi mereka keuntungan dalam mengarungi sistem pendidikan dan mencapai kesuksesan.

Kesimpulannya, hubungan antara stratifikasi sosial dan pendidikan saling berkaitan. Meskipun pendidikan dapat menjadi jalan menuju mobilitas ke atas dan sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial, pendidikan juga dapat memperkuat dan melanggengkan kesenjangan ini

jika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak merata. Mengatasi permasalahan ini sering kali melibatkan penanganan kesenjangan pendidikan dan sosial ekonomi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

2. Pendidikan dan mobilitas sosial

Mobilitas sosial adalah kemampuan individu atau keluarga untuk naik atau turun tangga sosial berdasarkan situasi sosial ekonomi mereka. Ini merupakan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kehidupan mereka, memajukan karier mereka, dan mengatasi kelemahan apa pun yang mungkin mereka warisi. Pendidikan telah lama diakui sebagai pendorong utama mobilitas sosial, memberikan individu, pengetahuan, dan peluang yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi mereka. Mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu kelas atau status ke kelas atau status lainnya. Penekanannya di sini, seperti kebanyakan studi tentang mobilitas sosial, adalah pada mobilitas antargenerasi, yang mengacu pada perubahan kelas atau status dari orang tua ke anak-anaknya yang sudah dewasa. Contoh mobilitas antargenerasi adalah ketika anak perempuan atau anak petani menjadi dokter. Sebaliknya, ketika anak petani menjadi petani, itu adalah contoh reproduksi sosial.

a. Pemerataan akses terhadap Pendidikan

Banyak budaya secara historis memiliki akses yang tidak setara ke pendidikan yang layak, yang telah melanggengkan struktur sosial yang ada dan mobilitas sosial yang terbatas. Namun, upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Dengan menyediakan pendidikan untuk semua orang, terlepas dari kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, etnis, atau lokasi geografis, masyarakat dapat menyamakan kedudukan dan membangun sistem yang lebih egaliter. Kebijakan seperti tindakan afirmatif, beasiswa, dan reformasi pendidikan berusaha untuk menjembatani kesenjangan dan memberdayakan orang-orang kurang mampu untuk mengejar pendidikan sebagai metode mobilitas ke atas.

b. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan

Pendidikan memberi individu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan kesuksesan di lingkungan saat ini. Kemampuan kerja individu dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi ekonomi yang berubah ditingkatkan oleh pendidikan, yang menanamkan keterampilan literasi, aritmatika, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi. Pendidikan menyeluruh mempersiapkan orang untuk melanjutkan pendidikan tinggi, pelatihan kejuruan, atau kewirausahaan, meningkatkan peluang mereka untuk mobilitas ke atas dan bebas dari kemiskinan antargenerasi.

c. Memberdayakan individu dan menumbuhkan harga diri

Pendidikan mengubah kehidupan orang dengan menanamkan kepercayaan diri, ambisi, dan rasa harga diri. Pendidikan memberdayakan orang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dengan memperluas wawasan mereka dan memperkenalkan mereka pada ide, sudut pandang, dan peluang baru. Pemberdayaan ini sangat penting dalam memotivasi orang-orang dari asal-usul kurang mampu untuk bermimpi besar, menetapkan tujuan, dan berjuang untuk sukses, sehingga mempromosikan mobilitas sosial di tingkat individu.

d. Modal sosial dan budaya

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan modal sosial dan budaya, yang dapat berdampak besar pada mobilitas sosial seseorang. Modal sosial didefinisikan sebagai jaringan, hubungan, dan ikatan sosial yang dibentuk orang sebagai hasil dari pengalaman pendidikan mereka. Koneksi ini dapat mengarah pada kemungkinan kerja yang menguntungkan, bimbingan, dan sumber daya sosial, memungkinkan kemajuan karier. Demikian pula, pendidikan memaparkan orang pada modal budaya seperti seni, sastra, musik, dan jenis ekspresi budaya lainnya, memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk menavigasi berbagai pengaturan sosial dan berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

e. Memutus siklus kemiskinan

Pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberhasilan pendidikan mereka. Masyarakat dapat membantu anak-anak ini mengatasi situasi mereka dan mencapai mobilitas sosial dengan berinvestasi dalam pendidikan anak usia dini, memberikan dukungan peningkatan, dan memberikan beasiswa dan bantuan keuangan. Individu dari asal kurang mampu yang memperoleh pendidikan yang layak lebih siap untuk menemukan pekerjaan yang aman, meningkatkan potensi pendapatan mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum, menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong mobilitas sosial di masyarakat.

f. Pendidikan dan mobilitas sosial di era digital

Di era digital, pendidikan berperan semakin penting dalam mendorong mobilitas sosial. Peningkatan teknologi telah mengubah industri, menghasilkan prospek kerja baru sekaligus membuat kemampuan tertentu ketinggalan zaman. Individu yang memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan digital dapat mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam ekonomi digital, meningkatkan mobilitas sosial. Namun, kesenjangan digital, di mana beberapa individu atau komunitas tidak memiliki akses ke teknologi dan layanan digital, tetap menjadi masalah. Mengatasi kesenjangan ini dengan upaya mengajarkan literasi digital dan akses ke teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi katalis mobilitas sosial di era digital. Pendidikan adalah pendorong utama mobilitas sosial, memungkinkan orang untuk mengatasi hambatan sosial ekonomi dan meningkatkan kehidupan mereka. Sekolah dapat memutus siklus kemiskinan dan mempromosikan mobilitas ke atas dengan memastikan akses yang sama ke sekolah, memberikan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan pemberdayaan, dan mengatasi modal sosial dan budaya. Untuk terus mengatasi tantangan era digital, sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan tersedia untuk semua, terlepas dari latar belakangnya, dan bahwa individu dibekali dengan

keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam lingkungan yang semakin digital. Masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial dengan memprioritaskan pendidikan dan memberlakukan kebijakan yang mempromosikan akses yang adil, menghasilkan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang.

Hubungan antara mobilitas sosial dan pendidikan merupakan hubungan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Mobilitas sosial mengacu pada kemampuan individu atau keluarga untuk naik atau turun tangga sosial dan ekonomi dari generasi ke generasi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan mobilitas sosial seseorang, dan hubungan ini dapat dipahami dalam beberapa cara:

- a. Akses terhadap Pendidikan: Akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan faktor penting dalam menentukan mobilitas sosial. Di banyak masyarakat, individu dengan latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas, termasuk kendala keuangan, kurangnya sumber daya pendidikan, dan distribusi lembaga pendidikan yang tidak merata. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dapat memberikan individu alat yang mereka perlukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.
- b. Pencapaian Pendidikan: Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang sering kali berdampak langsung pada potensi penghasilan dan peluang kariernya. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau gelar lanjutan, cenderung memiliki prospek pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pencapaian pendidikan dapat menjadi pendorong utama mobilitas sosial ke atas.
- c. Kualitas Pendidikan: Bukan hanya tingkat pendidikan yang penting tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima. Kesenjangan dalam kualitas pendidikan, yang seringkali dikaitkan dengan faktor sosial ekonomi, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja. Pendidikan berkualitas dapat membantu menyamakan kedudukan dan mendorong mobilitas sosial.

- d. Pendidikan Anak Usia Dini: Pendidikan anak usia dini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek jangka panjang seseorang. Anak-anak yang memiliki akses terhadap pendidikan usia dini yang berkualitas tinggi akan lebih mungkin mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial yang penting, yang dapat menempatkan mereka pada jalur menuju mobilitas sosial yang lebih baik.
- e. Ketimpangan Pendidikan: Ketimpangan pendidikan, yang seringkali berakar pada kesenjangan sosial ekonomi, dapat mengganggu hierarki sosial yang ada. Jika kelompok tertentu kurang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, hal ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan antargenerasi dan terbatasnya mobilitas sosial.
- f. Pembelajaran Seumur Hidup: Di dunia yang berubah dengan cepat saat ini, pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan tidak berakhir dengan sekolah formal; ini adalah proses seumur hidup yang dapat meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan peluang.
- g. Modal Sosial: Pendidikan juga dapat berkontribusi pada modal sosial individu, yang mencakup jaringan, hubungan, dan keterampilan sosial. Aspek-aspek modal sosial ini dapat membuka pintu terhadap peluang kerja dan kemajuan karier, sehingga selanjutnya mendorong mobilitas sosial.
- h. Intervensi Kebijakan: Kebijakan dan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, khususnya bagi kelompok marginal dan kurang beruntung, dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap mobilitas sosial. Hal ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan pendanaan pendidikan, memberikan beasiswa, dan melaksanakan program intervensi dini.

Kesimpulannya, pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mendorong mobilitas sosial dengan memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan peluang yang mereka perlukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Namun, agar pendidikan benar-benar berfungsi sebagai penyeimbang dan pendorong mobilitas sosial, maka

penting untuk mengatasi permasalahan terkait akses, kualitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Upaya kebijakan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan memfasilitasi mobilitas ke atas.

3. Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial mengacu pada kapasitas individu atau keluarga untuk naik atau turun tangga sosial dalam hal status sosial ekonomi. Ini merupakan kesempatan bagi orang untuk meningkatkan kehidupan mereka, mencapai mobilitas ke atas, dan mengatasi kerugian apa pun yang mungkin mereka warisi. Pendidikan telah lama diakui sebagai katalis penting untuk mobilitas sosial, memberikan individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan peluang yang mereka butuhkan untuk memajukan status sosial ekonomi mereka.

Menyamakan akses ke pendidikan

Banyak budaya secara historis memiliki akses yang tidak setara ke pendidikan yang layak, yang telah melanggengkan struktur sosial yang ada dan mobilitas sosial yang terbatas. Namun, upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Masyarakat dapat menyamakan kedudukan dan membangun sistem yang lebih adil dengan memastikan bahwa pendidikan tersedia untuk semua, terlepas dari kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, etnis, atau lokasi geografis. Kebijakan seperti tindakan afirmatif, beasiswa, dan reformasi pendidikan berusaha untuk menutup kesenjangan dan memberdayakan orang-orang kurang mampu untuk mengejar pendidikan sebagai metode mobilitas ke atas.

Memperoleh pengetahuan dan keterampilan

Pendidikan memberi individu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan kesuksesan di lingkungan saat ini. Pendidikan meningkatkan kemampuan kerja orang dengan mengajarkan mereka literasi, berhitung, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi. Pendidikan menyeluruh

mempersiapkan orang untuk melanjutkan pendidikan tinggi, pelatihan kejuruan, atau kewirausahaan, meningkatkan peluang mereka untuk mobilitas ke atas dan membebaskan diri dari kemiskinan antargenerasi.

Memberdayakan individu dan menumbuhkan harga diri

Pendidikan memiliki efek transformasi pada individu dengan menanamkan kepercayaan diri, ambisi, dan rasa berharga. Pendidikan membantu orang memvisualisasikan masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dengan memperluas wawasan mereka dan memperkenalkan mereka pada ide, sudut pandang, dan peluang baru. Pemberdayaan ini sangat penting dalam memotivasi orang-orang dari asal-usul yang kurang mampu untuk bermimpi besar, menetapkan tujuan, dan berjuang untuk sukses, sehingga memfasilitasi mobilitas sosial di tingkat individu.

Modal sosial dan budaya

Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan modal sosial dan budaya, yang dapat berdampak besar pada mobilitas sosial individu. Modal sosial didefinisikan sebagai jaringan, hubungan, dan ikatan sosial yang dibentuk orang sebagai hasil dari pengalaman pendidikan mereka. Koneksi ini dapat memberikan akses ke peluang kerja, bimbingan, dan sumber daya sosial yang penting, memungkinkan mobilitas ke atas. Demikian pula, sekolah memaparkan siswa pada modal budaya seperti seni, sastra, musik, dan jenis ekspresi budaya lainnya, memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk melintasi situasi sosial yang berbeda dan berkomunikasi dengan orang-orang dari semua latar belakang.

Memutus siklus kemiskinan

Pendidikan adalah instrumen kunci untuk mengatasi siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari rumah berpenghasilan rendah sering menghadapi beberapa tantangan yang menghambat kemajuan pendidikan mereka. Berinvestasi dalam pendidikan anak usia dini, memberikan dukungan perbaikan, dan menawarkan beasiswa dan bantuan keuangan dapat membantu anak-anak ini mengatasi kerugian mereka dan mencapai mobilitas sosial. Individu dari asal kurang mampu yang mendapatkan pendidikan yang layak lebih cocok untuk mencari pekerjaan

yang stabil, meningkatkan potensi penghasilan mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial dalam skala sosial.

Pendidikan dan mobilitas sosial di era digital

Di era digital, peran pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial semakin berkembang. Peningkatan teknologi telah merevolusi industri, membuka peluang kerja baru sekaligus membuat beberapa kemampuan ketinggalan zaman. Individu yang memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan digital dapat mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk makmur dalam ekonomi digital, menghasilkan mobilitas sosial yang lebih besar. Namun, kesenjangan digital, di mana beberapa orang atau komunitas tidak memiliki akses ke teknologi dan layanan digital, tetap menjadi masalah. Mengatasi ketidaksetaraan ini melalui upaya yang mempromosikan literasi digital dan akses teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan terus menjadi katalis mobilitas sosial di era digital. Pendidikan adalah pendorong utama mobilitas sosial, memungkinkan orang untuk mengatasi hambatan sosial ekonomi dan meningkatkan kehidupan mereka. Pendidikan dapat memutus siklus kemiskinan dan mendorong mobilitas ke atas dengan menyediakan akses yang setara, informasi, keterampilan, pemberdayaan, dan mengatasi faktor sosial dan budaya. Untuk terus menavigasi tantangan era digital, sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan tetap tersedia untuk semua, terlepas dari latar belakangnya, dan bahwa individu dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di lingkungan yang semakin digital. Masyarakat dapat mendukung mobilitas sosial dengan mengutamakan pendidikan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan akses yang adil, menghasilkan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. (Freeland, 2023)

GENDER, KELUARGA DAN PENDIDIKAN

Peran gender dalam keluarga dan pendidikan telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam studi sosial kontemporer. Pemahaman tentang bagaimana gender memengaruhi dinamika keluarga dan pendidikan sangat penting, mengingat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Peran tradisional gender di dalam keluarga, yang sering kali membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan karier, kini mulai bergeser seiring dengan semakin diterimanya kesetaraan gender sebagai norma global (Connell, 2022). Pergeseran ini didukung oleh gerakan feminisme gelombang ketiga yang menekankan pentingnya mengakui keragaman pengalaman perempuan dan mendorong pembongkaran struktur patriarki yang mengekang kebebasan individu berdasarkan gender (Butler, 2020).

Di banyak negara, kebijakan publik dan pendidikan mulai memperhatikan kesenjangan gender yang masih ada dalam sistem pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, hambatan struktural dan kultural masih menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam karier dan kehidupan pribadi (Foster & Hyman, 2023). Di sisi lain, laki-laki juga menghadapi tantangan yang unik dalam pendidikan, terutama dalam hal keterlibatan emosional dan akademis, yang sering kali diabaikan dalam diskusi kesetaraan gender (Mills, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki perlu didukung secara berbeda dalam konteks pendidikan untuk memastikan tercapainya kesetaraan yang substansial.

Dalam konteks keluarga, gender memainkan peran kunci dalam menentukan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja, mereka masih menanggung sebagian besar tanggung jawab domestik, yang dapat berdampak negatif pada keseimbangan kehidupan

kerja dan kesempatan pendidikan mereka (Hochschild, 2021). Fenomena ini dikenal sebagai "beban ganda" atau "double burden", di mana perempuan harus menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan rumah tangga. Namun, perubahan pola asuh, seperti peningkatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, menunjukkan potensi untuk mengurangi beban ini dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam karier dan pendidikan (Taylor, 2024).

Lebih jauh lagi, pendekatan interdisipliner dalam studi gender, keluarga, dan pendidikan menunjukkan bahwa intervensi dalam salah satu area ini sering kali berdampak pada area lain. Sebagai contoh, perubahan dalam peran gender di dalam keluarga, seperti peningkatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, dapat mempengaruhi hasil pendidikan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan (Taylor, 2024). Oleh karena itu, memahami kompleksitas hubungan ini menjadi krusial dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua individu, tanpa memandang gender mereka. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan pendidikan yang peka gender dapat diterapkan untuk mendukung kesetaraan ini, termasuk program-program yang mendorong partisipasi perempuan dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki (Blickenstaff, 2021).

Sebagai kesimpulan, peran gender dalam keluarga dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kultural yang lebih luas. Penelitian dan kebijakan harus terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan ini, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Diskusi mengenai gender, keluarga, dan pendidikan bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga tentang menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks lokal dan global. Dengan demikian, studi ini menjadi semakin relevan dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

1. Peran Gender dalam Pendidikan: Perspektif Historis dan Kontemporer

Peran gender dalam pendidikan telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarah, terutama dalam kaitannya dengan akses dan

peluang yang tersedia bagi laki-laki dan perempuan. Pada masa lalu, pendidikan sering kali menjadi hak istimewa bagi laki-laki, sementara perempuan terbatas pada peran domestik dan keluarga. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan feminis mulai menuntut akses yang lebih luas dan adil bagi perempuan dalam pendidikan. Misalnya, di Inggris dan Amerika Serikat, perempuan mulai mendapatkan akses ke pendidikan tinggi pada akhir abad ke-19, tetapi sering kali hanya di institusi yang dirancang khusus untuk mereka dan dengan kurikulum yang terbatas pada pelajaran-pelajaran yang dianggap sesuai untuk perempuan, seperti seni rumah tangga dan literatur.

Pada pertengahan abad ke-20, dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kebijakan pendidikan mulai mengalami reformasi yang lebih inklusif. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan. Selain itu, gerakan hak-hak sipil dan feminisme gelombang kedua di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan, menuntut perlakuan yang adil di sekolah dan universitas, serta menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam kurikulum dan fasilitas pendidikan.

Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan terkait kesetaraan gender dalam pendidikan masih ada hingga saat ini. Secara global, perempuan sekarang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan formal dibandingkan masa lalu, bahkan di beberapa negara, mereka melampaui laki-laki dalam hal jumlah lulusan pendidikan tinggi. Namun, representasi perempuan dalam bidang tertentu, seperti STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh stereotip gender yang sudah mengakar yang menganggap laki-laki lebih cocok untuk bidang-bidang ini. Penelitian menunjukkan bahwa sejak usia dini, perempuan sering kali tidak mendapat dukungan yang sama seperti laki-laki dalam mata pelajaran ini, yang berdampak pada pilihan pendidikan dan karier mereka di masa depan.

Selain itu, ekspektasi gender tradisional masih memengaruhi pendidikan perempuan di banyak bagian dunia. Di beberapa negara berkembang, misalnya, peran gender yang mengutamakan perempuan sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga membatasi akses mereka ke pendidikan tinggi. Di banyak masyarakat, pendidikan anak perempuan sering kali dianggap kurang penting dibandingkan dengan pendidikan anak laki-laki, yang berujung pada tingkat putus sekolah yang lebih tinggi di kalangan perempuan.

Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, masih banyak hambatan yang harus diatasi. Upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil memerlukan perubahan kebijakan yang berkelanjutan, serta pendidikan yang berfokus pada penghapusan stereotip gender dan pemberdayaan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, tanpa memandang gender mereka.

2. Pengaruh Struktur Keluarga terhadap Pendidikan Anak

Struktur keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan pendidikan anak. Struktur keluarga mengacu pada komposisi dan organisasi keluarga, termasuk jumlah orang tua, hubungan antar anggota keluarga, dan peran masing-masing anggota dalam mendukung pendidikan anak. Dalam konteks ini, keluarga dapat bervariasi dari keluarga inti (ayah, ibu, dan anak-anak), keluarga besar (yang melibatkan kakek-nenek atau anggota keluarga lainnya), hingga keluarga dengan orang tua tunggal.

a. Keluarga Inti dan Dukungan Pendidikan

Keluarga inti, yang terdiri dari kedua orang tua dan anak-anak, sering kali dianggap sebagai struktur keluarga yang paling ideal dalam mendukung pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran kedua orang tua cenderung memberikan lingkungan yang lebih stabil secara emosional dan finansial, yang dapat meningkatkan peluang anak untuk berhasil di sekolah. Kedua orang tua biasanya berbagi tanggung jawab dalam hal pengasuhan dan dukungan pendidikan, sehingga anak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang cukup dalam belajar. Selain itu, dalam keluarga inti, orang tua cenderung lebih mampu memberikan sumber daya

yang diperlukan untuk pendidikan anak, seperti buku, akses ke teknologi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sering kali meningkatkan performa akademik anak dan mendorong mereka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

b. Keluarga dengan Orang Tua Tunggal

Sebaliknya, keluarga dengan orang tua tunggal sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendukung pendidikan anak. Orang tua tunggal mungkin menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan dukungan pendidikan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan orang tua tunggal cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah akademik dan perilaku di sekolah, terutama jika orang tua mereka mengalami stres finansial atau emosional. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak anak dari keluarga dengan orang tua tunggal tetap berhasil dalam pendidikan mereka. Dukungan sosial dari keluarga besar atau komunitas, serta akses ke program-program bantuan pendidikan, dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh keluarga dengan orang tua tunggal.

c. Keluarga Besar dan Peran Kolektif dalam Pendidikan

Dalam keluarga besar, yang melibatkan kakek-nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya, dukungan terhadap pendidikan anak dapat datang dari berbagai sumber. Struktur keluarga ini dapat memberikan keuntungan tambahan, seperti dukungan emosional yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat. Namun, konflik antar anggota keluarga atau perbedaan dalam pandangan pendidikan juga dapat menjadi tantangan.

Kakek-nenek, misalnya, sering kali memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan cucu mereka, terutama dalam keluarga di mana kedua orang tua bekerja atau dalam kasus keluarga dengan orang tua tunggal. Mereka dapat membantu dalam hal pengasuhan dan bimbingan moral, serta memberikan cerita dan pengalaman hidup yang memperkaya pendidikan informal anak-anak.

d. Pengaruh Dinamika Keluarga terhadap Prestasi Akademik

Dinamika dalam keluarga, termasuk komunikasi antar anggota keluarga dan konflik, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan anak. Keluarga yang memiliki komunikasi yang terbuka dan positif cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih percaya diri dan termotivasi dalam pendidikan mereka. Sebaliknya, konflik keluarga yang berlarut-larut dapat menyebabkan stres pada anak, yang berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Secara keseluruhan, struktur keluarga merupakan faktor yang kompleks namun sangat penting dalam menentukan hasil pendidikan anak. Pendidikan yang sukses tidak hanya bergantung pada jenis struktur keluarga, tetapi juga pada kualitas hubungan dan dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada anak-anak.

3. Sosialisasi Gender di Lingkungan Keluarga dan Sekolah

Sosialisasi gender adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, peran, dan harapan sosial yang berkaitan dengan gender. Proses ini dimulai sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah, di mana anak-anak mulai memahami apa yang dianggap "sesuai" atau "tidak sesuai" berdasarkan jenis kelamin mereka. Proses sosialisasi ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan identitas gender anak, serta pada pilihan pendidikan dan karier mereka di masa depan.

a. Sosialisasi Gender dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan utama bagi anak-anak. Sejak lahir, anak-anak diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa orang tua cenderung memberikan mainan yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan—mainan seperti boneka sering diberikan kepada anak perempuan, sementara mainan seperti mobil-mobilan atau alat konstruksi diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan anak-anak tentang peran gender yang dianggap sesuai dalam masyarakat.

Selain itu, ekspektasi gender juga ditanamkan melalui aktivitas sehari-hari di rumah. Anak perempuan mungkin lebih sering diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga, sementara anak laki-laki didorong untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Pengaturan tugas rumah tangga berdasarkan gender ini memperkuat pandangan tradisional tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat membatasi pilihan pendidikan dan karier anak-anak di masa depan.

Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak juga sering kali berbeda berdasarkan jenis kelamin. Studi menunjukkan bahwa orang tua cenderung berbicara lebih banyak dengan anak perempuan tentang perasaan dan emosi, sementara percakapan dengan anak laki-laki lebih sering berfokus pada prestasi dan tindakan. Pola komunikasi ini dapat memengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak, serta cara mereka menavigasi hubungan interpersonal di sekolah dan kehidupan dewasa.

b. Sosialisasi Gender di Sekolah

Sekolah sebagai agen sosialisasi kedua juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas gender. Di sekolah, sosialisasi gender dapat terjadi melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan kurikulum yang diajarkan. Misalnya, buku teks dan materi pembelajaran sering kali mengandung bias gender, di mana laki-laki lebih sering digambarkan dalam peran yang dominan atau berprestasi, sementara perempuan lebih sering digambarkan dalam peran yang mendukung atau domestik.

Guru juga berperan dalam memperkuat norma-norma gender, sering kali secara tidak sadar. Penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung memberikan perhatian dan umpan balik yang berbeda kepada siswa berdasarkan jenis kelamin mereka. Misalnya, guru mungkin lebih cenderung memuji anak laki-laki atas prestasi akademik mereka dan mendorong mereka untuk mengambil risiko, sementara anak perempuan lebih sering dipuji atas perilaku mereka yang patuh dan rapi. Hal ini dapat membentuk persepsi diri anak tentang kemampuan mereka dan mempengaruhi pilihan akademik dan karier mereka di masa depan.

Di samping itu, interaksi dengan teman sebaya juga memperkuat norma-norma gender yang diajarkan di rumah dan di sekolah. Kelompok teman sebaya sering kali menegaskan kembali harapan gender yang ada, dengan memberikan penghargaan atau hukuman sosial kepada anak-anak yang mematuhi atau melanggar norma-norma tersebut. Misalnya, anak laki-laki yang menunjukkan minat pada aktivitas yang secara tradisional dianggap feminin mungkin diejek atau dijauhi oleh teman-teman sebayanya, yang dapat memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi gender yang kaku.

c. Dampak Jangka Panjang dari Sosialisasi Gender

Sosialisasi gender yang diterima anak-anak baik di rumah maupun di sekolah memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan pribadi dan profesional mereka. Anak-anak yang dibatasi oleh norma-norma gender yang kaku mungkin merasa terhalang untuk mengejar minat atau karier di luar stereotip gender tradisional. Misalnya, anak perempuan yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa sains dan teknologi adalah bidang untuk laki-laki mungkin ragu untuk mengejar pendidikan atau karier di bidang STEM.

Sebaliknya, anak-anak yang didukung untuk mengeksplorasi minat mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka dan fleksibel tentang peran gender, yang dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: Tantangan dan Solusi

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang saling terkait. Meskipun telah ada banyak kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender, masalah ini tetap menjadi tantangan besar di banyak negara. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk akses yang tidak merata ke pendidikan, perbedaan dalam hasil pendidikan, representasi gender yang tidak seimbang dalam bidang studi tertentu, serta stereotip dan diskriminasi yang memperkuat ketidakadilan gender.

a. Tantangan dalam Akses dan Partisipasi Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah akses yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan. Di banyak negara berkembang, anak perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Hambatan ini bisa berupa kemiskinan, pernikahan dini, norma budaya yang membatasi peran perempuan, serta kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan sekolah atau selama perjalanan ke sekolah. Sebagai contoh, di beberapa wilayah di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah untuk anak perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan anak laki-laki, meskipun ada upaya global untuk meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan.

Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan juga dapat terlihat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di mana perempuan sering kali kurang terwakili dalam bidang studi tertentu seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Stereotip gender yang menganggap bahwa laki-laki lebih cocok untuk bidang STEM masih kuat dan sering kali menghalangi perempuan untuk mengejar pendidikan dan karier di bidang ini. Penelitian menunjukkan bahwa sejak dini, anak perempuan cenderung kurang didorong untuk mengejar minat dalam bidang STEM, baik oleh keluarga maupun oleh lingkungan sekolah.

b. Kesenjangan dalam Hasil Pendidikan

Selain masalah akses, kesenjangan dalam hasil pendidikan juga menjadi masalah yang signifikan dalam ketidaksetaraan gender. Meski secara umum perempuan kini memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan formal, kesenjangan dalam hasil tetap ada. Misalnya, dalam banyak sistem pendidikan, anak laki-laki cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam mata pelajaran matematika dan sains, sementara anak perempuan lebih unggul dalam bahasa dan literatur. Perbedaan ini sering kali dikaitkan dengan pengaruh stereotip gender dan ekspektasi sosial yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung mengalami kecemasan dan ketidakpercayaan diri dalam bidang yang dianggap "maskulin", seperti matematika dan sains, yang dapat menghambat performa akademik mereka di bidang-bidang ini. Faktor-faktor seperti metode pengajaran yang tidak sensitif gender, kurangnya role model perempuan di bidang tertentu, dan diskriminasi implisit oleh guru juga turut memperkuat kesenjangan hasil pendidikan ini.

c. Solusi untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah penerapan kebijakan pendidikan yang proaktif dalam mendukung kesetaraan gender. Hal ini termasuk memberikan insentif dan dukungan khusus untuk anak perempuan agar mereka dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Contoh keberhasilan dari kebijakan semacam ini dapat dilihat di negara-negara seperti Rwanda dan Bangladesh, di mana upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak perempuan telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk menantang dan mengubah stereotip gender yang membatasi anak perempuan dalam mengejar bidang studi tertentu. Program-program *mentoring*, penyediaan role model perempuan dalam bidang STEM, serta pengembangan kurikulum yang inklusif dan sensitif gender merupakan langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk mendukung perempuan dalam pendidikan. Guru dan pendidik juga perlu dilatih untuk mengatasi bias gender dalam pengajaran dan penilaian, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang adil dan setara kepada semua siswa, tanpa memandang gender mereka. Upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa juga sangat penting. Ini termasuk menangani masalah kekerasan berbasis gender, *bullying*, dan diskriminasi di sekolah, serta memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara ke fasilitas dan sumber daya pendidikan.

Secara keseluruhan, mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua.

Hubungan antara gender, jenis kelamin, keluarga, dan pendidikan sangatlah kompleks dan memiliki banyak aspek, dengan berbagai faktor sosial, budaya, dan individu yang mempengaruhi bagaimana elemen-elemen ini saling bersinggungan. Berikut ikhtisar hubungan antara konsep-konsep ini:

a. Jenis Kelamin dan Gender:

- 1) Jenis kelamin mengacu pada ciri-ciri biologis dan fisiologis yang membedakan laki-laki dari perempuan, biasanya berdasarkan kromosom, organ reproduksi, dan ciri-ciri seksual sekunder. Mereka sering dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan, namun penting untuk dicatat bahwa beberapa individu mungkin interseks, yang berarti mereka memiliki variasi dalam karakteristik seks yang tidak sesuai dengan definisi umum tentang laki-laki atau perempuan.
- 2) Gender, di sisi lain, mengacu pada peran sosial dan budaya, perilaku, harapan, dan identitas yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan dalam masyarakat tertentu. Gender tidak sepenuhnya bersifat biner; itu ada dalam spektrum dan dapat mencakup identitas seperti transgender, genderqueer, non-biner, dan banyak lagi.

b. Keluarga dan Jenis Kelamin:

- 1) Keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi anak mengenai peran dan harapan gender. Keluarga dapat memperkuat atau menantang norma-norma gender tradisional.
- 2) Peran gender dalam keluarga dapat sangat bervariasi antar budaya dan periode waktu. Di beberapa keluarga, mungkin terdapat peran gender yang lebih tradisional, sementara di keluarga lain, perannya mungkin lebih cair dan egaliter.
- 3) Keluarga juga dapat memengaruhi cara individu memandang identitas dan ekspresi gendernya. Penerimaan dan dukungan

dari anggota keluarga merupakan faktor penting dalam kesejahteraan individu transgender dan non-konforming gender.

c. Pendidikan dan Gender:

- 1) Pendidikan adalah institusi yang kuat untuk membentuk dan melanggengkan norma-norma gender. Sekolah dan materi pendidikan sering kali mencerminkan dan memperkuat stereotip gender di masyarakat.
- 2) Kesenjangan gender dapat terjadi dalam bidang pendidikan, dengan variasi dalam akses, partisipasi, dan prestasi berdasarkan gender. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan.
- 3) Pendidikan juga dapat menjadi platform untuk menantang norma-norma gender dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang beragam identitas dan ekspresi gender. Pendidikan inklusif dan sensitif gender dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil.

d. Pendidikan dan Keluarga:

- 1) Pendidikan adalah cita-cita bersama dalam keluarga, dan orang tua sering kali memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan anak, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi.
- 2) Latar belakang keluarga, termasuk status sosial ekonomi, dapat berdampak signifikan terhadap peluang dan hasil pendidikan. Keluarga yang memprioritaskan pendidikan mungkin menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk keberhasilan pendidikan anak-anak mereka.
- 3) Interaksi antara nilai-nilai keluarga dan institusi pendidikan dapat mempengaruhi pilihan siswa mengenai jalur akademis dan karier mereka.

Singkatnya, hubungan antara gender, jenis kelamin, keluarga, dan pendidikan bersifat rumit dan dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, masyarakat, dan individu, serta berpotensi mencerminkan dan membentuk norma dan harapan sosial. Upaya untuk mendorong kesetaraan dan inklusivitas gender dalam konteks keluarga dan pendidikan penting untuk mendorong masyarakat yang lebih adil.

a. Jenis Kelamin dan Gender:

- 1) Jenis kelamin mengacu pada ciri-ciri biologis yang biasanya membedakan individu sebagai laki-laki atau perempuan, seperti organ reproduksi, kromosom, dan profil hormonal. Hal ini sering dianggap sebagai konsep biner (pria dan wanita), namun penting untuk menyadari bahwa individu interseks mungkin memiliki variasi dalam karakteristik seks biologis mereka.
- 2) Gender, di sisi lain, merupakan konsep yang lebih cair dan sosiokultural. Hal ini mengacu pada peran, perilaku, harapan, dan identitas yang diberikan masyarakat kepada individu berdasarkan jenis kelamin yang mereka anggap. Gender bisa bersifat non-biner atau berubah-ubah, dan mencakup serangkaian identitas selain laki-laki dan perempuan.

b. Peran Keluarga dan Gender:

- 1) Keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi peran dan norma gender. Anak-anak sering kali belajar tentang perilaku apa yang dianggap sesuai dengan persepsi gender mereka dalam konteks keluarga. Misalnya, anak laki-laki mungkin didorong untuk menjadi kuat dan tegas, sedangkan anak perempuan mungkin didorong untuk menjadi orang yang mengasuh dan peduli.
- 2) Ekspektasi peran gender ini dapat berdampak pada cara anggota keluarga diperlakukan dan peluang yang diberikan kepada mereka.

c. Pendidikan dan Gender:

- 1) Pendidikan merupakan lembaga penting untuk membentuk dan memperkuat peran dan harapan gender. Sekolah dan

kurikulum pendidikan sering kali mencerminkan dan melanggengkan norma-norma gender dalam masyarakat. Misalnya, buku teks mungkin menggambarkan peran gender tradisional, dan guru mungkin secara tidak sengaja menunjukkan bias gender dalam interaksi mereka dengan siswa.

- 2) Akses terhadap pendidikan secara historis tidak setara bagi berbagai gender, dengan banyak anak perempuan dan perempuan menghadapi hambatan terhadap pendidikan di beberapa bagian dunia. Upaya telah dilakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan melalui inisiatif seperti kampanye pendidikan anak perempuan.

d. Keluarga dan Pendidikan:

- 1) Keluarga sangat penting bagi pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Kualitas dukungan dan keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak dapat berdampak signifikan terhadap kinerja akademik dan motivasi mereka.
- 2) Status dan nilai-nilai sosio-ekonomi keluarga juga memainkan peranan penting dalam peluang pendidikan anak. Keluarga yang memprioritaskan pendidikan dan mempunyai sarana untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anaknya cenderung memperoleh hasil yang lebih baik.

e. Kesenjangan Gender dan Pendidikan:

- 1) Kesenjangan gender dalam pendidikan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan partisipasi, akses terhadap sumber daya, dan prestasi akademik. Di beberapa masyarakat, anak perempuan secara historis dirugikan, sementara di masyarakat lain, anak laki-laki mungkin menghadapi tantangan khusus.
- 2) Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini sering kali melibatkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan, memastikan akses yang setara terhadap peluang pendidikan, dan menantang norma-norma gender tradisional.

Singkatnya, hubungan antara gender, jenis kelamin, keluarga, dan pendidikan saling berhubungan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor masyarakat dan individu. Memahami dan mengatasi dampak gender dan seks terhadap dinamika keluarga dan pendidikan adalah penting untuk mendorong kesetaraan dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

SEKOLAH DAN MASYARAKAT

A. Peran Sekolah dalam Masyarakat

Sekolah adalah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai agen sosialisasi, sekolah berfungsi untuk mengajarkan murid bagaimana berperilaku dalam masyarakat, termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menghormati aturan, dan memahami peran mereka sebagai warga negara. Emile Durkheim (1956) berargumen bahwa pendidikan adalah alat utama untuk menjaga solidaritas sosial dengan mengajarkan norma-norma kolektif yang penting bagi integritas sosial. Dalam pandangan ini, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar mata pelajaran akademis, tetapi juga untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang berfungsi.

Namun, peran sekolah dalam masyarakat tidak terbatas pada sosialisasi semata. Sekolah juga berfungsi sebagai mekanisme untuk reproduksi sosial, yaitu proses di mana struktur sosial yang ada dipertahankan dan diperkuat melalui pendidikan. Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron (1977) mengemukakan bahwa sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketidaksetaraan sosial dengan memberikan keuntungan kepada individu yang memiliki kapital budaya lebih besar. Kapital budaya, seperti gaya bicara, selera, dan pengetahuan tertentu, sering kali lebih mudah diakses oleh murid dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih tinggi, sehingga mereka cenderung lebih berhasil dalam sistem pendidikan yang ada.

Meskipun demikian, sekolah juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial. Melalui pendidikan kritis, sekolah dapat mengajarkan murid untuk berpikir kritis tentang struktur sosial yang ada, mempertanyakan ketidakadilan, dan bekerja untuk perubahan sosial. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pemberdayaan, di mana murid belajar untuk melihat dunia secara kritis dan untuk berkontribusi pada transformasi sosial yang positif. Pendidikan kritis

ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan kesadaran sosial dan politik.

Sekolah juga memainkan peran penting dalam integrasi sosial, terutama di masyarakat yang beragam secara etnis dan budaya. Dalam konteks ini, sekolah dapat menjadi tempat di mana murid dari berbagai latar belakang belajar untuk hidup bersama, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan multikultural, seperti yang dijelaskan oleh James Banks (2006), bertujuan untuk mengajarkan murid tentang pentingnya keberagaman dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui program-program ini, sekolah dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan koheren, di mana semua individu dihargai dan dihormati.

Namun, peran sekolah dalam masyarakat juga dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika ada ketidakcocokan antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan realitas sosial yang dihadapi murid di luar sekolah. Misalnya, sekolah mungkin mengajarkan pentingnya meritokrasi dan kerja keras, tetapi murid dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung mungkin menghadapi hambatan struktural yang membuat mereka sulit mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk tidak hanya mentransmisikan nilai-nilai dominan, tetapi juga untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan murid.

B. Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat memegang peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan pendidikan. Salah satu cara utama masyarakat mempengaruhi pendidikan adalah melalui kebijakan pendidikan. Kebijakan ini sering kali mencerminkan nilai-nilai dan prioritas yang dianut oleh masyarakat, seperti pentingnya kesetaraan, efisiensi ekonomi, atau keberlanjutan lingkungan. Misalnya, di banyak negara, kebijakan pendidikan telah bergeser untuk menekankan pentingnya STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi global untuk tenaga kerja yang terampil dalam bidang-bidang ini (Labaree, 2010). Kebijakan ini mempengaruhi kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah, sumber daya yang dialokasikan, dan metode pengajaran yang digunakan.

Selain kebijakan, masyarakat juga mempengaruhi pendidikan melalui harapan sosial dan budaya. Harapan ini dapat datang dari berbagai pihak, termasuk orang tua, komunitas, dan media. Orang tua, misalnya, memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka dengan menetapkan harapan akademis, mendukung pembelajaran di rumah, dan terlibat dalam aktivitas sekolah. Joyce Epstein (2001) mengembangkan model keterlibatan orang tua yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan akademis murid. Harapan ini tidak hanya membentuk sikap murid terhadap pendidikan tetapi juga mempengaruhi bagaimana sekolah merespons kebutuhan murid dan keluarga.

Masyarakat juga berperan dalam mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pendidikan. Sumber daya ini mencakup segala sesuatu mulai dari pendanaan untuk infrastruktur sekolah hingga program ekstrakurikuler dan dukungan bagi murid yang membutuhkan. Namun, distribusi sumber daya ini sering kali tidak merata, yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh murid di berbagai daerah. Di banyak kasus, sekolah di daerah miskin atau pedesaan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya berkualitas tinggi seperti sekolah di daerah perkotaan yang lebih makmur. Fenomena ini sering kali memperkuat ketidaksetaraan sosial yang sudah ada, membuat murid dari latar belakang yang kurang beruntung semakin sulit untuk berhasil secara akademis (Rothstein, 2004).

Pengaruh masyarakat dalam pendidikan juga dapat terlihat dalam cara-cara di mana sekolah dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dominan. Misalnya, di beberapa masyarakat, pendidikan mungkin lebih menekankan pada kepatuhan dan penguasaan keterampilan dasar, sementara di masyarakat lain, pendidikan mungkin lebih berfokus pada kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi tetapi juga oleh pandangan dunia yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk tetap sensitif terhadap konteks sosial dan budaya di mana mereka beroperasi.

Namun, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan juga bisa menjadi tantangan, terutama ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau ketika kebijakan pendidikan tidak mencerminkan

kebutuhan semua kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi sekolah untuk membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Selain itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua anggota masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu.

C. Sekolah sebagai Cerminan Masyarakat

Sekolah sering kali mencerminkan struktur sosial dan budaya dari masyarakat di mana mereka berada. Misalnya, di masyarakat yang sangat terstratifikasi, sekolah-sekolah cenderung merefleksikan ketidaksetaraan ini dalam cara mereka diorganisasikan dan dioperasikan. Ini dapat dilihat dalam perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah kaya dan miskin, serta dalam cara kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dirancang untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Max Weber (1947) mencatat bahwa institusi sosial, termasuk sekolah, sering kali merefleksikan kekuasaan dan otoritas yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya mentransmisikan pengetahuan tetapi juga norma-norma dan nilai-nilai yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada.

Di banyak masyarakat, sekolah menjadi tempat di mana norma-norma sosial yang dominan diajarkan dan diperkuat. Misalnya, di masyarakat yang menekankan meritokrasi, sekolah sering kali menekankan pentingnya prestasi akademis dan kerja keras sebagai cara untuk mencapai kesuksesan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua murid memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ini, karena faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, ras, dan gender dapat mempengaruhi hasil pendidikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah sering kali berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial, mereka juga dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat (Bourdieu, 1977).

Sekolah juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat di mana mereka berada. Misalnya, di masyarakat yang sangat menghargai sains dan teknologi, kurikulum sekolah mungkin lebih berfokus pada mata pelajaran

STEM, sementara di masyarakat yang lebih menghargai seni dan humaniora, kurikulum mungkin lebih beragam dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan akademis tetapi juga untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya yang penting bagi identitas dan kohesi sosial masyarakat. Pendidikan multikultural, misalnya, bertujuan untuk mengajarkan murid tentang pentingnya keberagaman dan untuk mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya (Banks, 2006).

Namun, sekolah juga memiliki potensi untuk menantang dan mengubah struktur sosial dan budaya yang ada. Melalui pendidikan kritis, sekolah dapat mengajarkan murid untuk berpikir kritis tentang norma-norma sosial yang mereka terima dan untuk mempertanyakan ketidakadilan yang mereka saksikan. Pendidikan kritis ini tidak hanya membantu murid memahami dunia di sekitar mereka tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi agen perubahan sosial. Dalam konteks ini, sekolah dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial di mana ide-ide baru diuji dan diimplementasikan, memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berubah seiring waktu (Freire, 1970).

Selain itu, sekolah juga memainkan peran penting dalam integrasi sosial, terutama di masyarakat yang beragam. Pendidikan multikultural, seperti yang dijelaskan oleh Banks (2006), bertujuan untuk mengajarkan murid tentang pentingnya keberagaman dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui program-program ini, sekolah dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan koheren, di mana semua individu dihargai dan dihormati. Dengan demikian, sekolah tidak hanya mencerminkan masyarakat di mana mereka berada tetapi juga berpotensi untuk membentuk dan mengubah masyarakat tersebut.

D. Sekolah sebagai Agen Perubahan Sosial

Meskipun sekolah sering kali mereproduksi struktur sosial yang ada, mereka juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial. Salah satu cara utama di mana sekolah dapat melakukan ini adalah melalui pendidikan kritis, yang mendorong murid untuk berpikir kritis tentang masyarakat mereka, mempertanyakan ketidakadilan, dan bekerja untuk perubahan sosial. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pemberdayaan, di mana murid belajar untuk melihat

dunia secara kritis dan untuk berkontribusi pada transformasi sosial yang positif. Pendidikan kritis ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis tetapi juga pada pengembangan kesadaran sosial dan politik.

Sekolah dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mengajarkan murid tentang hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Misalnya, program-program pendidikan yang berfokus pada hak-hak sipil, keberlanjutan lingkungan, atau kesetaraan gender dapat memainkan peran penting dalam mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan global dan untuk bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Henry Giroux (1983) berpendapat bahwa pendidikan kritis adalah cara untuk mempersiapkan murid untuk menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, sekolah berfungsi sebagai tempat di mana murid belajar untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Sekolah juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial dengan memperkenalkan inovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran. Misalnya, pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah dapat membantu murid mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Selain itu, teknologi pendidikan juga dapat digunakan untuk memperluas akses ke informasi dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Dengan cara ini, sekolah dapat membantu murid untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21 (Papert, 1980).

Namun, menjadi agen perubahan sosial tidak selalu mudah bagi sekolah. Mereka sering kali menghadapi hambatan, termasuk resistensi dari masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan pendidikan yang konservatif. Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi sekolah untuk membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah. Ini dapat membantu mereka mengakses sumber daya tambahan, mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan memastikan bahwa program-program pendidikan mereka relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penting juga bagi sekolah untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan program-program mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dalam mencapai tujuan mereka (Fullan, 1993).

Akhirnya, sekolah dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan dalam semua aspek pendidikan. Ini termasuk memastikan bahwa semua murid, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi, ras, atau gender, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Ini juga mencakup upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan prasangka di dalam sekolah, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati. Melalui pendekatan ini, sekolah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil pendidikan tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

E. Tantangan dalam Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Meskipun ada banyak potensi positif dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat, ada juga tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan. Sekolah di daerah yang berbeda sering kali memiliki sumber daya yang sangat berbeda, yang dapat menghasilkan kesenjangan besar dalam pencapaian akademis dan peluang hidup. Di banyak kasus, sekolah di daerah miskin atau pedesaan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya berkualitas tinggi seperti sekolah di daerah perkotaan yang lebih makmur. Fenomena ini sering kali memperkuat ketidaksetaraan sosial yang sudah ada, membuat murid dari latar belakang yang kurang beruntung semakin sulit untuk berhasil secara akademis (Rothstein, 2004).

Ketidaksetaraan ini juga dapat terlihat dalam cara kebijakan pendidikan diterapkan. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan standar akademis sering kali mengabaikan kebutuhan murid yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung. Ini bisa terjadi ketika kebijakan pendidikan menekankan standar yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan dalam sumber daya dan dukungan yang tersedia bagi murid di berbagai daerah. Akibatnya, murid di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, yang pada gilirannya memperkuat ketidaksetaraan sosial (Ravitch, 2010).

Tantangan lain dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah bagaimana sekolah dapat tetap relevan dengan perubahan cepat dalam masyarakat. Teknologi, perubahan demografi, dan perkembangan

ekonomi global semuanya mempengaruhi apa yang dibutuhkan dari sistem pendidikan. Sekolah perlu terus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan murid di dunia yang terus berubah. Ini termasuk memperkenalkan teknologi baru dalam pembelajaran, mempromosikan literasi digital, dan memastikan bahwa semua murid memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka (Labaree, 2010).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi sekolah adalah bagaimana menangani perbedaan budaya dan etnis di dalam masyarakat. Di masyarakat yang semakin beragam, sekolah sering kali menjadi tempat di mana berbagai budaya dan identitas bertemu. Ini bisa menjadi sumber kekayaan, tetapi juga bisa menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan multikultural, seperti yang dijelaskan oleh Banks (2006), bertujuan untuk mengajarkan murid tentang pentingnya keberagaman dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Namun, implementasi pendidikan multikultural sering kali menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari masyarakat yang lebih luas, kurangnya dukungan dari kebijakan pendidikan, dan keterbatasan dalam pelatihan guru.

Akhirnya, tantangan lain yang dihadapi sekolah adalah bagaimana membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat. Sekolah sering kali memerlukan dukungan dari komunitas lokal, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah untuk mengakses sumber daya tambahan dan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan mereka relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, membangun kemitraan ini bisa menjadi tantangan, terutama ketika ada perbedaan dalam prioritas, harapan, atau nilai-nilai antara sekolah dan komunitas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi sekolah untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan (Epstein, 2001).

Hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan hubungan yang kompleks dan memiliki banyak aspek, karena sekolah memainkan peran penting dalam membentuk dan mencerminkan nilai-nilai, norma,

dan harapan masyarakat. Hubungan ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang:

- a. Sosialisasi (***Socialization***): Sekolah berfungsi sebagai lembaga utama untuk sosialisasi. Mereka meneruskan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, individu belajar tentang sejarah masyarakat, adat istiadat, bahasa, dan harapan sosialnya.
- b. Persiapan Kewarganegaraan (***Preparation for Citizenship***): Sekolah mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, keterlibatan sipil, dan tanggung jawab sosial, membantu siswa memahami peran mereka dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.
- c. Fungsi Ekonomi (***Economic Function***): Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk dunia kerja. Dalam perekonomian modern yang berbasis pengetahuan, sekolah berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk berkarier dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d. Mobilitas Sosial (***Social Mobility***): Pendidikan dapat menjadi alat mobilitas sosial, yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Akses terhadap pendidikan berkualitas dapat berdampak signifikan terhadap peluang dan peluang hidup seseorang.
- e. Transmisi Budaya (***Cultural Transmission***): Sekolah membantu melestarikan dan mewariskan warisan budaya. Mereka mengajarkan bahasa, sastra, seni, dan sejarah, memastikan bahwa identitas budaya masyarakat dipertahankan dan dirayakan.
- f. Integrasi Sosial (***Social Integration***): Sekolah menyatukan individu-individu dari berbagai latar belakang, mendorong integrasi sosial dan mendorong toleransi dan pemahaman di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Mereka dapat berperan dalam mengurangi prasangka dan mendorong kohesi sosial.
- g. Perubahan Sosial (***Social Change***): Sekolah juga dapat menjadi agen perubahan sosial. Mereka menantang norma-norma yang ada dan dapat mempromosikan nilai-nilai progresif, seperti kesetaraan

gender dan kelestarian lingkungan, yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih luas.

- h. Refleksi Masyarakat (*Reflection of Society*): Sekolah dapat mencerminkan nilai-nilai dan kesenjangan yang ada di masyarakat. Sistem pendidikan dapat melanggengkan atau menantang hierarki sosial yang sudah ada, bergantung pada kebijakan dan praktik yang diterapkan.
- i. Keterlibatan Masyarakat (*Community Engagement*): Sekolah sering kali berfungsi sebagai pusat kegiatan dan keterlibatan masyarakat. Mereka mengadakan acara, pertemuan, dan program yang menghubungkan individu dan *meningkatkan rasa memiliki*.
- j. Pengaruh Masyarakat di Sekolah (*Influence of Society on Schools*): Masyarakat membentuk kurikulum, kebijakan, dan praktik sekolah. Perubahan nilai-nilai masyarakat, kemajuan teknologi, dan pergeseran ekonomi dapat menyebabkan perubahan dalam prioritas dan metode pendidikan.
- k. Respons Krisis (*Crisis Response*): Sekolah memainkan peran penting pada saat krisis, seperti bencana alam atau keadaan darurat kesehatan masyarakat. Mereka memberikan dukungan dan sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ringkasnya, hubungan antara sekolah dan masyarakat bersifat dinamis dan timbal balik. Sekolah mencerminkan dan mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma, dan struktur masyarakat di mana mereka beroperasi. Menyadari pentingnya hubungan ini sangatlah penting untuk mengatasi tantangan masyarakat dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan positif.

GURU, MURID DAN KELAS

Pendidikan merupakan salah satu institusi sosial paling fundamental dalam masyarakat modern, berfungsi sebagai agen utama dalam membentuk karakter individu sekaligus alat untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam kerangka pendidikan, hubungan antara guru, murid, dan kelas menjadi tiga elemen inti yang memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran. Keterkaitan di antara ketiga elemen ini tidak hanya sebatas dalam ruang fisik, melainkan juga dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Dengan kata lain, guru, murid, dan kelas tidak dapat dipahami secara terpisah karena mereka berinteraksi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada di luar sekolah.

Dalam perspektif sosiologis, guru sering kali dianggap sebagai "agen sosialisasi" yang memainkan peran lebih dari sekadar penyampai pengetahuan. Mereka bertindak sebagai penghubung antara individu dan masyarakat, bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dan norma yang diperlukan bagi keberlangsungan sosial. Guru adalah pembentuk karakter, penegak disiplin, serta pembimbing moral yang membantu siswa memahami peran mereka dalam masyarakat yang lebih besar. Namun, peran guru ini bukanlah hal yang statis. Guru juga dihadapkan pada perubahan sosial yang terus berkembang, seperti pergeseran nilai-nilai budaya, kemajuan teknologi, serta perubahan dalam kebijakan pendidikan dan tuntutan globalisasi. Dalam konteks ini, guru harus menavigasi peran mereka dengan cermat, memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan murid yang beragam sambil tetap mempertahankan otoritas dan tanggung jawab profesional mereka.

Di sisi lain, murid juga tidak dapat dipandang sebagai objek pasif dalam proses pendidikan. Dalam literatur sosiologi pendidikan, murid sering kali dianggap sebagai "agen" dalam proses pembelajaran, di mana mereka membawa identitas sosial, latar belakang budaya, dan pengalaman hidup yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan pendidikan. Murid adalah subjek aktif yang memproses, menafsirkan, dan

merespons pembelajaran sesuai dengan pengalaman pribadi dan sosial mereka. Identitas sosial seperti kelas sosial, etnisitas, gender, dan agama memengaruhi posisi murid di dalam sistem pendidikan. Misalnya, murid dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan murid dari kelas menengah atas, baik dalam hal akses ke sumber daya pendidikan maupun harapan akademis yang dikenakan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya interaksi di dalam kelas, sangat terkait dengan dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial yang ada di masyarakat.

Kelas, baik sebagai ruang fisik maupun sosial, berfungsi sebagai arena utama di mana interaksi antara guru dan murid berlangsung. Kelas bukan hanya sekadar tempat untuk kegiatan akademis, tetapi juga tempat di mana berbagai norma, nilai, dan hubungan sosial dibentuk dan dinegosiasikan. Kelas adalah mikrokosmos dari masyarakat yang lebih luas, di mana stratifikasi sosial, hubungan kekuasaan, dan ketidaksetaraan sering kali tercermin. Pengaturan kelas, metode pengajaran, dan kebijakan penilaian memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pendidikan murid. Misalnya, bagaimana kelas diatur—apakah dengan gaya tradisional yang hierarkis atau dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif—dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan antara guru dan murid serta antara murid itu sendiri. Dalam banyak kasus, kelas juga menjadi tempat di mana ketidaksetaraan sosial yang lebih luas, seperti perbedaan dalam kapital budaya dan ekonomi, dapat diperkuat atau dilawan.

Dari sudut pandang sosiologis, hubungan antara guru, murid, dan kelas dapat dipahami sebagai proses interaktif yang terus menerus dibentuk oleh konteks sosial yang lebih besar. Guru, misalnya, tidak hanya berperan sebagai otoritas yang memberikan instruksi, tetapi juga sebagai figur yang mengatur dinamika sosial dalam kelas, memastikan bahwa setiap murid dapat berpartisipasi secara setara dan memiliki akses ke kesempatan belajar yang sama. Murid, dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, membawa pengalaman dan harapan mereka sendiri ke dalam kelas, dan ini mempengaruhi cara mereka merespons otoritas guru serta kurikulum yang diajarkan. Dalam beberapa kasus, murid dapat menunjukkan bentuk perlawanan terhadap otoritas atau norma-norma sekolah, yang sering kali merupakan bentuk agen sosial

mereka dalam menavigasi posisi mereka di dalam struktur sosial yang lebih luas. Di sisi lain, kelas sebagai ruang interaksi sering kali menjadi tempat di mana ketidaksetaraan sosial yang lebih besar diperkuat melalui kurikulum tersembunyi, praktik penilaian, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.

Selain itu, perkembangan globalisasi, teknologi, dan perubahan kebijakan pendidikan juga telah membawa tantangan dan peluang baru bagi hubungan antara guru, murid, dan kelas. Globalisasi telah memperkenalkan standar pendidikan internasional, mobilitas siswa lintas negara, serta pengaruh budaya yang semakin beragam di dalam kelas. Guru kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengajar di lingkungan yang lebih global dan multikultural, sementara murid semakin dituntut untuk memiliki keterampilan global yang relevan di pasar kerja internasional. Di sisi lain, kemajuan teknologi pendidikan juga telah mengubah cara guru dan murid berinteraksi, dengan kelas yang semakin digital dan pembelajaran yang lebih personal. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan digital dan akses yang tidak merata terhadap teknologi di antara siswa dari latar belakang yang berbeda.

Kelas (**classroom**) di sekolah adalah lebih dari sekadar ruang fisik di mana proses belajar-mengajar berlangsung. Dari perspektif sosiologis, kelas adalah mikrokosmos dari masyarakat yang lebih luas, tempat di mana murid berinteraksi satu sama lain, dengan guru, dan dengan struktur yang lebih besar dari sistem pendidikan itu sendiri. Di dalam kelas, murid tidak hanya menerima pengetahuan akademis, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukan identitas, sosialisasi, dan reproduksi sosial. Sosiologi pendidikan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai dinamika ini memengaruhi pembelajaran dan perkembangan murid, serta bagaimana murid memainkan peran aktif dalam menciptakan dan mengubah lingkungan kelas dan sekolah mereka.

Peran murid di dalam kelas dan sekolah tidak bersifat pasif; mereka adalah agen yang aktif yang berpartisipasi dalam pembentukan norma-norma sosial, dinamika kekuasaan, dan identitas kelompok. Melalui interaksi sehari-hari, murid membantu membentuk budaya kelas dan berkontribusi pada reproduksi atau perubahan struktur sosial yang ada di sekolah. Peran mereka di kelas mencakup berbagai aspek, mulai dari

kolaborasi dalam pembelajaran hingga partisipasi dalam dinamika kekuasaan yang terjadi di antara teman sebaya dan antara murid dan guru. Dengan memahami peran murid dari perspektif sosiologis, kita dapat lebih baik dalam mengidentifikasi cara-cara di mana pendidikan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memberdayakan individu dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Bab ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan antara guru, murid, dan kelas dibentuk, dipengaruhi, dan diatur oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kita akan mengeksplorasi bagaimana kekuasaan, identitas sosial, dan ketidaksetaraan berperan dalam membentuk pengalaman pendidikan di dalam kelas. Bab ini juga akan menyelidiki bagaimana dinamika sosial di dalam kelas dapat mencerminkan, memperkuat, atau bahkan menantang struktur sosial yang lebih luas di masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran guru, murid, dan kelas dalam proses pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk perubahan sosial atau alat untuk mempertahankan status quo.

1. Peran Guru dalam Masyarakat

Guru sebagai Agen Sosialisasi: Guru memainkan peran kunci dalam mentransfer nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi muda. Dalam konteks ini, *Apple* (2019) menekankan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh guru tidak hanya mencakup transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan ideologi dan pemahaman dunia yang sesuai dengan kepentingan sosial tertentu. Ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran ideologis dalam membentuk pandangan dunia siswa (Apple, 2019). *Giroux* (2020) juga menambahkan bahwa peran ini melibatkan pembentukan agen yang mampu berpikir kritis dan bertindak dalam konteks sosial mereka, bukan hanya sekadar penerus budaya yang ada (Giroux, 2020).

Guru sebagai Pemimpin Kelas: Guru sebagai pemimpin kelas tidak hanya bertanggung jawab untuk manajemen kelas, tetapi juga untuk menciptakan iklim belajar yang inklusif dan mendukung. Menurut *Hargreaves dan Fullan* (2020), guru harus mengembangkan kapasitas mereka sebagai pemimpin pedagogis yang mampu menginspirasi dan

memfasilitasi pembelajaran melalui kepemimpinan yang kolaboratif dan berbasis komunitas. Kepemimpinan ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola keberagaman dalam kelas, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial-budaya (Hargreaves & Fullan, 2020).

Guru dan Kapital Budaya:** Menurut Bourdieu (2018), kapital budaya mencakup berbagai bentuk pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan keahlian yang dianggap berharga di masyarakat dan sekolah. Guru, sebagai penjaga kapital budaya, sering kali memiliki kekuatan untuk menentukan nilai-nilai budaya mana yang dihargai di dalam kelas. Hal ini dapat menyebabkan reproduksi ketidaksetaraan sosial ketika guru tidak secara sadar memperhatikan keberagaman latar belakang siswa dan bagaimana kapital budaya mereka mungkin tidak sesuai dengan harapan institusi pendidikan (Bourdieu, 2018). Lamont dan Lareau (2020) lebih lanjut menyatakan bahwa guru perlu memiliki kesadaran kritis terhadap bias mereka sendiri dan bagaimana bias tersebut dapat memengaruhi interaksi mereka dengan siswa dari latar belakang sosial yang berbeda (Lamont & Lareau, 2020).

2. Murid sebagai Subjek dan Objek Pendidikan

Murid sebagai Subjek Aktif: Murid sebagai subjek aktif membawa agen sosial mereka ke dalam proses pendidikan. Freire (2021) menekankan pentingnya kesadaran kritis di mana siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mempersoalkan dan membentuk ulang pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri. Ini adalah proses yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan suara mereka sendiri dalam ruang pendidikan (Freire, 2021). Bakhtin (2021) juga menambahkan bahwa dialogisitas antara guru dan murid adalah esensial untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan penuh makna (Bakhtin, 2021).

Identitas Sosial dan Pendidikan: Identitas sosial murid—termasuk kelas sosial, etnisitas, gender, dan identitas lainnya—berpengaruh besar pada pengalaman mereka di dalam sistem pendidikan. Lareau (2019) mengidentifikasi bahwa kelas sosial mempengaruhi jenis dukungan yang diterima siswa di rumah dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem pendidikan. Anak-anak dari kelas menengah cenderung menerima "pengasuhan yang terstruktur," yang mempersiapkan mereka untuk

menavigasi institusi pendidikan dengan lebih efektif dibandingkan anak-anak dari kelas pekerja (Lareau, 2019). Selain itu, Ogbu (2018) berargumen bahwa etnisitas dan ras juga memainkan peran dalam pembentukan harapan akademis, di mana siswa dari kelompok minoritas sering kali menghadapi tantangan tambahan karena diskriminasi dan stereotip rasial dalam pendidikan (Ogbu, 2018).

Perlawanan dan Kepatuhan: Menurut Willis (2018), perlawanan yang ditunjukkan oleh murid sering kali merupakan bentuk agen sosial di mana mereka menolak untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diberlakukan oleh otoritas pendidikan. Namun, perlawanan ini sering kali berbentuk "perlawanan ritual," di mana murid secara tidak sadar menegaskan kembali batasan sosial mereka sendiri. Sebaliknya, Giroux (2020) menyarankan pendekatan pendidikan yang memberdayakan murid untuk menentang struktur sosial yang menindas secara lebih konstruktif melalui pedagogi kritis (Giroux, 2020).

3. Kelas sebagai Ruang Sosial

Kelas sebagai Mikrokosmos Masyarakat: Kelas sering kali dianggap sebagai representasi kecil dari masyarakat yang lebih luas. Giddens (2020) menyatakan bahwa struktur kelas mencerminkan dan memperkuat hierarki sosial yang ada di masyarakat, seperti stratifikasi berdasarkan kelas sosial, gender, dan etnisitas. Kelas sebagai ruang sosial memungkinkan kita untuk memahami bagaimana norma sosial dipelajari, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari antara guru dan murid (Giddens, *et al.*, 2020). Bernstein (2019) lebih lanjut menekankan bahwa bahasa dan kode komunikasi yang digunakan dalam kelas juga berperan dalam mereproduksi struktur sosial yang ada (Bernstein, 2019).

Dinamika Kekuasaan di Dalam Kelas: Kekuasaan dalam kelas sering kali dilihat melalui lensa teori Foucault (2021), yang mengamati bagaimana teknik disiplin, seperti pengawasan dan penilaian, digunakan untuk mengatur dan mengontrol perilaku siswa. Sekolah sebagai institusi sosial menggunakan berbagai mekanisme kekuasaan untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma yang diinginkan oleh masyarakat (Foucault, 2021). Ball (2019) mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan, yang sering kali didorong oleh ideologi neoliberal, memperkenalkan

bentuk-bentuk baru dari pengawasan dan evaluasi yang menambah kompleksitas dinamika kekuasaan di dalam kelas (Ball, 2019).

Kelas dan Ketidaksetaraan: Kelas sering kali menjadi arena di mana ketidaksetaraan sosial dipertahankan atau bahkan diperparah. Anyon (2022) mengungkapkan bahwa kurikulum tersembunyi, yang mencakup nilai-nilai dan harapan yang tidak secara eksplisit diajarkan tetapi diimplikasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari, sering kali memperkuat ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Kurikulum ini mencerminkan dan memperkuat stratifikasi sosial dengan mengarahkan siswa dari latar belakang yang berbeda ke jalur pendidikan dan karier yang berbeda-beda, sering kali sesuai dengan posisi sosial awal mereka (Anyon, 2022). Reay (2020) juga menyoroti bagaimana rasa takut gagal dan kurangnya dukungan di rumah dapat memperburuk kesenjangan prestasi antara siswa dari latar belakang yang berbeda (Reay, 2020).

4. Interaksi Guru-Murid di Dalam Kelas

Komunikasi dan Hubungan Interpersonal: Hubungan interpersonal yang efektif antara guru dan murid sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Cornelius-White (2019) menyoroti bahwa komunikasi yang empatik dan berbasis pada penghargaan terhadap keberagaman murid dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada gilirannya meningkatkan prestasi akademis mereka. Komunikasi yang buruk atau kurangnya empati dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada, terutama bagi siswa yang sudah menghadapi tantangan tambahan di luar kelas (Cornelius-White, 2019). Rogers (2020) menambahkan bahwa model pembelajaran yang berfokus pada siswa dan hubungan guru-murid yang sehat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa (Rogers, 2020).

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Strategi pengajaran yang efektif harus mempertimbangkan keberagaman kebutuhan dan gaya belajar siswa. Johnson dan Johnson (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa tetapi juga membangun keterampilan sosial yang penting untuk kerja tim di masa depan. Mereka juga menekankan pentingnya menciptakan tugas yang menantang namun dapat dicapai untuk mendorong siswa bekerja sama dan belajar dari satu sama lain (Johnson & Johnson, 2020). Vygotsky (2021)

dalam teorinya tentang zona perkembangan proksimal menekankan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa bekerja dalam "zona" di mana mereka dapat mencapai tugas dengan bantuan dari guru atau teman sekelas yang lebih ahli (Vygotsky, 2021).

Evaluasi dan Penilaian: Penilaian memainkan peran penting dalam proses pendidikan, baik dalam mengukur kemajuan siswa maupun dalam membentuk pengalaman belajar mereka. Brookhart (2021) berpendapat bahwa penilaian formatif yang memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membangun rasa percaya diri mereka dalam belajar. Sebaliknya, penilaian summatif yang berfokus pada nilai akhir tanpa memberikan umpan balik yang bermakna dapat membuat siswa merasa tertekan dan kurang termotivasi (Brookhart, 2021). Black dan Wiliam (2018) juga menekankan pentingnya penggunaan penilaian untuk mendukung pembelajaran daripada hanya mengukur hasil, dengan menyarankan bahwa penilaian harus menjadi bagian integral dari proses pengajaran (Black & Wiliam, 2018).

5. Konteks Sosial yang Mempengaruhi Guru, Murid, dan Kelas

Kebijakan Pendidikan: Kebijakan pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana sekolah diorganisasikan dan bagaimana guru serta siswa berinteraksi. Ball (2020) mengkritik kebijakan pendidikan neoliberal yang menekankan hasil yang dapat diukur dan akuntabilitas yang ketat, yang sering kali menyebabkan tekanan yang besar pada guru dan siswa. Ini dapat mengarah pada pengajaran yang berfokus pada ujian dan mengabaikan aspek pembelajaran yang lebih luas, seperti pengembangan keterampilan kritis dan kreatif (Ball, 2020). *Rizvi dan Lingard* (2020) menambahkan bahwa kebijakan globalisasi dalam pendidikan cenderung memperkenalkan standar yang seragam secara global, yang mungkin tidak selalu cocok dengan konteks lokal dan dapat memperdalam ketidaksetaraan pendidikan (Rizvi & Lingard, 2020).

Teknologi dalam Pendidikan: Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara guru mengajar dan siswa belajar. Selwyn (2021) menunjukkan bahwa meskipun teknologi pendidikan memiliki potensi untuk mempersonalisasi pembelajaran dan meningkatkan akses ke pengetahuan, itu juga dapat memperlebar kesenjangan digital antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Siswa yang tidak memiliki akses yang

memadai ke teknologi atau yang tidak memiliki dukungan untuk menggunakannya secara efektif dapat tertinggal (Selwyn, 2021). Clark dan Mayer (2019) menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogi yang baik, dan bukan hanya pada adopsi teknologi untuk teknologi itu sendiri (Clark & Mayer, 2019).

Pengaruh Globalisasi: Globalisasi telah membawa tantangan dan peluang baru dalam pendidikan. Spring (2022) berargumen bahwa globalisasi pendidikan sering kali membawa agenda neoliberal yang menekankan pada kompetisi global, mobilitas tenaga kerja, dan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, pendekatan ini dapat mengabaikan kebutuhan lokal dan memperdalam ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang (Spring, 2022). Tikly (2018) juga memperingatkan bahwa globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya pendidikan, yang mengancam keberagaman pedagogi dan konten lokal (Tikly, 2018).

6. Guru, Murid, dan Kelas di Era Modern

Seiring perkembangan zaman, hubungan antara guru, murid, dan kelas mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai dinamika baru seperti globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, serta tuntutan sosial dan ekonomi yang terus berkembang telah membentuk ulang cara kita memandang peran guru, murid, dan kelas di era modern. Sosiologi pendidikan di era kontemporer harus mempertimbangkan dampak dari perubahan-perubahan ini pada interaksi dan proses pembelajaran di sekolah. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana tantangan dan peluang baru ini mempengaruhi guru, murid, dan kelas dalam dunia pendidikan modern.

a. Perubahan Peran Guru di Era Modern

Guru sebagai Fasilitator dan Pembimbing: Di era modern, peran guru telah berkembang dari sekadar sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Teknologi telah mengubah akses terhadap informasi, di mana siswa sekarang dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berfungsi sebagai

pembimbing yang membantu siswa untuk menyaring informasi, mengembangkan pemikiran kritis, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Selwyn (2021), guru modern harus mampu mengadopsi peran ini dengan fleksibilitas tinggi, karena mereka tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, tetapi juga membantu siswa menavigasi dunia yang dipenuhi informasi digital (Selwyn, 2021).

Guru dan Teknologi Pendidikan: Kemajuan teknologi telah memperkenalkan berbagai alat baru untuk mengajar, seperti platform pembelajaran *online*, alat komunikasi digital, dan perangkat lunak pembelajaran berbasis data. Guru di era modern harus mampu mengintegrasikan teknologi ini dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa. Teknologi seperti **learning management systems** (LMS), aplikasi kolaboratif, dan kelas virtual telah memberikan peluang bagi guru untuk mengajar dengan cara yang lebih interaktif dan personal. Namun, teknologi juga menuntut guru untuk terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan digital mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Clark dan Mayer (2019), teknologi pendidikan yang digunakan secara tepat dapat meningkatkan hasil belajar, tetapi jika tidak diintegrasikan dengan strategi pedagogis yang baik, teknologi bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran (Clark & Mayer, 2019).

Guru sebagai Agen Perubahan Sosial: Di tengah perkembangan sosial, guru modern juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan di dalam dan luar kelas. Tantangan seperti meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi, perubahan iklim, dan krisis global lainnya menuntut guru untuk mendidik generasi muda tentang bagaimana memahami dan menghadapi masalah-masalah ini. Guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan konten kurikulum tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Giroux (2020), pendidikan kritis modern mengharuskan guru untuk menjadi pemikir dan praktisi yang kritis, yang mampu membentuk siswa menjadi agen perubahan di masyarakat (Giroux, 2020).

b. Peran Murid di Era Modern

Murid sebagai Pembelajar Mandiri dan Kreatif: Di era modern, peran murid juga berubah seiring dengan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan informasi. Murid kini memiliki lebih banyak otonomi dalam proses pembelajaran mereka, di mana mereka dapat mencari informasi secara mandiri, belajar melalui platform *online*, dan mengembangkan keterampilan secara kreatif. Konsep "pembelajaran seumur hidup" menjadi semakin penting, di mana murid tidak lagi hanya belajar di dalam kelas, tetapi terus belajar di luar kelas melalui teknologi digital, media sosial, dan pengalaman langsung. Vygotsky (2021) menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana murid dapat membentuk pemahaman melalui diskusi dan kolaborasi, terutama di era modern yang didukung oleh alat-alat digital yang memungkinkan interaksi lintas batas fisik (Vygotsky, 2021).

Murid sebagai Agen Sosial: Murid di era modern tidak hanya dipandang sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai agen sosial yang aktif terlibat dalam proses belajar dan kehidupan masyarakat. Mereka menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, isu-isu keadilan sosial, dan teknologi yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, siswa modern sering kali menuntut pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata dan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi. Mereka ingin menjadi bagian dari solusi terhadap masalah global yang dihadapi dunia saat ini, dan ini mendorong pendidikan yang lebih berorientasi pada aksi sosial dan partisipasi demokratis. Willis (2018) menekankan bahwa murid yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi sering kali menunjukkan perlawanan terhadap otoritas pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial mereka, sehingga menciptakan ruang untuk pendidikan yang lebih kritis dan transformasional (Willis, 2018).

Murid dan Teknologi: Generasi murid di era modern dikenal sebagai "digital natives," yaitu individu yang sejak lahir telah berinteraksi dengan teknologi digital. Ini memberikan mereka keunggulan dalam hal adaptasi terhadap teknologi baru, tetapi juga menciptakan tantangan terkait gangguan digital, akses ke informasi

yang tidak selalu valid, serta pengaruh media sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan sosial mereka. Teknologi telah mempermudah akses ke pengetahuan, tetapi juga memerlukan keterampilan literasi digital yang tinggi agar murid dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Prensky (2019) mengemukakan bahwa meskipun murid era modern mahir menggunakan teknologi, mereka tetap membutuhkan bimbingan dalam membedakan informasi yang benar dan palsu, serta dalam mengelola interaksi digital mereka (Prensky, 2019).

c. Kelas di Era Modern

Kelas yang Terintegrasi dengan Teknologi: Teknologi telah secara fundamental mengubah konsep kelas. Di era modern, kelas tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat meluas menjadi kelas virtual, kelas hibrida, dan ruang belajar *online* yang terdistribusi. Garrison dan Vaughan (2020) mengemukakan bahwa model pembelajaran hibrida, di mana sebagian proses belajar dilakukan secara *online* dan sebagian lagi dilakukan secara tatap muka, semakin populer karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan individu siswa (Garrison & Vaughan, 2020). Pembelajaran jarak jauh juga menjadi semakin penting, terutama di tengah pandemi global, di mana kelas-kelas harus beralih ke mode daring secara cepat dan efisien.

Kelas yang Inklusif dan Multikultural: Globalisasi telah menciptakan kelas yang semakin multikultural, dengan murid yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan agama. Guru di era modern dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Menurut Banks (2021), pendidikan multikultural adalah pendekatan yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan ini, dengan menekankan pentingnya menghargai keragaman budaya dan menciptakan kurikulum yang responsif terhadap latar belakang sosial murid (Banks, 2021). Guru modern harus berperan sebagai mediator budaya, yang mampu memfasilitasi dialog antarbudaya dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap peluang belajar.

Kelas dan Kesenjangan Akses: Meskipun teknologi membuka banyak peluang untuk pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel, tantangan utama yang dihadapi kelas di era modern adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi. Murid dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital atau koneksi internet yang stabil, yang memperburuk kesenjangan pendidikan. Selwyn (2021) menyoroti bahwa meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran, ketimpangan dalam akses teknologi dapat memperdalam jurang ketidaksetaraan di kalangan siswa (Selwyn, 2021). Oleh karena itu, guru dan institusi pendidikan di era modern harus bekerja untuk memastikan bahwa setiap murid, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara ke sumber daya pembelajaran digital.

d. Dinamika Sosial dan Ekonomi di Kelas Modern

Dampak Globalisasi: Globalisasi membawa tantangan dan peluang baru dalam pendidikan. Murid di era modern diharapkan memiliki keterampilan global yang mampu mengatasi tantangan di pasar kerja internasional yang kompetitif. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kebutuhan lokal atau nasional, melainkan juga pada pengembangan kompetensi yang relevan dalam konteks global, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan kolaboratif lintas budaya. Spring (2022) mengemukakan bahwa globalisasi pendidikan telah meningkatkan permintaan akan keterampilan "global citizenship," di mana siswa dilatih untuk memahami dan berpartisipasi dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan (Spring, 2022).

Kelas sebagai Ruang untuk Membangun Keterampilan Abad 21: Dunia modern memerlukan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kelas di era modern harus mampu mengakomodasi pengembangan keterampilan ini melalui pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dinamis. Trilling dan Fadel (2020) menyatakan bahwa keterampilan abad ke-21

tidak hanya diperlukan untuk kesuksesan individu, tetapi juga untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung (Trilling & Fadel, 2020). Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pengajaran mereka agar lebih berpusat pada pengembangan keterampilan ini, dan sekolah harus menciptakan kurikulum yang mendukung pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

1. Interaksi Sosial dan Peran Murid di Dalam Kelas

Murid berperan sebagai aktor utama dalam dinamika sosial yang terjadi di dalam kelas. Setiap interaksi antara murid dengan guru dan dengan sesama murid berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial dan budaya kelas. Interaksi ini bisa berupa kolaborasi dalam tugas kelompok, partisipasi dalam diskusi kelas, atau bahkan konflik yang muncul di antara murid. Mead (1934) berpendapat bahwa identitas individu dibentuk melalui interaksi sosial, dan dalam konteks kelas, ini berarti bahwa murid secara aktif membentuk identitas akademis dan sosial mereka melalui partisipasi dalam aktivitas kelas.

Sebagai contoh, murid yang aktif dalam diskusi kelas mungkin mengembangkan identitas sebagai "siswa pintar" atau "pemimpin kelompok," sementara murid yang lebih suka bekerja sendiri mungkin mengidentifikasi diri sebagai "independen" atau "pemikir kritis." Peran murid dalam interaksi sosial ini juga mencakup bagaimana mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh teman sebaya mereka. Studi menunjukkan bahwa kelompok sebaya memainkan peran penting dalam memengaruhi sikap dan perilaku akademis murid, termasuk motivasi belajar dan pencapaian akademis (Ryan, 2001).

2. Peran Murid dalam Dinamika Kekuasaan dan Otoritas di Kelas

Kelas adalah tempat di mana kekuasaan dan otoritas sering kali berada di tangan guru, tetapi murid juga memiliki peran penting dalam dinamika ini. Meskipun guru memiliki otoritas formal, murid dapat mempengaruhi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dan bahkan dapat menantang atau menegosiasikan aturan yang ada. Foucault (1977) menyebutkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat tetapi juga tersebar di seluruh hubungan sosial, termasuk di dalam kelas. Murid dapat

menegosiasikan kekuasaan ini melalui berbagai cara, seperti membentuk aliansi dengan teman sekelas, menunjukkan ketaatan atau pemberontakan terhadap aturan, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas.

Sebagai contoh, murid yang merasa bahwa suatu aturan tidak adil mungkin berusaha menantangnya dengan mengajukan argumen kepada guru atau dengan memimpin teman-temannya untuk protes. Sebaliknya, murid yang setuju dengan aturan atau metode pengajaran mungkin memperkuat otoritas guru dengan menunjukkan dukungan terbuka. Dalam kasus ini, murid tidak hanya menjadi penerima pasif dari kebijakan dan praktik pendidikan, tetapi juga agen yang dapat memengaruhi arah dan pelaksanaan proses pembelajaran (Giroux, 1983).

3. Sosialisasi dan Peran Murid dalam Pembentukan Identitas di Sekolah

Sekolah adalah salah satu agen sosialisasi yang paling penting dalam kehidupan anak-anak dan remaja, di mana mereka belajar tentang norma-norma sosial, nilai-nilai, dan peran-peran sosial. Di dalam kelas, murid memainkan peran aktif dalam proses sosialisasi ini, baik dalam hal internalisasi norma-norma yang ada maupun dalam menegosiasikan atau menantang norma-norma tersebut. Goffman (1959) berbicara tentang "presentasi diri" dalam interaksi sosial, dan di dalam kelas, murid seringkali mengelola bagaimana mereka ingin dilihat oleh guru dan teman sekelas mereka.

Sebagai contoh, murid mungkin berusaha menampilkan diri sebagai "pintar" atau "berprestasi" untuk mendapatkan pengakuan dari guru dan teman sekelas, atau sebagai "pemberontak" untuk menantang otoritas atau menegaskan identitas mereka sendiri. Proses sosialisasi ini juga melibatkan pembentukan identitas kelompok, di mana murid membentuk kelompok sebaya berdasarkan minat, latar belakang, atau nilai-nilai yang sama. Identitas kelompok ini dapat berperan penting dalam pengalaman pendidikan murid, memengaruhi sikap mereka terhadap sekolah, perilaku akademis, dan hubungan sosial mereka (MacLeod, 2008).

4. Partisipasi Murid dalam Pembelajaran dan Pengaruhnya terhadap Budaya Kelas

Murid tidak hanya berperan sebagai penerima pengetahuan tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam pembentukan budaya kelas. Partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan debat kelas, membantu membentuk suasana dan dinamika sosial di dalam kelas. Pendekatan pedagogi yang mendorong partisipasi aktif murid cenderung menciptakan budaya kelas yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar (Vygotsky, 1978).

Misalnya, dalam pembelajaran berbasis proyek, murid tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari satu sama lain, berbagi pengetahuan, ide, dan perspektif yang berbeda. Dalam proses ini, murid juga belajar untuk bekerja sama, menghormati pandangan orang lain, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang penting. Dengan demikian, partisipasi aktif murid tidak hanya meningkatkan pembelajaran akademis tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya kelas yang positif dan produktif.

5. Peran Murid dalam Mengubah atau Mempertahankan Struktur Sosial di Sekolah

Murid memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di sekolah, baik dengan cara mendukung struktur sosial yang ada atau dengan menantang dan mengubahnya. Dalam banyak kasus, murid yang termotivasi secara sosial dan politik dapat mengambil peran aktif dalam inisiatif sekolah, seperti dewan murid, klub sosial, atau proyek layanan masyarakat, untuk mempromosikan perubahan positif. Ini mencerminkan konsep Giroux (1983) tentang "pendidikan kritis," di mana murid diajak untuk menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi dan perubahan sosial.

Sebaliknya, murid juga dapat mempertahankan status quo dengan mematuhi norma-norma dan aturan yang ada tanpa menantanginya. Dalam hal ini, peran mereka mungkin lebih bersifat konformis, di mana mereka berpartisipasi dalam proses reproduksi sosial yang mempertahankan struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan yang ada di sekolah. Penting untuk diakui bahwa peran murid dalam mengubah atau mempertahankan struktur

sosial di sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya sekolah, serta oleh dukungan dari guru dan administrasi (Willis, 1977).

Hubungan antara murid (siswa) dan kelas dalam konteks pendidikan merupakan hal mendasar bagi organisasi dan berfungsinya sekolah dan lembaga pendidikan. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam beberapa cara:

- a. Pendaftaran: Siswa terdaftar di kelas atau kursus tertentu berdasarkan tingkat kelas, usia, dan kebutuhan akademik mereka. Proses pendaftaran memastikan bahwa siswa ditempatkan di kelas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan persyaratan kurikulum mereka.
- b. Ukuran Kelas: Jumlah siswa dalam suatu kelas dapat sangat bervariasi tergantung pada institusi pendidikan, tingkat kelas, dan peraturan setempat. Ukuran kelas yang lebih kecil sering kali menghasilkan perhatian yang lebih personal bagi siswa, sementara kelas yang lebih besar mungkin menghadirkan tantangan dalam pengajaran individual.
- c. Rasio Guru-Siswa: Rasio guru dan siswa di suatu kelas merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Rasio guru-siswa yang lebih rendah umumnya memungkinkan lebih banyak interaksi dan dukungan untuk setiap murid.
- d. Pengajaran dan Pembelajaran: Tujuan utama hubungan antara murid dan kelas adalah pendidikan. Di kelas, siswa belajar dari guru dan teman-temannya. Guru menyampaikan pengajaran, memfasilitasi diskusi, dan menilai kemajuan siswa, sementara siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan berkolaborasi dengan teman sekelas.
- e. Kebutuhan Individu: Pendidikan yang efektif mengakui bahwa siswa memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Guru sering kali menyesuaikan pengajaran mereka untuk mengakomodasi gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda di dalam kelas. Beberapa siswa mungkin memerlukan dukungan tambahan, seperti layanan pendidikan khusus atau dukungan pembelajaran bahasa Inggris.
- f. Lingkungan Kelas: Lingkungan kelas memainkan peran penting dalam hubungan murid-kelas. Faktor-faktor seperti tata ruang kelas, sumber daya, dan teknologi dapat memengaruhi pengalaman belajar.

Ruang kelas yang terorganisir dengan baik dan menstimulasi dapat meningkatkan pembelajaran.

- g. **Penilaian dan Evaluasi:** Kinerja siswa di kelas biasanya dinilai melalui berbagai metode, seperti tes, kuis, proyek, dan pekerjaan rumah. Hasil penilaian membantu guru dan siswa mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- h. **Dinamika Kelas:** Interaksi antar siswa di kelas dapat mempengaruhi pengalaman belajar. Dinamika kelas yang positif, termasuk kerja sama, rasa hormat, dan suasana yang mendukung, dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif.
- i. **Manajemen Kelas:** Guru memainkan peran penting dalam mengelola kelas, menjaga disiplin, dan memastikan lingkungan belajar yang produktif. Manajemen kelas yang efektif dapat menghasilkan hubungan murid-kelas yang lebih positif.
- j. **Kemajuan dan Promosi:** Kemajuan siswa melalui kelas sering kali didasarkan pada kinerja dan penguasaan konten kursus. Kemajuan ke nilai atau kursus yang lebih tinggi bergantung pada keberhasilan penyelesaian kelas prasyarat.
- k. **Keterlibatan Orang Tua:** Hubungan antara murid dan kelas melampaui ruang kelas. Orang tua atau wali sering kali terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, menghadiri konferensi orang tua-guru, memberikan dukungan di rumah, dan terus mengetahui kemajuan anak mereka di kelas.

Secara keseluruhan, hubungan antara siswa dan kelas merupakan inti dari sistem pendidikan, di mana pengetahuan disampaikan, keterampilan dikembangkan, dan pertumbuhan pribadi dipupuk. Kolaborasi yang efektif antara guru, murid, dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan pengalaman pendidikan.

- a. **Rasio Guru-Siswa:** Rasio guru-siswa merupakan faktor penting dalam efektivitas pengalaman belajar. Rasio yang lebih rendah, berarti lebih sedikit siswa per guru, memungkinkan pengajaran yang lebih dipersonalisasi dan pemantauan kemajuan siswa yang lebih baik.
- b. **Kurikulum dan Instruksi:** Kelas dirancang untuk menyampaikan kurikulum atau serangkaian materi pendidikan tertentu. Guru

- bertanggung jawab untuk mengajar siswa tentang konten dan keterampilan yang diuraikan dalam kurikulum.
- c. **Interaksi:** Interaksi antara siswa dan teman sekelas serta guru memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan pengalaman belajar, dan aktivitas kolaboratif sering kali didorong di dalam kelas.
 - d. **Penilaian dan Umpan Balik:** Guru menilai kinerja siswa melalui berbagai cara, termasuk tes, tugas, dan partisipasi kelas. Mereka memberikan umpan balik untuk membantu siswa memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan.
 - e. **Pembelajaran Individual:** Dalam beberapa lingkungan pendidikan, upaya dilakukan untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Hal ini mungkin melibatkan pengajaran yang berbeda, layanan pendidikan khusus, atau program berbakat dan berbakat.
 - f. **Dukungan dan Sumber Daya:** Siswa mungkin memiliki akses terhadap layanan dan sumber daya pendukung dalam lembaga pendidikan, seperti konselor, perpustakaan, teknologi, dan kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat meningkatkan pengalaman pendidikan mereka.
 - g. **Transisi:** Siswa sering kali berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya seiring kemajuan mereka dalam perjalanan akademis mereka. Hubungan antar kelas dan kelangsungan kurikulum memainkan peran penting dalam memastikan pengalaman pendidikan yang lancar.
 - h. **Tujuan Pendidikan:** Hubungan antara siswa dan kelas pada akhirnya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mungkin mencakup perolehan pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan persiapan untuk pencapaian akademis atau karier di masa depan.

Secara keseluruhan, hubungan antara siswa dan kelas merupakan inti dari proses pendidikan, dan kualitas hubungan ini dapat berdampak signifikan terhadap pengalaman dan hasil belajar siswa. Hal ini melibatkan interaksi yang kompleks antara metode pengajaran, dinamika kelas, dan

dukungan individual untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka.

1. Guru dan peranannya:

Peran dan fungsi seorang guru dalam pendidikan memiliki banyak segi dan penting dalam proses pembelajaran. Guru memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral siswa. Berikut beberapa aspek penting dari peran dan fungsinya:

- a. Instruksi: Guru terutama bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Mereka merencanakan dan menyampaikan pelajaran, membuat kurikulum, dan menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran untuk membantu siswa memahami dan menerapkan konsep.
- b. Penilaian: Guru menilai kinerja siswa melalui kuis, tes, tugas, dan metode evaluasi lainnya. Mereka menggunakan data ini untuk mengukur kemajuan siswa, mengidentifikasi area di mana siswa mungkin memerlukan dukungan tambahan, dan menyesuaikan metode pengajaran mereka.
- c. Mentorship: Guru berfungsi sebagai mentor dan teladan bagi siswanya. Mereka memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan, membantu siswa mengembangkan pola pikir berkembang dan semangat untuk belajar. Guru sering kali membantu siswa menetapkan tujuan akademik dan pribadi.
- d. Manajemen Kelas: Menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan teratur sangatlah penting. Guru menetapkan peraturan kelas, rutinitas, dan harapan untuk memastikan bahwa siswa dapat fokus pada studi mereka. Mereka juga mengatasi masalah perilaku bila diperlukan.
- e. Pembelajaran Individual: Menyadari bahwa setiap siswa adalah unik, guru menyesuaikan pengajaran mereka untuk memenuhi beragam kebutuhan siswanya. Mereka mungkin memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang kesulitan atau menantang pelajar tingkat lanjut dengan materi yang lebih kompleks.
- f. Pengembangan Kurikulum: Guru sering kali berperan dalam merancang dan mengadaptasi kurikulum agar selaras dengan standar pendidikan dan kebutuhan khusus siswanya. Mereka memilih buku

- teks, materi pendidikan, dan sumber daya untuk meningkatkan pembelajaran.
- g. **Membantu Siswa Berkebutuhan Khusus:** Guru dapat bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau ketidakmampuan belajar, menyediakan akomodasi dan pengajaran yang berbeda untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses dan berhasil dalam kurikulum.
 - h. **Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:** Guru berkomunikasi dengan orang tua dan wali agar mereka selalu mendapat informasi tentang kemajuan anak mereka dan mengatasi segala kekhawatiran. Mereka juga dapat terlibat dengan komunitas lokal untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung.
 - i. **Konseling dan Dukungan:** Guru sering kali menawarkan dukungan emosional kepada siswanya dan dapat mengidentifikasi tanda-tanda tekanan atau masalah yang mungkin memerlukan intervensi. Mereka mungkin merujuk siswa ke konselor atau layanan dukungan lainnya bila diperlukan.
 - j. **Pengembangan Profesional:** Untuk mengikuti tren pendidikan dan meningkatkan keterampilan mengajar mereka, guru terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Mereka menghadiri lokakarya, konferensi, dan sesi pelatihan.
 - k. **Peran dalam Penilaian dan Akuntabilitas:** Guru sering kali berpartisipasi dalam proses pengujian dan penilaian yang terstandarisasi, sehingga memberikan data berharga untuk akuntabilitas pendidikan dan pengambilan kebijakan.
 - l. **Menumbuhkan Pemikiran Kritis:** Selain menyampaikan informasi, guru mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan analitis. Mereka membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertanyakan, menganalisis, dan mensintesis informasi secara mandiri.
 - m. **Mempromosikan Nilai dan Kewarganegaraan:** Guru juga berperan dalam menanamkan nilai, etika, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab pada siswanya. Mereka mempromosikan toleransi, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial. (Singh, 2021) (Raj Lakshmi, 2018)

Singkatnya, guru adalah tokoh sentral dalam sistem pendidikan, yang membimbing siswa dalam perjalanan akademis mereka dan seterusnya. Peran mereka tidak hanya mencakup transmisi pengetahuan tetapi juga pembinaan perkembangan pribadi dan sosial siswa, menjadikan mereka kontributor yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kemajuan masyarakat.

2. Sekolah, murid dan penyakit social

Sekolah adalah institusi pendidikan formal yang memegang peran sentral dalam pembentukan karakter anak-anak dan remaja. Sebagai tempat di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sekolah bukan hanya menjadi pusat pembelajaran akademis tetapi juga arena untuk sosialisasi. Dalam konteks ini, sosialisasi mencakup proses internalisasi norma dan nilai-nilai sosial yang diterima dalam masyarakat. Proses ini penting dalam pembentukan identitas sosial murid dan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan sekolah (Coleman, 1961).

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial yang pesat, dinamika di lingkungan sekolah menjadi semakin kompleks. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan mendukung, kadangkala malah menjadi tempat di mana berbagai bentuk penyakit sosial muncul dan berkembang. Penyakit sosial seperti *bullying*, tekanan akademis yang berlebihan, dan kecanduan teknologi menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir (Olweus, 1993). Penyakit sosial ini tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis murid tetapi juga mempengaruhi prestasi akademis dan hubungan sosial mereka.

Penyakit sosial ini muncul sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, termasuk budaya sekolah, kebijakan pendidikan, hubungan antar murid, serta pengaruh eksternal seperti media dan teknologi. Sebagai contoh, *bullying*, yang merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang paling umum di sekolah, sering kali dipicu oleh dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di antara murid (Rigby, 2003). Murid yang memiliki kekuatan lebih cenderung memanfaatkan

posisi mereka untuk menindas yang lain, yang pada gilirannya menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Selain itu, tekanan akademis yang berlebihan juga telah menjadi penyakit sosial yang lazim di kalangan murid, terutama di negara-negara dengan sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Murid-murid sering kali merasa tertekan untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Larson (2000), tekanan akademis yang berlebihan tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan mental murid tetapi juga dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar dan penurunan prestasi akademis.

Kecanduan teknologi juga merupakan penyakit sosial yang semakin meningkat di kalangan murid. Dengan semakin mudahnya akses ke gadget dan internet, banyak murid yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan layar, baik untuk bermain game, menonton video, atau berselancar di media sosial. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk belajar atau berinteraksi dengan teman sebaya secara langsung tetapi juga dapat mengganggu pola tidur dan kesehatan fisik mereka (Anderson & Dill, 2000).

Bab ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan antara institusi sekolah, murid, dan kemunculan penyakit sosial. Dengan memadukan perspektif teoretis dan empiris, bab ini akan menganalisis dampak penyakit sosial terhadap perkembangan murid, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diambil oleh sekolah untuk mengatasi masalah ini. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman dan mendukung bagi semua murid.

3. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi yang beragam dan kompleks. Secara historis, sekolah didirikan untuk menyediakan pendidikan formal yang berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, fungsi sekolah tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan akademis semata. Sekolah juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian murid melalui pendidikan moral dan etika. Dalam hal ini, sekolah berperan sebagai agen

sosialisasi yang penting, membantu murid dalam menginternalisasi norma dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat (Durkheim, 1922).

Di dalam kelas, guru memainkan peran utama dalam proses pendidikan ini. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai model peran (role model) bagi murid. Cara guru berinteraksi dengan murid, cara mereka mengelola kelas, serta nilai-nilai yang mereka tanamkan melalui pengajaran, semua berkontribusi pada pembentukan karakter murid. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bandura (1977), model peran yang efektif dapat memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan sikap murid, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.

Lingkungan sekolah itu sendiri juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan murid. Sekolah yang memiliki lingkungan yang inklusif dan mendukung cenderung lebih berhasil dalam membantu murid berkembang secara holistik. Sebaliknya, sekolah yang memiliki lingkungan yang kompetitif dan eksklusif sering kali menciptakan tekanan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan murid. Sebuah studi oleh Eccles dan Roeser (2011) menunjukkan bahwa murid yang merasa diterima dan didukung di sekolah cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih baik dan kesejahteraan mental yang lebih tinggi.

Selain itu, budaya sekolah memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pendidikan murid. Budaya sekolah mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang diterima secara kolektif oleh seluruh anggota sekolah, termasuk guru, murid, dan staf administrasi. Budaya sekolah yang positif dapat mendorong murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, sementara budaya yang negatif dapat memunculkan masalah seperti penyakit sosial (Deal & Peterson, 1999). Misalnya, budaya persaingan yang berlebihan dapat mendorong perilaku seperti *bullying* dan cheating, yang dapat merusak iklim belajar di sekolah.

Di era digital saat ini, peran sekolah juga semakin diperluas dengan adanya teknologi pendidikan. Teknologi telah menjadi alat yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran, memungkinkan guru dan murid untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam. Namun, penggunaan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti kecanduan gadget dan *cyberbullying*, yang dapat mengganggu proses

pembelajaran tradisional dan menimbulkan masalah sosial baru di lingkungan sekolah (Selwyn, 2011).

Dalam keseluruhan peranannya, sekolah berfungsi sebagai fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Dengan memastikan bahwa sekolah menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, kita dapat membantu murid tidak hanya untuk mencapai prestasi akademis tetapi juga untuk berkembang sebagai individu yang seimbang dan bertanggung jawab sosial.

4. Profil Murid dalam Sistem Pendidikan Modern

Murid di era modern ini berbeda secara signifikan dari generasi sebelumnya, terutama dalam hal cara mereka belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Perkembangan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara murid memperoleh informasi dan berkomunikasi. Banyak murid yang kini lebih bergantung pada sumber informasi digital daripada pada guru atau buku teks tradisional. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi sekolah dalam menyusun kurikulum yang relevan dan menarik bagi generasi digital ini (Prensky, 2001).

Di sisi lain, perubahan demografi juga telah membawa tantangan baru bagi sekolah. Dengan meningkatnya keberagaman di kalangan murid, sekolah harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai latar belakang sosial-ekonomi, budaya, dan bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang mampu mengakomodasi keberagaman ini cenderung memiliki tingkat keberhasilan akademis yang lebih tinggi dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif (Banks, 2006). Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini juga dapat memicu konflik dan penyakit sosial, seperti segregasi sosial dan diskriminasi.

Tekanan akademis adalah aspek lain dari profil murid modern yang perlu diperhatikan. Di banyak negara, tekanan untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi semakin meningkat, terutama karena persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi. Tekanan ini sering kali berasal dari ekspektasi orang tua, guru, dan masyarakat, yang semuanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tekanan akademis yang berlebihan dapat berdampak

negatif pada kesehatan mental murid, termasuk menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi (Deb, *et al.*, 2015).

Selain itu, kecanduan teknologi adalah masalah yang semakin merajalela di kalangan murid. Banyak murid yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, baik untuk bermain game, menonton video, atau berinteraksi di media sosial. Kecanduan ini tidak hanya mengganggu proses belajar tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Menurut penelitian oleh Twenge, *et al.*, (2018), penggunaan media sosial yang berlebihan terkait dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan pada remaja.

Murid modern juga menghadapi tantangan dalam membangun identitas sosial mereka. Di era digital, di mana segala sesuatu tampak terjadi dalam waktu nyata dan di depan umum, murid sering kali merasa tertekan untuk memenuhi standar sosial yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti body image issues, *cyberbullying*, dan masalah kesehatan mental lainnya (Marwick & Boyd, 2014). Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi murid dalam mengelola tantangan-tantangan ini.

Secara keseluruhan, profil murid dalam sistem pendidikan modern mencerminkan tantangan dan peluang baru. Dengan memahami profil ini, sekolah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan akademis dan sosial murid, serta mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul.

5. Penyakit Sosial di Kalangan Murid

Penyakit sosial di kalangan murid, seperti *bullying*, kecanduan teknologi, dan tekanan sosial, merupakan masalah yang semakin mendapat perhatian di lingkungan sekolah. *Bullying*, sebagai salah satu penyakit sosial yang paling menonjol, telah lama menjadi masalah serius di sekolah-sekolah di seluruh dunia. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Penelitian menunjukkan bahwa korban *bullying* sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi akademis (Olweus, 1993).

Cyberbullying, sebagai bentuk *bullying* yang dilakukan melalui platform digital, menjadi semakin lazim seiring dengan meningkatnya

penggunaan media sosial di kalangan murid. *Cyberbullying* sering kali lebih sulit dideteksi daripada *bullying* konvensional karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas dunia maya. Dampaknya tidak kalah serius; korban *cyberbullying* sering kali merasa terisolasi dan tidak berdaya, yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental (Kowalski, *et al.*, 2014).

Kecanduan teknologi juga merupakan bentuk penyakit sosial yang semakin mengkhawatirkan. Murid yang kecanduan teknologi sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, baik untuk bermain game, berinteraksi di media sosial, atau menonton video. Kecanduan ini tidak hanya mengganggu waktu belajar mereka tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Menurut Anderson dan Dill (2000), kecanduan video game, misalnya, dapat meningkatkan agresivitas dan mengurangi kemampuan murid untuk berinteraksi secara sosial.

Tekanan sosial di kalangan murid juga dapat memicu penyakit sosial lainnya, seperti gangguan makan, perilaku menyimpang, dan penggunaan narkoba. Tekanan untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada, seperti memiliki penampilan fisik yang sempurna atau menjadi populer di kalangan teman sebaya, dapat mendorong murid untuk mengambil tindakan-tindakan ekstrem yang merugikan diri mereka sendiri. Penelitian oleh Stice, *et al.*, (2002) menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan makan di kalangan remaja perempuan.

Selain itu, penyakit sosial lainnya, seperti diskriminasi dan segregasi sosial, juga dapat muncul di lingkungan sekolah. Murid-murid yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi atau etnis yang berbeda sering kali mengalami diskriminasi atau dikucilkan oleh teman-teman sebaya mereka. Diskriminasi ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis murid dan menghambat perkembangan sosial mereka (Tajfel & Turner, 1986).

Secara keseluruhan, penyakit sosial di kalangan murid merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu munculnya penyakit sosial ini, sekolah dapat merancang kebijakan dan program yang efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

6. Dampak Penyakit Sosial terhadap Pendidikan dan Perkembangan Murid

Penyakit sosial yang terjadi di lingkungan sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan murid, baik dari segi akademis maupun psikologis. *Bullying*, misalnya, telah terbukti menyebabkan berbagai masalah psikologis pada korban, termasuk rendahnya harga diri, kecemasan, dan depresi. Penelitian oleh Rigby (2003) menunjukkan bahwa murid yang menjadi korban *bullying* cenderung menunjukkan penurunan dalam prestasi akademis mereka, karena mereka sering merasa tidak aman dan terisolasi di lingkungan sekolah.

Cyberbullying, sebagai bentuk *bullying* yang dilakukan melalui platform digital, juga memiliki dampak yang tidak kalah serius. Korban *cyberbullying* sering kali merasa terisolasi dan tidak berdaya, yang dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Selain itu, karena *cyberbullying* dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, korban sering kali tidak dapat melepaskan diri dari pelecehan tersebut, bahkan ketika mereka berada di rumah atau di luar lingkungan sekolah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan konsentrasi, dan pada kasus yang parah, korban mungkin mengalami pikiran untuk bunuh diri (Hinduja & Patchin, 2010).

Kecanduan teknologi, terutama kecanduan media sosial dan video game, juga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan akademis dan sosial murid. Murid yang kecanduan teknologi sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, yang dapat mengganggu waktu belajar mereka dan mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa murid yang menghabiskan lebih banyak waktu bermain video game atau berselancar di media sosial cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih rendah dibandingkan dengan murid yang menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar (Gentile, *et al.*, 2004).

Tekanan sosial juga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan murid, terutama dalam hal kesehatan mental dan perilaku sosial. Murid yang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis, seperti memiliki penampilan fisik yang sempurna atau menjadi populer di kalangan teman sebaya, cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan makan, kecemasan, dan depresi.

Penelitian oleh Eisenberg, *et al.*, (2006) menunjukkan bahwa murid yang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial lebih cenderung mengembangkan gangguan makan dan masalah kesehatan mental lainnya.

Selain itu, diskriminasi dan segregasi sosial di sekolah dapat menyebabkan murid merasa tidak diterima atau dikucilkan oleh teman-teman sebaya mereka. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis murid tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial mereka. Murid yang merasa didiskriminasi atau dikucilkan cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dan lebih sulit untuk membentuk hubungan sosial yang sehat (Greene, *et al.*, 2006).

Secara keseluruhan, dampak penyakit sosial terhadap pendidikan dan perkembangan murid sangatlah serius dan memerlukan perhatian yang mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dengan memahami dampak-dampak ini, sekolah dapat merancang program-program intervensi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan akademis dan psikologis murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif.

3. Pendidikan dan filosofi

Pendidikan adalah salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga berperan dalam membentuk individu menjadi pribadi yang bermoral, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, kita belajar tentang dunia di sekitar kita, memahami diri kita sendiri, dan menemukan posisi kita dalam masyarakat. Namun, proses pendidikan tidak berdiri sendiri; ia selalu dipandu oleh serangkaian keyakinan, nilai, dan tujuan yang berasal dari pandangan filosofis yang mendasari sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, memahami filsafat pendidikan menjadi esensial untuk memahami mengapa dan bagaimana pendidikan dijalankan.

Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan, seperti apa tujuan akhir dari pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan melalui proses pendidikan. Berbagai aliran filsafat, seperti idealisme, realisme, pragmatisme,

eksistensialisme, dan teori kritis, menawarkan jawaban yang berbeda atas pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, idealisme, yang dipengaruhi oleh pemikiran Plato, menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter moral dan intelektual. Idealisme melihat pendidikan sebagai upaya untuk membawa individu lebih dekat kepada "kebaikan" yang absolut, melalui pengembangan kebijaksanaan dan kebajikan.

Sebaliknya, realisme, yang berakar pada pemikiran Aristoteles, memandang pendidikan sebagai sarana untuk memahami dunia nyata melalui pengamatan dan pengalaman. Pendidikan, dalam pandangan realisme, bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang objektif dan rasional tentang dunia di sekitar mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan logika dalam pendidikan, dengan asumsi bahwa pengetahuan yang diperoleh dari dunia nyata adalah yang paling penting.

Pragmatisme, yang dipelopori oleh filsuf seperti John Dewey, menawarkan pendekatan yang berbeda dengan melihat pendidikan sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Dalam pragmatisme, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang terus-menerus berkembang melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pendidikan, dalam pandangan ini, harus fleksibel dan adaptif, memungkinkan siswa untuk belajar melalui percobaan dan refleksi. Pendekatan pragmatis ini menekankan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, dan mendorong siswa untuk terlibat dalam pembelajaran aktif yang berfokus pada pemecahan masalah.

Eksistensialisme membawa kita ke dimensi yang berbeda, di mana kebebasan dan tanggung jawab individu menjadi pusat perhatian. Filsafat ini, yang terkait erat dengan pemikiran Jean-Paul Sartre, menekankan bahwa pendidikan harus memungkinkan individu untuk mengeksplorasi identitas mereka sendiri dan membuat pilihan yang autentik tentang bagaimana mereka ingin hidup. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme menantang gagasan pendidikan yang seragam dan normatif, dan sebaliknya mendorong pendekatan yang lebih personal dan individualistik, di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengejar tujuan mereka sendiri.

Teori kritis, di sisi lain, melihat pendidikan sebagai alat untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Tokoh seperti

Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi proses mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga harus menjadi sarana untuk memberdayakan individu dan kelompok yang terpinggirkan. Dalam pandangan ini, pendidikan harus mempromosikan kesadaran kritis, yang memungkinkan siswa untuk memahami dan menantang ketidakadilan sosial, serta berkontribusi pada transformasi masyarakat.

Dalam konteks dunia modern, di mana pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan ketidaksetaraan sosial, filsafat pendidikan menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Misalnya, di era digital ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana teknologi seharusnya digunakan dalam pendidikan, atau apakah pendidikan harus lebih berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan di abad ke-21 tidak hanya dituntut untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan ekonomi global, tetapi juga untuk membentuk mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan sadar sosial.

Dengan berbagai pandangan filosofis yang berbeda, filsafat pendidikan menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk mengevaluasi dan mengarahkan pendidikan. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, tetapi juga bagaimana kita dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui praktik pendidikan yang konkret. Lebih dari itu, filsafat pendidikan membantu kita memahami bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan alienasi, serta bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan masyarakat.

Bab ini akan mengeksplorasi berbagai aliran dalam filsafat pendidikan, menguraikan prinsip-prinsip utama mereka, dan menganalisis bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Melalui kajian ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, baik dalam kehidupan individu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer

pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan kebebasan individu, dan promosi keadilan sosial.

1. Apa Itu Filsafat Pendidikan?

Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai pendidikan, termasuk tujuannya, metode yang digunakan, serta nilai-nilai yang mendasarinya. Secara umum, filsafat pendidikan bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa tujuan akhir dari pendidikan?", "Apa yang seharusnya diajarkan di sekolah?", dan "Bagaimana cara terbaik untuk mengajar?". Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas, karena keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, serta praktik pengajaran di sekolah-sekolah (Gutek, 2009).

Di masa kini, ketika pendidikan menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan ketidakesetaraan sosial, filsafat pendidikan menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Misalnya, di era digital ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana teknologi seharusnya digunakan dalam pendidikan, atau apakah pendidikan harus lebih berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan etika. Menurut Postman (1993), pendidikan modern sering kali terlalu berfokus pada "bagaimana" mengajar, daripada "mengapa" dan "apa" yang diajarkan, yang mengakibatkan hilangnya tujuan mendasar dari pendidikan itu sendiri.

Pendekatan filsafat pendidikan juga bervariasi tergantung pada aliran pemikiran yang dianut. Misalnya, filsafat pendidikan idealis cenderung menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter moral dan intelektual siswa, sedangkan realisme lebih fokus pada penanaman pengetahuan faktual yang dapat diverifikasi melalui pengamatan langsung. Pragmatism, di sisi lain, menekankan pendidikan sebagai proses yang terus berkembang berdasarkan pengalaman dan eksperimen, sementara eksistensialisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kebebasan dan tanggung jawab individu (Dewey, 1938; Kant, 2007).

Selain itu, filsafat pendidikan juga berperan penting dalam menyoroti isu-isu etika dan keadilan sosial dalam pendidikan. *Critical theory*, misalnya, memandang pendidikan sebagai alat untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Paulo Freire (1970) adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan pandangan ini, dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan individu dari penindasan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami dan menavigasi kompleksitas dunia pendidikan saat ini. Melalui kajian kritis terhadap tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan, filsafat pendidikan membantu kita untuk tidak hanya menjadi pendidik yang lebih baik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Aliran-aliran Utama dalam Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan telah berkembang melalui berbagai aliran pemikiran, masing-masing menawarkan pandangan yang berbeda tentang tujuan dan metode pendidikan. Setiap aliran ini memberikan kontribusi penting terhadap cara kita memahami dan menjalankan pendidikan di berbagai konteks.

- Idealism adalah salah satu aliran filsafat pendidikan tertua, yang menekankan pada pengembangan karakter moral dan intelektual siswa. Dalam pandangan idealisme, pendidikan bertujuan untuk membawa siswa mendekati "kebaikan" yang absolut dan universal. Plato adalah salah satu tokoh utama dari aliran ini, dengan karyanya "The Republic" yang menekankan pentingnya pendidikan dalam menciptakan warga negara yang bijaksana dan bermoral. Kant (2007) juga termasuk dalam aliran ini, dengan menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk moralitas dan kebijaksanaan dalam individu (Plato, 2007). Sebaliknya, "Realism" berfokus pada dunia nyata dan pengetahuan yang dapat diverifikasi. Aristoteles, yang sering dianggap sebagai pendiri realisme, menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengamatan dan pengalaman nyata. Pendidikan, dalam pandangan ini, bertujuan untuk membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka secara

objektif dan rasional. Realisme sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum yang berfokus pada sains dan matematika, di mana pengetahuan dianggap dapat diverifikasi melalui metode ilmiah (Aristotle, 1984).

- Pragmatism, yang dipelopori oleh John Dewey, menawarkan pandangan yang berbeda dengan menekankan bahwa pendidikan adalah proses yang terus berkembang. Dalam pragmatisme, pengetahuan dianggap tidak tetap tetapi berkembang melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan kebutuhan individu. Dewey (1938) berpendapat bahwa sekolah harus menjadi laboratorium sosial di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi. Pendekatan ini menekankan pentingnya metode pembelajaran aktif dan partisipatif, serta relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata.
- Existentialism menempatkan kebebasan individu sebagai pusat dari proses pendidikan. Menurut pandangan ini, pendidikan harus membantu individu untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka sendiri. Sartre (2007) dan Nietzsche adalah dua filsuf yang terkait dengan eksistensialisme, yang menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab, dan otentisitas dalam pendidikan. Aliran ini mengkritik sistem pendidikan yang terlalu normatif dan berusaha mengembangkan pendekatan yang lebih personal dan individualistik.
- *Critical Theory*, yang berkembang dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Paulo Freire dan Jürgen Habermas, melihat pendidikan sebagai alat untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Pendidikan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan individu dan kelompok yang terpinggirkan. Freire (1970) dalam **Pedagogy of the Oppressed** menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses dialogis yang membebaskan, di mana guru dan siswa berkolaborasi untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar mereka.

Setiap aliran filsafat pendidikan ini menawarkan pandangan yang unik dan penting tentang tujuan dan metode pendidikan. Dengan memahami dan mengkritisi aliran-aliran ini, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

3. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Karakter

Pendidikan telah lama dianggap sebagai sarana utama untuk pembentukan karakter dan moralitas individu. Dari sudut pandang idealisme, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa sehingga mereka dapat hidup sebagai individu yang bermoral dan bijaksana. Plato, misalnya, berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membawa individu menuju kebenaran dan kebajikan. Dalam **The Republic**, Plato menguraikan bahwa pendidikan harus membimbing siswa melalui proses dialektis menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang keadilan, kebaikan, dan kebenaran (Plato, 2007).

Namun, pendekatan ini telah mendapatkan kritik dalam konteks pendidikan modern. Beberapa kritikus berargumen bahwa pendidikan yang terlalu menekankan pembentukan karakter dapat mengabaikan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja. Di sisi lain, realisme dan pragmatisme menawarkan perspektif yang lebih berorientasi pada dunia nyata, di mana pendidikan dilihat sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles, misalnya, berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengamatan langsung dan pengalaman, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitar mereka (Aristotle, 1984).

Dalam konteks pendidikan modern, ada juga perdebatan tentang bagaimana pendidikan harus menangani masalah moral dan etika. Beberapa berpendapat bahwa pendidikan harus tetap netral dan fokus pada pengembangan keterampilan akademis, sementara yang lain berpendapat bahwa pendidikan harus secara aktif membentuk moralitas siswa. Dewey (1938), dalam pendekatan pragmatismenya, berpendapat bahwa pendidikan harus melibatkan siswa dalam proses belajar yang aktif dan reflektif, di mana mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang

diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka melalui pengalaman langsung.

Pendekatan eksistensial, di sisi lain, menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam proses pendidikan. Sartre (2007) berpendapat bahwa pendidikan harus membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup mereka sendiri, bukan hanya mengikuti norma dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat. Pendidikan, dalam pandangan eksistensialisme, adalah proses yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi identitas mereka dan membuat pilihan yang autentik tentang bagaimana mereka ingin hidup.

Critical theory juga menawarkan perspektif penting tentang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter yang kritis dan reflektif. Freire (1970) berpendapat bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari struktur sosial yang menindas dan membantu mereka mengembangkan kesadaran kritis tentang dunia di sekitar mereka. Pendidikan, dalam pandangan ini, adalah proses yang memungkinkan individu untuk memahami dan menantang ketidakadilan, serta bekerja menuju perubahan sosial yang positif.

Dengan demikian, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter melibatkan berbagai pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang berbeda. Pendekatan yang dipilih akan sangat bergantung pada pandangan filosofis yang dianut oleh pendidik dan pembuat kebijakan, serta konteks sosial dan budaya di mana pendidikan berlangsung.

4. Peran Guru dalam Filsafat Pendidikan

Peran guru dalam filsafat pendidikan telah banyak dibahas dalam berbagai aliran pemikiran, dengan masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi peran utama seorang guru dalam proses pendidikan.

Dalam idealisme, guru sering dipandang sebagai model peran moral dan intelektual bagi siswa. Sebagai pengganti orang tua di lingkungan pendidikan, guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pengembangan moral dan intelektual yang lebih tinggi. Kant (2007) menekankan bahwa guru harus berfungsi sebagai pemandu yang membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan moralitas melalui proses dialektika dan refleksi kritis.

Sebaliknya, pragmatisme memandang guru sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung. John Dewey (1938), salah satu tokoh utama pragmatisme, berpendapat bahwa guru harus menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui percobaan, interaksi sosial, dan refleksi. Dalam pandangan ini, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam mengeksplorasi dan memahami dunia melalui tindakan nyata dan pengalaman sehari-hari.

Existentialism menawarkan pandangan yang berbeda tentang peran guru. Sartre (2007) menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu, dan dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa guru harus menghormati kebebasan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan identitas mereka sendiri. Guru, dalam pandangan eksistensialisme, tidak seharusnya memaksakan nilai-nilai atau pandangan dunia mereka sendiri kepada siswa, tetapi sebaliknya, harus membantu siswa dalam proses eksplorasi diri dan pengambilan keputusan yang autentik.

Critical theory juga memiliki pandangan yang kuat tentang peran guru. Paulo Freire (1970) berpendapat bahwa guru harus berperan sebagai agen perubahan sosial yang membantu siswa mengembangkan kesadaran kritis tentang dunia di sekitar mereka. Dalam pandangan Freire, pendidikan adalah proses dialogis di mana guru dan siswa bekerja sama untuk memahami dan menantang struktur sosial yang tidak adil. Guru harus berfungsi sebagai pemandu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis tentang realitas sosial mereka dan mengambil tindakan untuk mengubahnya.

Dengan demikian, peran guru dalam filsafat pendidikan sangat bervariasi tergantung pada pendekatan filosofis yang dianut. Apakah sebagai model peran, fasilitator, pendukung kebebasan individu, atau agen perubahan sosial, peran guru selalu menjadi pusat dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai pemandu, fasilitator, dan pendukung dalam perkembangan moral, intelektual, dan sosial siswa.

5. Pendidikan dan Kebebasan Individu

Pendidikan dan kebebasan individu adalah tema yang sangat penting dalam filsafat pendidikan, terutama dalam konteks eksistensialisme dan teori kritis. Eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu dalam pendidikan, dan berpendapat bahwa pendidikan harus memungkinkan siswa untuk menemukan identitas mereka sendiri dan membuat pilihan yang autentik tentang bagaimana mereka ingin hidup. Sartre (2007) menyatakan bahwa kebebasan adalah esensi dari eksistensi manusia, dan oleh karena itu, pendidikan harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kebebasan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, pendidikan dilihat sebagai proses yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan memilih jalan hidup mereka sendiri. Guru, dalam pandangan ini, tidak boleh memaksakan nilai-nilai atau pandangan dunia mereka sendiri kepada siswa, tetapi sebaliknya harus membantu siswa dalam proses eksplorasi diri dan pengambilan keputusan yang autentik. Pendidikan, dengan demikian, menjadi sarana untuk memberdayakan individu dan memungkinkan mereka untuk hidup dengan penuh kebebasan dan tanggung jawab.

Critical theory, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Paulo Freire, juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam pendidikan. Freire (1970) berpendapat bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari struktur sosial yang menindas dan membantu mereka mengembangkan kesadaran kritis tentang dunia di sekitar mereka. Dalam pandangan Freire, pendidikan adalah proses dialogis di mana guru dan siswa bekerja sama untuk memahami dan menantang struktur sosial yang tidak adil.

Namun, kebebasan individu dalam pendidikan juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana kebebasan ini dapat dikelola dalam sistem pendidikan yang sering kali terbatas oleh standar dan kurikulum yang ketat. Dalam banyak sistem pendidikan, ada tekanan untuk mematuhi standar akademis yang telah ditetapkan, yang dapat membatasi kebebasan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa kebebasan individu dalam pendidikan tidak mengarah pada anarki atau

relativisme moral, tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai sosial yang disepakati bersama.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan. Pendidikan harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kebebasan mereka sendiri, tetapi juga harus memastikan bahwa kebebasan ini tidak merugikan orang lain atau mengganggu tatanan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pendidikan harus mengajarkan siswa tentang tanggung jawab yang menyertai kebebasan, serta pentingnya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, pendidikan dan kebebasan individu adalah tema yang kompleks dan penuh nuansa dalam filsafat pendidikan. Meskipun kebebasan adalah nilai yang sangat penting, kebebasan ini harus dikelola dengan hati-hati dalam konteks pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan individu yang bertanggung jawab dan sadar sosial.

6. Simpulan: Integrasi Teori dalam Praktik Pendidikan

Kesimpulan ini berfokus pada pentingnya mengintegrasikan berbagai teori filsafat pendidikan ke dalam praktik pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman modern. Meskipun aliran-aliran pemikiran dalam filsafat pendidikan mungkin berbeda dalam pandangan mereka tentang tujuan dan metode pendidikan, masing-masing menawarkan wawasan penting yang dapat membantu kita memahami dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan saat ini.

Dari idealisme, kita belajar tentang pentingnya membentuk karakter moral dan intelektual siswa, serta pentingnya pendidikan dalam membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang kebenaran dan kebajikan. Dari realisme, kita belajar tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman nyata, yang memungkinkan siswa untuk memahami dunia di sekitar mereka secara objektif dan rasional. Pragmatism mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan sebagai proses yang terus berkembang, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka.

Eksistensialisme menawarkan wawasan penting tentang pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu dalam pendidikan, sementara *critical theory* menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini ke dalam praktik pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membantu siswa berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab, kritis, dan sadar sosial.

Namun, integrasi teori-teori ini ke dalam praktik pendidikan juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara berbagai tujuan pendidikan yang berbeda, seperti pengembangan karakter, penguasaan pengetahuan, dan kebebasan individu. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman modern, di mana teknologi dan globalisasi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan praktik pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ini melibatkan dialog yang terus-menerus antara teori dan praktik, serta keterbukaan terhadap ide-ide baru dan inovasi dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang fleksibel dan terbuka, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan individu dan masyarakat, serta membantu kita mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abayomi, Ayotunde, Ayoade., Srinivasarao, Thota. (2023). (3) Functional Education as a Nexus between Agricultural and Industrial Revolution: An Epidemiological Modeling Approach. *Uniciencia*, doi: 10.15359/ru.37-1.12
- A, I. (2022). The Role of Education in Social Change. *Indian Journal of Multilingual Research and Development*, *Ii*, 28–32. <https://doi.org/10.54392/ijmrd223s16>
- Alteneiji, E. (2023). Value changes in gender roles: Perspectives from three generations of Emirati women. *Cogent Social Sciences*, *9* (1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2184899>
- Anderson, W. A. (1978). Avoiding Redundancy: Advanced Placement in Social Work Education. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, *5* (2). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.1278>
- Arsal, T. (2014). Forum ilmu sosial. *Forum Ilmu Sosial*, *41* (1), 54–66. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS_JURNAL
- Asgharkhani, J. H. & A. (2018). Social Diversification and its Impact on Political Stability in Iran since Islamic Revolution. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, *12* (3), 387–400. <https://doi.org/10.1080/25765949.2018.1514172>
- Asnita. (2022). *Urbanisasi dan Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Perkotaan*.
- Azarian, R. (2023). Social construction of places as meaningful objects: a symbolic interactionist approach. *International Review of Sociology*, *33* (3), 546–564. <https://doi.org/10.1080/03906701.2023.2259060>
- Batzke, M. C. L., & Ernst, A. (2024). Distinguishing fast change in social norms and slow change in personal norms in cooperative decision-making. *Frontiers in Psychology*, *15* (May), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1380341>
- Beck, C. W. (2015). Home Education and Social Integration. *International Perspectives on Home Education: Do We Still Need Schools?*, *2*, 87–98. https://doi.org/10.1057/9781137446855_7

- Bhopal, K., & Preston, J. (2012). Intersectionality and race in education. In *Intersectionality and Race in Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203802755>
- Bilad, M. R., Zubaidah, S., & Prayogi, S. (2024). Addressing the PISA 2022 Results: A Call for Reinvigorating Indonesia's Education System. *International Journal of Essential Competencies in Education*, 3 (1), 1–12. <https://doi.org/10.36312/ijece.v3i1.1935>
- Bömmel, N., & Heineck, G. (2023). Revisiting the causal effect of education on political participation and interest. *Education Economics*, 31 (6), 664–682. <https://doi.org/10.1080/09645292.2022.2141199>
- Brisko, B. (2012). The socialization process and the functional significance of education from vocational education learners' perspective. *SHS Web of Conferences*, 2, 00008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20120200008>
- Budiati, S., & Rochmat, S. (2020). *The Impact of Education on Social Stratification and Social Mobility in Communities in Indonesia*. 398 (ICoSSCE 2019), 75–78. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.016>
- Bylieva, D. S., Lobatyuk, V. V., & Rubtsova, A. V. (2019). Information and communication technologies as an active principle of social change. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 337 (1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/337/1/012054>
- Byrne, L. (2000). *SWORD-South West Open Research Deposit Practice Placement in Social Care Education*.
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Caspersen, J., & Smeby, J. C. (2021). Placement training and learning outcomes in social work education. *Studies in Higher Education*, 46 (12), 2650–2663. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750583>
- Conrad, D. (2015). Education and social innovation: The youth uncensored project-A case study of youth participatory research and cultural democracy in action. *Canadian Journal of Education*, 38 (1), 1–25.
- Cookson, T. P., Kuss, M. K., Bitterly, J., & Fuentes, L. (2023). Social Norms, Gender and Development: A Review of Research and Practice. *UN Women Discussion Paper Series*, 42 (42), 1–67.

- D'Enbeau, S. (2009). Feminine and feminist transformation in popular culture. *Feminist Media Studies*, 9 (1), 17–36. <https://doi.org/10.1080/14680770802619474>
- Dahal, G. (2016). *THE CONTRIBUTION OF EDUCATION TO ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM NEPAL*. [https://doi.org/DOI: 10.20472/IAC.2016.023.032](https://doi.org/DOI:10.20472/IAC.2016.023.032) GANGADHAR DAHAL
- Day Frank, M. (2023). The School and Society. In *Schools of Fiction* (pp. 41–73). <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867506.003.0002>
- Demographic, A. (2001). *Mohana Basu* and Debajit Datta**. 27 (3).
- Dergisi, İ. A. (2022). *SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN DİN YORUMUNA ETKİSİ: KABIR ZİYARETLERİ*. 2 (August).
- Derzhavina, V. V., Nikitina, A. A., Makarov, A. L. M., Piralova, O. F., Korzhanova, A. A., Gruver, N. V., & Mashkin, N. A. (2021). Inclusive Education Importance and Problems for Students Social Integration. *Propósitos y Representaciones*, 9 (SPE3). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1130>
- Dinorah Sanchez LozaORCID Icon, A. A. & Dean C. (2021). Education and the political: The possibilities and constraints of political education in an (un)democratic world. *Teory into Practice*, 60 (4), 337–339. <https://doi.org/10.1080/00405841.2021.1981076>
- Efendi, E., Fadila, F., Tariq, K., Pratama, T., & Azmi, W. (2024). Interaksionisme Simbolik dan Praktis. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4 (3), 1088–1095. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.514>
- Eriksen, T. H. (2022). Transformations, Complexity, and Rapid Change. In S. V. Fran Meissner, Nando Sigona (Ed.), *The Oxford Handbook of Superdiversity* (pp. 403–416). Oxford University Press Maret 2022. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197544938.013.35>
- Farooq, A., & Kayani, A. K. (2014). Social dynamics in rural Punjab: Changes in gender roles, spatial mobility and decision making. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 34 (5), 317–333. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2013-0067>
- Fîrîală, V., & Cristea, D. (2023). Social values, criminal risks, and security. *Technium Social Sciences Journal*, 51, 297–302. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9701>

- Fletcher, J. R. (2023). Encyclopedia of Health Research in the Social Sciences. In evin D. and S. Donovan (Ed.), *Encyclopedia of Health Research in the Social Sciences* (pp. 320–325). EE ElgarOnline. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781800885691>
- Freeland, S. (2023). *Sociology and Criminology : Open Access The Role of Mental Health in Criminal Behavior*. 11 (1000279), 10–11. <https://doi.org/10.35248/2375-4435.23.11.281>
- Ginsberg, M. (1958). Social Change. *The British Journal of Sociology*, vol 9 no 3 (3), 205–229. <https://doi.org/doi.org/10.2307/587016>
- Grace Giving International. (2021). The Importance of Education in Uganda. *Grace Giving International*, 51 (4), 50–58. <https://www.gracegivinginternational.org/the-importance-of-education-in-uganda>
- Grasso, V., Colella, C., & L’Astorina, A. (2023). *Junior Researchers ’ Seminars*. 1 (1), 52–57.
- Green, D. (2024). Shifts in Social Norms Often Underpin Change. *How Change Happens*, 44–62. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198899952.003.0004>
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Mempertahankan Integrasi Sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3 (1), 01–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1599>
- Hasbullah. (2020). PEMIKIRAN KRITIS JOHN DEWEY TENTANG PENDIDIKAN. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10 (1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jtipai.v10i1.3770>
- Havlin, T. (2015). Shift in social order – shift in gender roles? Migration experience and gender roles. *Current Issues in Personality Psychology*, 3 (3), 185–191. <https://doi.org/10.5114/cipp.2015.53229>
- Hernes, G. (2001). Social Change: Types. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 14223–14228. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01832-5>

- Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2024). Education Is a Political Issue. *Global Histories of Education, Part F2197*, 261–280. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41308-7_17
- Hytten, K., & Bettez, S. C. (2011). Understanding Education for Social Justice. *Educational Foundations, Winter-Spring*, 7–24.
- Igras, S., Kohli, A., Bukuluki, P., Cislighi, B., Khan, S., & Tier, C. (2021). Bringing ethical thinking to social change initiatives: Why it matters. *Global Public Health*, 16 (6), 882–894. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1820550>
- Inpyo Hwang. (2015). Social Integration Education and Civic Education for Democracy in Preparation for Unification of Korea. *Journal of Ethics*, 1 (104), 29–46. <https://doi.org/10.15801/je.1.104.201511.29>
- Johansen, S. L., & Givskov, C. (2014). Media and civic engagement. *MedieKultur: Journal of Media and Communication Research*, 30 (56), 1–4. <https://doi.org/10.7146/mediekultur.v30i56.17286>
- Jozelić, J. (2017). The Politicization of Education in Conflict-Affected Countries: The Legitimization of a Divided Society. In G. Ognjenović (Ed.), *Education in Post-Conflict Transition* (pp. 21–32). SPRINGER LINK. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-56605-4_3?sv1=affiliate&sv_campaign_id=1018583&awc=26429_1724295537_eb1051848107361b47738c6d22c4f0f3&utm_medium=affiliate&utm_source=awin&utm_campaign=CONR_BOOKS_ECOM_DE_PBOK_ALWYS_DEEPLINK&utm_content=t
- Kesten, A. (2019). Analysis of the Missions of Higher Education Institutions within the Scope of Third Mission Understanding. *International Journal of Educational Methodology*, 5 (3), 387–400. <https://doi.org/10.12973/ijem.5.3.387>
- Komatsu, T. (2024). Education and Social Cohesion in a Post-conflict and Divided Nation. In Taro Komatsu (Ed.), *Theoretical Perspectives* (pp. 13–35). SPRINGER LINK. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-6519-9_2
- Kristanto, N. (2022). Pendidikan Politik di Indonesia. *Metanoia*, 2 (1), 1. <https://doi.org/10.55962/metanoia.v2i1.34>

- Larreguy, H., & Liu, S. X. (2023). When does education increase political participation? Evidence from Senegal. *Political Science Research and Methods*, 354–371. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.37>
- Liu, Y., Zhou, S., & Yajun, Y. (2022). Education for Social Change: Perspectives on Global Learning, by Douglas Bourn. *Education as Change*, 26. <https://doi.org/10.25159/1947-9417/12140>
- Macheret, D. A. (2016). On influence of Education on Economic Growth. *World of Transport and Transportation*, 14 (4), 240–245. <https://doi.org/10.30932/1992-3252-2016-14-4-24>
- Manajemen, J., & Islam, P. (n.d.). *Abstract. Problematika pendidikan Indonesia dalam lembaga pendidikan tinggi Islam mencakup kurikulum yang tidak relevan, keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, kualitas pengajaran dan riset yang perlu dit.* 31–37.
- Marvin W. Berkowitz, P. D., Melinda C. Bier, P. D., & Olsen, L. (2014). a Guide for Educators. *National Education Association, January 2007*, 41.
- Mi, N. (n.d.). *Rodni aspekti društvenih promena 1.*
- Moniz, J. B. (2019). Diversidade cultural: um conceito fundamental para o estudo dos fenômenos religiosos modernos. *Revista de Ciências Sociais*, 73–109. <http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/39632>
- Naibaho, F. R. (2023). the Most Fundamental Education Conflict in Indonesia: a Systematic Literature Review. *IJIET (International Journal of Indonesian Education and Teaching)*, 7 (1), 100–113. <https://doi.org/10.24071/ijiet.v7i1.4981>
- Nandang Mustafa, A. (2023). Reflection on the Latest Pisa Results of Indonesia. *International Journal of Advanced Research*, 11 (05), 1223–1228. <https://doi.org/10.21474/ijar01/16988>
- Newman, K., & Brunswick, N. (2009). *Social Justice, Urban*. 195–198.
- Ni Nyoman Perni, I Made Gede Nesa Saputra, & Kadek Agus Wardana. (2024). Education in Indonesia: Critique and Reflectivity. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 8 (1), 97–105. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v8i1.2974>

- O'Leary, R., & Finnäs, F. (2002). Education, social integration and minority-majority group intermarriage. *Sociology*, 36 (2), 235–254. <https://doi.org/10.1177/0038038502036002001>
- Olena, K., & Sciences, P. (2022). *Феномен суспільства споживання : ціннісно-культурні виміри. 1* (2), 34–39.
- Online Appendix The Relationship Between Education and Political Knowledge : Evidence from Discordant Danish Twins Overview of the Discordant Twin Design.* (n.d.).
- OZTURK, I. (2001). THE ROLE OF EDUCATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT: A THEORETICAL PERSPECTIVE. *Journal of Rural Development and Administration*, 33 (1), 39–47.
- Pande, A., & Delhi, N. (n.d.). *Social gender stereotypes and their implications in hindi.*
- Patsiaouras, G. (2022). Marketplace cultures for social change? New social movements and consumer culture theory. *Journal of Marketing Management*, 38 (1–2), 17–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1996443>
- Petrova, Y., & Pervukhina, S. (2022). Socio-cultural changes influenced by information and communication technology. *E3S Web of Conferences*, 363. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236304039>
- Pieszak, E. (2020). The Culture of Consumption as a Consequence of the Economic Process in the Context of Changes in the European Union. *Rocznik Integracji Europejskiej*, 14, 259–269. <https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.17>
- Prendergast, A. (2014). *Interprofessional Education Challenges in contemporary Social Care Placement Education.* 15 (1), 4–9. <https://doi.org/10.21427/D73441>
- Przepiorka, W., Szekely, A., Andrighetto, G., Diekmann, A., & Tummolini, L. (2022). How Norms Emerge from Conventions (and Change). *Socius*, 8. <https://doi.org/10.1177/23780231221124556>
- Putra, A. R. (2009). *Artikel sosiologi.*
- Qureshi, M. H. (2023). Cultural Diversity in India. *Journal of Development Policy and Practice*, 8 (1), 13–23. <https://doi.org/10.1177/24551333221127508>
- Raj Lakshmi. (2018). Education as an Instrument of Social Change. *JETIR*, 5 (10), 317–321. www.jetir.org

- Regmi, S. K. (2007). *Perspective transformation: an ethnoculturally-based community service learning with refugees and immigrant students*. February.
- Riani, S. S., & Ain, S. Q. (2022). The Role of School Principal in Implementing Education Quality Management. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 6 (2). <https://doi.org/10.23887/jisd.v6i2.45216>
- Riya Bhorkar. (2024). Cultural Diversity: Adapting to Change. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 459–468. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-17479>
- Ruth, S., & Arrubla, Q. (n.d.). *Capítulo Xix Intrainnovación Social En Las Ies, Estrategia En La Formación De Emprendedores Para La 4Ta Revolución Social Intranovation in the Heis, Strategy in the Training of Entrepreneurs for the 4Th*. 343–359.
- Saha, L. J. (2013). Durkheim’s Sociology of Education: A Critical Reassessment. *Education and Society*, 19 (2). <https://doi.org/10.7459/es/19.2.03>
- Saha, L. J. (2015). Educational Sociology. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92067-1>
- Schneider, B. R. (2024). Theorizing on Education Politics. *Routes to Reform*, 2017, 21–46. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197758854.003.0002>
- Shadmehr, B. de M. and M. (2023). Social Norms and Social Change. *Quarterly Journal of Political Science*, 18 (3), 339–363. <https://doi.org/10.1561/100.00021153>
- Singh, P. (2021). The Role of Teachers in Motivating Students to Learn. *Technolearn An International Journal of Educational Technology*, 11 (1). <https://doi.org/10.30954/2231-4105.01.2021.6>
- Siregar, D. R. S., Ratnaningsih, S., & Nurochim. (2022). PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3 (1), 61–71.
- Smakotina, N. L. (2022). Global Social Transformations in the Context of Demographic Change and Urbanization. *Acta Biomedica Scientifica*, 7 (3), 47–56. <https://doi.org/10.29413/ABS.2022-7.3.6>

- Spulber, D., & Nesterova, M. (2023). Intercultural education and social innovation approaches as answers to societal challenges of migration. *Geopolitical, Social Security and Freedom Journal*, 6 (1–2), 20–37. <https://doi.org/10.2478/gssfj-2023-0002>
- Steeves, K. (2023). Varieties of Qualitative Research Methods Chapter. In K. D. W. Janet Mola Okoko, Scott Tunison (Ed.), *Varieties of Qualitative Research Methods* (pp. 457–462). SPRINGER LINK. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-04394-9_71
- Stryzhakov, A. (2022). Socialization and Education of Personality: Correlation. *Innovative Solution in Modern Science*, 2 (54), 52. [https://doi.org/10.26886/2414-634x.2\(54\)2022.4](https://doi.org/10.26886/2414-634x.2(54)2022.4)
- Subroto, G. (2014). EDUCATION AND ECONOMICS: Perspectives of Theoretical and Empirical. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20 (3), 390–400.
- TAN, M., & FIRAT, M. (2022). the Changing Structure of the Tribe in the Process of Urbanization. *E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)*, 1 (April). <https://doi.org/10.26791/sarkiat.1068037>
- Telaumbanua, S. R. K., Harahap, M. Y., Ningsih Aceh, I. R., Herman⁴, N., & Arli, W. (2023). Moderasi Beragama Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Desa Sibolangit. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (4), 2353–2359. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.2228>
- Tfaily, R., Diab, H., & Kulczycki, A. (2013). Educational disparities and conflict: Evidence from Lebanon. *Research in Comparative and International Education*, 8 (1), 55–73. <https://doi.org/10.2304/rcie.2013.8.1.55>
- Thankappan, S., & Ambat, B. (2015). *ENVIRONMENT*. October.
- Utrecht, U. (2022). *Agents with Social Norms and Values Een raamwerk voor agent gebaseerde sociale simulaties met Samaneh Heidari* (Issue september).
- Warde, A. (2022). Society and consumption. *Consumption and Society*, 1 (1), 11–30. <https://doi.org/10.1332/gtye7193>
- Wasilah, S. (2023). Education in a Functional Structural Perspective and Conflict Regarding Social Relations in Society. *JUPE: Jurnal*

- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala*, XVII (2), 207–215.
- Woessmann, L. (2016). The economic case for education. *Education Economics*, 4 (1).
<https://doi.org/doi.org/10.1080/09645292.2015.1059801>
- Wu, M. (2023). Research on Social Integration and Path of Higher Education Graduates in Chinese Education System. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 9 (1), 374–380.
<https://doi.org/10.54254/2753-7048/9/20230282>
- Yixian, L., & Huizhen, L. (1987). Socialization and Education. *Chinese Education*, 20 (2), 24–39. <https://doi.org/10.2753/CED1061-1932200224>
- Zepa, N. (2022). the Influence of Social Changes in Religious Practice [Hinduism, Jainism And buddhism] of India. *International Journal of Advanced Research*, 10 (02), 180–184.
<https://doi.org/10.21474/ijar01/14191>
- Amato, P. R. (2005). The impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation. **Future of Children**, 15 (2), 75-96.
- Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. **Journal of Personality and Social Psychology*, 78* (4), 772-790.
- Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. **Journal of Personality and Social Psychology*, 78* (4), 772-790.
- Anyon, J. (2022). **Social class and the hidden curriculum of work**. Journal of Education.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. Routledge.
- Apple, M. W. (2019). **Ideology and curriculum**. Routledge.
- Aristotle. (1984). **The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation**. Princeton: Princeton University Press.
- Ayalon H and Yogev A (2005) Field of study and students' stratification in an expanded system of higher education: The case of Israel. *European Sociological Review* 21 (3): 227–41.

- Ayee, G.Y.A., Shabliy, E.V., Wall, T., & Kurochkin, D. *Gender Diversity and Inclusion: Contemporary and Historical Perspectives*. Lexington Books, 2023.
- Baghdadi, N. (2014). *Education and Political Transformation in the Developing World*. Routledge.
- Bakhtin, M. M. (2021). *The dialogic imagination: Four essays*. University of Texas Press.
- Ball, S. J. (2013). *Education, Justice and the Human Capacity for Flourishing*. Routledge.
- Ball, S. J. (2019). *The education debate* (3rd ed.). Policy Press.
- Ball, S. J. (2020). *The neoliberal education agenda and the politics of learning*. *Journal of Education Policy*, 35 (6), 761-779.
- Ballantine, J. H., & Hammack, F. M. (2012). *The Sociology of Education: A Systematic Analysis*. Pearson.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Pearson Education.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Boston: Pearson.
- Banks, J. A. (2021). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley.
- Barbosa ML (2012) The expansion of higher education in Brazil: Credentials and merit. *REMIE – Multidisciplinary Journal of Educational Research* 2 (3): 251–71.
- Bates, T. (2022). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. BCcampus.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Beller E and Hout M (2006) Welfare states and social mobility: How educational and social policy may affect cross-national differences in the association between occupational origins and destinations. *Research in Social Stratification and Mobility* 24: 353–65.
- Bengtson, V. L. (2001). Beyond the nuclear family: The increasing importance of multigenerational bonds. *Journal of Marriage and Family*, 63 (1), 1-16.

- Bernstein, B. (2019). **Class, codes and control: Volume 4: The structuring of pedagogic discourse**. Routledge.
- Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2010). How does the gender of parents matter? **Journal of Marriage and Family**, 72 (1), 3-22.
- Bills DB (2004) *The Sociology of Education and Work*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Bjork, C. (2005). **Indonesian education: Decentralization and adrift in uncharted waters**. Oxford: Pergamon Press.
- Black, P., & Wiliam, D. (2018). **Inside the black box: Raising standards through classroom assessment**. GL Assessment.
- Blakemore, J. E. O., Berenbaum, S. A., & Liben, L. S. (2009). **Gender Development**. Psychology Press.
- Blickenstaff, J. C. (2021). **Women and STEM: Addressing the Gender Gap in Science, Technology, Engineering, and Mathematics**. New York: Routledge.
- Bourdieu, P. (1977). **Outline of a Theory of Practice**. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1990). **Reproduction in Education, Society and Culture**. Sage Publications.
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), **Handbook of theory and research for the sociology of education**. Greenwood Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). **Reproduction in Education, Society and Culture**. Sage Publications.
- Bourn, D. (2023). **Education for social change: Perspectives on global learning**. Bloomsbury Publishing.
- Brookhart, S. M. (2021). **Formative assessment strategies for every classroom: An ASCD action tool** (2nd ed.). ASCD.
- Brunello G, Garibaldi P and Wasmer E (2007) *Education and Training in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Butler, J. (2020). **Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity**. New York: Routledge.
- Campbell, C., & Rozsnyai, C. (2002). *Quality Assurance and the Development of Course Programmes*. EUA.

- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2019). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning** (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Coleman, J. S. (1961). *The Adolescent Society: The Social Life of the Teenager and its Impact on Education**. New York: Free Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94* (Supplement), S95-S120.
- Connell, R. W. (2022). *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics**. Cambridge: Polity Press.
- Cornelius-White, J. (2019). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. *Review of Educational Research**, 79 (1), 326-365.
- Crenshaw KW (1991) Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review* 43 (6): 1241–99.
- Crosnoe, R., & Elder, G. H. (2004). Family dynamics, supportive relationships, and educational resilience during adolescence. *Journal of Family Issues**, 25 (5), 571-602.
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. *Educational Policy Analysis Archives*.
- Davies, B. (2003). *Frogs and Snails and Feminist Tales: Preschool Children and Gender**. Hampton Press.
- Deal, T. E., & Peterson, K. D. (1999). *Shaping School Culture: The Heart of Leadership**. San Francisco: Jossey-Bass.
- Deb, S., Strodl, E., & Sun, J. (2015). Academic-related stress among private secondary school students in India. *Asian Education and Development Studies*, 4* (2), 153-171.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education**. New York: Macmillan.
- Dronkers J (1993) Educational reform in the Netherlands: Did it change the impact of parental occupation and education? *Sociology of Education* 66: 262–77.
- Durkheim, É. (1922). *Education and Sociology**. New York: The Free Press.
- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology**. The Free Press.
- Durkheim, E. (2001). *Education and Sociology**. Free Press.

- Eccles, J. S. (1994). Understanding women's educational and occupational choices: Applying the Eccles, *et al.*, model of achievement-related choices. *Psychology of Women Quarterly*, 18 (4), 585-609.
- Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. *Journal of Research on Adolescence*, 21 (1), 225-241.
- Eisenberg, M. E., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2006). Associations of weight-based teasing and emotional well-being among adolescents. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 160* (2), 123-128.
- Epstein, J. L. (2001). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Westview Press.
- Erikson R and Goldthorpe J (1992) *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Society*. Oxford: Clarendon.
- Ferreira F (2000) Os determinantes da desigualdade de renda no Brasi: luta de classes ou heterogeneidade educacional. In: Henriques, R (ed.) *Desigualdade e Pobreza no Brasil*. Rio de Janeiro: IPEA.
- Foster, J., & Hyman, P. (2023). *The Gendered Landscape of Education: Policy, Practice, and Research*. New York: Routledge.
- Foucault, M. (2021). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Penguin Books.
- Francis, B., & Skelton, C. (2005). *Reassessing Gender and Achievement: Questioning Contemporary Key Debates*. Routledge.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (2021). *Pedagogy of the oppressed* (30th Anniversary Ed.). Bloomsbury Academic.
- Fullan, M. (1993). *Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform*. Falmer Press.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2020). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Gentile, D. A., Lynch, P. J., Linder, J. R., & Walsh, D. A. (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility,

- aggressive behaviors, and school performance. *Journal of Adolescence*, 27* (1), 5-22.
- Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2020). *Introduction to sociology** (10th ed.). W. W. Norton & Company.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition**. Bergin & Garvey.
- Giroux, H. A. (2020). *On critical pedagogy** (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.
- Giroux, H. A. (2023). *Education and Social Change: The Struggles of Schooling in the Slums of the Global South**. Springer.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life**. Anchor Books.
- Good, J. J., Woodzicka, J. A., & Wingfield, L. C. (2010). The effects of gender stereotypic and counter-stereotypic textbook images on science performance. *Journal of Social Psychology**, 150 (2), 132-147.
- Greene, M. L., Way, N., & Pahl, K. (2006). Trajectories of perceived adult and peer discrimination among Black, Latino, and Asian American adolescents: Patterns and psychological correlates. *Developmental Psychology*, 42* (2), 218-238.
- Gutek, G. L. (2009). *New Perspectives on Philosophy and Education**. New Jersey: Pearson.
- Halim, M. L., Ruble, D. N., & Tamis-LeMonda, C. S. (2013). Four-year-olds' beliefs about how others regard males and females. *British Journal of Developmental Psychology**, 31 (1), 128-135.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2010). Generalizations about Using Value-Added Measures of Teacher Quality. *American Economic Review*.
- Hargreaves, A. (2003). *Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity*. Open University Press.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional capital: Transforming teaching in every school**. Teachers College Press.
- Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement**. National Center for Family & Community Connections with Schools.

- Hill, H., & Wie, T. K. (2012). **Indonesian education: The critical drivers and outcomes**. New York: Routledge.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). *Cyberbullying: Identification, prevention, and response*. In K. E. Patterson (Ed.), **Handbook of Bullying in Schools: An International Perspective** (pp. 285-297). New York: Routledge.
- Hochschild, A. R. (2021). **The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home**. New York: Penguin Books.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (Eds.). (2001). **Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah**. Jakarta: Depdiknas.
- Jenkins, R. (2023). **Lifelong learning in the digital era: Opportunities and challenges**. *Journal of Educational Technology*, 18 (2), 45-60.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. **Allyn & Bacon**.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2020). **Cooperation and competition: Theory and research**. Interaction Book Company.
- Kabeer, N. (2005). *Gender and Social Protection Strategies: The Social Protection of Women and Girls*. Routledge.
- Kabeer, N., & Subrahmanian, R. (2020). **Institutions, Relations and Outcomes: A Framework and Case Studies for Gender-Aware Planning**. Zed Books.
- Kant, I. (2007). **Critique of Pure Reason**. New York: Penguin.
- Konstantinovskiy D (2012) Social inequality and access to higher education in Russia. *European Journal of Education* 12 (1): 1–10.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). *Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth*. **Psychological Bulletin*, 140* (4), 1073-1137.
- Kozol, J. (2005). *The Shame of the Nation: The Restoration of Apartheid Schooling in America*. Crown Publishers.
- Labaree, D. F. (2010). **Someone Has to Fail: The Zero-Sum Game of Public Schooling**. Harvard University Press.
- Ladd, H. F., & Fiske, E. B. (2003). *The Uneven Playing Field of School Finance*. Routledge.

- Lamont, M., & Lareau, A. (2020). Cultural capital: Allusions, gaps and glissandos in recent theoretical developments. **Sociological Theory**, 6 (2), 153-168.
- Lareau, A. (2019). **Unequal childhoods: Class, race, and family life** (2nd ed.). University of California Press.
- Leaper, C., Farkas, T., & Brown, C. S. (2012). Adolescent girls' experiences and gender-related beliefs in relation to their motivation in math/science and English. **Journal of Youth and Adolescence**, 41 (3), 268-282.
- Lee, M., & Larson, R. (2000). The Korean 'Examination Hell': Long hours of studying, distress, and depression. **Journal of Youth and Adolescence**, 29 (2), 249-271.
- Lingard, B., & Sellar, S. (2013). *Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*. Routledge.
- Lubienski, S., & Lubienski, C. "How Our Education System Undermines Gender Equity." **Brookings Institution**, 2023.
- Maccoby, E. E. (1998). **The Two Sexes: Growing Up Apart, Coming Together**. Harvard University Press.
- MacLeod, J. (2008). **Ain't No Makin' It: Aspirations and Attainment in a Low-Income Neighborhood**. Westview Press.
- Makarim, N. (2020). **Merdeka belajar: Kebijakan pendidikan nasional**. Jakarta: Kemendikbud.
- Marks GN (2005) Cross-national differences and accounting for social class inequalities in education. *International Sociology* 20 (4): 483–505.
- Markus, S. F. (2016). The impact of gender stereotypes on the self-concept of female students in STEM fields. **Journal of Educational Psychology**, 108 (3), 362-375.
- Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2004). Children's search for gender cues: Cognitive perspectives on gender development. **Current Directions in Psychological Science**, 13 (2), 67-70.
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2014). 'It's just drama': Teen perspectives on conflict and aggression in a networked era. **Journal of Youth Studies**, 17 (9), 1187-1204.
- McLanahan, S., & Sandefur, G. (1994). **Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps**. Harvard University Press.

- McLeod, J. "The Movement of Feminist and Gender History in Educational Research." *International Journal of Historiography of Education**, 2018.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society**. University of Chicago Press.
- Mills, M. (2023). *Boys and Schooling: Beyond Structural Inequalities**. London: Routledge.
- Mirza HS (2009) Plotting a history: Black and postcolonial feminism in 'new times'. *Race, Ethnicity and Education* 12 (1): 1–10.
- Miske, S. (2003). *The Gender and Education for All: The Leap to Equality*. International Institute for Educational Planning.
- OECD. (2020). *PISA 2018 Results: Where All Students Can Succeed**. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators**. OECD Publishing.
- Ogbu, J. U. (2018). *Minority education and caste: The American system in cross-cultural perspective*. *Academic Press**.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do**. Oxford: Blackwell Publishers.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas**. Basic Books.
- Parker, L., & Raihani, R. (2011). Democratic reform and decentralization in Indonesia: The case of local education governance. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 26* (1), 61-80.
- Plato. (2007). *The Republic**. New York: Penguin Classics.
- Postman, N. (1993). *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology**. New York: Vintage Books.
- Power S, Edwards T, Whitty G and Wigfall V (2003) *Education and the Middle Class*. Buckingham: Open University Press.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9* (5), 1-6.
- Prensky, M. (2019). *Teaching digital natives: Partnering for real learning**. Corwin Press.
- Ravitch, D. (2010). *The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education**. Basic Books.

- Reay, D. (2020). *Miseducation: Inequality, education and the working classes*. *Policy Press*.
- Renold, E. (2005). **Girls, Boys, and Junior Sexualities: Exploring Children's Gender and Sexual Relations in the Primary School**. Routledge.
- Rigby, K. (2003). Consequences of *bullying* in schools. **The Canadian Journal of Psychiatry*, 48* (9), 583-590.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2020). **Globalizing education policy** (2nd ed.). Routledge.
- Rogers, C. R. (2020). **Freedom to learn** (3rd ed.). Merrill/Macmillan.
- Rothstein, R. (2004). **Class and Schools: Using Social, Economic, and Educational Reform to Close the Black-White Achievement Gap**. Economic Policy Institute.
- Ryan, A. M. (2001). The Peer Group as a Context for the Development of Young Adolescent Motivation and Achievement. **Child Development*, 72* (4), 1135-1150.
- Sadker, D., & Sadker, M. (1994). **Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls**. Simon & Schuster.
- Sadker, D., & Zittleman, K. (2009). **Still Failing at Fairness: How Gender Bias Cheats Girls and Boys in School and What We Can Do About It**. Scribner.
- Sadker, M., & Sadker, D. (1994). **Failing at Fairness: How Our Schools Cheat Girls**. Scribner.
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*. Teachers College Press.
- Santos JAF (2009) A interação estrutural entre a desigualdade de raça e de gênero no Brasil. [Structural interaction between gender and race inequality in Brazil/L'interaction structurelle entre l'inégalité de race et de genre au Brésil]. *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 24 (70): 37–60.
- Sartre, J.-P. (2007). **Existentialism is a Humanism**. New Haven: Yale University Press.
- Schmidt, W. H., & Prawat, R. S. (2006). *Curriculum Research: What We Have Learned, What We Need to Know*. Educational Policy.

- Schwartzman S (2011) O viés acadêmico na educação brasileira. In: Bacha E and Schwartzman S (eds) *Brasil: A Nova Agenda Social*. Rio de Janeiro: LTC, pp. 254–69.
- Sellar, S., & Lingard, B. (2013). *Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*. Routledge.
- Selwyn, N. (2021). **Education and technology: Key issues and debates** (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.
- Selwyn, N. (2023). **Education and technology: Key issues and debates**. Bloomsbury Publishing.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Shavit Y and Blossfield H-P (1993) *Persistent Equality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Boulder, CO: Westview Press.
- Shavit Y and Miller W (1998) *From School to Work: A Comparative Study on Education Qualifications and Occupational Destinations*. Oxford: Clarendon Press.
- Smith, E., & Jackson, C. (2023). **Education and Gender: Realizing Equality in Schools**. London: Sage Publications.
- Spring, J. (2022). **Globalization of education: An introduction** (4th ed.). Routledge.
- Stevenson, D. L., & Lee, P. W. (1996). *The Korean Education System: Education Reform and Development*. Springer.
- Stice, E., Schupak-Neuberg, E., Shaw, H. E., & Stein, R. I. (1994). Relation of media exposure to eating disorder symptomatology: An examination of mediating mechanisms. **Journal of Abnormal Psychology, 103** (4), 836-840.
- Stromquist, N. P. (2015). Gender, education and the possibility of transformative knowledge. **Compare: A Journal of Comparative and International Education**, 45 (3), 445-465.
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). **Education in Indonesia**. Singapore: ISEAS Publishing.
- Suryadi, A. (2021). **Challenges in implementing Merdeka Belajar in Indonesia's diverse regions**. Jakarta: Indonesian Institute for Educational Development.

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.
- Taylor, G. (2024). *Fatherhood and Family Dynamics: New Perspectives on Gender Roles*. Oxford: Oxford University Press.
- Thorne, B. (1993). *Gender Play: Girls and Boys in School*. Rutgers University Press.
- Tikly, L. (2018). Education for sustainable development in the postcolonial world: Towards a transformative agenda for Africa. *Routledge*.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2020). *21st century skills: Learning for life in our times*. Jossey-Bass.
- Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in depressive symptoms, suicide-related outcomes, and suicide rates among U.S. adolescents after 2010 and links to increased new media screen time. *Clinical Psychological Science*, 6(1), 3-17.
- UNESCO. (2015). *Global Education Monitoring Report: Education for All 2015*. UNESCO.
- UNESCO. (2019). *Education for All Global Monitoring Report 2019: Gender and Education for All-The Leap to Equality*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report: Gender Report- Deepening the debate on those still left behind*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Education in a global context: Indonesia's path towards sustainable education*. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2018). *The State of the World's Children 2018: Children in a Digital World*. UNICEF.
- Unterhalter, E., & North, A. (2017). *Education, Poverty and Global Goals for Gender Equality: How People Make Policy Happen*. Routledge.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

- Vygotsky, L. S. (2021). **Mind in society: The development of higher psychological processes**. Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (2021). **Mind in society: The development of higher psychological processes**. Harvard University Press.
- Walker, M., & Unterhalter, E. (2007). **The Capability Approach: Its Potential for Work in Education**. Palgrave Macmillan.
- Weber, M. (1947). **The Theory of Social and Economic Organization**. Oxford University Press.
- Willis, P. (1977). **Learning to Labor: How Working-Class Kids Get Working-Class Jobs**. Columbia University Press.
- Willis, P. E. (2018). **Learning to labour: How working class kids get working class jobs** (2nd ed.). Routledge.
- Willis, P. E. (2018). **Learning to labour: How working class kids get working class jobs** (2nd ed.). Routledge.
- World Bank. (2012). **Indonesia: Spending more or spending better? Improving education financing in Indonesia**. Washington, DC: World Bank.
- Zajda, J. (2023). **Discourses of globalization, cultural diversity, and values education**. Springer Nature.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sebuah Pengantar

Sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang menerapkan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir, dan penyatuan informasi dalam penyelidikan pendidikan. Hal ini berfokus pada pemahaman proses pendidikan sebagai interaksi sosial, menelaah sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Manfaat sosiologi pendidikan bagi pendidik sangat besar. Salah satunya adalah membantu dalam memetakan hubungan antara individu dalam lingkungan sekolah dan struktur masyarakat di mana sekolah berada. Sosiologi Pendidikan mencakup berbagai topik; masyarakat dan seluruh komponen lain di dalamnya (budaya, golongan, ras, gender, dan lain-lain), berlangsungnya proses sosialisasi, akulturasi budaya, organisasi sosial, serta faktor-faktor lain seperti status, peran, nilai, moral, semuanya termasuk dalam peninjauan bidang ini. Menyelaraskan desain pendidikan menurut kebutuhan geografis, etnis, dan bahasa, serta kebutuhan subkelompok populasi lainnya juga termasuk dalam Sosiologi Pendidikan.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📘 Penerbit Deepublish

📱 @penerbitbuku_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Sosiologi dan Pendidikan

ISBN 978-623-02-9544-7



9

786230

295447